1.

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah

Istimewa...

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan – Mojokerto Surabaya -Sidoarjo - Lamongan,

Kawasan Bromo - Tengger - Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

25. Peraturan...

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8)

sebagaimana...

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 4);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamongan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamongan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Lamongan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Perencanaan...

7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
8. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
9. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*), dalam bentuk barang dan jasa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
15. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Prioritas...

16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam pen)rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
18. Prioritas dan Sasaran Pembangunan adalah fokus atau agenda pembangunan tahunan yang berasal dari arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun berkenaan.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan:

a. teknokratik;
b. partisipatif;
c. politis; dan
d. atas bawah dan bawah atas.

Pasal 4

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada substansi, dengan menggunakan pendekatan:

a. holistik-tematik;
b. integratif;dan
c. spasial.

Pasal 5...

Pasal 5

(1) Sistematika RPJMD terdiri atas :
   a. Bab I : Pendahuluan
   b. Bab II : Gambaran Umum Daerah
   c. Bab III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
   d. Bab IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
   e. Bab V : Penutup
(2) Isi beserta uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMD bersifat indikatif.
(3) Perubahan atas target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJMD dituangkan dalam RKPD.
(4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen Perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
(6) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 7

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Mekanisme…

(2) Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Dalam rangka efektivitas, RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra PD.

Pasal 9

RPJMD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11...

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN,

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

MOH. NALIKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi, misi, dan program Bupati diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Lamongan 2025-2045.

RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun dan menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Renstra PD.

RPJMD sebagai suatu bentuk perencanaan strategis yang disusun melalui proses yang dilakukan dengan memperhatikan pendekatan dalam penyusunan perencanaan, penelaahan kondisi dan permasalahan daerah serta identifikasi potensi sumber daya yang ada agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen pembangunan nasional. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen rencana pemenuhan kebutuhan nyata serta untuk mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi masyarakat di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan...

Berdasarkan hal tersebut, dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Lamongan periode 2025-2030, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendekatan teknokratik" adalah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendekatan partisipatif' adalah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pendekatan politis" adalah dilaksanakannya dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pendekatan atas-bawah dan bawah atas" adalah hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan daerah.

Pasal 4...

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendekatan holistik-tematik" adalah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendekatan integratif' adalah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pendekatan spasial" adalah dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi ke ruangan dalam Perencanaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

LAMPIRAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1 LATAR BELAKANG I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN I-4
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN I-9
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN I-16
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN I-17
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH **II-1**
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1.1 EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN RPJMD PERIODE 2020-2024 ..... II-1
2.1.2 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI II-8
2.1.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT II-37
2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH II-54
2.1.5 ASPEK PELAYANAN UMUM II-65
2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH II-122
2.2.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU II-122
2.2.2 KINERJA PELAKSANAAN APBD II-127
2.2.3 NERACA DAERAH II-136
2.2.4 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU II-150
2.2.5 KERANGKA PENDANAAN II-187
2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS II-207
2.3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH II-207
2.3.2 ISU STRATEGIS DAERAH II-209
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN **III-1**
3.1 VISI DAN MISI III-1

3.1.1 Misi I: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan III-6
3.1.2 Misi II: Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Berahklak Dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman III-7
3.1.3 Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Mantap Dan Berwawasan Lingkungan..... III-9
3.1.4 Misi IV : Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmoni Sosial Masyarakat Yang Religius, Berbudaya Dan Partisipatif Dalam Pembangunan III-10
3.1.5 Misi V Mewujudkan Reformasi Birokasi Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Responsif..... III-12
3.2 TUJUAN DAN SASARAN III-13
3.2.1 Tujuan dan Sasaran Misi I..... III-14
3.2.2 Tujuan dan Sasaran Misi II..... III-16
3.2.3 Tujuan dan Sasaran Misi III III-18
3.2.4 Tujuan dan Sasaran Misi IV III-20
3.2.5 Tujuan dan Sasaran Misi V III-22
3.3 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-29
3.3.1 STRATEGI III-29
3.3.2 ARAH KEBIJAKAN..... III-47
3.3.3 PROGRAM PEMBANGUNAN III-56
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... IV-1
4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2030 DALAM MENCAPAI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH.....IV-1
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-43
BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Keselarasan RPJMN Terhadap RPJMD Kabupaten Lamongan..... ..... I-10
Tabel 1-2 Keselarasan RPJMD Provinsi Jawa Timur Terhadap RPJMD Kabupaten Lamongan..... I-12
Tabel 2-1 Pencapaian Kinerja Indikator Tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan Periodesasi Tahun 2021 - 2026 ..... II-3
Tabel 2-2 Klasifikasi Predikat Kinerja Tujuan dan Sasaran II-7
Tabel 2-3 Luas Kecamatan di Kabupaten Lamongan II-8
Tabel 2-4 Tabel Penggunaan Lahan Kabupaten Lamongan..... II-12
Tabel 2-5 Daya Dukung Air Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ..... II-17
Tabel 2-6 Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029..... II-18
Tabel 2-7 Daya Dukung Pangan Kabupaten Lamongan Tahun 2024 .. II-20
Tabel 2-8 Prediksi Daya Dukung Pangan Tahun 2025 - 2029..... II-21
Tabel 2-9 Capaian Komponen IKLH 2021 - 2024..... II-24
Tabel 2-10 Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lamongan..... II-25
Tabel 2-11 Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah di KAbupaten Lamongan II-27
Tabel 2-12 Capaian Penurunan Emisi GRK Tahun 2021-2024 di Kab Lamongan II-32
Tabel 2-13 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024..... II-34
Tabel 2-14 Proyeksi Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 . II-36
Tabel 2-15 Hasil Perhitungan LQ (*Location Quotient*) Sektor Ekonomi di Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024..... II-41
Tabel 2-16 Hasil Perhitungan Shift Share Sektor Ekonomi di Kabupaten Lamongan II-43
Tabel 2-17 Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2024..... II-51

Tabel 2-18 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2024..... II-52
Tabel 2-19 Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2024..... II-53
Tabel 2-20 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024..... II-65
Tabel 2-21 Indikator-Indikator Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024..... II-69
Tabel 2-22 Indikator-Indikator Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024..... II-71
Tabel 2-23 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024..... II-79
Tabel 2-24 Indikator Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2020-2024 ..... II-80
Tabel 2-25 Indikator Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024..... II-82
Tabel 2-26 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 ..... II-83
Tabel 2-27 Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2020-2024 ..... II-85
Tabel 2-28 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024... ..... II-86
Tabel 2-29 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020-2024 ..... II-88
Tabel 2-30 Jumlah Desa Berdasarkan Kategori di Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024..... II-88
Tabel 2-31 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024 ..... II-90
Tabel 2-32 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024..... II-92
Tabel 2-33 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024..... II-94
Tabel 2-34 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024... ..... II-97

Tabel 2-35 Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024 ..... II-98
Tabel 2-36 Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2020-2024..... II-99
Tabel 2-37 Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2020-2024 .... II-100
Tabel 2-38 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024 .. II-101
Tabel 2-39 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024 II-101
Tabel 2-40 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024 ..... II-103
Tabel 2-41 Produksi Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024..... II-104
Tabel 2-42 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2020-2024..... II-105
Tabel 2-43 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024..... II-106
Tabel 2-44 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024..... II-107
Tabel 2-45 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024 II-108
Tabel 2-46 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024.. II-109
Tabel 2-47 Jumlah Kepala Keluarga Transmigran dari Kabupaten Lamongan II-110
Tabel 2-48 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2020-2024..... II-111
Tabel 2-49 Capaian Bidang Keuangan Tahun 2020-2024..... II-112
Tabel 2-50 Capaian Indikator Pengawasan Tahun 2020-2024 ..... II-113
Tabel 2-51 Capaian Kinerja Kepegawaian Tahun 2020-2024 ..... II-114
Tabel 2-52 Kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024..... II-115
Tabel 2-53 Capaian Kinerja Urusan Kewilayahan Tahun 2020-2024 .. II-116
Tabel 2-54 Konflik Sosial yang Tertangani di Kabupaten Lamongan 2020-2024..... II-117
Tabel 2-55 Capaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Lamongan Tahun 2023-2024..... II-119
Tabel 2-56 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024..... 123
Tabel 2-57 Persentase Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2024 ..... II-131

Tabel 2-58 Persentase Pertumbuhan Pengunaan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2024 ..... II-135
Tabel 2-59 Persentase Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2024..... II-136
Tabel 2-60 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Lamongan 2020-2024..... II-139
Tabel 2-61 Perhitungan Rasio Likuiditas Kabupaten Lamongan 2020-2024 ..... II-145
Tabel 2-62 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024..... II-151
Tabel 2-63 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal II-154
Tabel 2-64 Predikat Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Lamongan II-154
Tabel 2-65 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal II-156
Tabel 2-66 Predikat Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Lamongan II-156
Tabel 2-67 Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah II-157
Tabel 2-68 Predikat Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan II-158
Tabel 2-69 Kriteria Penilaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Berdasarkan II-159
Tabel 2-70 Predikat Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan II-161
Tabel 2-71 Rasio Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-165
Tabel 2-72 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur..... II-168
Tabel 2-73 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2024 ..... II-173
Tabel 2-74 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama II-176
Tabel 2-75 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ... . II-178

Tabel 2-76 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lamongan II-180
Tabel 2-77 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024..... II-182
Tabel 2-78 Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024..... 183
Tabel 2-79 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2030..... II-186
Tabel 2-80 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Lamongan Tahun 2026-2030..... II-193
Tabel 2-81 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2026-2030..... II-204
Tabel 2-82 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan II-205
Tabel 2-83 17 Program Prioritas dan 8 Program hasil Terbaik Cepat .. II-213
Tabel 2-84 Lokasi Prioritas dan Highlight Indikasi Intervensi Arah Kebijakan Kewilayahan..... II-222
Tabel 2-85 Linerietas Arah Kebijakan RPJPN dan Arah Kebijakan RPJPD II-227
Tabel 2-86 Linerietas Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Timur dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Lamongan..... II-227
Tabel 2-87 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029..... II-228
Tabel 2-88 Keselarasan RTRW 2020-2039 dengan RPJMD Kabupaten Lamongan II-232
Tabel 2-89 Keselerasan Arah Kebijakan Prioritas RIPJPID dengan RPJMD II-239
Tabel 2-90 Linerietas Program Prioritas dengan Program pda Perangkat Daerah II-242
Tabel 3-1 Gambaran Umum Target Kinerja RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029..... III-25
Tabel 3-2 Keterkaitan Strategi dengan Sasaran, Tujuan, Misi Dan Visi Kabupaten Lamongan 2025-2029..... III-45

Tabel 3-3 Arah Kebijakan Kabupaten Lamongan 2025-2029 ..... III-47
Tabel 3-4 Linieritas Program Politis Kepala Daerah Terhadap Nomenklatur III-57
Tabel 3-5 Program Pembangunan Daerah Tahun 2026-2030 ..... III-66
Tabel 4-1 Program Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2030..... IV-3
Tabel 4-2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamongan 2025-2030..... IV-43
Tabel 4-3 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2030 Melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) IV-44
Tabel 4-4 Indikator Makro Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 . IV-68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Lamongan II-9
Gambar 2-2 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan..... II-22
Gambar 2-3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan II-23
Gambar 2-4 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Lamongan II-27
Gambar 2-5 Prosentase Ketaatan Kegiatan/ Usaha terhadap Pengelolaan Limbah B3 Kabupaten Lamongan II-29
Gambar 2-6 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lamongan II-30
Gambar 2-7 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Lamongan..... II-32
Gambar 2-8 Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan II-34
Gambar 2-9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-37
Gambar 2-10 PDRB ADHK dan PDRB ADHB Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-39
Gambar 2-11 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Lamongan Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2020-2024 ..... II-40
Gambar 2-12 Matriks Tipologi Klassen Sektor PDRB Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-40
Gambar 2-13 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 Berdasarkan Hasil Analisis Shift Share II-44
Gambar 2-14 Angka Kemiskinan Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-45
Gambar 2-15 PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-46
Gambar 2-16 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2025 ..... II-46
Gambar 2-17 Perbandingan Indeks Gini Rasio Kab. Lamongan, Provinsi, Nasional Tahun 2020-2024..... II-48

Gambar 2-18 Perbandingan Capaian IPM Kab. Lamongan, Provinsi, Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-48
Gambar 2-19 Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Lamongan dan Provinsi Tahun 2020-2024 ..... II-49
Gambar 2-20 Tingkat Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-50
Gambar 2-21 Tingkat Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-51
Gambar 2-22 Capaian IDG Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ... II-53
Gambar 2-23 Angka Ketergantungan Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-54
Gambar 2-24 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Lamongan 2020-2024 ..... II-55
Gambar 2-25 Capaian PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-56
Gambar 2-26 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Lamongan Tahun 2023-2024 ..... II-56
Gambar 2-27 TPAK dan TPAK Perempuan Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-57
Gambar 2-28 Tingkat Innovasi Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-58
Gambar 2-29 Modal Tetap Bruto Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2024 ..... II-59
Gambar 2-30 Capaian Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Lamongan 2020-2024 ..... II-60
Gambar 2-31 Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-61
Gambar 2-32 Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Lamongan 2020-2024 ..... II-62
Gambar 2-33 Persentase Jumlah Desa Mandiri Kabupaten Lamongan 2020-2024 ..... II-63
Gambar 2-34 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB II-64
Gambar 2-35 Tingat Inflasi Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ... II-64

Gambar 2-36 Nilai Indeks SPBE Tahun 2020-2024 ..... II-66
Gambar 2-37 Indeks Demokrasi Indonesia, Rata-rata Provinsi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2023..... II-67
Gambar 2-38 Persentase Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik..... II-73
Gambar 2-39 Indeks Infrastruktur Irigasi, Ketersediaan Air Baku, dan Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024 ..... II-74
Gambar 2-40 Persentase Rumah Layak Huni dan Indeks Permukiman II-75
Gambar 2-41 Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Tahun 2020-2024 II-76
Gambar 2-42 Capaian PPKS yang Meningkat Kapasitasnya Kabupaten Lamongan..... II-81
Gambar 2-43 Indikator Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 ..... II-82
Gambar 2-44 Capaian IPG Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 .... II-83
Gambar 2-45 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-84
Gambar 2-46 Konsumsi Pangan (Kg/Kap/Ton) Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-84
Gambar 2-47 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-85
Gambar 2-48 Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah yang Bersertifikat Tahun 2020-2024 ..... II-86
Gambar 2-49 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-89
Gambar 2-50 Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2020-2024 ..... II-91
Gambar 2-51 Persentase Ruas Jalan Kabupaten yang Terpenuhi Alat Kelengkapannya Tahun 2020-2024..... II-91
Gambar 2-52 Nilai Tukar Petani Tahun 2020-2024 ..... II-104
Gambar 2-53 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-107

Gambar 2-54 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-127
Gambar 2-55 Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan..... II-129
Gambar 2-56 Struktur Belanja Daerah berdasarkan Penggunaannya Tahun 2020-2024 ..... II-132
Gambar 2-57 Persentase Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan..... II-133
Gambar 2-58 Rasio Likuiditas Kabupaten Lamongan 2020-2024 ..... II-146
Gambar 2-59 Rasio Solvabilitas Kabupaten Lamongan 2020-2024 ..... II-147
Gambar 2-60 Rasio Aktivitas Kabupaten Lamongan 2020-2024 ..... II-148
Gambar 2-61 Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-151
Gambar 2-62 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-153
Gambar 2-63 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-155
Gambar 2-64 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan..... II-157
Gambar 2-65 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020-2024 ..... II-159
Gambar 2-66 Rasio Efektivitas Keuangan Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-161
Gambar 2-67 Rasio PAD Terhadap PDRB Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-162
Gambar 2-68 Rasio Ruang Fiskal Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-164
Gambar 2-69 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-167
Gambar 2-70 Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-169
Gambar 2-71 Proporsi Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 ..... II-170

Gambar 2-72 Proporsi SiLPA Tahun Sebelumnya terhadap Belanja Daerah Kabupaten II-171
Gambar 2-73 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia II-212
Gambar 2-74 Kerangka Visi dan Misi RPJPD Tahun 2025-2045 ..... II-225
Gambar 2-75 Arah Kebijakan Pada RPJPD Kabupaten Lamongan Untuk Tahun 2025-2029 ..... II-226
Gambar 2-76 Potensi Lamongan Dalam Angka II-262
Gambar 2-77 Potensi Industrialisasi di Lamongan..... II-263
Gambar 3-1 Visi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 ..... III-2
Gambar 3-2 Keterkaitan *Tagline* Visi terhadap Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 ..... III-3
Gambar 3-3 Pemetaan Misi 1 Kabupaten Lamongan..... III-6
Gambar 3-4 Pemetaan Misi 2 Kabupaten Lamongan..... III-8
Gambar 3-5 Pemetaan Misi 3 Kabupaten Lamongan..... III-9
Gambar 3-6 Pemetaan Misi 4 Kabupaten Lamongan..... III-11
Gambar 3-7 Pemetaan Misi 5 Kabupaten Lamongan..... III-12
Gambar 3-8 *Cascading* Misi 1 Kabupaten Lamongan..... III-16
Gambar 3-9 *Cascading* Misi 2 Kabupaten Lamongan..... III-18
Gambar 3-10 *Cascading* Misi 3 Kabupaten Lamongan..... III-20
Gambar 3-11 *Cascading* Misi 4 Kabupaten Lamongan (disesuaikan) ... III-22
Gambar 3-12 *Cascading* Misi 5 Kabupaten Lamongan Lamongan (disesuaikan) III-24
Gambar 3-13 Analisis SWOT dalam Perumusan Strategi Pembangunan III-30
Gambar 3-14 Tema/Pentahapan Tahunan Pembangunan Kabupaten Lamongan..... III-56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan baik pusat hingga daerah. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan perlu menyusun perencanaan pembangunan baik yang sifatnya jangka panjang, menengah dan jangka pendek yang substansinya harus saling berkaitan.

Melalui kewenangan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat namun tetap harus memperhatikan keselarasan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan yang baik menjadi arah dan strategi dalam pencapaian cita-cita atau tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (2), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ialah penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, RPJMD Provinsi dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka menjawab tantangan pembangunan ke depan yang semakin kompleks dan dinamis, penyusunan RPJMD ini dengan berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan melalui integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas daerah. Komitmen terhadap pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berwawasan lingkungan menjadi landasan utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, serta menjaga daya dukung lingkungan untuk generasi mendatang.

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode tahun 2025-2029 yakni Dr. H. Yuhronur Efendi, M.BA, M.EK dan Dirham Akbar Aksara, S.T, B.Eng, M.Sc. yang dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 harus diterjemahkan ke dalam dokumen RPJMD yang dibahas bersama dengan DPRD. Selain janji-janji politik atau Visi Misi Kepala Daerah terpilih, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis di dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), ekosistem inovasi yang tertuang di dalam Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) serta potensi-potensi unggulan Kabupaten Lamongan telah terakomodir dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029. Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 menjadi sangat strategis karena merupakan tahapan pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045. Sebagai dokumen jangka menengah, RPJMD ini harus mencerminkan visi jangka panjang pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, Pemerintah Daerah dihadapkan pada tantangan untuk membangun fondasi yang kokoh guna mewujudkan visi besar RPJPD, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan dari periode sebelumnya.

Selanjutnya, dalam proses penyusunannya RPJMD Kabupaten Lamongan menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik, Pendekatan Partisipatif, Pendekatan Politis, dan Pendekatan Atas Bawah dan Bawah Atas. Pendekatan teknokratik direpresentasikan dengan tersusunnya Rancangan Teknokratik RPJMD secara akademis dan ilmiah dalam melihat objektifitas kondisi, permasalahan, dan isu-isu strategis. Sedangkan pendekatan partisipatif ditunjukkan pada setiap proses dan tahapannya selalu melibatkan stakeholder terkait meliputi Pemerintah Daerah, DPRD, Akademisi, masyarakat, sektor swasta dan Komunitas. Pendekatan politis yakni penerjemahan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen RPJMD yang dibahas bersama dengan DPRD. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan Atas Bawah dan Bawah Atas merupakan hasil perencanaan yang diseleraskan dengan tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 juga dilakukan secara bersamaan atau simultan dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029. Adapun dalam penyusunannya baik Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 dan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 menggunakan data-

data sektoral dalam Satu Data Indonesia Kabupaten Lamongan agar terwujud keberlanjutan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan yang berbasiskan data (*data driven policy*).

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan – Mojokerto Surabaya -Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 3).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses sistematis yang mengintegrasikan berbagai dokumen perencanaan yang selaras dengan tujuan nasional. Merujuk pada sinkronisasi perencanaan, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan jangka panjang daerah, rencana induk dan peta jalan pemajuan Iptek daerah, RPJMD Provinsi, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional serta dokumen sektoral lainnya yang setara dengan dokumen yang disusun dalam konteks kabupaten. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar level pemerintahan, antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan

evaluasi. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut:

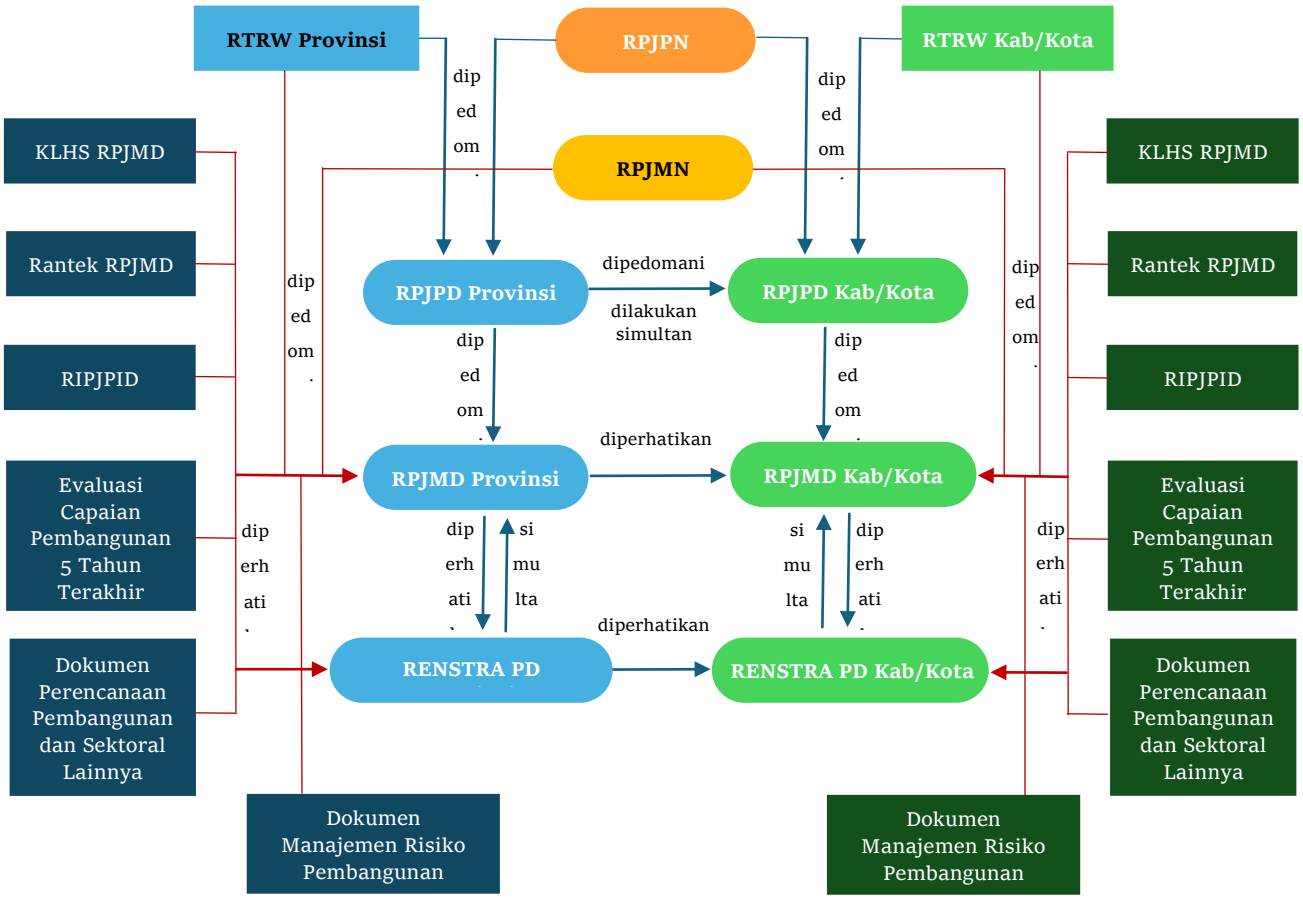

Gambar 1-1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 (Data Diolah), 2025

Berdasarkan gambar di atas, dapat difahami bahwa RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya yakni:

1. Sinergitas dengan dokumen RPJMN tahun 2025-2029. Hal ini sebagai acuan dalam melakukan telaah dan penyelasaran kebijakan pembangunan daerah yang berdampak pada target pembangunan nasional. Hubungan keselarasan visi, misi dan prioritas pembangunan yang tertuang di dalam RPJMN dengan frame pembangunan di Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 1-1 Keselarasan RPJMN Terhadap RPJMD Kabupaten Lamongan

RPJMN 2025-2029	RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2025-2029

	RPJMN 2025-2029	RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2025-2029
Visi	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan
Misi	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meninqkatkan nilai tambah di dalam negeri. 6. Membangun daridesa dan dari Bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. 7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.	1. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan. 2. Menguatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak serta adaptif terhadap perubahan zaman. 3. Mewujudkan infrastruktur daerah yang mantap dan berwawasan lingkungan. 4. Meningkatkan kesejahteraan sosial ditengah kehidupan masyarakat yang religius, harmoni, berbudaya dan partisipatif dalam pembangunan. 5. Percepatan reformasi birokasi berdampak melalui digitalisasi manajemen pemerintahan yang akuntabel dan responsif.
Prioritas Pembangunan	Program Hasil Cepat Terbaik:	Program Prioritas:
	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesankecenderungan serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.	PERINTIS (Pendidikan berkualitas dan gratis bagi warga miskin) Lamongan sehat
	Menyelenggarakan pemeriksaan Kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di	Lamongan sehat

	RPJMN 2025-2029	RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2025-2029
	kabupaten.	
	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional.	Lumbung Pangan Lamongan Lamongan Hijau
	Membangun Sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.	PERINTIS (Pendidikan berkualitas dan gratis bagi warga miskin)
	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan social serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.	Yakin Semua Sejahtera
	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah.	Jamula Mantap Lamongan Menyala Lamongan Hijau Lamongan Tangguh Desa Pintar
	Menaikkan gaji ASN terutama (guru, dosen, tenaga Kesehatan dan penyuluh). TNI/ Polri dan pejabat negara.	Transformasi Digital Pelayanan Publik
	Mendirikan Badan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.	Transformasi Digital Pelayanan Publik

Sumber: RPJMN 2025-2029

2. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029 berpedoman pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029, terutama pedoman tentang isu-isu strategis arah pembangunan Provinsi Jawa Timur berdasarkan potensi dan pengembangan wilayah. Keselarasan program prioritas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1-2 Keselarasan RPJMD Provinsi Jawa Timur Terhadap RPJMD Kabupaten Lamongan

	RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2029	RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2025-2029
Visi	Bersama Jawa Timur Maju Yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045.	Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan
Misi	1. Jatim Sejahtera, Mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendekatan lintas sektoral-spasial terpadu dengan memperkuat peran kaum perempuan dalam program pemberdayaan serta memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan di antaranya difabel dan lansia melalui program bantuan dan perlindungan sosial berbasis data terpadu.	1. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan. 2. Menguatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak serta adaptif terhadap perubahan zaman. 3. Mewujudkan infrastruktur daerah yang mantap dan

	RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2029	RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2025-2029
	2. Jatim Kerja, Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (start-up) pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan abad 21 (21st century skills) yang berdaya saing. 3. Jatim Akses, Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas sektor serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan. 4. Jatim Cerdas, Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. 5. Jatim Sehat, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Health Coverage (UHC). 6. Jatim Berkah Amanah, Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna, dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa Pancasila. 7. Jatim Agro, Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional. 8. Jatim Harmoni, Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga. 9. Jatim Lestari, Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral.	berwawasan lingkungan. 4. Meningkatkan kesejahteraan sosial ditengah kehidupan masyarakat yang religius, harmoni, berbudaya dan partisipatif dalam pembangunan. 5. Percepatan reformasi birokasi berdampak melalui digitalisasi manajemen pemerintahan yang akuntabel dan responsif.
Prioritas	**Nawa Bhakti**	**Program Prioritas**

	RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2029	RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2025-2029
Pembanagunan	**Jatim Sejahtera**, merupakan program yang difokuskan untuk menunjang keberhasilan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.	Yakin Semua Sejahtera UMKM Naik Kelas
	Jatim Kerja, dengan fokus menuju keberhasilan upaya memperluas lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan menjaga iklim investasi serta stabilitas ekonomi.	Young Enterprenuer Success UMKM Naik Kelas
	Jatim Akses, sebagai program yang difokuskan untuk menunjang keberhasilan perkuatan konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas sektor serta transportasi yang berkualitas.	Jamula Mantap Lamongan Menyala
	Jatim Cerdas yang difokuskan untuk menunjang keberhasilan perkuatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.	PERINTIS (Pendidikan berkualitas dan gratis bagi warga miskin).
	Jatim Sehat, fokus untuk menunjang keberhasilan perkuatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan layanan kesehatan untuk semua yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan.	Lamongan Sehat
	Jatim Berkah Amanah, untuk menunjang keberhasilan perkuatan tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna, dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat.	Transformasi Digital Pelayanan Publik
	Jatim Agro, dengan fokus menunjang keberhasilan peningkatan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian.	Lumbung Pangan Lamongan
	Jatim Harmoni, difokuskan untuk menunjang keberhasilan upaya terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga.	Lamongan Nyantri Yakin Semua Sejahtera
	Jatim Lestari, fokus dalam menunjang keberhasilan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.	Lamongan Hijau

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029

3. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029 juga memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043. Kabupaten Lamongan termasuk dalam cluster Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau kegiatan beberapa kabupaten/kota yang terdiri dari Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan atau yang biasa dikenal dengan (Gerbangkertosusila). Dalam penetapan fungsi wilayah pembangunan (WP), Kabupaten Lamongan termasuk dalam WP Gerbangkertosusila Plus dengan pusat di Kota Surabaya meliputi: Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep yang diarahkan untuk optimalisasi fungsi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri. Dalam rencana penetapan kawasan andalan, Kabupaten Lamongan masuk sebagai Kawasan dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata. Selain itu Kabupaten Lamongan juga termasuk dalam rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai KSP yakni kawasan ekonomi unggulan terdiri atas Lamongan Integrated Shorebase (LIS) dan sekitarnya, kawasan agroindustri, yaitu Agroindustri Gelang (Gresik dan Lamongan) Utara dan Kawasan Perbatasan antarkabupaten/kota meliputi Gerbangkertosusila dan segitiga emas pertumbuhan Tuban–Lamongan-Bojonegoro.

4. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029 berpedoman pada Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Lamongan tahun 2025-2045 khususnya terkait visi, misi, arah kebijakan, dan

sasaran. RPJMD ini menjadi bagian dari tahapan pencapaian RPJPD, khususnya untuk periode pembangunan tahap pertama (2025-2029). Oleh karena itu, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 mengacu dan konsisten dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk memastikan kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Lamongan.

5. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 memperhatikan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039. Hal yang sangat diperhatikan dalam RTRW adalah kesesuaian program prioritas dengan program pada pola dan struktur ruang sebagai acuan pembangunan.
6. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029 dalam rangka meningkatkan daya saing daerah juga memperhatikan isu strategis dan arah kebijakan prioritas dalam rangka menjaga ekosistem riset dan teknologi serta inovasi daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029. Hal tersebut sangat penting mengingat pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif tidak dapat dipisahkan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dalam menciptakan solusi terhadap berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh Kabupaten Lamongan.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 sebagai arah untuk akselerasi Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan sepanjang tahun 2025-2029. Selain itu dokumen RPJMD juga menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan keuangan

daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah serta program kewilayahan dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan.

Adapun tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 yakni:

1. Sebagai pedoman dalam mengimplementasikan program prioritas yang menjadi janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Sebagai pedoman dalam memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, dan strategi pembangunan daerah.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan strategis daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.
4. Sebagai acuan kinerja pemerintah daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta dasar untuk penjabaran RKPD, terutama terkait dengan sasaran, arah kebijakan dan program perangkat daerah.
5. Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun 2026-2030.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 sepenuhnya mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang terdiri atas 5 (lima) Bab dan terdapat keterkaitan antar bab. Adapun sistematika penyusunan dokumen sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum Kabupaten Lamongan yang memuat subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah yang terdiri dari dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum; subbab Gambaran Keuangan Daerah yang terdiri dari penjelasan tentang realisasi APBD tahun anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah tahun anggaran 2025-2029 serta subbab Permasalahan dan Isu Strategis yang terdiri atas permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisikan subbab Visi dan Misi kepala daerah terpilih yang kemudian diterjemahkan menjadi tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, sekaligus juga dengan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sebagai representasi dari tolok ukur keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2025-2029. Pada bab ini juga diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta menguraikan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, serta berbagai program prioritas daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat subbab program pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program disajikan beserta indikator kinerja, nilai target indikator, pagu indikatif, serta perangkat daerah penanggung jawab penyelenggaraan bidang urusan. Selain itu pada bab ini dituangkan terkait target keberhasilan pencapaian tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan kesimpulan dan kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN RPJMD PERIODE 2020-2024

Evaluasi kinerja pemerintah daerah adalah salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Evaluasi kinerja menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan agar Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan menjaga keberlanjutan pembangunan. Visi pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan". Adapun Misi pembangunan adalah:

- Misi 1 "Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah."
- Misi 2 "Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman."
- Misi 3 "Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan."
- Misi 4 "Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tentram."
- Misi 5 "Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi."

Masing-masing misi pembangunan memiliki fokus utama sebagai tujuan yang harus dicapai. Fokus dari Misi pertama yakni terwujudnya pertumbuhan yang inklusif. Representasi ketercapaian atau keberhasilan dari misi pertama yakni ekonomi semakin tumbuh, meningkatnya jumlah

investasi, meningkatnya produktifitas sektor unggulan dan pengeluaran wisatawan meningkat. Selain itu, Kemiskinan menurun, kesenjangan mengecil, dan pengangguran berkurang, serta ketahanan ekonomi keluarga dan perempuan terjamin. Harapannya kesejahteraan petani dan penanganan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial mengalami peningkatan.

Sedangkan Misi kedua terfokus pada upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Representasi tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yakni semakin meningkatnya pembangunan manusia yang didukung oleh kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat, kualitas pelayanan dan kemudahan aksesiblitas kesehatan bagi masyarakat serta semakin meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga.

Misi ketiga difokuskan pada upaya Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur melalui peningkatan kualitas layanan dan konektifitas infrastruktur yang merata, pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian terhadap risiko bencana. Untuk Misi keempat fokus pada upaya Peningkatan Kesalehan Sosial dan Pelestarian nilai-nilai Kebudayaan bagi Masyarakat. Representasi ketercapaiannya dilihat dari meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sikap toleran, solidaritas sosial dan stabilitas ketenteraman dan ketertiban lingkungan serta menjaga nilai-nilai budaya lokal. Pada misi yang terakhir atau kelima difokuskan untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berkualitas sehingga tercipta Reformasi Birokrasi yang didukung oleh peningkatan inovasi layanan berbasis digital, profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan desa mandiri.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan merupakan komponen utama dalam Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk mengetahui sejauh mana indikator tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 dapat tercapai atau perlu akselerasi untuk pencapaiannya. Adapun realisasi capaian indikator kinerja utama dan

kinerja sasaran sepanjang tahun 2021 hingga 2024 yang merupakan bagian dari periodesasi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-1 Pencapaian Kinerja Indikator Tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan Periodesasi Tahun 2021 - 2026

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Capaian Awal Perencanaan (2021)	Target Perencanaan 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Target Akhir Periode (2026)	Gap Realisasi Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Periode
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan	**Pertumbuhan Ekonomi**	**3,43**	**4,71**	**4,81**	**102,12**	**5,43**	**Realisasi tahun 2024 meningkat tajam dibandingkan tahun 2021, namun masih memerlukan upaya untuk mencapai target tahun 2026**
	Gini Rasio	**0,294**	**0,290**	**0,281**	**103,20**	**0,288**	**Realisasi tahun 2024 meningkat tajam dibandingkan tahun 2021 dan sudah melebihi target tahun 2026**
	Prosentase Penduduk Miskin	**13,85**	**12,92**	**12,16**	**106,25**	**12,35**	**Realisasi tahun 2024 meningkat tajam dibandingkan tahun 2021, namun masih memerlukan upaya untuk mencapai target tahun 2026**
Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender	74,05	74,01	67,9	91,74	74,05	Realisasi tahun 2024 mengalami penurunan dan lebih rendah dari baseline
	Nilai Tukar Petani (NTP)	106,81	104,88	123,93	118,16	104,9	Realisasi tahun 2024 meningkat tajam dibandingkan tahun 2021 dan sudah melebihi target tahun 2026
Meningkatnya kesejahteran masyarakat	Prosentase PPKS yang meningkat kapasitasnya	N/A	4,38	6,22	142,01	4,88	Realisasi tahun 2024 meningkat tajam dibandingkan tahun 2021 dan sudah melebihi target tahun 2026
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,9	4,47	4,34	103,00	4,07	Realisasi tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2021, namun masih memerlukan effort untuk mencapai target tahun 2026
	Indeks Daya Beli	0,744	0,778	0,768	98,71	0,794	Realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, namun belum mencapai target 2024 dan masih memerlukan effort untuk mencapai target tahun 2026
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Persentase Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,37	1	0,11	11,00	1,5	Realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, namun belum mencapai target

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Capaian Awal Perencanaan (2021)	Target Perencanaan 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Target Akhir Periode (2026)	Gap Realisasi Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Periode
							2024 dan masih memerlukan effort untuk mencapai target tahun 2026
	Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	7,03	5,3	5,08	95,85	6,92	Realisasi tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dan belum mencapai target 2024 dan masih memerlukan effort untuk mencapai target tahun 2026
	Persentase Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	7,02	4,43	7,66	172,91	7,39	Realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 dan telah mencapai target 2026
Meningkatnya Efektivitas Investasi	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi	N/A	2,5	8,02	320,8	3,5	Realisasi tahun 2024 meningkat tajam dibandingkan tahun 2021 dan sudah melebihi target tahun 2026
Meningkatnya Belanja Wisatawan	Jumlah pengeluaran Wisatawan	N/A	227.500.000.000	1.059.999.000.000	465,93	268.500.000.000	Realisasi tahun 2024 sudah mencapai target dan melampui target 2026
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing	**Indeks Pembangunan Manusia**	**73,97**	**73,95**	**75,90**	**102,64**	**74,58**	**Realisasi tahun 2024 meningkat tajam dibandingkan tahun 2021 dan sudah melebihi target tahun 2026**
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,651	0,642	0,672	104,67	0,644	Realisasi tahun 2024 meningkat tajam dibandingkan tahun 2021 dan sudah melebihi target tahun 2026
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,808	0,809	0,847	104,70	0,811	Realisasi tahun 2024 meningkat tajam dibandingkan tahun 2021 dan sudah melebihi target tahun 2026
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	54,6	61,33	112,33	55,6	Realisasi tahun 2024 sudah mencapai target dan melampui target di tahun 2026
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	**N/A**	**81**	**81,33**	**100,41**	**83**	**Realisasi tahun 2024 sudah mencapai target, namun memerlukan upaya untuk mencapai target di tahun 2026**
Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas Dan Merata	Indeks Infrastruktur	82,54	82,33	83,22	101,08	83,33	Realisasi tahun 2024 meningkat tajam dibandingkan tahun 2021 dan sudah melebihi target tahun 2026
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,92	62,08	63,33	102,01	62,74	Realisasi tahun 2024 meningkat tajam dibandingkan tahun 2021 dan sudah melebihi target tahun 2026

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Capaian Awal Perencanaan (2021)	Target Perencanaan 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Target Akhir Periode (2026)	Gap Realisasi Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Periode
Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,62	0,64	0,64	100,00	0,68	Realisasi tahun 2024 sudah mencapai target, namun memerlukan effort untuk mencapai target di tahun 2026
Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal	**Indeks Kesalehan Sosial**	**N/A**	**64,2**	**89,33**	**139,14**	**65,36**	**Realisasi tahun 2024 sudah mencapai target dan melampui target di tahun 2026**
Meningkatnya Toleransi	Nilai Toleransi	N/A	73,12	89,93	122,99	79,08	Realisasi tahun 2024 sudah mencapai target dan melampui target di tahun 2026
Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat	Nilai Stabilitas	N/A	68,98	88,11	127,73	71,77	Realisasi tahun 2024 sudah mencapai target dan melampui target di tahun 2026
Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotongroyong	Nilai Solidaritas	N/A	67,31	90,57	134,56	70,71	Realisasi tahun 2024 sudah mencapai target dan melampui target di tahun 2026
Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	N/A	55,1	67,64	122,76	55,5	Realisasi tahun 2024 sudah mencapai target dan melampui target di tahun 2026
Mengoptimalisa-si Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**68,35**	**70,5**	**86,48**	**122,67**	**71,5**	Realisasi tahun 2024 meningkat tajam dibandingkan tahun 2021 dan sudah melebihi target tahun 2026
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM	82,62	84,48	88,02	104,91	85,73	Realisasi tahun 2024 meningkat tajam dibandingkan tahun 2021 dan sudah melebihi target tahun 2026
	Indeks SPBE	3,32	3,85	4,18	108,57	4	Realisasi tahun 2024 meningkat tajam dibandingkan tahun 2021 dan sudah melebihi target tahun 2026
Meningkatnya Kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	N/A	71	79,28	111,66	74	Realisasi tahun 2024 sudah mencapai target dan melampui target di tahun 2026
Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	Predikat SAKIP	A	A	A	100,00	A	Realisasi tahun 2024 mendapatkan predikat yang sama dengan tahun 2021 dan telah mencapai target tahun 2026
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	Realisasi tahun 2024 mendapatkan predikat yang sama dengan tahun 2021

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Capaian Awal Perencanaan (2021)	Target Perencanaan 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Target Akhir Periode (2026)	Gap Realisasi Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Periode
							dan telah mencapai target tahun 2026
	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	100,00	Level 4	Realisasi tahun 2024 sudah mencapai target dan melampui target di tahun 2026
Meningkatnya Kemandirian Desa	Prosentase Peningkatan Desa Mandiiri	N/A	200,00%	1.393.75%	697,00	375,00%	Realisasi tahun 2024 sudah mencapai target dan melampui target di tahun 2026
Rata-Rata Pencapaian Kinerja RPJMD pada tahun 2024					**142,69%**		

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah telah mencapai target kinerja tahun 2024 namun belum semuanya melampui target kinerja akhir periode RPJMD Tahun 2021-2026. Sedangkan untuk indikator sasaran dari 27 indikator terdapat tiga indikator yang belum mencapai target kinerja di tahun 2024 yakni Indeks Daya Beli, Persentase Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, sehingga memerlukan upaya yang besar untuk mencapai target akhir periode RPJMD. Selain itu masih terdapat indikator kinerja sasaran pada Misi ke 1 dan ke 3 yang belum melampui target hingga akhir periode tahun 2026.

Menindaklanjuti SDGs terbaru untuk kabupaten/kota, seperti yang tertera dalam Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs 2021-2024, dari hasil evaluasi diketahui bahwa Kabupaten Lamongan memiliki 16 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDG's) dengan rincian 74 target, 126 indikator. Status pencapaian TPB/SDG's Kabupaten Lamongan diketahui Tahun 2023 sebanyak 7,14 persen atau 9 indikator TPB/SDG's berada dalam status perlu perhatian khusus yang mana kecenderungan capaian mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan tidak mencapai target tahun berjalan. Sebanyak 6,35 persen atau 8 indikator TPB/SDG's berada dalam status akan tercapai yang mana kecenderungan capaian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya walaupun belum mencapai target tahun berjalan. Kemudian

sebanyak 86,51 persen atau 109 indikator TPB/SDG's berada dalam status tercapai yang mana target tahun berjalan yang ditetapkan dapat tercapai. Sedangkan sebanyak 188 indikator TPB/SDG's berada dalam status N/A yang mana data tidak tersedia dan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi dan sebanyak 85 indikator TPB/SDG's tidak memiliki status pencapaian dikarenakan data capaian atau realisasi indikator TPB/SDG's tidak tersedia.

Selanjutnya, jika mengacu terhadap pedoman evaluasi pencapaian RPJMD pada periode RPJPD Tahun 2005-2025 pada surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Tahun 2005-2025 maka hasil capaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD di klasifikasikan menjadi predikat yaitu:

Tabel 2-2 Klasifikasi Predikat Kinerja Tujuan dan Sasaran

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 75%	Rendah
5.	≤50%	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017

Berdasarkan hasil evaluasi pada tabel capaian RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD secara keseluruhan mempunyai predikat **Sangat Tinggi** dengan nilai sebesar **239,05%**.

Capaian kinerja pembangunan yang melebihi ekspektasi tersebut dikarenakan sebagian besar indikator mempunyai capaian di atas 100%, salah satu capaian indikator kinerja yang sangat tinggi yaitu tujuan dan sasaran pembangunan Meningkatnya Kemandirian Desa, dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Desa Mandiri sebesar 697,00%.

Dari tingginya capaian kinerja Kabupaten Lamongan tersebut, dapat dilihat juga kontribusi Kabupaten Lamongan terhadap wilayah sekitarnya diantaranya :

1. Kontribusi di bidang ekonomi Kontribusi di bidang ketahanan pangan sebagai lumbung pangan di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lamongan

mempunyai lahan baku sawah terbesar di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 95,718 Ha dengan jumlah produksi padi sebesar 852.948 ton GKG;

2. Kontribusi dibidang infrastruktur jalan radial menuju ke pelabuhan ASD Paciran, pelaksanaan SPAM Regional Pantura dengan wilayah pelayanan Tuban dan Bojonegoro, Pelaksanaan SPAM Regional Mojolagres;
3. Kontribusi dibidang lingkungan hidup (persampahan) adanya rencana pembangunan TPA Regional (Lamongan, Mojokerto, Sidoarjo dan Gresik)

2.1.2 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.2.1 POSISI DAN PERAN STRATEGIS DAERAH

A. LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah 175.221 Km² atau ±3.67% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur, mempunyai panjang garis pantai sepanjang 47 km dan dilewati oleh Sungai Bengawan Solo sepanjang ±68 Km. Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 Kecamatan dengan rincian sebanyak 462 Desa dan 12 Kelurahan.

Tabel 2-3 Luas Kecamatan di Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (km²/sq.km)	Persentase terhadap luas Kabupaten
1	Sukorame	Sukorame	3.929	2,24
2	Bluluk	Bluluk	5.800	3,31
3	Ngimbang	Sendangrejo	10.006	5,71
4	Sambeng	Adirejo	15.078	8,61
5	Mantup	Mantup	9.123	5,21
6	Kembangbahu	Kembangbahu	6.825	3,9
7	Sugio	Sugio	8.974	5,12
8	Kedungpring	Kedungpring	8.573	4,89
9	Modo	Mojorejo	8.170	4,66
10	Babat	Bedahan	6.459	3,69
11	Pucuk	Pucuk	4.538	2,59
12	Sukodadi	Sukodadi	4.748	2,71
13	Lamogan	Lamongan	4.094	2,34
14	Tikung	Bakalanpule	5.542	2,16
15	Sarirejo	Dermolemahbang	4.887	2,79
16	Deket	Deketwetan	4.395	2,51
17	Glagah	Glagah	5.002	2,85

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (km²/sq.km)	Persentase terhadap luas Kabupaten
18	Karangbinangun	Sambopinggir	4.726	2,7
19	Turi	Sukoanyar	5.250	3
20	Kalitengah	Dibee	3.695	2,11
21	Karanggeneng	Karanggeneng	4.074	2,33
22	Sekaran	Bulutengger	5.405	3,08
23	Maduran	Maduran	3.278	1,87
24	Laren	Gampangsejati	9.411	5,37
25	Solokuro	Payaman	9.487	5,41
26	Paciran	Paciran	5.681	3.24
27	Brondong	Brondong	8.072	4,61
Jumlah			**175.221**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, Buku Lamongan Dalam Angka, 2021

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan wilayah administrasi, Kabupaten Lamongan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

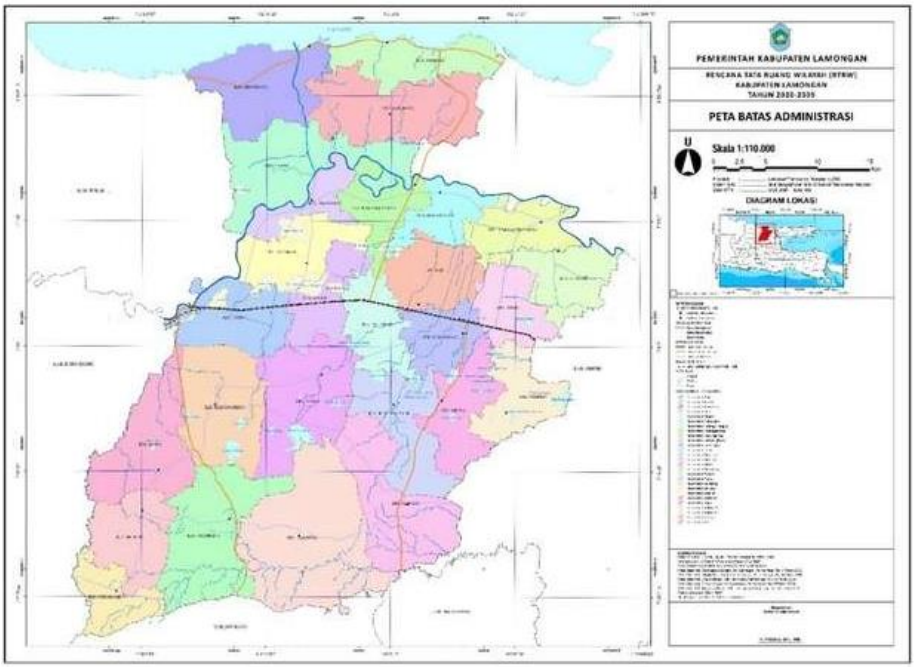

Gambar 2-1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Lamongan

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039

Gambar di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan, Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Mojokerto dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik.

B. LETAK DAN KONDISI GEOGRAFIS

Secara astronomis, Kabupaten Lamongan terletak pada koordinat 6º51'54"-7º23'6" Lintang Selatan dan berada di antara 112º4'41"-112º33'12" Bujur Timur. Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik sebagai berikut:

1) Bagian Selatan dan Utara, adalah daerah pegunungan kapur berbatuan yang memiliki tingkat kesuburan yang sedang. Kawasan ini meliputi Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran dan Solokoro
2) Bagian Tengah-Selatan, adalah dataran rendah yang relatif subur dan membentang mulai dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sarirejo, Kembangbahu dan Sugio
3) Bagian Tengah-Utara, adalah daerah Bonorowo yang merupakan daerah produktif akan tetapi termasuk dalam kawasan yang rawan banjir. Kawasan ini mencakup Kecamatan Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah.

C. TOPOGRAFI

Topografi/ketinggian adalah kondisi ketinggian suatu wilayah dari atas permukaan laut yang dinyatakan dengan mdpl (meter di atas permukaan laut). Kondisi topografi Kabupaten Lamongan berkisar antara 0 – 186 meter di atas permukaan laut. Ketinggian tertinggi berada di Kecamatan Ngimbang yang terletak 186 meter di atas permukaan laut. Secara administrasi Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 Kecamatan yang dibagi menjadi 3 karakteristik daratan berdasarkan aliran sungai bengawan solo, yaitu :

a) Bagian tengah selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu.
b) Bagian utara dan selatan yang merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang meliputi Kecamatan Mantup,

Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.

c) Bagian tengah utara yang merupakan daerah rawan banjir meliputi Kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, Glagah.

Topografi Kabupaten Lamongan terdiri dari 5 klasifikasi yaitu 0 – 25 MDPL, 25 – 50 MDPL, 50 –100 MDPL, 100 – 500 MDPL, >1000 MDPL.

D. HIDROLOGI

Secara umum keberadaan air di Kabupaten Lamongan didominasi oleh air permukaan, dimana pada saat musim penghujan dijumpai air dalam jumlah yang melimpah hingga mengakibatkan bencana banjir pada sebagaian wilayah. Namun sebaliknya pada saat musim kemarau, di sebagian besar wilayah Kabupaten Lamongan relatif berkurang. Kabupaten Lamongan dilewati oleh 3 sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo sepanjang ± 68 Km dengan debit rata – rata 531,61 m^3/bulan (debit maksimum 1.758,46 m^3 dan debit minimum 19,58 m^3). Kali Blawi sepanjang ± 27 Km dan Kali Lamong sepanjang ± 65 Km yang bermata air di Kabupaten Lamongan. Waduk di Kabupaten Lamongan berjumlah 33 Waduk dengan luas keseluruhan 2.326 Ha dan volume 51.093.192 m^3.

Keberadaan waduk di Kabupaten Lamongan dapat mengairi lahan sawah seluas 20.960 Ha, terutama lahan sawah berpengairan teknis dan ½ teknis sehingga keberadaan waduk sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya untuk meningkatkan produksi pertanian. Namun, dibalik melimpahnya sumberdaya air baik air sungai, air waduk, dan air rawa, masih terdapat beberapa desa di Kabupaten Lamongan berkategori sulit air. Hal tersebut sebagaimana hasil analisa KLHS RPJMD yang menyebutkan bahwa ketersediaan air bersih sebesar 515.817.092 m3/tahun sedangkan kebutuhan air bersih sebesar 2.207.404.800 m3/tahun. Sehingga kebutuhan air bersih Kabupaten Lamongan mengalami defisit sebesar – 1.691.586.898 m3/tahun. Upaya peningkatan sumber daya air dilakukan melalui perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

E. PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan lahan di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-4 Tabel Penggunaan Lahan Kabupaten Lamongan

No.	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)
A.	**Rencana Kawasan Lindung**	
	1. Kawasan Hutan Lindung	
	a) Kawasan Hutan Lindung	255,28
	2. Kawasan Perlindungan Setempat	
	a) Sempadan Pantai	43
	b) Sempadan Sungai	570
	c) Sempadan Waduk	83
	3. Kawasan Lindung Geologi	
	a) Kawasan Cagar Alam Geologi	
	b) Kawasan Keunikan Bentang Alam	6
	4. Kawasan Ekosistem Mangrove	
	a) Kawasan Hutan Mangrove	84
B.	**Rencana Kawasan Budidaya**	
	1. Kawasan Hutan Produksi	31.437,57
	2. Kawasan Peruntukan Pertanian	
	a) Kawasan Tanaman Pangan	53.384
	b) Kawasan Hortikultura	10.509
	c) Kawasan Perkebunan	29.618
	3. Kawasan Peruntukan Perikanan	
	a) Kawasan Perikanan Budidaya	6.407
	b) Kawasan Perikanan Tangkap	43
	4. Kawasan Peruntukan Industri	7.419
	5. Kawasan Pariwisata	63
	6. Kawasan Permukiman	
	a) Kawasan Permukiman Perkotaan	13.898
	b) Kawasan Permukiman Perdesaan	16.365
	7. Kawasan Pertahanan dan Keamanan	5
	8. Kawasan Transportasi	153
	9. Kawasan Peruntukan Lainnya	
	a) Sungai	913
	b) Waduk	1.730
	c) Rawa	2.234
JUMLAH		1.752.21

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan, 2025

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Lamongan digunakan sebagai kawasan LP2B seluas 45.841,00 Ha, selanjutnya ada kawasan pertanian lahan kering seluas 38.683,76 Ha. Kemudian juga terdapat kawasan hutan

produksi seluas 31.437,57 Ha, sedangkan luas kawasan untuk permukiman adalah 30.263 Ha. Luas lahan lainnya diperuntukkan sebagaimana yang tersaji dalam tabel di atas.

Tantangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di daerah yaitu adanya alih fungsi lahan pertanian. Isu perlindungan lahan sawah, terutama yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), merupakan prioritas yang sejalan dengan tujuan penataan ruang Kabupaten Lamongan untuk menjadikan kawasan selatan sebagai basis agropolitan regional. Hal ini juga menjadi perhatian nasional dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) oleh KPK. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan menjadi krusial untuk dilaksanakan.

2.1.2.2 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH (POTENSI SUMBER DAYA ALAM)

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten diwujudkan melalui rencana pengembangan perdesaan dan perkotaan. Pengembangan kawasan perdesaan memperhatikan kondisi permukiman perdesaan yang memiliki keberagaman yang tinggi, ada yang terpusat, terpencar, maupun berdekatan dengan Kabupaten Lamongan. Pola ruang seperti ini menjadikan pusat kegiatan perdesaan juga memiliki skala bermacam-macam.

Pengembangan sektor ekonomi perdesaan bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan serta memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat, dengan pengembangan agropolitan di Kecamatan Ngimbang dan minapolitan di Kecamatan Brondong, Paciran dan Glagah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan Kabupaten Lamongan sebagai kawasan agropolitan dan minapolitan serta sentra bahan baku pangan. Dalam pengembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Lamongan diarahkan sebagai simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang dibedakan menjadi:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), adalah Kabupaten Lamongan yang merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Gerbang Kertosusilo.

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kecamatan Paciran - Brondong, Kecamatan Babat, Kecamatan Sukodadi dan Kecamatan Ngimbang.
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi Kecamatan Sukorame, Bluluk, Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Sugio, Kedungpring, Modo, Pucuk, Tikung, Sarirejo, Deket, Glagah, Karangbinangun, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Sekaran, Maduran, Laren, Solokuro.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, meliputi wilayah Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup, Desa Deketagung Kecamatan Sugio, Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng, Desa Centini Kecamatan Laren, Desa Weru Kecamatan Paciran.

Setiap kawasan perkotaan memiliki jangkauan pelayanan tertentu sesuai dengan pusat kegiatan perkotaan masing-masing. Dalam lingkup Kabupaten Lamongan, Kota Lamongan menjadi pusat bagi wilayah pengembangan (WP) Lamongan. Setiap perkotaan yang termasuk dalam PKN dan PKL menjadi pusat wilayah pengembangan (WP). Berdasarkan sistem perwilayahan tersebut, maka Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 27 kecamatan dibagi menjadi lima wilayah pengembangan (WP), atas dasar orientasi pergerakan terhadap pusat wilayah pengembangan (WP), tersedianya akses penunjang ke pusat wilayah pengembangan (WP), kesamaan terhadap potensi wilayah, mengurangi kesenjangan wilayah dan karakter penduduk.

Selanjutnya terkait dengan sistem jaringan, secara keseluruhan pengembangan prasarana akan mendukung struktur dan pola ruang di masa yang akan datang. Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Lamongan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air dan prasarana lingkungan. Berkaitan dengan kebijakan strategis pengembangan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Daerah memprioritaskan pembangunan pada beberapa sektor sebagai berikut:

a) Sektor Pertanian, untuk meningkatkan nilai tambah maka perlu dilakukan revitalisasi pertanian dan peternakan.
b) Sektor Perikanan, meningkatkan budidaya darat dan perikanan tangkap melalui pengembangan secara intensifikasi, kecukupan sarana prasarana, dan pengembangan Kawasan perikanan.
c) Sektor Pariwisata, meningkatkan peran pariwisata sebagai sektor andalan yang mampu meningkatkan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lainnya yang terkait, sehingga dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan.
d) Sektor Industri, pembangunan sektor industri terutama agroindustri, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Pengembangan industri di daerah diharapkan tumbuh dan berkembang, industri-industri yang berbasis pada bahan baku produk pertanian, perkebunan, dan perikanan yang ada di daerah dengan tetap menjaga kelanjutan pembangunan.

Kawasan strategis memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah, penetapan kawasan strategis dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelestarian lingkungan, dan menciptakan sentra industri atau usaha kecil menengah. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan meliputi:

a. Kawasan Peruntukan Industri dan Maritim di Wilayah Utara yang menjadi kawasan peruntukan industri strategis didukung pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan;
b. Kawasan Agropolitan meliputi Kawasan Agropolitan Wilayah Selatan dengan pusat pengembangan di Kecamatan Ngimbang dengan Kawasan pendukung meliputi: Kecamatan Mantup, Kembangbahu, Sukorame, Blubuk, Sambeng, Modo dan Kecamatan Kedungpring.
c. Kawasan Minapolitan, meliputi:
    1. Minapolitan Tangkap dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Brondong dengan Kawasan Pendukung Kecamatan Paciran

2. Minapolitan Budidaya dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Glagah dengan Kawasan Pendukung Kecamatan Sekitarnya

d. Kawasan Perdagangan dan jasa dengan pusat pengembangan di Kecamatan Babat.

2.1.2.3 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

A. DAYA DUKUNG AIR

Kabupaten Lamongan memiliki Perhitungan status daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem air dilakukan berdasarkan metode grid. Sistem grid merupakan struktur dua dimensi yang membagi suatu wilayah menjadi rangkaian sel-sel unik dan berbeda yang bersebelahan. Perhitungan status daya dukung air metode grid menggunakan 3 data spasial yaitu data wilayah DAS, data jasa ekosistem penyedia air bersih, serta data grid ukuran 150x150.

Tahapan perhitungannya meliputi skoring/pembobotan densitas penduduk terhadap penutup lahan, memasukkan nilai standar air untuk kegiatan ekonomi berbasis lahan, menghitung nilai ketersediaan air, menghitung kebutuhan air rumah tangga, menghitung kebutuhan air untuk kegiatan ekonomi berbasis lahan, menghitung kebutuhan air total, dan Perhitungan Ambang Batas Penduduk Sistem Grid. Nilai ambang batas adalah hasil pengurangan “ambang Batas Penduduk” dengan Jumlah penduduk sistem grid, menggunakan rumus excel standar pengurangan. Hasilnya jika mempunyai nilai (-) berarti sudah melebihi ambang batas penduduk, jika nilainya (+) maka belum melebihi ambang batas penduduk.

Daya dukung air di Kabupaten Lamongan defisit -233,747,313 sebagaimana tabel 3.15. Namun terdapat beberapa kecamatan yang mengalami surplus diantaranya adalah Kecamatan Kedungpring, Modo, Deket, Karangbinangun, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Sekaran, Maduran, Laren. Berikut kondisi daya dukung air Kabupaten Lamongan:

Tabel 2-5 Daya Dukung Air Kabupaten Lamongan Tahun 2023

Wilayah Kecamatan	Jumlah Penduduk BPS	Ketersediaan Air (M3/Thn)	Jumlah Penduduk Sistem Grid (Jiwa) 150x150 M	Kebutuhan Domestik (M3/Thn)	Kebutuhan Air Untuk Kegiatan Ekonomi Berbasis Lahan (M3/Thn)	Kebutuhan Air Total	Ambang Batas Penduduk Sistem Grid (150x150 M)	Nilai Ambang Batas
Sukorame	21,639	15,102,447	21,639	1,869,610	26,674,179	28,543,789	4,837	-13,441,342
Bluluk	23,097	39,815,927	23,097	1,995,581	40,985,240	42,980,821	19,141	-3,164,894
Ngimbang	49,497	40,336,519	49,497	4,276,541	54,910,749	59,187,290	25,934	-18,850,771
Sambeng	52,824	53,737,122	52,824	4,563,994	54,917,406	59,481,400	45,644	-5,744,278
Mantup	46,906	26,630,290	46,906	4,052,678	58,350,317	62,402,995	2,190	-35,772,705
Kembangbahu	50,613	25,855,335	50,613	4,372,963	62,331,940	66,704,903	-449	-40,849,568
Sugio	63,255	65,088,256	63,255	5,465,232	63,875,412	69,340,644	57,940	-4,252,388
Kedungpring	62,045	71,524,062	62,045	5,360,688	59,163,973	64,524,661	70,794	6,999,401
Modo	51,247	68,788,151	51,247	4,427,741	62,789,504	67,217,245	53,211	1,570,906
Babat	91,285	38,576,477	91,285	7,887,024	45,978,202	53,865,226	72,174	-15,288,749
Pucuk	48,869	33,624,754	48,869	4,222,282	34,453,402	38,675,683	42,555	-5,050,929
Sukodadi	59,592	41,582,049	59,592	5,148,749	40,581,187	45,729,935	54,407	-4,147,887
Lamongan	71,080	34,188,664	71,080	6,141,312	33,388,524	39,529,836	64,404	-5,341,172
Tikung	47,622	24,283,503	47,622	4,114,541	51,661,718	55,776,259	8,256	-31,492,756
Sarirejo	25,597	19,515,185	25,597	2,211,581	46,706,458	48,918,038	-11,157	-29,402,853
Deket	44,057	45,520,743	44,057	3,806,525	41,387,233	45,193,758	44,466	326,985
Glagah	41,347	48,168,038	41,347	3,572,381	47,436,289	51,008,670	37,796	-2,840,632
Karangbinangun	40,943	47,168,056	40,943	3,537,475	42,326,724	45,864,199	42,573	1,303,857
Turi	55,282	53,550,024	55,282	4,776,365	47,795,644	52,572,008	56,505	978,015
Kalitengah	36,549	34,352,096	36,549	3,157,834	29,637,058	32,794,892	38,496	1,557,204
Karanggeneng	44,216	34,152,667	44,216	3,820,262	27,823,596	31,643,858	47,352	2,508,809
Sekaran	44,343	48,210,899	44,343	3,831,235	38,766,403	42,597,638	51,360	5,613,261
Maduran	34,162	30,095,308	34,162	2,951,597	25,427,510	28,379,106	36,307	1,716,202
Laren	51,091	80,115,122	51,091	4,414,262	52,022,088	56,436,350	80,689	23,678,771
Solokuro	49,904	55,111,126	49,904	4,311,706	56,456,060	60,767,766	42,833	-5,656,639
Paciran	99,986	26,523,782	99,986	8,638,790	37,272,553	45,911,344	75,752	-19,387,562
Brondong	78,787	45,392,397	78,787	6,799,334	77,908,662	84,707,996	29,552	-39,315,599
Jumlah	**1,385,835**	**1,147,009,000**	**1,385,835**	**119,728,282**	**1,261,028,031**	**1,380,756,313**	**1,093,560**	**-233,747,313**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025 – 2029

Tabel 2-6 Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Sistem Grid (150x150)	Ketersediaan Air (m3/Tahun)	Kebutuhan Domestik (M3/THN)	Kebutuhan Air untuk Kegiatan Ekonomi Berbasis Lahan (m3/thn)	Kebutuhan Air Total	Ambang Batas Penduduk Sistem Grid (150 x 150 m)	Nilai Ambang Batas
Th 2025	1,394,222	1,394,222	1,135,538,910	120,452,871	1,273,638,311	1,394,091,182	1,104,121	-258,552,272
Th 2026	1,401,608	1,401,608	1,124,068,820	121,090,979	1,286,248,592	1,407,339,571	1,114,614	-283,270,751
Th 2027	1,408,508	1,408,508	1,112,598,730	121,687,100	1,298,858,872	1,420,545,972	1,125,073	-307,947,242
Th 2028	1,414,913	1,414,913	1,101,128,640	122,240,456	1,311,469,152	1,433,709,608	1,135,499	-332,580,968
Th 2029	1,420,809	1,420,809	1,089,658,550	122,749,837	1,324,079,433	1,446,829,269	1,145,890	-357,170,719

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Tahun 2025.

Hasil perhitungan proyeksi daya dukung air Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 Kabupaten Lamongan mengalami defisit air sesuai dokumen KLHS RPJMD 2025-2029 ditabulasikan pada Tabel 2-6. Artinya bahwa Kabupaten Lamongan telah melebihi ambang batas kebutuhan air sehingga Pemerintah Daerah perlu untuk memperhatikan hal tersebut. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara konservasi sumber daya air melalui pembuatan sumur resapan dan biopori, normalisasi embung, waduk dan penampung air lainnya, kerja sama skala regional dalam pemenuhan kebutuhan air bersih (SPAM Mojolagres), serta penerapan efisiensi penggunaan air bersih (hemat air).

B. DAYA DUKUNG PANGAN

Dalam memetakan status daya dukung pangan berbasis jasa ekosistem pangan terdiri dari tiga bagian meliputi pendistribusian penduduk dalam grid, perhitungan kebutuhan pangan, perhitungan ketersediaan bahan pangan, penentuan status daya dukung lingkungan berdasarkan ambang batas dan visualisasi distribusi status daya dukung pangan dalam peta. Status daya dukung pangan di Kabupaten Lamongan surplus dengan nilai status kebutuhan pangan 11.57. Dari seluruh kecamatan yang ada, Kecamatan Paciran memiliki nilai ambang batas penduduk -41,067 artinya bahwa Kecamatan Paciran sudah melebihi ambang batas penduduk maksimal yang dapat ditampung berdasarkan ketersediaan bahan pangan dan status kebutuhan pangan 0,59 berarti sudah melebihi ambang batas kebutuhan bahan pangan. Berikut ini adalah kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Lamongan:

Tabel 2-7 Daya Dukung Pangan Kabupaten Lamongan Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk BPS Jiwa	Jumlah Penduduk Sistem Grid (Jiwa) 150x150 M	Jumlah Kebutuhan Bahan Pangan	Jumlah Ketersediaan Bahan Pangan	Ambang Batas Penduduk	Nilai Ambang Batas Penduduk	Nilai Status Kebutuhan Pangan
Sukorame	21,639	21,639	1,500,665	27,905,000	402,379	380,740	18.60
Bluluk	23,097	23,097	1,601,777	32,290,000	465,609	442,512	20.16
Ngimbang	49,497	49,497	3,432,617	51,038,000	735,948	686,451	14.87
Sambeng	52,824	52,824	3,663,344	41,332,000	595,991	543,167	11.28
Mantup	46,906	46,906	3,252,931	54,373,000	784,037	737,131	16.72
Kembangbahu	50,613	50,613	3,510,012	56,199,000	810,368	759,755	16.01
Sugio	63,255	63,255	4,386,734	81,809,000	1,179,654	1,116,399	18.65
Kedungpring	62,045	62,045	4,302,821	64,902,000	935,862	873,817	15.08
Modo	51,247	51,247	3,553,979	69,149,000	997,102	945,855	19.46
Babat	91,285	91,285	6,330,615	58,556,000	844,355	753,070	9.25
Pucuk	48,869	48,869	3,389,065	43,981,000	634,189	585,320	12.98
Sukodadi	59,592	59,592	4,132,705	54,290,000	782,841	723,249	13.14
Lamongan	71,080	71,080	4,929,398	33,279,000	479,870	408,790	6.75
Tikung	47,622	47,622	3,302,586	53,836,000	776,294	728,672	16.30
Sarirejo	25,597	25,597	1,775,152	51,908,000	748,493	722,896	29.24
Deket	44,057	44,057	3,055,353	26,906,000	387,974	343,917	8.81
Glagah	41,347	41,347	2,867,414	28,855,000	416,078	374,731	10.06
Karangbinangun	40,943	40,943	2,839,397	29,863,000	430,613	389,670	10.52
Turi	55,282	55,282	3,833,807	36,702,000	529,229	473,947	9.57
Kalitengah	36,549	36,549	2,534,673	20,420,000	294,448	257,899	8.06
Karanggeneng	44,216	44,216	3,066,380	30,433,000	438,832	394,616	9.92
Sekaran	44,343	44,343	3,075,187	42,434,000	611,882	567,539	13.80
Maduran	34,162	34,162	2,369,135	36,612,000	527,931	493,769	15.45
Laren	51,091	51,091	3,543,161	55,091,000	794,391	743,300	15.55
Solokuro	49,904	49,904	3,460,842	17,450,000	251,622	201,718	5.04
Paciran	99,986	99,986	6,934,029	4,086,000	58,919	-41,067	0.59
Brondong	78,787	78,787	5,457,568	7,950,000	114,636	35,849	1.46

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Tahun 2025

Tahapan yang dilakukan untuk memetakan status daya dukung pangan berbasis jasa ekosistem pangan terdiri dari tiga bagian meliputi pendistribusian penduduk dalam grid, perhitungan kebutuhan pangan, perhitungan ketersedian bahan pangan, penentuan status daya dukung lingkungan berdasarkan ambang batas dan visualisasi distribusi status daya dukung pangan.

Prediksi daya dukung pangan Kabupaten Lamongan Tahun 2029 adalah surplus dengan nilai status kebutuhan pangan 10.49. Artinya bahwa Kabupaten Lamongan belum melebihi ambang batas kebutuhan pangan. Namun dari tahun ke tahun nilai status kebutuhan pangan di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan dan perlu mendapat perhatian. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan yaitu penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, konservasi tanah dan air dan pemanfaatan teknologi.

Tabel 2-8 Prediksi Daya Dukung Pangan Tahun 2025 - 2029

Tahun	Jumlah Penduduk (BPS)	Jumlah Penduduk Sistem Grid (150x150)	Jumlah Kebutuhan Pangan	Jumlah Ketersediaan Pangan	Ambang Batas Penduduk	Nilai Ambang Batas Penduduk	Nilai Status Kebutuhan Pangan
Th 2025	1,394,222	1,394,222	96,682,947	1,078,299,530	15,548,659	14,154,437	11.15
Th 2026	1,401,608	1,401,608	97,195,132	1,067,183,040	15,388,364	13,986,756	10.98
Th 2027	1,408,508	1,408,508	97,673,616	1,056,066,550	15,228,068	13,819,560	10.81
Th 2028	1,414,913	1,414,913	98,117,773	1,044,950,060	15,067,773	13,652,860	10.65
Th 2029	1,420,809	1,420,809	98,526,634	1,033,833,570	14,907,478	13,486,669	10.49

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Tahun 2025

2.1.2.4 BERKETAHANAN ENERGI, AIR DAN KEMANDIRIAN PANGAN

A. INDEKS KETAHANAN PANGAN

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu negara atau wilayah. Indeks ini menggambarkan seberapa baik suatu daerah dalam menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi penduduknya. Berikut ini merupakan indeks ketahanan pangan di Kabupaten lamongan:

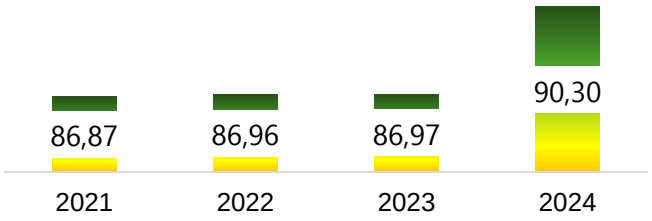

Gambar 2-2 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan
Sumber: DKPP Kabupaten Lamongan, Tahun 2025

Indeks ketahanan pangan Kabupaten Lamongan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat pada setiap tahunnya. Hal ini terlihat pada grafik di atas dimana pada tahun 2021 memiliki capaian sebesar 86,86 kemudian pada tahun 2024 menjadi 90,30. Peningkatan pada indeks ketahanan pangan ini bisa terjadi karena beberapa faktor diantaranya adanya peningkatan kualitas pangan masyarakat dan semakin mudah untuk mendapatkan akses pangan yang layak sehingga kualitas hidupnya bisa semakin meningkat.

2.1.2.5 LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS

A. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep *Environmental Performance Index* (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan

informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter – parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO_3^-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO_2 dan NO_2, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan. Berikut ini merupakan kondisi indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan:



Gambar 2-3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Tahun 2025

Grafik di atas menunjukkan bahwa kondisi IKLH Kabupaten Lamongan selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024) perkembangan dengan kecenderungan yang semakin menurun setiap tahunnya. Penurunan ini terjadi karena terjadi perubahan komposit dalam perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2021 sehingga mempengaruhi skor IKLH di Kabupaten Lamongan.

Dari hasil ekspose IKLH Tahun 2023 adalah 64,27 yang terdiri atas nilai Indeks Kualitas Air (IKA) 56.90, nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) 84,12 dan nilai IKL 40.21, Sedangkan capaian nilai IKLH Kabupaten Lamongan Tahun 2024, nilai IKLH Kabupaten Lamongan adalah 63.33 berada diatas target IKLH Tahun 2024 sebesar 62.08 yang terdiri atas Nilai IKA 57.69, nilai IKU 81.41 dan nilai IKL 39.59. Adapun nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) telah mencapai target tahun 2024 tetapi tidak melampaui capaian Tahun 2023. Penurunan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dari tahun 2023 disebabkan karena hasil penurunan kualitas udara ambien/passive sampler. Parameter NO_2 dan SO_2 cenderung naik

dikawasan peruntukan industri. Untuk nilai IKL Tahun 2023 dan 2024 tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan hasil pembacaan deliniasi peta oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menggambarkan pengurangan luas tutupan lahan karena alih fungsi lahan menjadi kegiatan perhutanan sosial dan adanya kasus kebakaran lahan.

Capaian IKLH pada Gambar 2-3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, telah disandingkan dengan capaian masing-masing komponen IKLH (IKA, IKU, dan IKL) dalam bentuk tabel sebagaimana Tabel 2-8 berikut :

Tabel 2-9 Capaian Komponen IKLH 2021 - 2024

Indikator Kinerja Utama	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
IKLH	64,92	64,70	64,27	63,33
IKA	59,52	58,39	56,90	57,69
IKU	84,04	84,05	84,12	81,41
IKL	38,84	39,76	40,21	39,59

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Tahun 2021-2024

Dalam beberapa tahun terakhir, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lamongan mengalami penurunan, yang sebagian besar disebabkan oleh adanya perubahan formula komposit IKLH secara nasional. Meskipun secara faktual kualitas lingkungan di lapangan belum tentu memburuk, penurunan skor IKLH tetap menjadi alarm penting bagi seluruh pemangku kepentingan.

Penurunan nilai IKLH harus dipahami bukan hanya sebagai catatan statistik, melainkan sebagai cerminan dari masih adanya tantangan dalam pengendalian pencemaran, degradasi lahan, serta tata kelola lingkungan yang perlu ditingkatkan. Hal ini mempertegas pentingnya mempertahankan dan meningkatkan IKLH secara substansial, bukan semata-mata untuk memenuhi target angka, tetapi untuk menjamin keberlangsungan kualitas hidup masyarakat.

Dengan demikian, mempertahankan IKLH bukan hanya bentuk tanggung jawab ekologis, melainkan juga investasi strategis dalam menciptakan kondisi lingkungan yang sehat, produktif, dan

berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Lamongan. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan IKLH mencakup aksi-aksi strategis berikut:

1. Peningkatan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terutama RTH perkotaan, taman, dan lain-lain;
2. Identifikasi kembali data tutupan lahan berbasis GIS dengan berdasarkan data faktual dan deliminasi peta yang ada;
3. Melakukan digitalisasi (GIS) seluruh kegiatan penghijauan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan capaian IKL;
4. Rehabilitasi dan revitalisasi sungai-sungai utama;
5. Peningkatan rehabilitasi lahan kritis dan peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam.

B. TIMBULAN SAMPAH TEROLAH DI FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Lamongan ditabulasikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2-10 Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lamongan

NO	KETERANGAN	NILAI (Ton/tahun)			
		2021	2022	2023	2024
I	**JUMLAH TIMBULAN SAMPAH**	**81,008.1**	**83,240.85**	**201,686.44**	**202,331.91**
II	**JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH**	**10,403.74**	**11,049.32**	**28,393.78**	**29,236.92**
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	341.28	341.28	408.7	386.34
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	103.14	103.14	197.34	0
c	Jumlah Pendauran Ulang Sampah	9,959.32	10,604.9	27,787.74	28,850.58
III	**JUMLAH PENANGANAN SAMPAH**	**23,725**	**21,900**	**73,912.5**	**75,737.5**
f	Pengolahan			912.5	912.5
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)			912.5	912.5
g	Pemrosesan akhir	23,725	21,900	73,000	74,825
IV	**SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)**	**34,128.74**	**32,949.32**	**102,306.28**	**104,974.42**
V	**SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)**	**46,879.36**	**50,291.53**	**99,380.16**	**97,357.49**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, 2025

1.

Tabel 2-11 Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lamongan

NO	KETERANGAN	NILAI (%)			
		2021	2022	2023	2024
1	Persentase sampah terkelola	42.13	39.58	50.73	51.88
a	Persentase pengurangan sampah	12.84	13.27	14.08	14.45
b	Persentase penanganan sampah	29.29	26.31	36.65	37.43
2	Persentase sampah tidak terkelola	57.87	60.42	49.27	48.12

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, 2025

Berikut informasi terkait timbulan sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Lamongan:

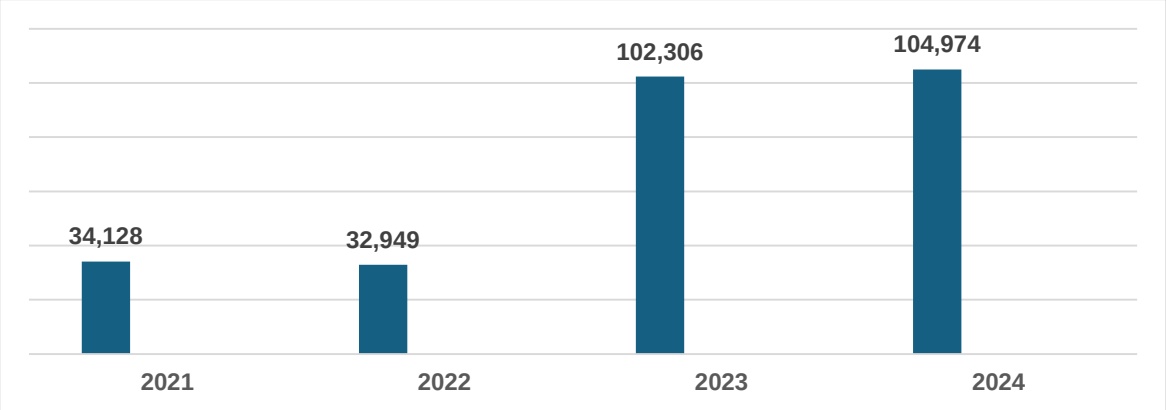

Gambar 2-4 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Lamongan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, 2025

Timbulan sampah terolah fasilitas di Kabupaten Lamongan menunjukkan peningkatan cukup signifikan pada tahun 2023. Terlihat pada grafik di atas pada tahun 2021 sebesar 34.128 ton/tahun, meningkat signifikan pada tahun 2023 menjadi 102.306 ton/tahun dan meningkat menjadi 104.974 ton/tahun. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan pada jumlah timbulan sampah dimana pada tahun 2022 sebesar 83.240,85 ton/tahun, tahun 2023 sebesar 201,686.44 ton/ tahun, dan menjadi 202.331,91 ton/tahun di tahun 2024.

Pada Tahun 2024, capaian penanganan sampah adalah sebesar 75,737.50 ton/tahun atau berkisar 37.43% dan capaian pengurangan sampah adalah sebesar 29,236.92 atau bekisar 14.45%. Sehingga total Timbulan sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah sebesar 104.974,42 ton/tahun atau 51,88%. Kegiatan yang berkontribusi terhadap pengurangan sampah antara lain pembatasan timbulan sampah

melalui kegiatan adiwiyata, pembatasan penggunaan plasik sekali pakai retail modern dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai, pemanfaatan kembali sampah dan daur ulang sampah melalui kegiatan Lamongan Green and Clean, Proklim, Desa Berseri. Sedangkan kegiatan-kegiatan penanganan sampah antara lain pemilahan/pengumpulan melalui kegiatan operasional TPS 3R, bank sampah, TPS, TPST, Rumah Kompos, pengangkutan sampah ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan) melalui operasional gerobak sampah, motor roda tiga, dump truck, arm roll/container dan pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan) melalui operasional dump truck, arm roll/container.

C. PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pengelolaan Limbah B3 ditinjau dari sektor industri, peternakan/budidaya, jasa kepelabuhan, pariwisata. Pengawasan pengelolaan limbah B3 meliputi : izin TPS Limbah B3, Bangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3), pengelolaan lanjutan limbah B3, pencatatan limbah B3, dan pelaporan pengelolaan limbah B3. Pada tahun 2024, kegiatan pengawasan dilakukan pada 19 (sembilan belas) kegiatan/usaha yang wajib dalam Pengelolaan B3 (PB3). Berdasarkan perhitungan sesuai dengan Instrumen Penilaian Ketaatan, kegiatan/usaha yang taat terhadap PB3 berjumlah 12 kegiatan/usaha atau sebesar 63 %, sementara itu kegiatan/usaha yang berstatus kurang taat berjumlah 3 kegiatan/usaha atau sebesar 16 %, dan kegiatan/usaha yang berstatus tidak taat berjumlah 4 kegiatan/usaha atau sebesar 21 %. Prosentase ketaatan kegiatan/usaha terhadap Pengelolaan B3 (PB3) digambarkan pada gambar dibawah ini:

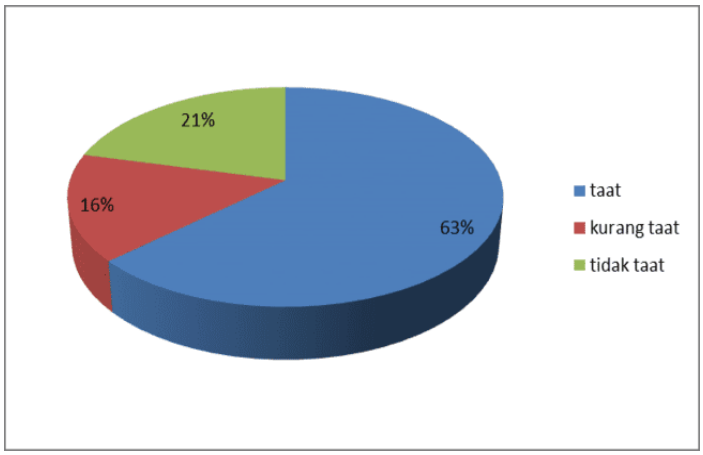

Gambar 2-5 Prosentase Ketaatan Kegiatan/ Usaha terhadap Pengelolaan Limbah B3 Kabupaten Lamongan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, 2025

Kegiatan/ usaha yang berstatus kurang taat PB3 pada umumnya karena Gudang B3 belum memenuhi ketentuan teknis, tidak melakukan pengelolaan lanjutan yang bekerja sama dengan pihak ketiga dan pelaporan PB3. Terkait dengan pelaporan PB3 hampir seluruh kegiatan/ usaha belum rutin melakukan pelaporan PB3, hanya beberapa yang melakukan pelaporan secara rutin.

2.1.2.6 RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

A. INDEKS RISIKO BENCANA

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, wilayah Kabupaten Lamongan memiliki beberapa jenis kerawanan bencana, meliputi Kawasan Rawan Bencana Banjir yang tersebar di seluruh kecamatan, Gelombang Pasang di wilayah pesisir, Kebakaran Hutan di wilayah selatan, Kekeringan, Longsor di sepanjang Daerah Aliran Sungai, serta Gempa Bumi dengan tingkat kerawanan yang bervariasi. Pemetaan risiko ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan mitigasi dan peningkatan resiliensi daerah.

Kerawanan bencana di Kabupaten Lamongan secara rinci ialah banjir seluas 102.730,12 Ha yang tersebar di 17 kecamatan dan kekeringan seluas 35.158,13 Ha di 8 kecamatan, yang memerlukan penguatan sistem

mitigasi struktural dan non-struktural secara berkelanjutan, gelombang Pasang dan Abrasi di Kawasan pesisir di Kecamatan Paciran dan Brondong memiliki kerawanan abrasi seluas 2.059,21 Ha, Kebakaran Hutan dan Lahan Terdapat 32.148,88 Ha kawasan dengan risiko tinggi tersebar di 12 kecamatan mayoritas di wilayah selatan, ancaman kekeringan mencakup area seluas 35.158,13 Ha dengan 8 kecamatan di wilayah selatan memiliki tingkat risiko tinggi, Tanah Longsor seluas 11.233,18 Ha dengan risiko tinggi berada di 8 kecamatan sepanjang aliran sungai.

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kerentanannya suatu wilayah terhadap bencana alam, serta kapasitas daerah tersebut dalam menghadapi dan mengurangi dampak bencana. Indeks ini mempertimbangkan berbagai faktor, seperti frekuensi dan intensitas bencana, kerentanannya terhadap bahaya (seperti gempa bumi, banjir, longsor, atau tsunami), serta kesiapsiagaan dan kapasitas respons pemerintah dan masyarakat terhadap bencana. Menurut surat penyampaian nilai IKD No. 360 / 0312 /208.2/2025, Capaian IRB pada tahun 2024 90,89. IRB dipengaruhi oleh komponen Indeks Bahaya, Indeks Kerentanan dan Indeks Kapasitas.Capaian IRB Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada grafis di bawah ini:

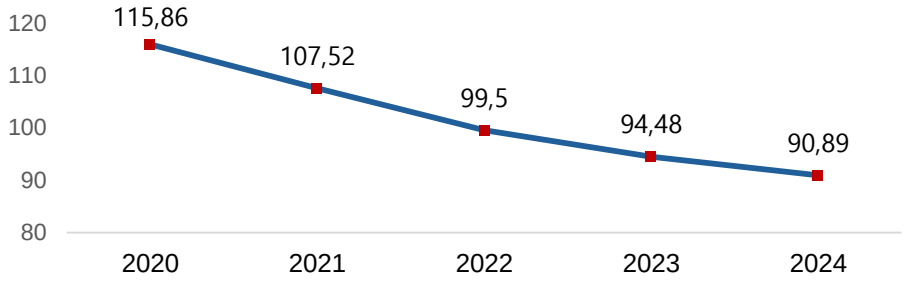

Gambar 2-6 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lamongan
Sumber: BPBD Kabupaten Lamongan, Tahun 2025.

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa indeks risiko bencana Kabupaten Lamongan mengalami kecenderungan dengan perkembangan yang semakin menurun setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa tingkat kerentanan Kabupaten Lamongan terhadap

bencana semakin berkurang dan Kabupaten Lamongan telah berhasil mengurangi risiko bencana melalui berbagai upaya mitigasi. Keberhasilan ini didukung oleh berbagai intervensi konkret, di antaranya:

- Penguatan Kapasitas Masyarakat, melalui pembentukan 138 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Katana) hingga tahun 2024 dan pelatihan untuk 338 relawan penanggulangan bencana yang terdaftar. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan gladi kesiapsiagaan bencana secara rutin dilaksanakan di 27 kecamatan.
- Pembangunan Infrastruktur Mitigasi, seperti pemasangan Sistem Peringatan Dini (EWS) banjir di 6 lokasi strategis dan pembangunan Gudang Logistik penanganan bencana. Upaya ini juga didukung oleh kegiatan normalisasi jaringan irigasi oleh dinas terkait untuk mengurangi dampak banjir.
- Penguatan Kapasitas Pemerintah, yang dibuktikan dengan adanya dokumen perencanaan berbasis risiko seperti Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Lamongan Tahun 2023-2027, yang menjadi acuan utama dalam setiap program penanggulangan bencana.

Meskipun nilai IKD fluktuatif, sebagaimana tercantum dalam subbab 2.1.2 C tentang IKD, upaya peningkatan ketahanan daerah telah dilakukan melalui pembentukan 138 Desa Tangguh Bencana (Destana) dan pelatihan 338 relawan bencana. Upaya ini didukung oleh komitmen pimpinan daerah dan modal sosial masyarakat yang kuat. Namun, terdapat faktor penghambat utama yaitu tingginya ancaman bencana hidrometeorologi serta keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai.

B. PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk turut serta dalam upaya nasional menurunkan emisi gas rumah kaca melalui penguatan

kebijakan berbasis lingkungan, pengelolaan sampah terpadu, perluasan ruang terbuka hijau, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam energi terbarukan. Upaya ini menjadi bagian penting dari strategi pembangunan berkelanjutan Lamongan demi menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas hidup generasi mendatang. Capaian penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2020-2024 ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 2-12 Capaian Penurunan Emisi GRK Tahun 2021-2024 di Kab Lamongan

TAHUN	PENURUNAN EMISI KUMULATIF (ton CO_2 eq)
2020	5,398.94
2021	7,044.93
2022	29,900.93
2023	50,295.89
2024	238,011.16

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan (melalui aplikasi aksara), 2025

C. INDEKS KETAHANAN DAERAH

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana sebuah daerah atau wilayah dapat bertahan dan berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan baik yang bersifat sosial, ekonomi, politik, maupun lingkungan. IKD terdiri dari beberapa faktor seperti ketahanan ekonomi, ketahanan sosial (akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial), serta ketahanan lingkungan (pengelolaan sumber daya alam, dampak perubahan iklim, dan pengelolaan bencana). Capaian IKD sepanjang lima tahun dapat dilihat pada grafis berikut:

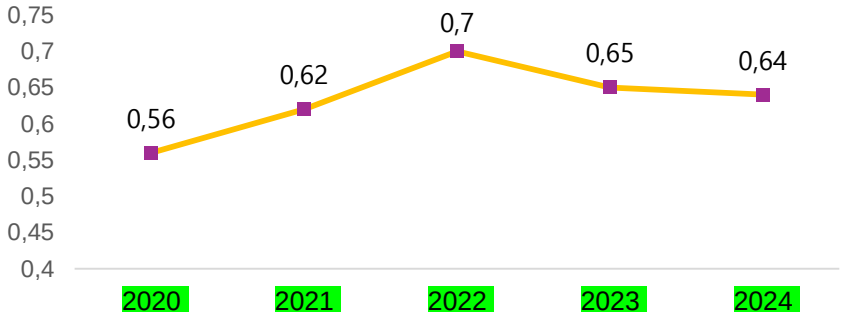

Gambar 2-7 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Lamongan
Sumber: BPBD Kabupaten Lamongan, 2025

Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Lamongan selama 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan upaya untuk menurunkan tingkat kerentanan daerah baik yang bersifat eksternal maupun internal.

Pemerintah Daerah secara konsisten melaksanakan program peningkatan kesiapsiagaan melalui pembentukan 138 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Katana) hingga tahun 2024, sosialisasi dan gladi kebencanaan di 27 kecamatan, serta pemasangan Sistem Peringatan Dini (EWS) banjir di 6 titik lokasi. Perencanaan juga didasarkan pada data risiko melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2023-2027.

Perkembangan IKD ini didorong oleh beberapa faktor pendukung dan sekaligus dihambat oleh tantangan yang ada. Upaya peningkatan ketahanan daerah didukung oleh komitmen pimpinan daerah yang kuat, adanya regulasi daerah tentang penanggulangan bencana, serta modal sosial masyarakat seperti gotong royong yang tinggi. Selain itu, keberadaan 338 relawan penanggulangan bencana yang terdaftar menjadi kekuatan dalam respons kedaruratan. Namun demikian terdapat tantangan utama yang dihadapi adalah ancaman bencana hidrometeorologi yang tinggi seperti banjir dan kekeringan akibat perubahan iklim. Secara internal, masih terdapat keterbatasan sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai, sistem data kebencanaan yang belum terintegrasi, serta tingkat kesadaran dan pemahaman risiko di sebagian masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Ke depan, Pemerintah Daerah terus meningkatkan upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut guna menurunkan tingkat kerentanan daerah secara berkelanjutan

2.1.2.7 DEMOGRAFI

A. JUMLAH DAN STRUKTUR PENDUDUK

Aspek demografis ditinjau dari jumlah penduduk di Kabupaten Lamongan. Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2024

sebanyak 1.367.503 jiwa. Sebanyak 684.425 jiwa atau 50,05% dan 683.503 jiwa atau 49,95% berjenis kelamin perempuan**.** Jika dilihat dari sebarannya**,** jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Sukorame sedangkan jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Paciran**.** Sebanyak 669,64% penduduk Lamongan berumur produktif sekaligus potensi bonus demografi yang akan dikelola dengan baik. Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada grafis di bawah ini:

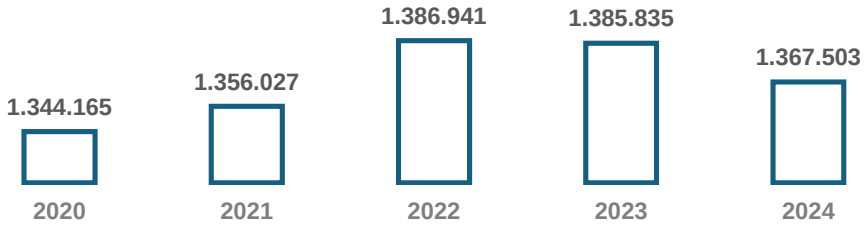

Gambar 2-8 Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2025

B. DISTRIBUSI/ PERSEBARAN PENDUDUK

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lamongan selama periode 5 (lima) tahun dalam kondisi yang fluktuatif. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Pertumbuhan penduduk tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,32% atau sebesar 18.332 jiwa dibandingkan dengan tahun 2023.

Tabel 2-13 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk	1.344.165	1.356.027	1.371.509	1.385.835	1.367.503
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk	13,04%	0,88%	1,14%	1,04%	-1,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2024

C. PROYEKSI PENDUDUK TAHUN 2025-2029

Proyeksi penduduk merupakan salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan memahami kecenderungan pertumbuhan penduduk, Pemerintah Daerah dapat merancang kebijakan

yang tepat dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Adapun penghitungan proyeksi penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2-14 Proyeksi Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029

Komponen	Penduduk Tahun 2024	Proyeksi Penduduk (Ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Penduduk						
Laki-Laki	684.425	692.953	696.579	699.953	703.049	705.876
Perempuan	683.078	693.437	697.643	701.655	705.459	709.037
Total	1.367.503	1.386.390	1.394.222	1.401.608	1.408.508	1.414.913
Rasio Jenis Kelamin Perempuan Terhadap Laki-Laki (%)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kepadatan Penduduk (jiwa / km2)	7,87	7,91	7,96	8,00	8,04	8,08
Komposisi Penduduk (%)						
0-14 Tahun	19,77%	19,70%	19,62%	19,54%	19,45%	19,35%
15-64 Tahun	69,49%	69,12%	68,75%	68,38%	68,03%	67,69%
65 + Tahun	10,74%	11,18%	11,63%	12,08%	12,52%	12,96%
Angka Ketergantungan (%)	43,90%	44,68%	45,46%	46,24%	47,00%	47,74%

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Lamongan 2020-2035 diolah, 2025

Proyeksi penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah penduduk. Dengan rasio jenis kelamin perempuan terhadap laki-laki sebesar 1%, hal ini mencerminkan keseimbangan demografi yang relatif stabil. Kepadatan penduduk mencapai 7,87 jiwa/km^2, yang mengindikasikan adanya potensi peningkatan tekanan terhadap infrastruktur dan sumber daya daerah. Oleh karena itu, kebijakan perencanaan tata ruang dan pembangunan harus diarahkan untuk mengakomodasi pertumbuhan ini secara berkelanjutan.

Sementara itu, angka ketergantungan yang meningkat dari 43,90% di tahun 2020 menjadi 47,74% di tahun 2029 menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia nonproduktif (anak-anak dan lansia) terhadap penduduk usia produktif semakin besar. Peningkatan ini dapat memberikan tantangan dalam aspek sosial dan ekonomi, terutama dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, serta kesempatan kerja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung peningkatan produktivitas penduduk usia kerja, termasuk investasi dalam pendidikan,

pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2.1.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.3.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI

A. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,93%. Sebagai pembanding pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

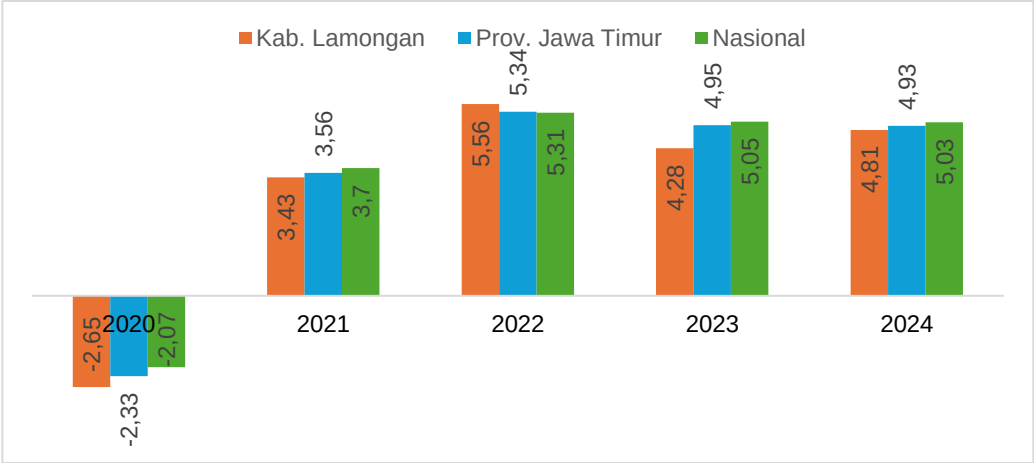

Gambar 2-9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dinamika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pola pemulihan yang sejalan dengan kecenderungan regional dan nasional, meskipun dengan fluktuasi yang mencerminkan berbagai tantangan struktural dan eksternal. Tahun 2020 menjadi titik terendah akibat kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19, di mana Lamongan mengalami penurunan sebesar -2,65%. Kontraksi ini disebabkan oleh gangguan pada sektor-sektor utama, terutama

perdagangan, pertanian, dan industri, yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Pada tahun 2021, ekonomi Lamongan mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 3,43%. Tahun 2022 menjadi momentum pemulihan yang lebih kuat. Namun, tantangan muncul kembali pada tahun 2023, di mana pertumbuhan Lamongan turun dikarenakan adanya faktor penghambat, seperti ketidakstabilan ekonomi global, inflasi, serta tantangan dalam menjaga daya beli masyarakat dan investasi daerah. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Lamongan kembali meningkat menjadi 4,81%. Hal tersebut mengindikasikan adanya perbaikan dalam sektor-sektor utama serta efektivitas program ekonomi daerah dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan. Ke depan, Lamongan perlu memperkuat strategi diversifikasi ekonomi, mendorong investasi sektor unggulan, agar dapat mempertahankan momentum pertumbuhan yang berkelanjutan dan lebih kompetitif.

B. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu. PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku (nominal) maupun harga konstan (riil), serta dapat diukur dari tiga pendekatan, yaitu produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Berikut adalah capaian PDRB Kabupaten Lamongan dalam 5 tahun terakhir:

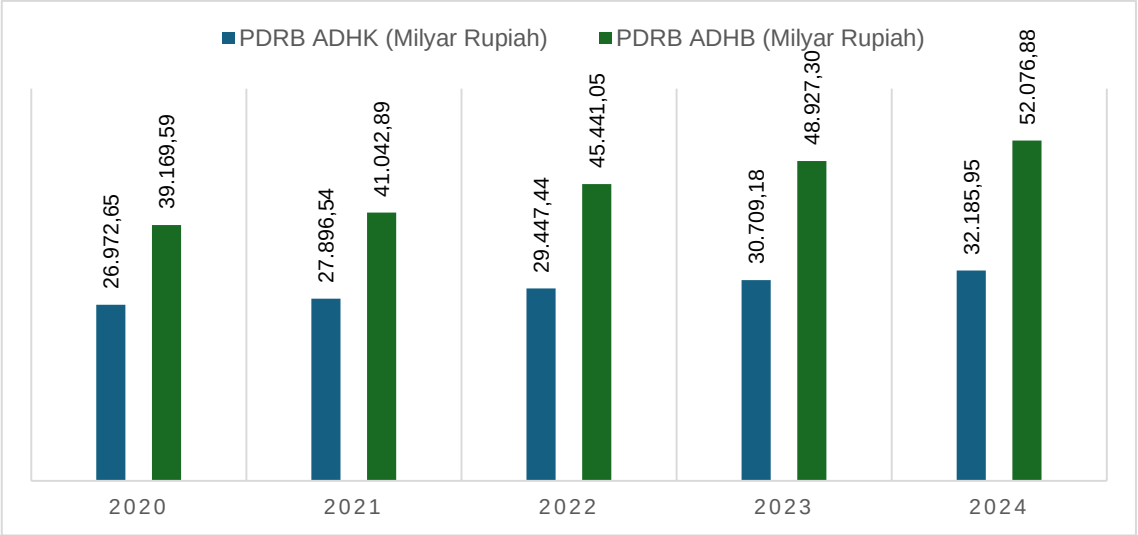

Gambar 2-10 PDRB ADHK dan PDRB ADHB Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2025

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Lamongan mengalami pertumbuhan signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil. Peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi di Kabupaten Lamongan terus berkembang, baik dari sisi produksi maupun konsumsi masyarakat.

Berdasarkan pada besarnya pertumbuhan dan kontribusi yang dimiliki oleh masing-masing sektor PDRB sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya dapat dilakukan analisis *Tipology Klassen* yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektor perekonomian. Melalui analisis *Tipology Klassen*, sektor-sektor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu: sektor prima, sektor potensial, sektor berkembang, dan sektor terbelakang. Berdasarkan data pertumbuhan dan distribusi/kontribusi sektor PDRB, maka dapat diperoleh hasil klasifikasi sektor PDRB Kabupaten Lamongan berdasarkan *Tipology Klassen* sebagaimana gambar dan matriks sebagai berikut:

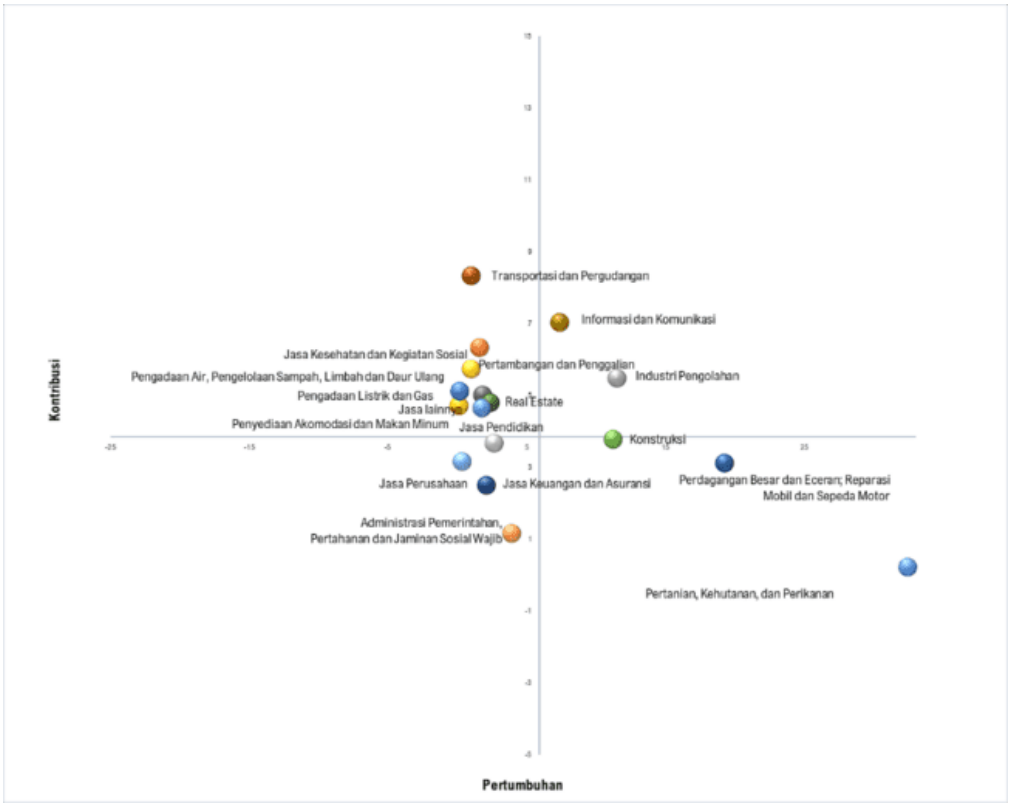

Gambar 2-11 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Lamongan Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan (Hasil Diolah), 2025

Kontribusi Sektoral Laju Pertumbuhan Sektoral	**Kontribusi Besar ($Y_{Sektor} > Y_{PDRB}$)**	**Kontribusi Kecil ($Y_{Sektor} < Y_{PDRB}$)**
Tumbuh Cepat ($r_{Sektor} > r_{PDRB}$)	Sektor Prima (Industri Pengolahan; Informasi dan Komunikasi; Konstruksi)	Sektor Berkembang (Transportasi dan Pergudangan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Pengadaan Listrik dan Gas; Jasa Lainnya; Real Estate; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)
Tumbuh Lambat ($r_{Sektor} < r_{PDRB}$)	Sektor Potensial (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan)	Sektor Terbelakang (Jasa Pendidikan; Jasa Perusahaan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib)

Gambar 2-12 Matriks Tipologi Klassen Sektor PDRB Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan (Hasil Diolah), 2025

Berdasarkan pada gambar dan matriks yang telah disajikan di atas selanjutnya dapat diperoleh hasil bahwa terdapat 3 (tiga) sektor ekonomi

di Kabupaten Lamongan yang termasuk kedalam kategori sektor dengan pertumbuhan tinggi dan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian Kabupaten Lamongan (Sektor Prima), yaitu Industri Pengolahan; Informasi dan Komunikasi; serta Konstruksi. Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan rendah, namun memiliki kontribusi yang tinggi (Sektor Potensial) di Kabupaten Lamongan tercatat sebanyak 2 (dua) sektor, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun memiliki kontribusi yang rendah (Sektor Berkembang) tercatat sebanyak 8 (delapan) sektor meliputi : Transportasi dan Pergudangan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Pengadaan Listrik dan Gas; Real Estate; Jasa Lainnya; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta Jasa Pendidikan. Sektor tersebut termasuk dalam kategori sektor berkembang cepat. Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan rendah dan memiliki kontribusi yang rendah (Sektor Terbelakang) tercatat sebanyak 4 (empat) sektor yang meliputi : Jasa Pendidikan; Jasa Perusahaan; Jasa Keuangan dan Asuransi; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial. Sektor tersebut termasuk dalam kategori relatif tertinggal.

Dari berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Lamongan diperlukan pengembangan terhadap sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis, dimana sektor-sektor yang menjadi basis dapat diketahui melalui Analisis *Location Quotient* (LQ). *Location quotient* menghitung perbandingan share output sektor i di kota atau kabupaten dan *share output* sektor i di provinsi.

Tabel 2-15 Hasil Perhitungan LQ (*Location Quotient*) Sektor Ekonomi di Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	Nilai LQ/ Tahun					LQ 2024	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,031	2,942	2,996	2,908	2,913	2,913	BASIS

No	Lapangan Usaha	Nilai LQ/ Tahun					LQ 2024	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024		
B	Pertambangan dan Penggalian	0,244	0,278	0,327	0,387	0,392	0,392	NON BASIS
C	Industri Pengolahan	0,349	0,362	0,367	0,379	0,387	0,387	NON BASIS
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,278	0,276	0,276	0,242	0,235	0,235	NON BASIS
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,169	1,163	1,145	1,187	1,269	1,269	BASIS
F	Konstruksi	1,176	1,195	1,198	1,231	1,246	1,246	BASIS
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,068	1,062	1,060	1,067	1,073	1,073	BASIS
H	Transportasi dan Pergudangan	0,309	0,330	0,319	0,314	0,322	0,322	NON BASIS
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	0,302	0,302	0,302	0,313	0,321	0,321	NON BASIS
J	Informasi dan Komunikasi	1,438	1,451	1,460	1,485	1,489	1,489	BASIS
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,800	0,791	0,783	0,795	0,812	0,812	NON BASIS
L	Real Estat	1,319	1,346	1,368	1,400	1,441	1,441	BASIS
M,N	Jasa Perusahaan	0,366	0,370	0,362	0,363	0,365	0,365	NON BASIS
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,840	1,850	1,825	1,841	1,809	1,809	BASIS
P	Jasa Pendidikan	1,059	1,072	1,066	1,088	1,110	1,110	BASIS
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,413	1,425	1,401	1,422	1,468	1,468	BASIS
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,345	1,329	1,341	1,367	1,378	1,378	BASIS

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan (Hasil Diolah), 2025

Kabupaten Lamongan secara konsisten pada 5 tahun terakhir (2020 - 2024) terdapat 10 (sepuluh) sektor yang termasuk menjadi sektor basis, dimana sektor tersebut memiliki nilai LQ diatas 1 (> 1). Adapun sektor-sektor tersebut meliputi : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Informasi dan Komunikasi; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa Lainnya. Sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di Lamongan akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah.

Selanjutnya, kinerja dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing suatu daerah dapat dilihat dari dimensi pengukuran produktivitas dengan metode analisis *shift share*. Hasil perhitungan *Shift Share* Sektor Ekonomi di Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2-16 Hasil Perhitungan Shift Share Sektor Ekonomi di Kabupaten Lamongan

No	Lapangan Usaha	Regional Share (Nij)	Proportional Shift (Pij)	Differential Shift (Dij)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.712,371	-1.196,938	-411,253
B	Pertambangan dan Penggalian	66,583	-100,553	-
C	Industri Pengolahan	574,093	11,030	355,377
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,172	6,421	-4,992
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,563	-2,024	2,931
F	Konstruksi	589,108	66,678	187,094
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.042,071	373,678	-8,889
H	Transportasi dan Pergudangan	45,287	71,555	11,599
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	85,055	42,800	30,825
J	Informasi dan Komunikasi	516,737	170,138	92,874
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	111,731	-44,322	4,921
L	Real Estat	131,378	-46,432	63,193
M,N	Jasa Perusahaan	15,033	4,194	-0,937
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	216,073	-125,761	-27,162
P	Jasa Pendidikan	163,381	-67,186	36,645
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	58,274	-7,203	10,829
R,S,T,U	Jasa lainnya	92,425	96,160	11,204
	Total	5.430,336	-747,765	354,259

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan (Hasil Diolah), 2025

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan di atas dapat diketahui bahwa sektor yang memiliki *regional share* terbesar adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1.712,371, sedangkan yang terkecil adalah Pengadaan Listrik dan Gas dengan angka 4,172. Berdasarkan nilai *proportional shift* dan *differential shift* maka dapat dilakukan pengelompokan sektor ekonomi di Kabupaten Lamongan sebagaimana gambar berikut:

KUADRAN I (Sektor dengan Pertumbuhan Cepat dan Berdaya Saing)	**KUADRAN III** (Sektor dengan Pertumbuhan Cepat dan Tidak Berdaya Saing)
• Industri Pengolahan; • Konstruksi; • Transportasi dan Pergudangan; • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;	• Pengadaan Listrik dan Gas; • Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; • Jasa Perusahaan

• Informasi dan Komunikasi; • Jasa Lainnya	
KUADRAN II (Sektor dengan Pertumbuhan Lambat dan Berdaya Saing)	**KUADRAN IV** (Sektor dengan Pertumbuhan Lambat dan Tidak Berdaya Saing)
• Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; • Jasa Keuangan dan Asuransi; • Real Estate; • Jasa Pendidikan; • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; • Pertambangan dan Penggalian; • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Gambar 2-1313 1415Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 Berdasarkan Hasil Analisis Shift Share

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan (Hasil Diolah), 2025

C. ANGKA KEMISKINAN

Angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat dan efektivitas program pembangunan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya Pemerintah Daerah dalam mengentaskan kemiskinan telah menunjukkan berbagai hasil, baik melalui program bantuan sosial, pengembangan ekonomi lokal, maupun peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Meskipun demikian, tantangan masih ada, terutama dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang memperburuk kondisi ekonomi dan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah terus berfokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan UMKM, serta meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Lamongan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lamongan menunjukkan kecenderungan menurun dari 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020,

persentase penduduk miskin mencapai 13,85% dan mengalami penurunan menjadi 12,16% pada tahun 2024.

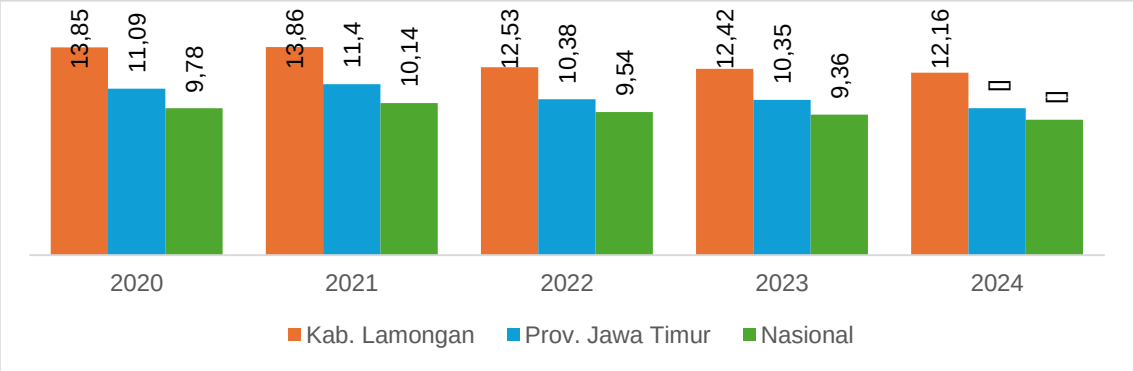

Gambar 2-1416 Angka Kemiskinan Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2025

Jika dibandingkan dengan kecenderungan kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan nasional, angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan dari tahun 2020 hingga 2024 masih di atas rata-rata Jawa Timur maupun nasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Lamongan masih menghadapi tantangan struktural dalam mengatasi kemiskinan, yakni keterbatasan lapangan pekerjaan berkualitas dan tingginya ketergantungan pada sektor pertanian tradisional.

D. PDRB PER KAPITA

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Lamongan merupakan indikator penting yang menggambarkan kontribusi dan kemampuan setiap individu dalam memutar roda perekonomian daerah. Tingginya PDRB per kapita mencerminkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Adapun capaian PDRB Per Kapita Kabupaten Lamongan tahun 2020-2024 sebagai berikut:

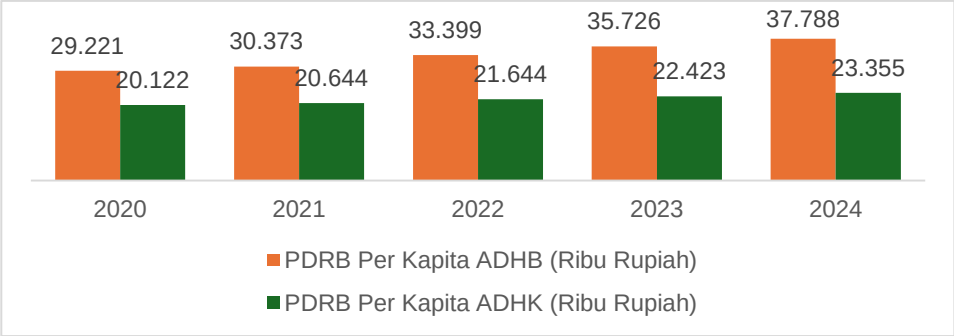

Gambar 2-15171819 20PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2025

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Lamongan, baik dalam harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK), menunjukkan kecenderungan peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang stabil serta adanya inflasi yang turut mempengaruhi kenaikan nilai nominal ekonomi daerah. Kecenderungan positif ini menandakan adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 serta penguatan sektor-sektor produktif.

E. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menandakan adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, kurangnya peluang kerja, serta kesenjangan keterampilan di pasar kerja. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lamongan tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui grafik berikut:

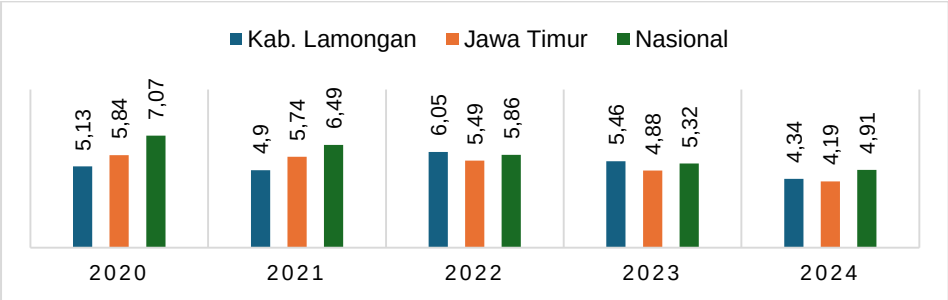

Gambar 2-1621 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2025

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Lamongan menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif selama periode 2020-2024,

namun secara keseluruhan mengalami penurunan. Dibandingkan dengan TPT Jawa Timur, Kabupaten Lamongan mengalami perbedaan pola. Pada tahun 2020-2021, TPT Lamongan masih lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi, menunjukkan kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik. Namun, sejak tahun 2022 hingga 2024, TPT Lamongan berada di atas TPT Jawa Timur, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam penciptaan lapangan kerja. Meski demikian, jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional, TPT Lamongan masih lebih baik karena tetap berada di bawah rata-rata nasional sepanjang periode tersebut.

Untuk menjaga kecenderungan positif ini, diperlukan kebijakan yang lebih proaktif dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperkuat sektor ekonomi berbasis teknologi dan inovasi, serta mendorong investasi di sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak.

F. INDEKS GINI

Gini rasio digunakan sebagai koefisien/alat dalam pengukuran tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk dalam suatu wilayah. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Tingkat ketimpangan di Kabupaten Lamongan, yang diukur melalui Gini Rasio, menunjukkan pola yang fluktuatif selama periode 2020-2024. Fluktuasi ini mencerminkan adanya dinamika dalam distribusi pendapatan di Kabupaten Lamongan, di mana ketimpangan sempat menurun di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi, namun kembali mengalami sedikit peningkatan seiring dengan perubahan struktur ekonomi dan distribusi kesejahteraan.

Adapun capaian indeks gini Kabupaten Lamongan tahun 2020-2024 sebagai berikut:

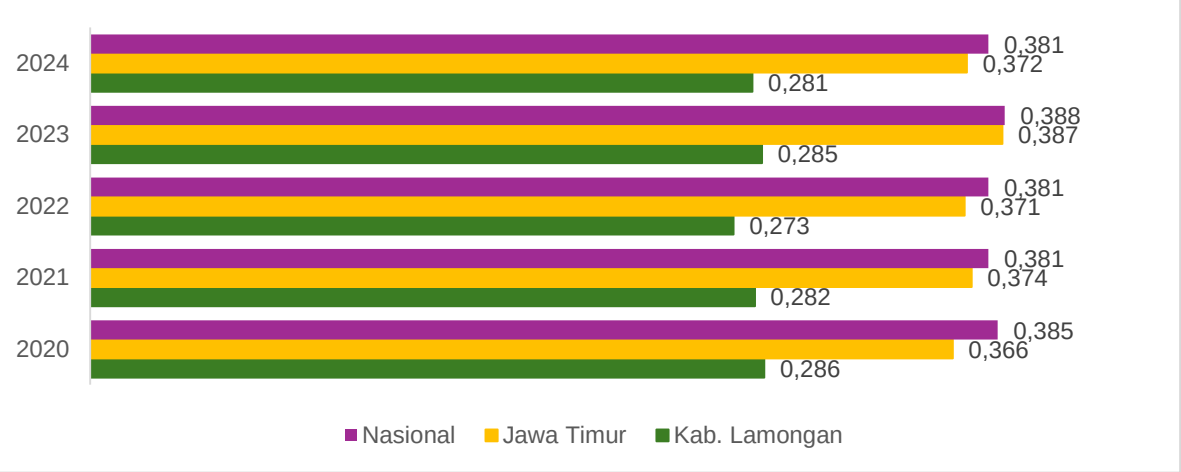

Gambar 2-22 Perbandingan Indeks Gini Rasio Kab. Lamongan, Provinsi, Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2025

Jika dibandingkan dengan tingkat ketimpangan di Jawa Timur dan nasional, Gini Rasio Kabupaten Lamongan masih jauh lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di Lamongan relatif lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun nasional.

G. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator pembangunan yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat dalam mendapatkan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah maka masyarakat di daerah tersebut semakin baik kesejahteraannya karena memiliki kesehatan yang baik, pendidikan yang memadai serta taraf hidup yang layak.Capaian IPM Kabupaten Lamongan secara rinci dapat dilihat melalui grafik berikut:

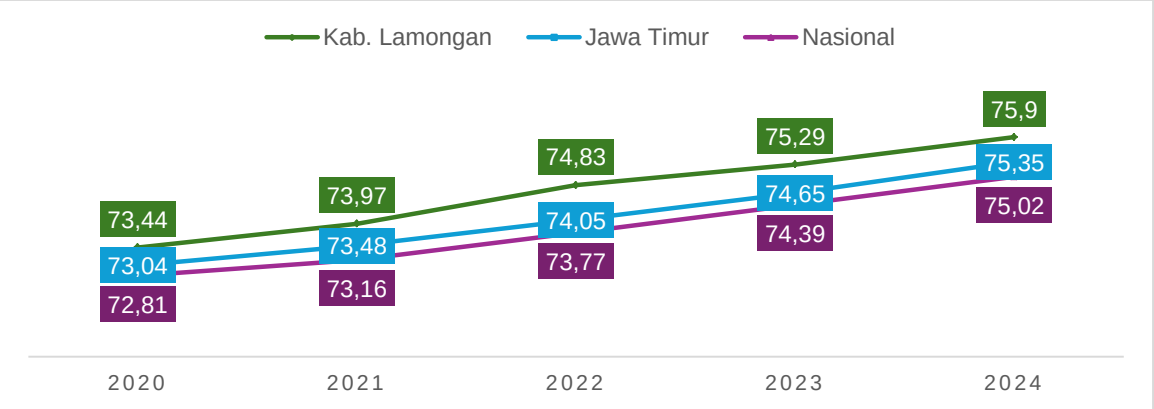

Gambar 2-23 Perbandingan Capaian IPM Kab. Lamongan, Provinsi, Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Capaian IPM Kabupaten Lamongan cenderung mengalami peningkatan dari 73,44 pada tahun 2020 menjadi 75,9 pada tahun 2024. Kecenderungan positif ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam tiga dimensi utama IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Keberhasilan Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan IPM bahkan melampaui capaian provinsi Jawa Timur dan nasional, yang menunjukkan bahwa pembangunan manusia di daerah ini berkembang lebih cepat dibandingkan rata-rata wilayah lainnya. Capaian ini memberikan dampak positif terhadap daya saing daerah, peluang investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.3.2 KESEHATAN UNTUK SEMUA

A. UMUR HARAPAN HIDUP

Umur Harapan Hidup (UHH) atau Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata lama hidup seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa pola mortalitas (kematian) saat ini akan terus berlaku sepanjang hidupnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. Semakin baik kualitas kesehatan penduduk di suatu daerah, yang mencerminkan akses terhadap layanan kesehatan, pola hidup sehat, serta tingkat kesejahteraan masyarakat.

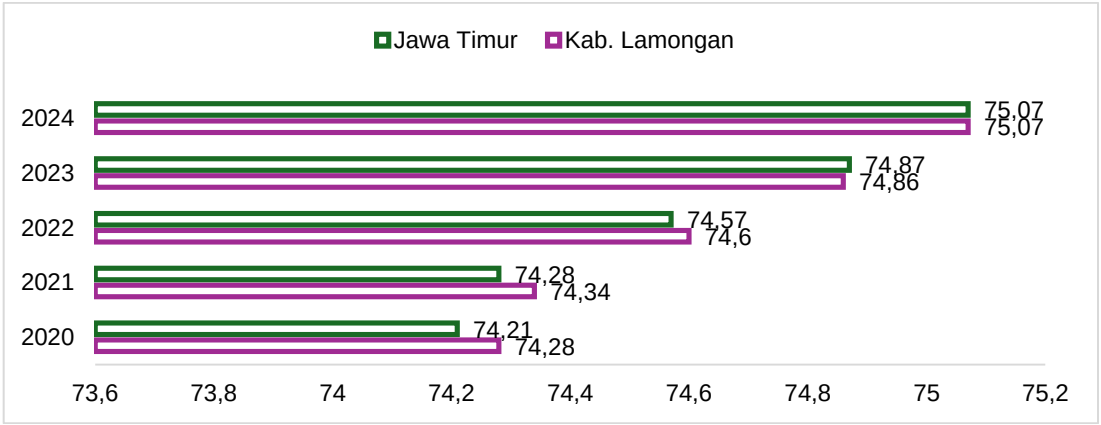

Gambar 2-24 Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Lamongan dan Provinsi Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2025

Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Lamongan menunjukkan kecenderungan peningkatan dari 74,28 pada tahun 2020 menjadi 75,07

pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan Umur harapan hidup rata-rata Provinsi Jawa Timur, capaiannya hampir menyamai. Untuk terus meningkatkan angka harapan hidup, perlu ada fokus lebih lanjut pada pemerataan akses kesehatan, peningkatan kesadaran hidup sehat, serta penguatan program kesehatan preventif.

2.1.3.3 PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA

A. RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. Indikator ini mencerminkan tingkat pendidikan yang telah diselesaikan oleh penduduk suatu wilayah dan menjadi salah satu komponen utama dalam perhitungan Indeks Pendidikan. Semakin tinggi angka RLS, semakin baik tingkat pendidikan penduduk, yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

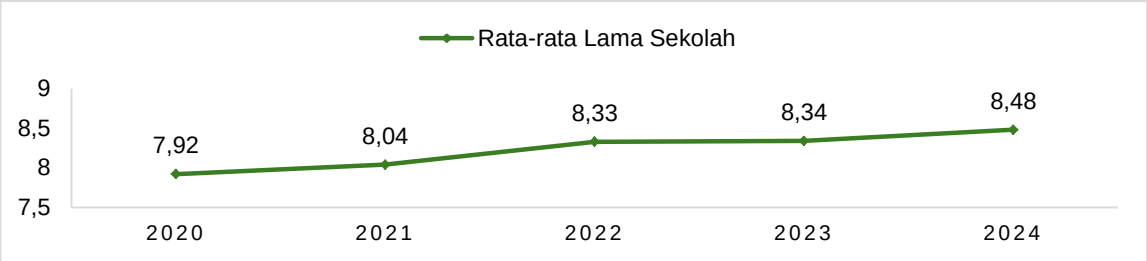

Gambar 2-25 Tingkat Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 2025

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lamongan menunjukkan kecenderungan peningkatan dari 7,92 tahun pada 2020 menjadi 8,48 tahun pada 2024. Berbagai program peningkatan akses ke sekolah, beasiswa, serta kebijakan daerah yang mendukung peningkatan angka partisipasi sekolah belum mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah setara dengan program wajib belajar 13 tahun.

B. HARAPAN LAMA SEKOLAH

Harapan Lama Sekolah (HLS) untuk mengukur akses dan peluang pendidikan yang tersedia bagi penduduk di suatu wilayah. Semakin tinggi

angka HLS, semakin besar peluang anak-anak di daerah tersebut untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Capaian HLS di Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

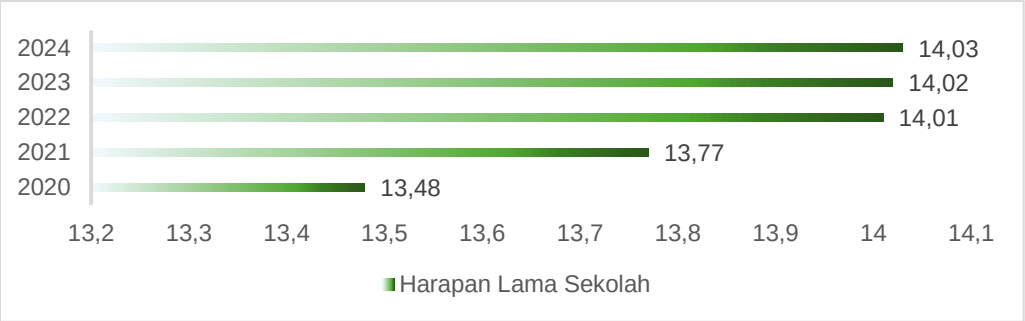

Gambar 2-26 Tingkat Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2025

Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan kecenderungan peningkatan dari 13,48 tahun pada 2020 menjadi 14,03 tahun pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan semakin besarnya peluang bagi anak-anak di Lamongan untuk mengenyam pendidikan formal yang lebih lama. Meskipun mengalami peningkatan, capaian 14,03 tahun masih menunjukkan bahwa setara jenjang Diploma I, sehingga perlu didorong melalui program beasiswa.

C. INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan literasi di suatu daerah berdasarkan akses, fasilitas, dan aktivitas literasi masyarakat. IPLM tidak hanya mencakup kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga aspek literasi digital, literasi finansial, dan literasi informasi, yang menjadi bagian penting dalam kehidupan modern.

Tabel 2-17 Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2024

No.	Indikator	2022	2023	2024
1.	IPLM Kabupaten Lamongan	66,12	63,86	65,76
2.	IPLM Provinsi Jawa Timur	74,73	75,18	78,60

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lamongan, 2025

Capaian IPLM mengalami kecenderungan yang fluktuatif namun tetap menunjukkan peningkatan secara keseluruhan dalam tiga tahun

terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya upaya pemerintah dalam peningkatan fasilitas literasi maupun program pemberdayaan masyarakat dalam membaca dan menulis pada lingkungan pendidikan.

2.1.3.4 BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU

A. INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah indikator yang mengukur perkembangan kebudayaan di suatu wilayah berdasarkan berbagai aspek, seperti ekonomi budaya, ketahanan budaya, ekspresi budaya, warisan budaya, serta literasi dan kreativitas masyarakat. Peningkatan IPK mencerminkan kemajuan dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal, yang berkontribusi pada pembangunan sosial, ekonomi kreatif, serta peningkatan daya saing daerah.

Tabel 2-18 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2024

No.	Indikator	2022	2023	2024
1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,99	58,82	67,64

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan, 2025

Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Lamongan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang sangat positif. Hal ini mencerminkan adanya penguatan dalam berbagai aspek kebudayaan, termasuk pelestarian warisan budaya, penguatan ekonomi kreatif, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan. Selain itu capaian tersebut berdampak pada meningkatnya daya saing daerah dalam sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta peningkatan kualitas pendidikan berbasis kebudayaan.

2.1.3.5 KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF

A. INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indikator yang mengukur perkembangan pemuda dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, partisipasi ekonomi, kepemimpinan, dan inklusi sosial. Indeks ini menggambarkan sejauh mana pemuda memiliki akses

terhadap peluang yang memungkinkan mereka berkembang secara optimal dan berkontribusi terhadap pembangunan, sekaligus mencerminkan kualitas kebijakan pemerintah dalam mendukung pemberdayaan pemuda sebagai aset pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 2-19 Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2024

No.	Indikator	2022	2023	2024
1.	Indeks Pembangunan Pemuda	59,17	59,50	61,33

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan, 2025

Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Lamongan menunjukkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek yang mendukung perkembangan pemuda. Kenaikan ini mencerminkan semakin baiknya akses pemuda terhadap pendidikan, kesehatan, partisipasi ekonomi, dan keterlibatan sosial di Lamongan. Berbagai program pemberdayaan pemuda, baik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah tampaknya berhasil meningkatkan kualitas hidup pemuda serta membuka lebih banyak peluang bagi mereka untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan.

B. INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan berperan aktif dalam bidang ekonomi dan politik.

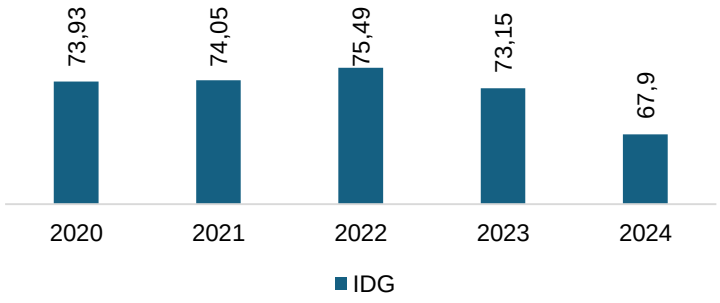

Gambar 2-27 Capaian IDG Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2025

Capaian tersebut juga menandakan adanya peningkatan aktivitas perempuan dalam bidang perekonomian dan pendidikan tinggi sehingga etos kerja perempuan juga meningkat. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam upaya mendorong perempuan untuk berperan aktif

dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintah Daerah perlu menguatkan kebijakan, program, pelatihan, pendidikan, dan dukungan sosial dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik.

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.4.1 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

A. ANGKA KETERGANTUNGAN

Angka Ketergantungan digunakan untuk menggambarkan beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non-produktif. Angka ini berfungsi untuk menilai kapasitas produktivitas ekonomi penduduk dan potensi tekanan sosial ekonomi yang mungkin muncul akibat ketidakseimbangan struktur usia. Semakin rendah angka ketergantungan, semakin kecil beban yang ditanggung oleh kelompok usia produktif, sehingga memberi peluang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan, efisiensi pembangunan, dan perencanaan program lintas sektor.

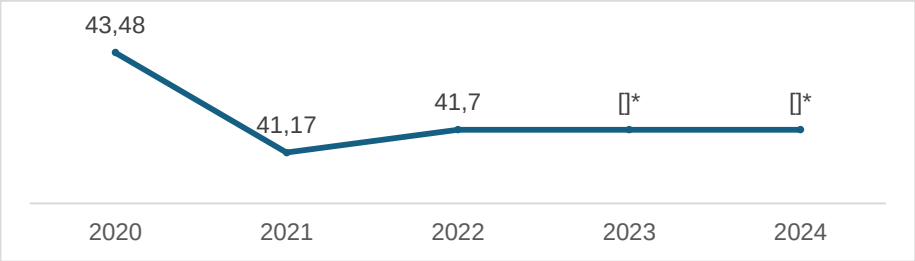

Gambar 2-28 Angka Ketergantungan Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2025
Keterangan(*): Angka Sementara

Capaian di atas menunjukkan bahwa struktur penduduk Lamongan cenderung seimbang. Stabilitas ini menjadi sinyal positif bagi potensi ekonomi daerah, khususnya dalam mendorong produktivitas sektor-sektor strategis dalam menopang pembangunan.

2.1.4.2 IPTEK, INOVASI DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI

A. RASIO PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN

Sektor industri pengolahan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan sektor industri tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja, mendorong inovasi, serta memperkuat keterkaitan antar sektor ekonomi lainnya.

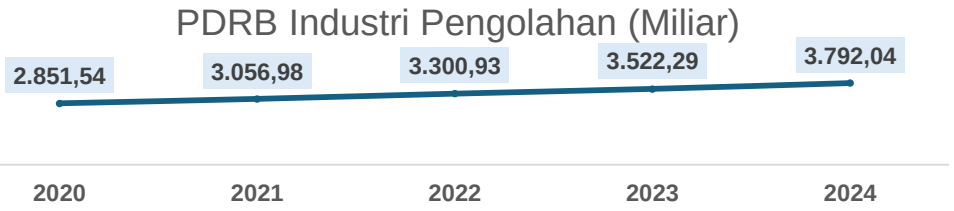

Gambar 2-29 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Lamongan 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Lamongan, 2025

PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Lamongan tahun 2020–2024, terjadi kecenderungan peningkatan yang konsisten. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan positif sektor industri pengolahan di Lamongan, yang ditopang oleh berkembangnya sektor UMKM, agroindustri, serta investasi industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Belum meratanya dampak industri terhadap penciptaan lapangan kerja lokal, minimnya transfer teknologi ke pelaku industri kecil, serta perlunya penguatan daya saing produk lokal di pasar regional dan nasional menjadi tantangan kedepan.

B. RASIO PDRB AKOMODASI MAKAN DAN MINUM

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Akomodasi, Makan, dan Minum merupakan indikator yang dapat menggambarkan pertumbuhan dan dinamika ekonomi kreatif serta pariwisata lokal di daerah. Capaian PDRB sektor ini mencerminkan kontribusi sektor jasa konsumsi terhadap perekonomian daerah, sekaligus mengindikasikan perkembangan aktivitas usaha masyarakat, pergerakan wisatawan, dan peningkatan daya beli.



Gambar 2-30 Capaian PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2025

Nilai PDRB sektor Akomodasi, Makan, dan Minum menunjukkan pertumbuhan yang positif selama periode 2020–2024. Peningkatan nilai tambah di sektor ini tidak hanya berdampak langsung pada pendapatan daerah, tetapi juga turut memperluas kesempatan kerja, khususnya di sektor informal dan UMKM.

Namun kedepan perlu memberikan perhatian agar pelaku usaha kecil menengah bisa mendapatkan akses pembiayaan, keterampilan manajemen usaha dan peningkatan promosi dan digitalisasi usaha. Pengembangan potensi wisata yang menjadi pendorong utama sektor makan dan minum tidak boleh bersifat sporadis harus terintegrasi secara optimal.

C. RASIO KEWIRAUSAHAAN

Rasio kewirausahaan merupakan indikator strategis dalam mengukur tingkat partisipasi penduduk dalam kegiatan ekonomi berbasis usaha mandiri, serta mencerminkan dinamika pertumbuhan sektor informal dan UMKM di suatu daerah.

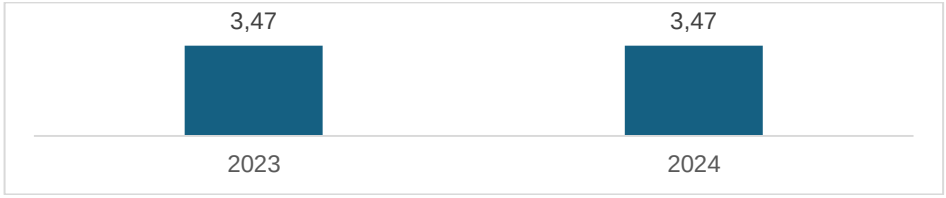

Gambar 2-31 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Lamongan Tahun 2023-2024

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamongan , 2025

Rasio kewirausahaan pada tahun 2023 sama dengan tahun 2024, angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah wirausaha di Lamongan belum mengalami percepatan yang signifikan. Pemerintah Daerah ke depan perlu menguatkan kebijakan inkubasi bisnis,

memperluas akses pembiayaan mikro dan ultra mikro, serta membangun sinergi antara dunia pendidikan, dunia usaha, dan komunitas dalam menciptakan generasi wirausaha yang inovatif.

D. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) indikator yang menggambarkan keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi, baik yang sudah bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Tingginya TPAK menunjukkan potensi ekonomi produktif masyarakat yang dapat dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menekan angka pengangguran secara berkelanjutan.

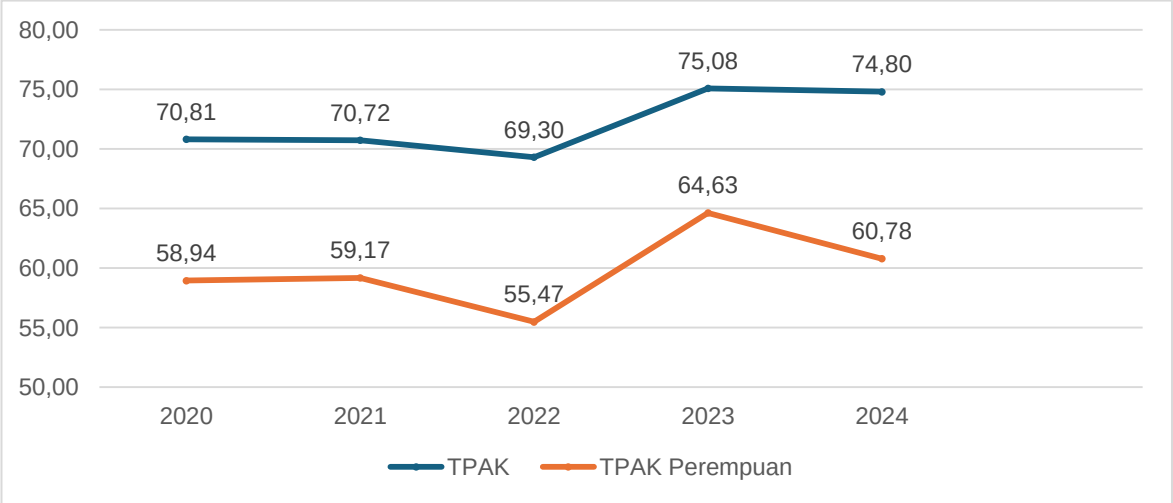

Gambar 2-32 TPAK dan TPAK Perempuan Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2025

Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan mengalami fluktuasi dalam periode 2020–2024. Kenaikan menandakan adanya peningkatan partisipasi masyarakat usia kerja dalam aktivitas ekonomi, yang kemungkinan besar dipicu oleh pemulihan pasca pandemi, tumbuhnya sektor informal dan UMKM, serta meningkatnya kegiatan produktif di sektor industri dan jasa.

E. INDEKS INOVASI DAERAH

Tingkat inovasi daerah merupakan indikator yang menggambarkan kapasitas dan komitmen Pemerintah Daerah dalam menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan berbagai inovasi kebijakan, tata

kelola, serta pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat. Inovasi dapat mengakselerasi reformasi birokrasi, mendorong efisiensi pelayanan, serta meningkatkan daya saing daerah. Semakin tinggi nilai inovasi, maka semakin adaptif dan responsif pemerintah daerah dalam menjawab tantangan pembangunan melalui pendekatan yang kolaboratif, dan berbasis teknologi.

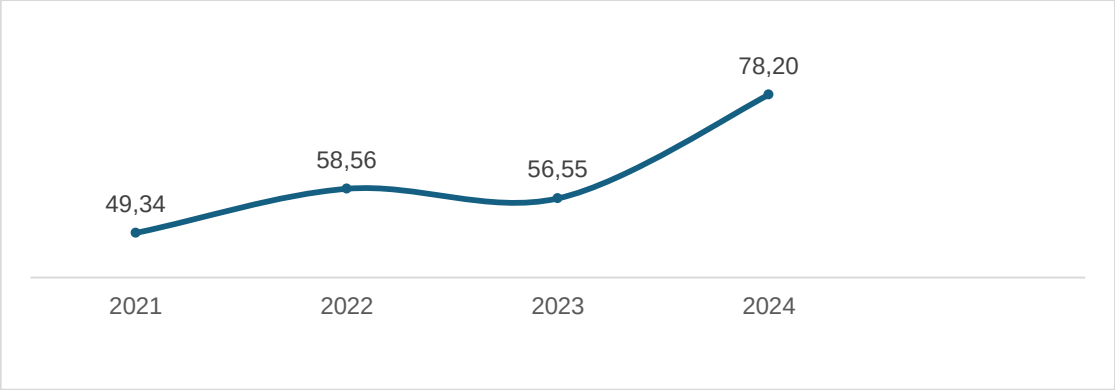

Gambar 2-33 Tingkat Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2024
Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Capaian Tingkat Inovasi Daerah menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2021–2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya serius dari Pemerintah Daerah dalam memperkuat budaya inovasi.

F. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Sebagai upaya dalam peningkatan kualitas pembangunan, saat ini daerah bukan hanya fokus pada pelaksanaan pembangunan saja, akan tetapi penting bagi daerah untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai referensi dalam perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan penting yang diambil dalam perencanaan pembangunan seharusnya didasarkan pada hasil riset dan pengembangan IPTEK.

Ekosistem Riset yang mendukung daya saing daerah dapat dijabarkan dalam dokumen RIP-JPID, melalui Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah, Penataan Basis Data Riset dan Inovasi, Pengembangan Infrastruktur Dasar Riset dan Inovasi, Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi, Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Penguatan Kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah, Penyediaan Sarana Pendukung Riset dan Inovasi Di Daerah, Peningkatan

Implementasi dan Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi, sebagai upaya peningkatan daya saing daerah sesuai dengan perencanaan.

2.1.4.3 INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL

A. MODAL TETAP BRUTO

Modal Tetap Bruto (MTB) merupakan salah satu indikator makroekonomi yang menggambarkan tingkat investasi yang dilakukan dalam bentuk aset tetap seperti bangunan, infrastruktur, mesin, dan peralatan dalam suatu wilayah. Nilai MTB menjadi parameter penting untuk melihat dinamika pertumbuhan ekonomi jangka menengah, kapasitas produksi daerah, serta prospek penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas.

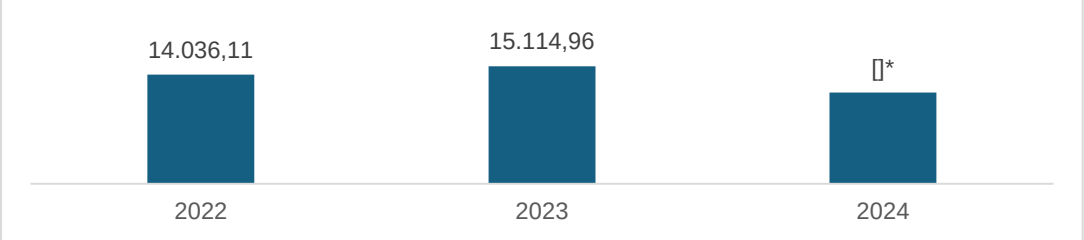

Gambar 2-34 Modal Tetap Bruto Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2024
Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2025
Keterangan(*): Angka Sementara

Nilai Modal Tetap Bruto mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Kedepan Pemerintah Daerah perlu mendorong pemenuhan dan pemerataan akses infrastruktur pendukung investasi, optimalisasi promosi potensi daerah serta mendorong agar investasi yang masuk berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di sektor-sektor prioritas seperti pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata.

B. EKSPOR BARANG DAN JASA

Ekspor barang dan jasa merupakan indikator dalam mengukur daya saing dan keterlibatan ekonomi daerah dalam pasar regional, nasional, maupun global. Peningkatan nilai ekspor secara konsisten menandakan kemajuan dalam industrialisasi, penguatan UMKM ekspor,

serta keberhasilan program hilirisasi dan promosi perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

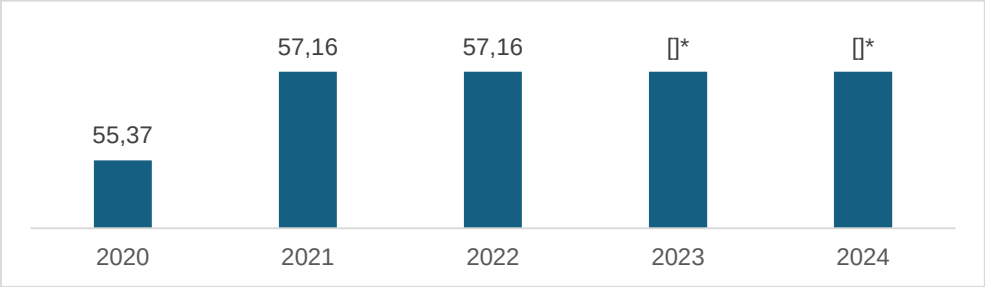

Gambar 2-35 Capaian Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Lamongan 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2025
Keterangan(*): Angka Sementara

Capaian ekspor barang dan jasa kecenderungandnya mengalami stagnasi hingga tahun 2024. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan inovasi produk, kurangnya diversifikasi pasar, serta kendala logistik dan sertifikasi ekspor.

2.1.4.4 PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

A. INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR

Indeks kepuasan layanan infrastruktur merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas sarana fisik yang mendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan konektivitas dan produktivitas wilayah, tetapi juga mempercepat pelayanan publik, pemerataan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Variabel/dimensi pengukuran indeks kepuasan layanan infrastruktur antara lain: (1) jalan dan jembatan meliputi jalan Kabupaten, jalan Desa, jembatan, jalan pertanian; (2) Infrastruktur air bersih meliputi akses layanan air bersih; (3) Infrastruktur perumahan meliputi drainase, jaringan listrik, jaringan internet/telepon, pengelolaan limbah; (4) Infrastruktur ruang publik meliputi pedestrian, ruang terbuka hijau, sarana olahraga; (5) Infrastruktur pelayanan publik meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan pasar; (6) Infrastruktur irigasi meliputi irigasi primer,

irigasi sekunder, irigasi tersier, irigasi air tanah, waduk, rawa, embung; dan (7) Sarana dan prasarana perhubungan meliputi halte dan sarana ojek, terminal, PJU, rambu, marka jalan, fasilitas parkir.

Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak 2022. Lonjakan ini mencerminkan adanya percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah, termasuk penguatan akses jalan, jaringan irigasi, serta pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi dan pelayanan publik. Pemerintah Daerah perlu memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap kebutuhan lokal, mendorong kolaborasi pendanaan dengan sektor swasta, serta mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan tata ruang dan pengembangan wilayah berbasis potensi unggulan daerah. Perkembangan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kabupaten Lamongan dapat dilihat grafik di bawah ini:

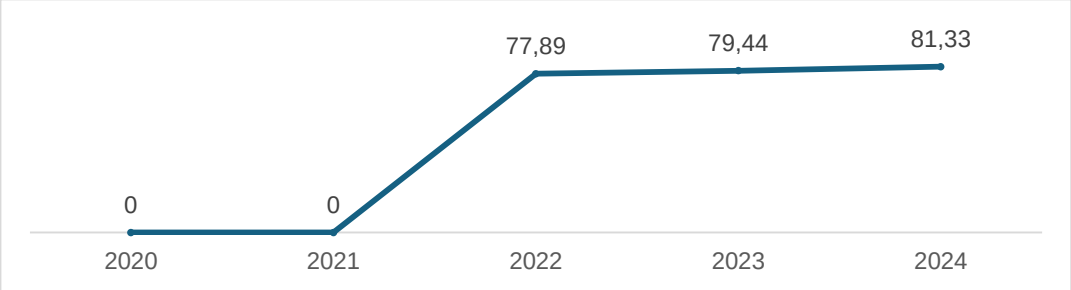

Gambar 2-36 Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lamongan, 2025

B. RUMAH TANGGA DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK

Akses terhadap hunian layak merupakan salah satu indikator kesejahteraan dasar masyarakat dan menjadi bagian dari hak atas tempat tinggal yang aman, sehat, dan manusiawi. Ketersediaan hunian layak yang merata juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan pembangunan kawasan yang tertata.

Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:

a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak mengukur pemenuhan standar dasar sebuah tempat tinggal. Sebuah hunian dikategorikan layak apabila memenuhi beberapa kriteria utama, meliputi: (1) Ketahanan Bangunan (atap, dinding, dan lantai terbuat dari bahan yang kuat), (2) Luas Lantai per Kapita yang mencukupi(>7,2 m^2) , serta (3) Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak. Dengan rumus perhitungan (Σ unit rumah dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan / Σ rumah di seluruh kabupaten Lamongan x 100%)

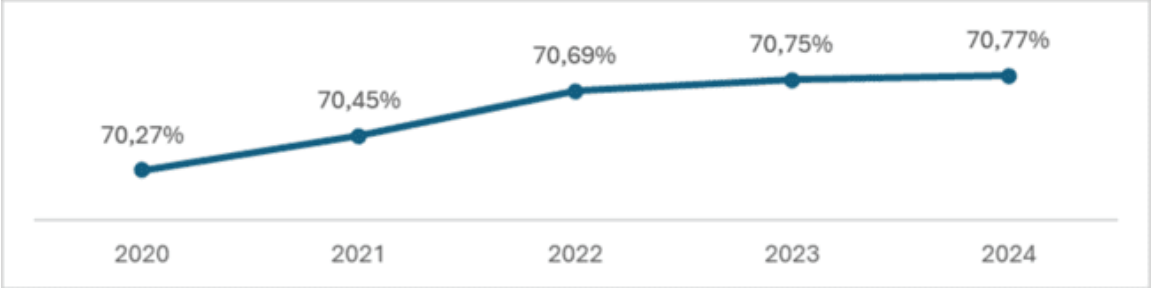

Gambar 2-37 Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Lamongan 2020-2024

Sumber: DPRKPCK Kabupaten Lamongan, 2025

Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, terjangkau dan berkelanjutan pada tahun 2024 mencapai 214.656 rumah atau sebesar 70,77%. Kedepan perlu memperkuat kebijakan perumahan berbasis komunitas, mengembangkan skema pembiayaan inovatif, serta memperluas cakupan intervensi program perumahan dan permukiman yang tersedia sarana dan prasarana dasar perumahan seperti air bersih, sanitasi dan ramah lingkungan.

C. JUMLAH DESA MANDIRI

Jumlah desa mandiri merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian desa dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Peningkatan jumlah desa mandiri mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan desa berbasis potensi lokal, memperkuat tata kelola pemerintahan desa, serta meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara berkelanjutan.

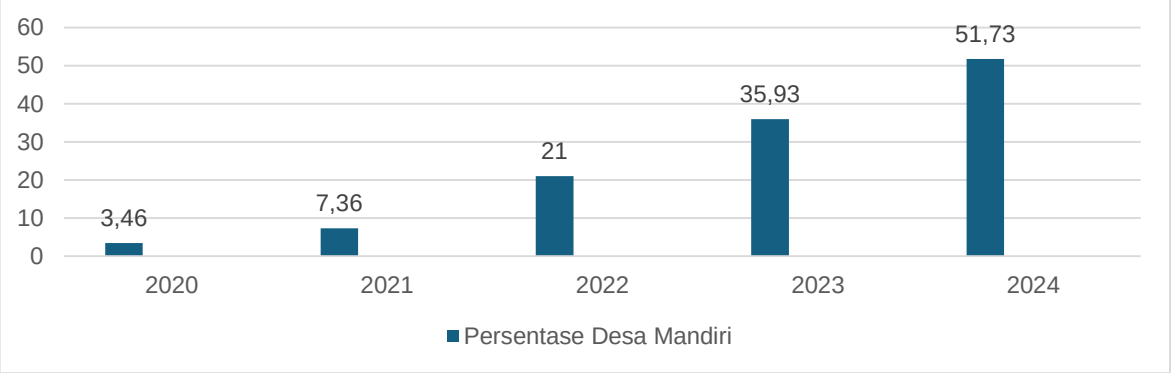

Gambar 2-38 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Lamongan 2020-2024
Sumber: DPMD Kabupaten Lamongan, 2025

Lonjakan ini menandakan keberhasilan berbagai intervensi program pembangunan dan pemberdayaan desa, termasuk penguatan kelembagaan, pemanfaatan dana desa, digitalisasi layanan. Namun demikian isu regenerasi petani, urbanisasi penduduk muda, dan keterbatasan inovasi berbasis potensi lokal masih menjadi hambatan dalam menciptakan desa yang benar-benar berdaya saing dan mandiri secara ekonomi.

2.1.4.5 STABILITAS EKONOMI MAKRO

A. RASIO PAJAK DAERAH TERHADAP PDRB

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah, khususnya sejauh mana pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak mampu berkontribusi terhadap total perekonomian wilayah. Rasio yang tinggi menunjukkan kekuatan fiskal

daerah yang semakin mandiri dan berkelanjutan, sehingga pembangunan tidak terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

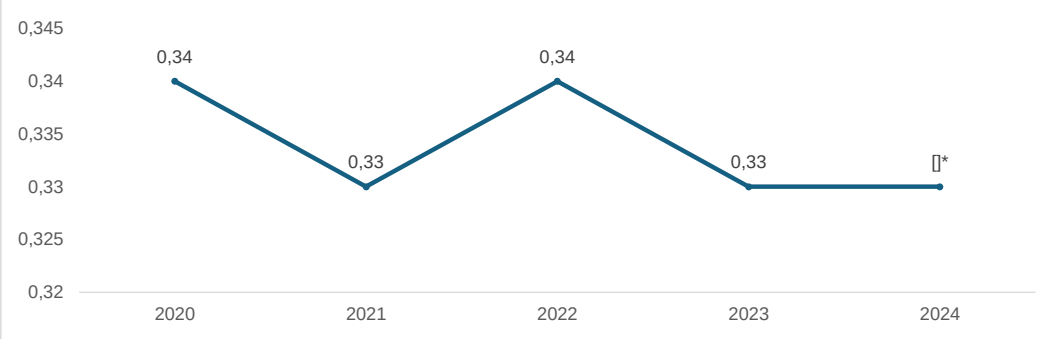

Gambar 2-39 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB
Sumber: Bapenda Kabupaten Lamongan, 2025
Keterangan(*): Angka Sementara

Pergerakan yang relatif datar ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap perekonomian Lamongan belum mengalami peningkatan yang signifikan. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan digitalisasi sistem pemungutan, serta belum optimalnya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah. Di sisi lain, masih terdapat potensi ekonomi yang belum tergarap sepenuhnya untuk dijadikan basis penerimaan pajak. Sehingga perlu dilakukan reformasi sistem perpajakan daerah agar penerimaan daerah dapat meningkat secara adil, efisien, dan berkelanjutan.

B. TINGKAT INFLASI

Tingkat inflasi untuk mengukur kestabilan harga barang dan jasa di suatu wilayah dalam periode tertentu. Pengendalian inflasi menjadi kunci penting dalam menjaga daya beli masyarakat, kestabilan iklim usaha, dan efektivitas program-program pembangunan.

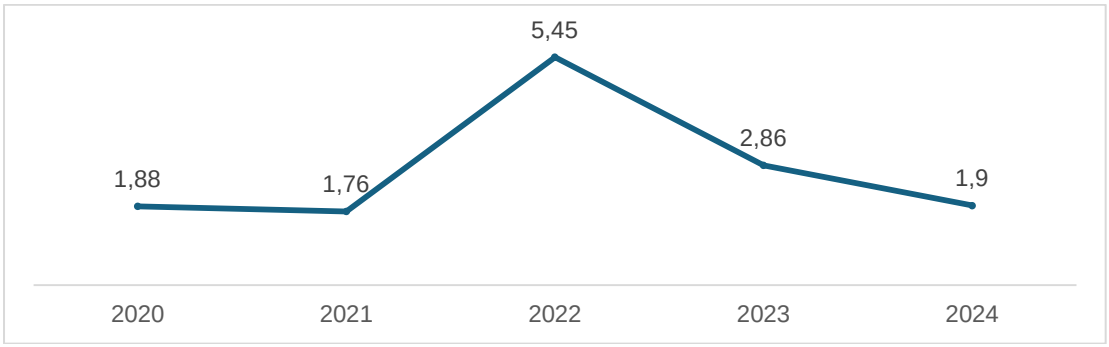

Gambar 2-40 Tingat Inflasi Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024
Sumber: Bagian Perekonomian Kabupaten Lamongan, 2025

Tingkat inflasi mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam periode 2020–2024. Inflasi yang terkendali mencerminkan koordinasi yang baik antara kebijakan fiskal, moneter, dan distribusi barang kebutuhan pokok, serta mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengantisipasi gangguan pasokan dan permintaan secara proporsional dan terukur. Oleh karena itu, ke depan perlu terus memperkuat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), memperluas akses pasar murah, memperkuat stok pangan lokal, serta mendorong kolaborasi antar daerah untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

2.1.5 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.5.1 REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF

A. INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana transformasi tata kelola pemerintahan menuju birokrasi yang bersih, efektif, responsif, dan akuntabel telah berjalan. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi menjadi tolok ukur komitmen setiap institusi pemerintahan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan, baik dari sisi struktural, kultural, maupun manajerial. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil terpotret melalui peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi. Peningkatan siginifikan terjadi pada tahun 2024 sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2-20 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	66,30 (B)	68,35 (B)	70,02 (BB)	75,89 (BB)	86,48 (A)

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan,2025

B. INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan bagian integral dari transformasi digital dalam tata kelola

pemerintahan modern yang bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi pelayanan publik, dan keterpaduan sistem informasi.

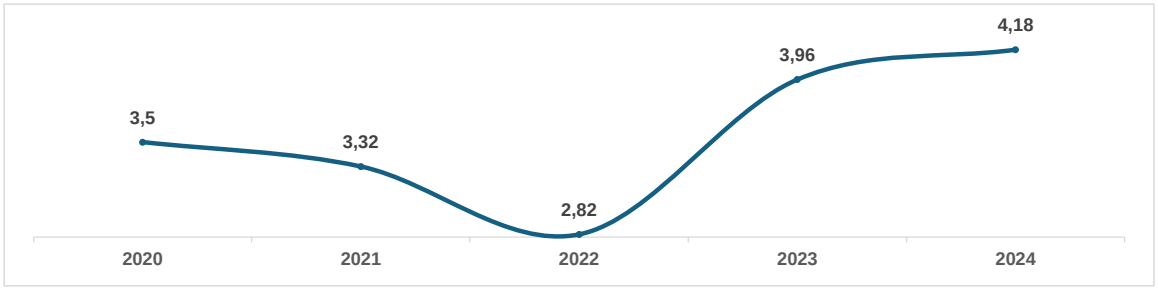

Gambar 2-41 Nilai Indeks SPBE Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Lamongan Tahun, 2025

Capaian Indeks SPBE menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama periode 2020–2024. Nilai indeks ini mencerminkan kualitas kebijakan internal, infrastruktur TIK, tata kelola data, dan kapabilitas SDM digital, serta kesiapan layanan digital yang terintegrasi antar perangkat daerah.

Pemerintah Daerah perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pembangunan infrastruktur digital, serta meningkatkan kapasitas SDM dan literasi digital agar dapat menjawab tantangan transformasi digital sehingga benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat.

2.1.5.2 HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL

A. INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

Indeks Demokrasi merupakan indikator yang digunakan dalam rangka mengukur dan menilai kualitas sistem demokrasi di suatu negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi seperti: (1) Proses pemilu dan pluralisme;(2) Kebebasan Sipil, mencakup hak-hak dasar individu. Negara harus memberikan ruang tersebut kepada masyarakat tanpa adanya tekanan; (3) Partisipasi Politik, Negara memberikan keleluasaan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses politik; dan (4) Tata Kelola Pemerintahan, demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Data dari Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia tiga tahun terakhir terkesan fluktuatif. Hal tersebut juga terjadi pada rata-rata indeks demokrasi provinsi.

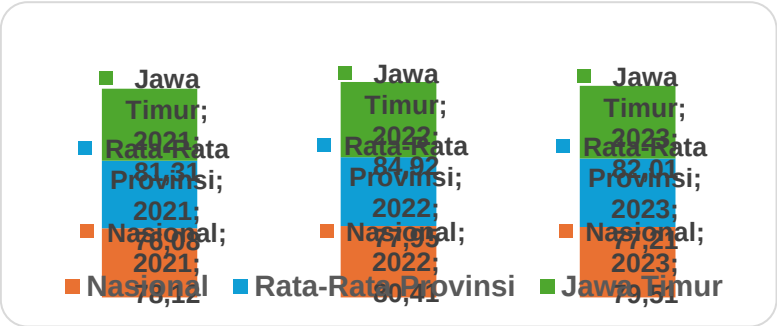

Gambar 2-42 Indeks Demokrasi Indonesia, Rata-rata Provinsi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tahun 2024 menjadi awal mula pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara serentak yakni pemilu legislatif dan pemilu presiden-wakil presiden pada bulan Februari, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota pada bulan November yang lalu. Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan pesta demokrasi baik pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah mampu melaksanakan dengan baik dan kondusifitas wilayah terjaga dengan angka partisipasi pemilih mencapai 80%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebebasan dan hak-hak politik masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan terbuka secara inklusif.

Kendatipun demikian, kualitas demokrasi masih menjadi tantangan nasional, mengingat, Freedom House, sebagai salah satu Lembaga pemerhati demokrasi, menunjukkan bahwa nilai indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 pada tahun 2019 menjadi 57 pada tahun 2024. Penilaian yang sama juga dirilis dalam V-Dem Democracy Index 2024, bahwa ranking Indonesia terjun bebas dari 79 ke 87. Isu yang paling menonjol di tahun 2024 yakni politik dinasti. Ke depan perlu lebih memperhatikan perlindungan hak-hak dasar warganya dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar masyarakatnya dapat menikmati kesejahteraan sosial yang lebih baik dan lebih stabil secara politik.

2.1.5.3 KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN

A. INDEKS DAYA SAING DAERAH

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan ditengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Indeks ini menjadi sangat penting karena memberikan gambaran objektif tentang sejauh mana suatu daerah dapat berkembang dan bersaing dalam konteks ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif sehingga dapat meningkatkan daya tarik Investasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada tahun 2024 skor nasional IDSD yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional sebesar 3,43 dari skala 5. Capaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan Indeks Daya Saing Provinsi Jawa Timur yang berada diangka 3,88. Sedangkan untuk Kabupaten Lamongan skor indeks daya saing lebih tinggi dari pada capaian nasional yakni 3,64. Skor tersebut terbentuk atas 4 komponen pengukuran yakni: Lingkungan Pendukung, Pasar, Sumber Daya Manusia dan Ekosistem Inovasi. Peningkatan daya saing daerah dapat memperkuat posisi daerah tersebut dalam peta pembangunan nasional dan global. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu menguatkan kolaborasi lintas sektor agar dapat menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5.4 KINERJA URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. PENDIDIKAN

Urusan Pendidikan menjadi salah satu urusan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting sebagai fondasi pembangunan individu dan kemajuan suatu daerah. Pendidikan juga menjadi fondasi

agar masyarakat tidak terperangkap dalam keterbelakangan. Berikut merupakan capaian kinerja urusan pendidikan:

Tabel 2-21 Indikator-Indikator Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Kasar PAUD	73.76%	80.20%	96.65%	97.18%	97,71%
Angka Partisipasi Kasar SD/MI	113.51%	113.52%	113.85%	100.68%	101,7%
Angka Partisipasi Kasar SMP	114.05%	114.07%	114.18%	110.86%	108,11%
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	99.96%	99.97%	94.10%	94.79%	94.85%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	90.05%	90.06%	90.06%	86.55%	86.88%
Angka Melek Huruf	100%	100%	100%	100%	100%
Indeks Pendidikan	0,639	0,65	0,667	0,668	0.672
Angka Harapan Lama Sekolah	13,48	13,77	14,01	14,02	14.03
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,92	8,04	8,33	8,34	99.66
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	99.61	99.10	99.2	99.99%	99.53%
Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS	99.5	99,31	99.31	98.95	94.85
Rasio Guru terhadap siswa	11	11.1	11.2	10,4	10.93
Rasio sekolah SD/MI	104.55	105	105.02	115,87	105.61
Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	60.59	51.01	52.91	60.53%	54.58
Rasio sekolah SMP/MTS	56.4	56.58	56.67	61,49	58.8
Rasio Rombongan Belajar terhadap Siswa	15.95	15.99	16	16.01	15.97
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	N/A	N/A	84,27	85,32	84.93%
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	N/A	99,2	99,99	99,66	99.98%
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	N/A	99,31	98,94	99,53	99.99%
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	N/A	N/A	2,94	9,25	11.56%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 2025

Sebagian besar indikator kinerja pada urusan Pendidikan di Kabupaten Lamongan menunjukkan kecenderungan yang positif, akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Angka partisipasi sekolah di Kabupaten Lamogan juga belum dapat mencapai 100%. Saat ini masih minim sekolah dasar di Kabupaten Lamongan yang memiliki kualitas dengan akreditasi minimal B. Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik perlu ditingkatkan melalui pelatihan

hingga sertifikasi. Hal tersebut penting karena tenaga pendidik merupakan ujung tombak keberhasilan pelaksanaan pendidikan.

Selanjutnya, terkait jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Lamongan pada tahun 2024 Sebanyak 8.486 dengan rincian Belum Pernah Bersekolah (BPB) 4,661, Drop Out (DO) 3,135, Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) 1,771 Pemerintah Daerah sudah melakukan verifikasi sebanyak 439 Anak Tidak Sekolah. Pemerintah Daerah dalam penanganan ATS telah melakukan beberapa Strategi diantaranya : (1) Pendataan, yang bersumber dari Data ATS dari Pusdatin, Sekolah melakukan verivikasi data ATS Kategori DO dan LTM, Desa/Kelurahan melakukan verifikasi data ATS. (2) Rekonfirmasi, Desa/Kelurahan melakukan rekonfirmasi dari hasil verifikasi dari satuan pendidikan sesuai kondisi dilapangan. (3) Pendampingan, Desa/Kelurahan melakukan pendampingan ke rumah sasaran ATS dengan metode home visite oleh Desa/Kelurahan. (4) Monitoring , ATS yang kembali bersekolah statusnya berubah menjadi APRS (Anak Rentan Putus Sekolah) dan akan dimonitoring Tim.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan, Pemerintah Daerah telah mengimplementasikan program prioritas Pendidikan berkualiatas dan gratis bagi keluarga sejahtera (Perintis) yang selaras dengan program pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, diantaranya penerapan 7 (tujuh) Kebiasaan Anak Indonesia Hebat; Dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG); Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan; Digitalisasi Sekolah; Wajib Belajar 13 Tahun; dan Ketercukupan dan Kelayakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

2. KESEHATAN

Urusan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam menjamin aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan layanan kesehatan

bagi seluruh lapisan masyarakat secara komprehensif. Dalam konteks ini, penguatan sistem pelayanan kesehatan primer, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, serta pengembangan infrastruktur dan teknologi kesehatan menjadi fokus utama Pemerintah Daerah. Secara umum komitmen daerah terhadap peningkatan kualitas Kesehatan tercermin dari capaian pada setiap indikator kinerja yang kecenderungandnya positif.

Tabel 2-22 Indikator-Indikator Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	5,37 per 1000KH	5,2 per 1000 KH	5,1 per 1000 KH	7.4 per 1000 KH	6,5 per 1000 KH
Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	3,2 per 1000 KH	3,6 per 1000 KH	5,0 per 1000 KH	6.9 per 1000 KH	6,2 per 1000 KH
Rasio Posyandu per Satuan Balita	2 per 100 balita	2,3 per 100 balita	2,3 per 100 balita	2.37 per 100 balita	1.88 per 100 balita
Rasio Dokter per Satuan Penduduk	19 per 100.000 penduduk	24 per 100.000 penduduk	65 per 100.000 penduduk	42 per 100.000 penduduk	45.64 per 100.000 penduduk
Rasio Puskesmas	2,78 per 100.000 penduduk	2,78 per 100.000 penduduk	2,78 per 100.000 penduduk	2,78 per 100.000 penduduk	2.32 per 100.000 penduduk
Rasio Rumah Sakit	1,09 per 100.000 penduduk	1,09 per 100.000 penduduk	1,09 per 100.000 penduduk	1.37 per 100.000 penduduk	1.37 per 100.000 penduduk
Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	97.30%	95.60%	97.90%	90.93%	75,11%
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	123 per 100.000 penduduk	136 per 100.000 penduduk	223 per 100.000 penduduk	266 per 100.000 penduduk	256 per 100.000 penduduk
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	9,41 per 100.000 pddk	21,78 per 100.000 pddk	34,99 per 100.000 pddk	15.98 per 100.000 pddk	64,4 per 100.000 pddk
Jumlah Kasus HIV AIDS	173	364	195	320	249
Indeks Kesehatan	0.806	0.808	0.813	0.844	0,847
Balita Stunting	7,1 (4,396 balita)	6,32 (3,276 balita)	5,56 (3,190 balita)	4.2 (2.569 balita)	4,15 (2.779 balita)
Balita Gizi Buruk	214	292	214	247	234
Jumlah Rumah Sakit	13	16	17	19	19
Jumlah Puskesmas	33	33	32	32	32
Jumlah Puskesmas Pembantu	109	109	109	109	109
Jumlah Pusat Layanan Kesehatan Desa	474	474	474	474	474
Jumlah Posyandu	1745	1746	1749	1750	1750
Angka Kematian Ibu (AKI)	83.64	148.29	52.02	96.24	53.98
Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	N/a	20.50%	27.50%	9.40%	Belum release

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja pada urusan Kesehatan kecenderungandnya mengalami peningkatan. Dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan di sektor Kesehatan, kedepan Pemerintah Daerah perlu fokus pada upaya penanggulangan penyakit yang menjadi prioritas nasional, yaitu AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM). Pencegahan dapat dilakukan dengan memasifkan Gerakan cek Kesehatan gratis bagi masyarakat di setiap fasilitas Kesehatan milik pemerintah. Selain itu terkait dengan Angka Kematian Ibu dan Prevalansi Stunting yang kinerjanya semakin baik harus terus dimitigasi dengan upaya promosi preventif baik melalui edukasi maupun pelayanan kesehatan yang optimal yang dapat dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat dasar.

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Infrastruktur memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan di daerah dan memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas hidup. Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum sebagai urusan wajib memiliki kontribusi penting terhadap akses seluruh pelayanan di Kabupaten Lamongan. Sehingga upaya meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana publik harus menjadi salah satu prioritas daerah.

Persentase panjang jalan dan jembatan dengan status kewenangan kabupaten yang berada dalam kondisi pelayanan "Baik" dan "Sedang" terhadap total panjang jalan dan jembatan kewenangan kabupaten. Kondisi ini dinilai berdasarkan survei visual atau metode teknis lainnya yang mengukur kerusakan permukaan, struktur, dan kelengkapan jalan, Cara Perhitungan: ((Panjang Jalan Kondisi Baik + Panjang Jalan Kondisi Sedang) / Total Panjang Jalan Kabupaten) x 100%.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 188/207/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor: 188/182/KEP/413.013/2024 tentang Status Jalan di Kabupaten Lamongan kondisi kemantapan jalan pada tahun 2024 adalah 55,14%.

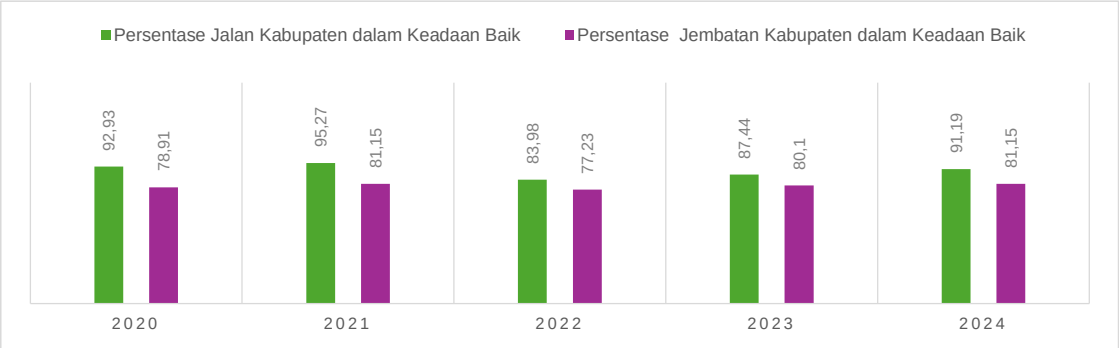

Sedangkan kondisi jalan dan jembatan yang berkategori baik, dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2-43 Persentase Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, 2025

Indikator persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik selama periode 2020-2024 memiliki capaian fluktuatif. Peningkatan jalan dalam kondisi mantap terus diupayakan secara bertahap yang menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dari Pemerintah Daerah terkait pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan melalui program Jalan mantap dan alus (Jamula).

Berkaitan dengan indeks infrastruktur irigasi, ketersediaan air baku, dan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Lamongan pada tahun 2020-2024 memiliki capaian yang terus meningkat. Hal tersebut menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya air untuk mendukung kebutuhan pertanian dan industri. Sedangkan rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi di Tahun 2024 sebesar 84,20 mengalami penurunan 3,15 poin jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

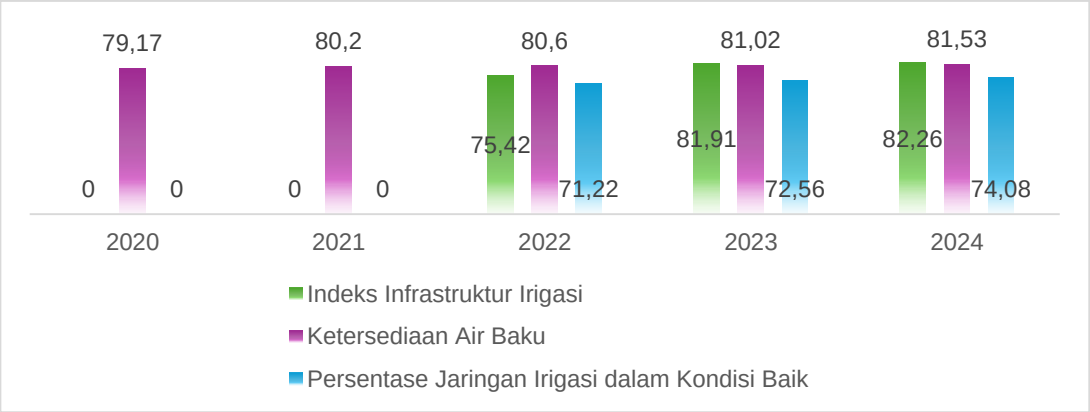

Gambar 2-44 Indeks Infrastruktur Irigasi, Ketersediaan Air Baku, dan Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, 2025

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumahan dan kawasan pemukiman memainkan peran kritis dalam pembangunan di daerah, karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Infrastruktur perumahan yang layak, seperti rumah yang aman dan terjangkau dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial. Berkaitan dengan Lingkungan perumahan yang sehat dan sanitasi yang baik, sistem pengelolaan limbah maupun akses ke air bersih dalam mendukung terwujudnya lingkungan yang layak harus benar-benar di perhatikan.

Definisi operasional dan indikator rumah layak huni sebagaimana tertuang dalam sub bab 2.2.4.2 , sementara itu Indeks permukiman memiliki Indikator ukuran komposit (gabungan) yang menilai kualitas suatu kawasan permukiman berdasarkan ketersediaan dan kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dasar. Komponen yang dinilai umumnya mencakup:

- Jalan Lingkungan: Kualitas dan jangkauan jalan di dalam kawasan permukiman.
- Drainase Lingkungan: Ketersediaan dan fungsi sistem drainase untuk mencegah genangan.
- Pengelolaan Air Limbah: Sistem pembuangan air limbah domestik.
- Pengelolaan Persampahan: Ketersediaan tempat sampah dan layanan pengangkutan.

- Ruang Terbuka Hijau (RTH): Ketersediaan taman atau area hijau di lingkungan.

Cara Perhitungan: Indeks dihitung berdasarkan rekapitulasi skor dari setiap komponen PSU yang dinilai. Masing-masing komponen diberi bobot sesuai tingkat prioritasnya, kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai indeks akhir. Indeks Permukiman=∑(Skor Komponen PSU×Bobot Komponen)

Capaian Indeks Permukiman dan rumah layak huni tertuang pada grafis di bawah ini:

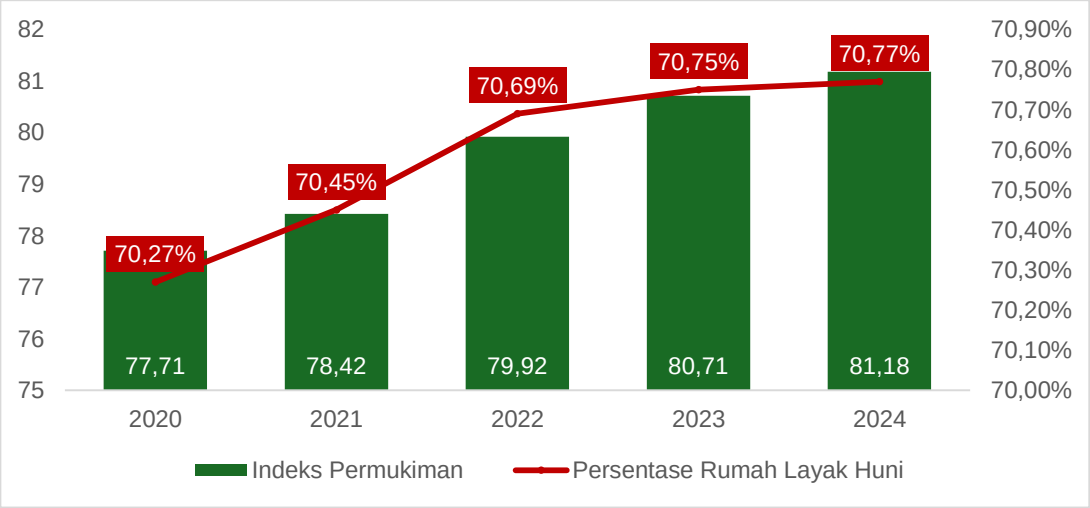

Gambar 2-45 Persentase Rumah Layak Huni dan Indeks Permukiman Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan, 2025

Capaian persentase rumah layak huni dan indeks permukiman di Kabupaten Lamongan selama periode 2020-2024 menunjukkan kecenderungan positif. Kenaikan ini menunjukkan efektivitas berbagai program penataan kawasan permukiman, termasuk rehabilitasi permukiman kumuh, pengembangan infrastruktur dasar, serta penerapan kebijakan tata ruang yang lebih optimal.

Di sisi lain, persentase rumah layak huni peningkatannya masih relatif kecil, sehingga masih menjadi tantangan untuk menghadirkan rumah yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan. Ke depan, diperlukan strategi yang lebih agresif dalam penyediaan perumahan yang terjangkau dan percepatan program

rehabilitasi rumah tidak layak huni guna memastikan lebih banyak masyarakat dapat menikmati hunian yang layak.

Selanjutnya, terkait akses sanitasi, persampahan, dan air minum perpipaan kecenderungannya selama periode 2020-2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang pada grafis di bawah ini:

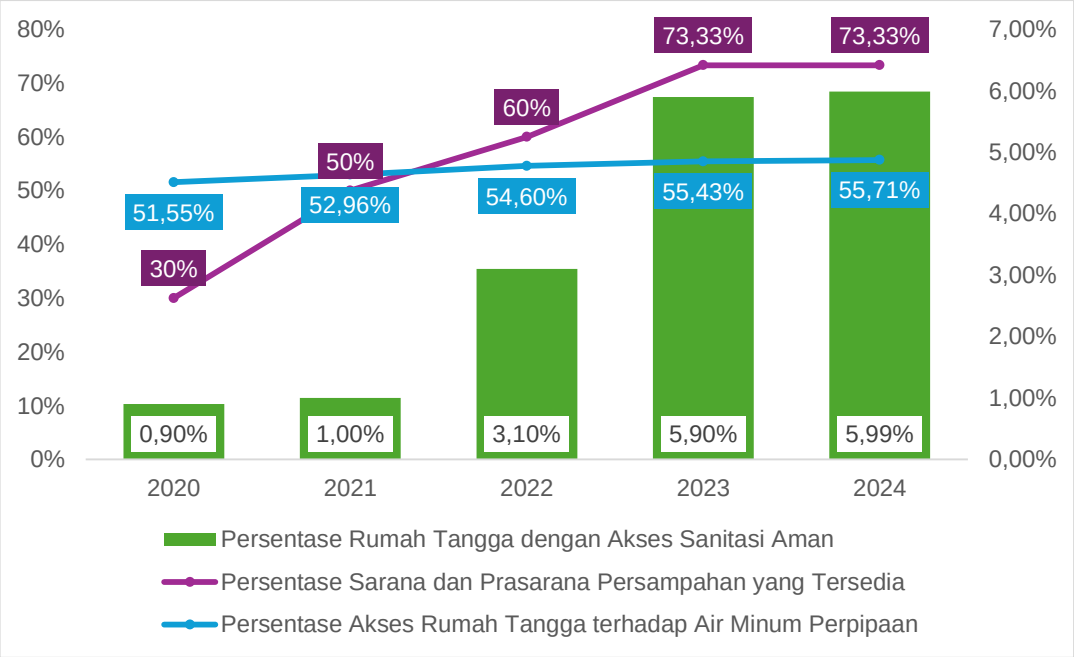

Gambar 2-46 Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan, 2025

Peningkatan kinerja mencerminkan adanya upaya intensif dalam pengembangan sistem sanitasi berbasis masyarakat serta pembangunan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan. Sistem pengelolaan sampah, baik dalam bentuk tempat pembuangan sementara (TPS), sistem pengangkutan, maupun pengolahan akhir juga mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk persentase akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan yang meningkat menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam memperluas cakupan layanan air bersih sebagai kebutuhan dasar.

Penyediaan air minum menjadi salah satu indikator infrastruktur perumahan yang berkualitas. Pemenuhan akses layanan air minum yang layak bagi masyarakat masih dirasa kurang, karena baru 55.71%

masyarakat Lamongan yang terlayani akses air minum melalui sistem perpipaan. Ketersediaan air minum perpipaan tercermin melalui indikator Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Perpipaan, yaitu rumah tangga yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan dengan kriteria sebagai berikut: 1) rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. Dalam menghitung persentase Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Perpipaan dilakukan dengan membandingkan jumlah rumah yang mendapatkan akses terhadap air minum perpipaan dengan jumlah seluruh rumah yang ada di Kabupaten Lamongan.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan air minum adalah melalui Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM). Pada tahun 2023, Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum membangun sistem penyediaan air minum regional di wilayah selatan yaitu SPAM Mojolagres; Mojokerto-Lamongan-Gresik yang memanfaatkan air baku dari sungai Brantas dengan kapasitas debit air 100l/detik. Pada tahun 2025, Perusahaan Umum Daerah Air Minum menargetkan bahwa penyambungan pipa SPAM Mojolagres telah tuntas dan dapat menyuplai air bersih bagi masyarakat Kabupaten Lamongan, khususnya pada wilayah Lamongan selatan.

Selain penyediaan air minum, pengelolaan persampahan juga menjadi indikator dari kualitas infrastruktur perumahan yang baik. Sistem persampahan regional hadir sebagai solusi untuk mengintegrasikan proses pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, hingga pembuangan akhir melalui fasilitas bersama yang melayani lebih dari satu daerah administrasi. Perencanaan pengelolaan sampah regional ini harus didasari pada Strategi Nasional Indonesia dan dibutuhkan modifikasi berdasarkan dari angka kalkulasi dan estimasi yang akan

dilakukan dalam progresnya. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) merencanakan pengelolaan sampah regional di wilayah gerbang Kertosusila pada 2024 yang mencakup 5 Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Gresik (tanpa Surabaya dan Bangkalan)—karena proyek ini tidak menyertakan Surabaya dan Bangkalan—selanjutnya, nomenklatur Gerbangkertosusila diubah menjadi Simolagres.

Periode perencanaan proyek TPA Simolagres yakni 20 tahun (2025-2045) dengan target area kecamatan dari kabupaten yang ikut serta dalam sistem pengelolaan sampah regional, utamanya di Desa Cendoro, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto dan Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Untuk proyek TPA Simolagres ini, perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kabupaten terkait seputar data atau infomasi area pelayanan TPA termasuk ketersediaan lahan serta teknologi dan biaya yang akan digunakan.

Akses sanitasi yang layak merupakan komponen penting berikutnya dalam mewujudkan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Sanitasi yang baik mencakup pengelolaan air limbah domestik, pengendalian drainase lingkungan, serta penyediaan sarana pembuangan limbah yang memenuhi standar kesehatan. Ketersediaan infrastruktur sanitasi yang memadai berkontribusi langsung terhadap kualitas lingkungan permukiman, menurunkan risiko penyakit, dan meningkatkan kenyamanan hidup masyarakat. Kualitas sanitasi permukiman dapat diukur dengan indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman. Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat.

Rumah Tangga yang dikatakan memiliki Akses Sanitasi Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Indikator ini diukur dengan jumlah keseluruhan rumah dengan akses sanitasi aman yakni rumah tangga dengan akses SPALD-T dan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dibagi dengan jumlah seluruh rumah yang ada di Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya, capaian tiga indikator yang menggambarkan kinerja dalam penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kecenderungandnya fluktuatif. Namun demikian Pemerintah Daerah berhasil meningkatkan penanganan permukiman kumuh di bawah 10 ha secara signifikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-23 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%
persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	25%	29,22%	36,75%	30,48%	70.46%
Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	N/A	N/A	N/A	N/A	70.77%
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	N/A	67%	69%	71%	63.96%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan, 2025

5. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Penyelenggaraan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagai urusan wajib dasar diharapkan dapat

menjaga kondusifitas dan stabilitas politik, sosial, hukum, ekonomi dan budaya serta harmonisasi masyarakat di Kabupaten Lamongan. Sehingga penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan bisa berjalan secara dinamis.

Keberhasilan dalam penegakan hukum dan penyelesaian terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan gangguan ketertiban umum sepanjang tahun 2020-2024 mencapai 100%. Mitigasi bencana yang dipersiapkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah mampu meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap kejadian bencana. Berbagai capaian tersebut menunjukkan efektivitas aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tabel 2-24 Indikator Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penanganan pra bencana	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Gangguan Trantibum yang Terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bakesbangpol, Satpol PP dan BPBD, Kab. Lamongan, Tahun 2025.

6. SOSIAL

Komitmen Pemerintah Daerah dalam menghadirkan pelayanan di sektor sosial sebagai urusan wajib dasar diarahkan pada pemberian jaminan bagi masyarakat rentan. Indikator kinerja yang merepresentasikan keberhasilan dalam menghadirkan layanan sosial adalah Persentase Pemerlu Perhatian Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kapasitasnya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemerlu Perhatian Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan kumpulan kelompok rentan yang terdiri dari para fakir miskin, Lansia, Disabilitas dan gelandangan, korban bencana serta beberapa kelompok rentan lainnya. Pemerintah Daerah terus memaksimalkan peran pendamping PPKS dalam melakukan graduasi terhadap penerima bansos

dan meningkatkan kapasitas melalui sinergitas dengan aparat desa. Adapun capaian kinerja urusan sosial dapat dilihat dalam grafik berikut:

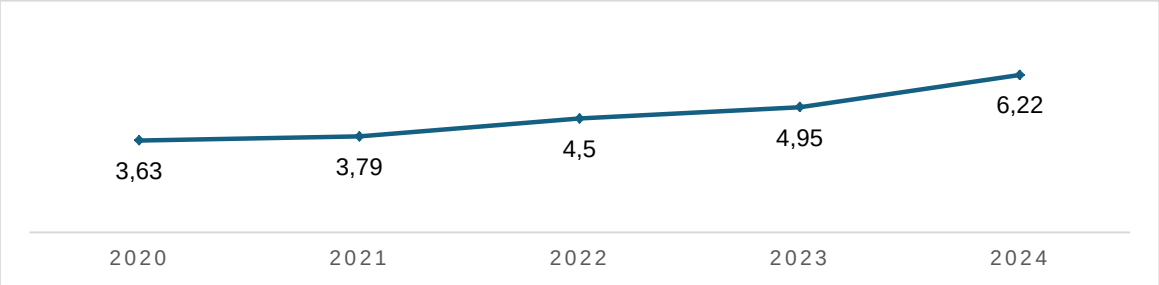

Gambar 2-47 Capaian PPKS yang Meningkat Kapasitasnya Kabupaten Lamongan tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2025

Capaian di atas menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan atau perlindungan PPKS yang diimplementasikan oleh pemerintah dan didukung dengan sinergitas stakeholder efektif untuk meningkat kapasitas PPKS. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan terhadap PPKS, perlu membentuk UPT yang menangani permasalahan PPKS serta menyiapkan rumah singgah atau ruang rehabilitasi sosial. Terkait upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban bancana alam dan sosial, Pemerintah Daerah dalam lima tahun terakhir mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi korban bencana dengan baik atau setara 100%. Hal tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Daerah untuk menghadirkan pelayanan terbaik dan kesetaraan terhadap kelompok rentan, sekaligus memastikan bahwa semua masyarakat Lamongan harus mendapatkan aksesibilitas untuk mencapai kesejahteraannya.

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. TENAGA KERJA

Urusan tenaga kerja merupakan bagian penting dari pelayanan dasar yang berperan dalam memberikan perlindungan, dan mendukung pengembangan sumber daya manusia. Tenaga kerja memegang peranan krusial dalam mendorong proses pembangunan. Capaian kinerja Pemerintah Daerah pada urusan ketenagakerjaan sebagai berikut:

Tabel 2-25 Indikator Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu pada Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,54	1,34	2.29	2.50	3.17
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	N/A	42,922	46,622	39,439	40,623
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS).	31,97	8,99	93,90	93,41	95,67
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	94,68	71,33	73,25	74,52	75,15
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	NA	NA	27.71	33.59	34.03
Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja	N/A	0,01	0,01	0,01	0,01
Jumlah Penyandang Disabilitas Bekerja	N/A	34	13	26	41

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, 2025

Tantangan dalam sektor ketenagakerjaan meliputi ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, rendahnya kualitas tenaga kerja, minimnya perlindungan pekerja, kurangnya pelatihan yang memadai, serta ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah senantiasa berupaya untuk melaksanakan fasilitasi penempatan kerja dengan memperhatikan keterampilan dan kualifikasi serta memberikan informasi pasar kerja dan mengadakan bursa kerja. Terkait dengan persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam dan di luar negeri melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah capaian terus mengalami peningkatan. Untuk menjaga kinerja positif dalam lima tahun ke depan Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi guna meningkatkan daya saing sumber daya manusia, terutama bagi mereka yang berada dalam usia kerja.

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memegang peranan penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Kualitas pelayanan pemerintah di sektor ini dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). Capaian IPG di Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

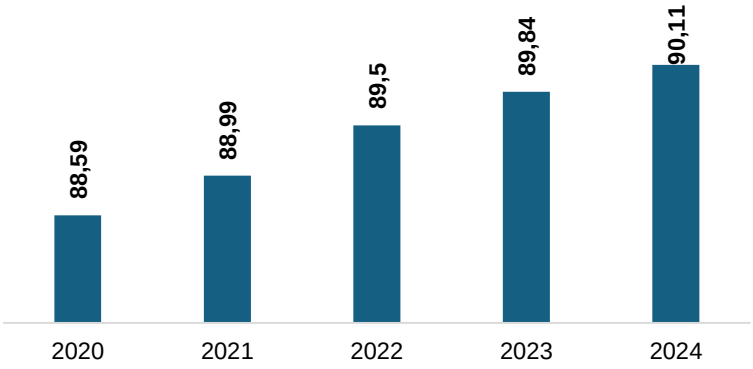

Gambar 2-48 Capaian IPG Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2025

Secara menyeluruh, IPG mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024. Kinerja tersebut sekaligus menunjukkan bahwa terjadi peningkatan peran perempuan dalam pembangunan, terutama di bidang ekonomi, politik dan pemerintahan. Ke depan pemerintah daerah perlu terus mendorong peran perempuan dalam proses perencanaan pembangunan, melakukan pelatihan, pendidikan, dan dukungan sosial dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya, terkait capaian indikator pendukung yang menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sepanjang tahun 2020-2024 kecenderungannya fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-26 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	74.48%	81.98%	71.77%	63.51%	31.46%
Persentase Anak Korban kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%	100%

Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	1.16	2.18	5.52	0.0036	2.79
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	N/A	0,423	0,272	0,334	0,203

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Lamongan, 2025

3. PANGAN

Ketahanan pangan merupakan pelayanan dasar yang bertujuan untuk memastikan bahwa orang memiliki akses terhadap makanan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan dapat digunakan untuk mengukur upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui partisipasi pelayanan urusan pangan.

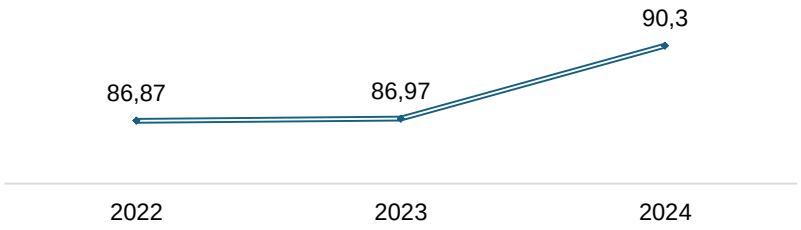

Gambar 2-49 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2025

Secara keseluruhan, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Sehingga menjadikan Kabupaten Lamongan sebagai "Kabupaten Sangat Tahan Pangan". Kabupaten Lamongan memiliki sumber daya pertanian yang melimpah sehingga bisa memproduksi banyak pangan dalam rangka memastikan ketersediaan konsumsi pangan. Adapun capaian konsumsi pangan tertuang pada grafik di bawah ini:

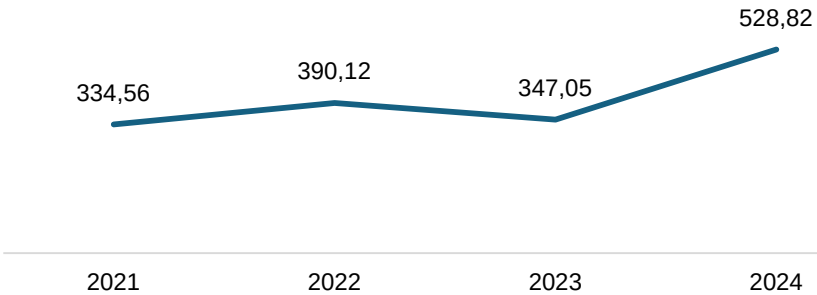

Gambar 2-50 Konsumsi Pangan (Kg/Kap/Ton) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2024
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan, 2025

Grafik di atas memperlihatkan perkembangan konsumsi pangan di Kabupaten Lamongan yang fluktuatif selama periode 2021 hingga 2024 dalam satuan kilogram per kapita per ton. Fluktuasi tersebut mencerminkan dinamika konsumsi pangan di Kabupaten Lamongan dan dapat menjadi acuan penting dalam perencanaan ketahanan pangan dan kebijakan pertanian daerah.

Selanjutnya terkait dengan skor pola pangan harapan selama periode 2020 hingga 2024 kecenderungannya mengalami peningkatan. Peningkatan skor ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah dan masyarakat dalam memperbaiki kualitas konsumsi pangan, baik dari segi keragaman maupun keseimbangannya, untuk memenuhi kebutuhan gizi yang optimal. Capaian tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

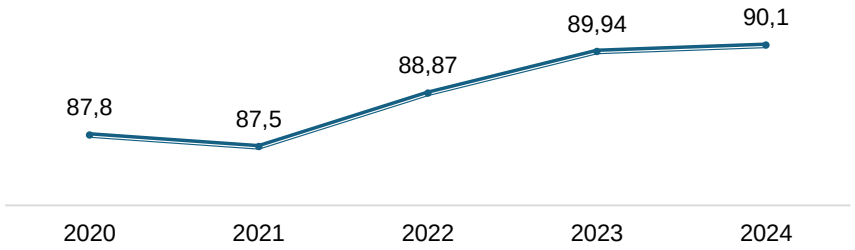

Gambar 2-51 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan, 2025

Selanjutnya capaian dua indikator yang dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pangan kecenderungannya fluktuatif sepangjang tahun 2020 hingga tahun 2024. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-27 Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	N/A	10,33%	3,37%	3,16%	1.90%
Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	N/A	100%	96.66%	100%	96.83%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan, 2025

4. PERTANAHAN

Pelayanan utama dalam urusan pertanahan berkaitan dengan mengelola tanah atau lahan sebagai aset untuk mengatur hak kepemilikan yang jelas. Salah satu indikator dalam urusan pertanahan yaitu Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran di tahun 2024 telah tercapai 100 %. Selanjutnya indikator lainnya yaitu persentase tanah aset yang bersertifikat sebagaimana pada grafik berikut:

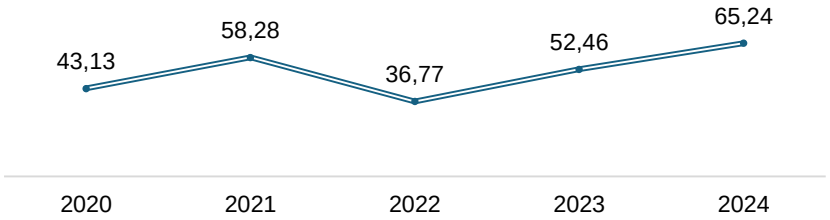

Gambar 2-52 Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah yang Bersertifikat Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan, 2025

Grafik di atas menyajikan perkembangan persentase tanah aset Pemerintah Daerah yang telah bersertifikat selama kurun waktu lima tahun. Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya fluktuasi dalam capaian sertifikasi tanah aset Pemerintah Daerah. Untuk mendorong kinerja tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan pendekatan yang lebih efektif, seperti digitalisasi data aset, percepatan pengumpulan dokumen, serta intensifikasi program pendaftaran tanah sistematis.

5. LINGKUNGAN HIDUP

Urusan lingkungan hidup adalah jenis pelayanan dasar yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan alam dan kehidupan manusia, sehingga perlu menerapkan kebijakan yang berwawasan lingkungan, merancang tata ruang yang berkelanjutan, dan melestarikan lingkungan. Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024 kecenderungannya mengalami peningkatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2-28 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,67	64,92	64,7	64,27	63,33
2.	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	5,45	5,61	5,76	5,92	6,08
3.	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	40,26	42,13	39,58	50,73	51,88
4.	Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	18,56	19,67	20,87	22,37	23,97

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan DPRKPCK Kabupaten Lamongan, 2025

Penurunan nilai IKLH pada tahun 2021 disebabkan penyesuaian target didasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tanggal 4 April 2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan,bahwa Kabupaten/Kota diharapkan melakukan penyesuaian target capaian sesuai dengan rencana target capaian yang telah direncanakan KLHK. Penyesuaian target dimaksudkan sebagai upaya standarisasi perhitungan dan acuan baku dalam kinerja pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah.

6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib untuk meningkatkan kualitas layanan pencatatan dan kepemilikan identitas kependudukan. Kinerja Pemerintah Daerah dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sepanjang tahun 2020-2024 kecenderungannya positif dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah terus melakukan inovasi untuk mendapatkan layanan kependudukan bagi masyarakat. Melalui inovasi 3 in 1 yang bekerja sama dengan fasilitas Kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta, saat ini setiap anak yang baru saja dilahirkan bisa langsung mendapatkan Kartu Identitas Anak atau KIA, Akta lahir dan orang tua bisa melakukan update kartu keluarga. Sedangkan Kepemilikan KTP Elektronik kecenderungannya

fluktuatif sebagai bentuk dinamika dalam proses perekaman dan distribusi KTP Elektronik. Pemerintah juga terus mendorong percepatan kepemilikan identitas kependudukan digital. Capaian indikator dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-29 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Prosentase Kepemilikan KTP Elektronik	98%	98,96%	93,6%	98,11%	98,91%
Persentase kepemilikan KIA	25,24%	45,40%	49,39%	55,70%	65,46%
Kepemilikan akta kelahiran	94,94%	98,57%	98,84%	98,86%	98,92%
Pemanfaatan data berdasar PKS	-	9,21%	9,23%	29,03%	39,06%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, 2025.

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan dan pembangunan sumber daya lokal. Desa memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga memainkan peran penting dalam pembangunan daerah. Berikut ini adalah jumlah desa menurut indikator sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri di Kabupaten Lamongan.

Tabel 2-30 Jumlah Desa Berdasarkan Kategori di Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
Desa Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
Desa Tertinggal	0	0	0	0	0
Desa Berkembang	323	271	176	58	0
Desa Maju	123	157	189	238	223
Desa Mandiri	16	34	97	166	239

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Lamongan, 2025

Tabel di atas menunjukkan perkembangan jumlah desa berdasarkan kategori di Kabupaten Lamongan selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024. Selama lima tahun tersebut, tidak ada desa yang masuk dalam kategori "Desa Sangat Tertinggal" maupun "Desa Tertinggal".

Perkembangan ini mencerminkan keberhasilan program pembangunan desa di Kabupaten Lamongan yang mampu mendorong peningkatan status desa menuju kategori yang lebih mandiri dan maju. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator kinerja persentase peningkatan status desa mandiri dan persentase pengentasan desa tertinggal yang meningkat signifikan dalam 5 tahun terakhir.

8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pelayanan dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana berfungsi untuk menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk di semua dimensinya. Pembangunan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Pemerintah Daerah harus mengontrol pertumbuhan penduduk untuk mengelola sumber daya ekonomi yang terbatas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan mencegah tekanan berlebihan terhadap layanan dasar, lapangan kerja, dan infrastruktur. Perkembangan populasi Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

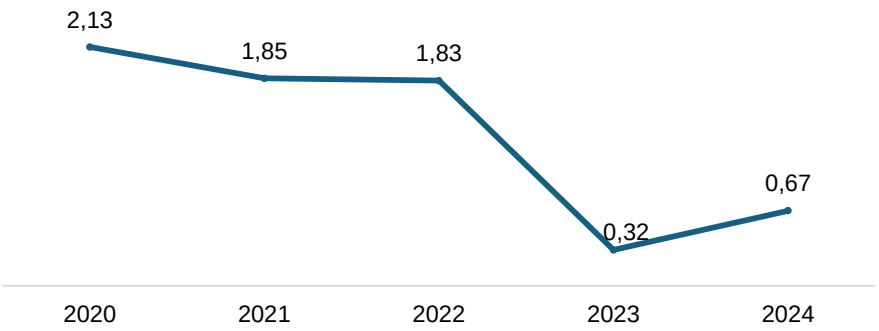

Gambar 2-53 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, 2025

Grafik di atas menunjukkan kecenderungan adanya perlambatan dalam pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Lamongan selama lima tahun terakhir yang mencerminkan keberhasilan program pengendalian penduduk yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Kinerja positif Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terlihat pada peningkatan kinerja 3 indikator pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-31 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kelahiran Total (TFR)	2.03	1.88	1.9	1.87	1.87
Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)	79.73	79.30	72.32	76.87	76.22
Persentase kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	6.11	7.48	8.97	7.10	4.48

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lamongan, 2025.

9. PERHUBUNGAN

Untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan konektifitas pelayanan publik diperlukan akses dan sarana perhubungan yang baik. Capaian kinerja urusan perhubungan ini dapat dilihat melalui indikator indeks layanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan indikator pengukuran kinerja meliputi 5 indikator :

1. Kualitas layanan, meliputi pengadaan fasilitas publik, optimalisasi, pengembangan sarana dan prasarana dan koordinasi;
2. Responsivitas, meliputi menanggapi kebutuhan dan keinginan masyarakat dan pengembangan program sesuai dengan aspirasi masyarakat;
3. Produktivitas, meliputi terealisasinya program-program mengatasi kemacetan lalu lintas dan hasil sesuai target;
4. Akuntabilitas, meliputi penyelenggaraan lalu lintas yang aman, lancar dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas;
5. Responsibilitas, meliputi pengendalian birokrasi dan kordinasi dengan lintas sektor;
6. Formula Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut : IKM + VC Rasio + Persentase Sarana Prasarana Perhubungan/3

Capaian indikator indeks layanan lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilihat pada grafik berikut:

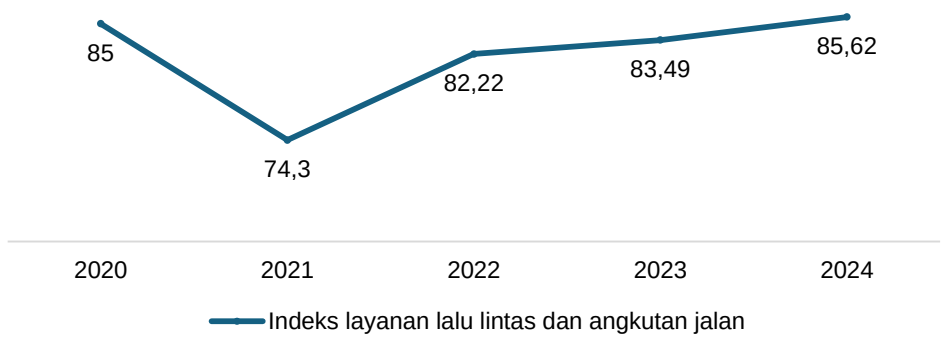

Gambar 2-54 Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, 2025

Grafik di atas menunjukkan perkembangan Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Lamongan selama periode 2020 hingga 2024 kecenderungannya mengalami peningkatan. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang didukung oleh kebijakan dan program peningkatan infrastruktur serta manajemen transportasi yang efektif. Sedangkan untuk persentase ruas jalan kabupaten di Lamongan yang telah terpenuhi alat kelengkapannya selama periode 2020 hingga 2024 juga mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketersediaan kelengkapan jalan dalam kondisi ideal demi mendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

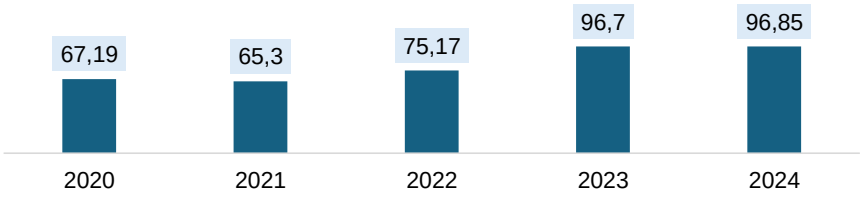

Gambar 2-55 Persentase Ruas Jalan Kabupaten yang Terpenuhi Alat Kelengkapannya Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, 2025

10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan Komunikasi dan Informatika sangat penting untuk mengembangkan berbagai aspek kehidupan manusia maupun tata kelola pemerintahan di tengah semangat e-Government yang menuntut efisiensi

dan transparansi atau ketebukaan informasi publik. Terkait dengan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lamongan pada lima tahun terakhir mengalami stagnasi. Stabilitas nilai dalam tiga tahun terakhir mengindikasikan adanya upaya untuk menjaga keterbukaan informasi publik, meskipun belum mampu mengembalikan capaian seperti pada tahun 2020. Ke depan memerlukan strategi dan arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas transparansi dan aksesibilitas informasi publik di Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya terkait indikator pemenuhan akses internet bagi seluruh Perangkat Daerah dan UPT Teknis, dalam 5 tahun terakhir Pemerintah Daerah telah menyiapkan sarana dan prasarana digital (internet) untuk mendukung kinerja birokrasi. Namun demikian belum semua perangkat daerah yang dapat memanfaatkan sistem penghubung layanan Pemerintah daerah, sehingga kecenderungandnya mengalami stagnasi sebagaimana yang tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-32 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Skor Keterbukaan Informasi Publik	80	63	65	65	70
Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, 2025

11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai tulang punggung perekonomian lokal, dapat berkontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, serta memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan. Dalam rangka mendukung pengembangan sektor

ini, diperlukan perencanaan yang terarah dan berkelanjutan, meliputi peningkatan akses pembiayaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Capaian kinerja Pemerintah Daerah tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-33 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	68,57	69	88,31	88,31	70.5
Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	35,63	40	25,34	48,81	52
Pertumbuhan Wirausaha	0,45	0,50	1,07	1,58	2
Persentase Koperasi Berkualitas	60.46%	66.20%	68.02%	70.94%	72,59
Persentase Koperasi Aktif	82,27	77,02	91,54	92,07	93,98
Persentase Usaha Kecil terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil	9.18%	9.51%	9.83%	10.03%	10,43%
Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Naik kelas (%)	3%	3,1 %	3,25%	3,43%	3,63%
Jumlah Usaha Mikro	229.221	228.383	227.564	227.064	243.234
Persentase peningkatan jumlah Usaha Mikro	-0,26%	-0,37%	-0,36%	-0,22%	7,12%
Jumlah Usaha Kecil	23.165	24.001	24.820	25.350	26.390
Persentase peningkatan jumlah Usaha Kecil	2,65%	3,61%	3,41%	2,13%	4,10%

Sumber: Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kabupaten Lamongan, 2025

Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi mengalami penurunan tahun 2023 88,31% sedangkan tahun 2024 capaiannya 70,2 %. Beberapa faktor penghambat baik faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi penurunan pertumbuhan volume koperasi, yaitu :

1. Faktor Internal
   a. Manajemen Koperasi yang Lemah;
   b. Modal Terbatas;
   c. Partisipasi Anggota Rendah;
   d. Keterbatasan Inovasi Produk dan Layanan;
   e. Sistem Informasi dan Teknologi Terbatas;
2. Faktor Eksternal
   a. Persaingan dengan Pelaku Usaha Lain;
   b. Kurangnya Dukungan Kebijakan atau Regulasi;
   c. Rendahnya Literasi Keuangan dan Koperasi di Masyarakat;
   d. Iklim Usaha yang Tidak Mendukung;
   e. Stigma Negatif terhadap Koperasi;

Persentase Usaha Kecil yang bertransformasi dari informal ke formal capainya cenderung meningkat, berikut beberapa faktor pendorongnya, yaitu :

1. Faktor Internal (dari pelaku usaha sendiri)
   a. Kesadaran akan manfaat legalitas
      Pelaku usaha mulai memahami keuntungan formalitas, seperti akses
      permodalan, perlindungan hukum, dan peluang pasar yang lebih luas.
   b. Keinginan mengakses permodalan
      Untuk mendapatkan kredit dari bank/lembaga keuangan, usaha harus memiliki legalitas seperti NIB, NPWP, dan izin usaha.
   c. Dorongan untuk ekspansi usaha
      Usaha yang ingin berkembang ke pasar lebih luas (termasuk ekspor) akan terdorong untuk menjadi formal agar diakui secara hukum dan dapat menjalin kerja sama yang lebih luas.
   d. Peningkatan kompetensi dan literasi digital
      Meningkatnya literasi digital dan keuangan mendorong pelaku usaha untuk mencatat transaksi secara rapi dan mengurus legalitas formal.
2. Faktor Eksternal (Lingkungan dan Kebijakan)
   a. Kebijakan Pemerintah yang Pro-UMKM
      Adanya insentif dari pemerintah seperti kemudahan perizinan melalui OSS (*Online Single Submission*), bantuan tunai, pelatihan, dan subsidi mendorong pelaku informal untuk masuk sektor formal.
   b. Digitalisasi dan Platform E-Commerce
      Banyak platform online (Tokopedia, Shopee, dsb.) mewajibkan pelaku usaha memiliki legalitas untuk dapat bergabung atau naik level sebagai penjual terpercaya.
   c. Dukungan dari Lembaga Keuangan dan Inkubator

Program dari bank, koperasi, fintech, dan incubator bisnis sering mengharuskan usaha memiliki legalitas agar bisa mendapatkan bantuan, pelatihan, atau pembiayaan.

d. Tekanan dari Rantai Pasok atau Mitra Usaha
   UMKM yang menjadi pemasok bagi perusahaan besar atau pemerintah diminta memiliki dokumen formal seperti SIUP, NPWP, dan sertifikasi tertentu.
e. Perubahan Sosial dan Budaya Usaha
   Adanya perubahan persepsi di masyarakat bahwa usaha yang formal lebih terpercaya dan berkelanjutan.

3. Faktor Pendukung Tambahan
   a. Kemudahan dan Biaya Murah dalam Pengurusan Legalitas
      Reformasi birokrasi dan layanan daring mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas secara cepat dan murah (bahkan gratis).
   b. Akses ke Program Pemerintah dan CSR
      Program bantuan seperti BLT UMKM, bantuan alat produksi, sertifikasi halal, dan pelatihan sering kali hanya diberikan kepada usaha yang sudah formal.

Perkembangan sektor koperasi serta usaha kecil dan menengah di Kabupaten Lamongan menunjukkan kecenderungan positif dalam beberapa tahun terakhir. Kualitas koperasi terus meningkat, ditandai dengan peningkatan persentase koperasi berkualitas dari tahun ke tahun. Pada sektor usaha kecil, kontribusinya terhadap keseluruhan usaha mikro dan kecil juga mengalami pertumbuhan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dukungan kebijakan pemerintah, akses permodalan yang lebih luas, serta semakin berkembangnya ekosistem bisnis di Kabupaten Lamongan. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa sektor usaha mikro memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan.

12. PENANAMAN MODAL

Urusan penanaman modal merupakan salah satu urusan konkuren yang strategis dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan berdaya saing, baik melalui penyederhanaan perizinan, penyediaan infrastruktur pendukung, maupun pemberian insentif dan kemudahan kepada investor. Penanaman modal tidak hanya menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, serta pemerataan pembangunan. Kinerja urusan penanaman modal di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-34 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Realisasi Investasi PMDN	124.466.200.000	210.896.000.000	205.375.600.000	1.544.395.000.000	1.363.901.585.439
Nilai Realisasi Investasi PMA	364.823.000.000	173.542.700.000	285.773.017.100	435.430.376.989	2.437.252.226.989
Peningkatan Nilai Investasi PMDN dan PMA	489.289.200.000	384.438.700.000	491.148.617.100	1.979.825.376.989	3.801.153.812.428
Jumlah Izin Usaha yang dikeluarkan	3.619	5.665	23.218	41.676	31.582
Jumlah Investor PMDN	2991	66	82	248	565
Jumlah Investor PMA	24	13	26	76	107
Persentase Peningkatan Investasi	N/A	N/A	1.5	2	8.02

Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten Lamongan, 2025

Berdasarkan data capaian urusan penanaman modal Kabupaten Lamongan tahun 2020-2024, terdapat kecenderungan positif dalam perkembangan realisasi investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Ke depan

memerlukan strategi dan arah kebijakan untuk meningkatkan realisasi investasi melalui identifikasi sektor unggulan dengan penyusunan dan pemetaan potensi investasi, kemudahan perizinan melalui Sistem OSS dan tepat waktu, peningkatan infrastruktur, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif agar dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial secara optimal.

13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan kepemudaan dan olahraga merupakan urusan wajib non-layanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Melalui berbagai program dan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga, pemerintah diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Berikut ini capaian yang telah diraih dalam urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Lamongan.

Tabel 2-35 Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan prestasi Olahraga	N/A	12.6	13.04	14.00	39%
Persentase Peningkatan Prestasi Pemuda dan Atlet	12%	41%	20,85%	20,85%	Indikator tidak di gunakan
Jumlah Atlet Binaan	91	252	636	839	66
Jumlah Atlet Berprestasi	104	117	105	306	447
Jumlah Sarana Prasarana Olahraga	7	7	8	8	8
Jumlah Cabang Olahraga yang Terfasilitasi	30	30	36	39	39
Jumlah Organisasi pemuda	27	27	28	19	29
Jumlah Pemuda Berprestasi	98	9	19	92	93
Jumlah Pemuda Wirausaha	0	53	57	107	112

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, 2025

Capaian kinerja pada urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Lamongan pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pembinaan serta dukungan terhadap

atlet, yang kemungkinan didorong oleh kebijakan pengembangan olahraga daerah dan peningkatan fasilitas latihan. Namun demikian terkait prestasi pemuda dan atlet perlu penguatan pembinaan kompetisi yang diikuti, serta dukungan sarana dan prasarana. Ke depan pemerintah perlu mendorong partisipasi pemuda dalam organisasi formal.

14. STATISTIK

Urusan statistik memiliki peran strategis dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, karena menyediakan data yang akurat dan terstruktur sebagai dasar pengambilan kebijakan. Melalui pengelolaan data yang sistematis, Pemerintah Daerah dapat memantau perkembangan sosial, ekonomi, dan demografi, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam berbagai sektor. Kinerja Pemerintah Daerah dalam urusan statistik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2-36 Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	35,80 %	51,34 %	55,30 %	56,36 %	39,07 %
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	N/A	N/A	N/A	N/A	1,99

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, 2025

Tabel di atas menunjukkan perkembangan dalam publikasi data statistik sektoral fluktuasi yang cukup signifikan. Faktor yang mempengaruhi dinamika ini adalah ketersediaan data dan efektivitas sistem pengelolaan informasi. Sejauh ini seluruh perangkat daerah secara konsisten telah memanfaatkan data statistik dalam perencanaan pembangunan untuk memastikan bahwa perencanaan akurat dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sedangkan terkait dengan Indeks Pembangunan Statistik, penghitungannya baru dimulai tahun 2024. Kedepan, Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan capaian indeks tersebut melalui percepetan implementasi Satu Data Indonesia, peningkatan kualitas data, penyempurnaan proses bisnis statistik dan penguatan kelembagaan.

15. PERSANDIAN

Urusan persandian memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan data serta memastikan kenyamanan masyarakat dalam mengakses informasi secara digital. Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya layanan berbasis elektronik, Kabupaten Lamongan terus berupaya memperkuat sistem keamanan siber untuk melindungi data yang dipublikasikan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keamanan informasi menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital, aman, dan terpercaya.

Tabel 2-37 Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengamanan sistem elektronik dan informasi	N/A	N/A	10,24%	17,94%	25,62%
Persentase Ketersediaan Jaringan Intranet Dan Akses Internet Publik	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Laporan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	87,94%	83,13%	93,34%
Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	N/A	N/A	N/A	19,07%	36,50%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, 2025

Capaian kinerja urusan persandian di Kabupaten Lamongan sepanjang tahun 2020-2024 menunjukkan kecenderungan positif dalam berbagai aspek keamanan. Kecenderungan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan data digital agar lebih aman dan terjamin serta responsif dalam menangani keluhan masyarakat terkait keamanan dan layanan digital.

16. KEBUDAYAAN

Akulturasi budaya serta adat istiadat di Kabupaten Lamongan merupakan hasil dari perjalanan sejarah panjang yang dipengaruhi oleh tokoh-tokoh dan pemimpin masa lampau. Melalui berbagai upaya pelestarian dan pengembangan, Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai budaya, baik dalam bentuk tradisi, seni, maupun peninggalan sejarah yang menjadi kebanggaan daerah. Capaian

dalam bidang kebudayaan ini menjadi bukti nyata bahwa warisan leluhur terus dirawat dan dikembangkan sebagai bagian dari identitas masyarakat Lamongan.

Tabel 2-38 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	69,47	72,68	73,17	73,55%	74,51%
Jumlah Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan	66	69	70	75	76
Jumlah Kelompok Seni yang dibina	18	18	110	113	122
Seni yang Berprestasi	45	50	50	50	50
Warisan Budaya yang Dilestarikan	n/a	n/a	68,63	73,53	74,51

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan, 2025

Kabupaten Lamongan terus berkomitmen dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan sebagai bagian dari identitas daerah. Salah satu indikator utama adalah persentase cagar budaya yang dilestarikan, dan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan upaya pelestarian terhadap warisan budaya semakin diperkuat.

17. PERPUSTAKAAN

Perpustakaan merupakan sarana penting dalam mendukung proses pembelajaran dan peningkatan literasi masyarakat di Kabupaten Lamongan. Keberadaan perpustakaan di setiap daerah menjadi aspek krusial dalam menunjang pendidikan dan pengembangan wawasan masyarakat. Di Kabupaten Lamongan, pengembangan perpustakaan terus dilakukan untuk meningkatkan akses literasi bagi masyarakat. Saat ini perpustakaan tersedia di berbagai instansi pemerintahan dan ruang publik, sehingga mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dan referensi. Kinerja Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-39 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun

	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pertumbuhan Kunjungan Perpustakaan	3,48	5,27	5,05	4,80	5,48%
Jumlah Pengunjung Perpustakaan	802.293	844.602	887.236	929.886	980.866
Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	-	70,90	65,90	66,21	70,4
Jumlah Perpustakaan desa/ kelurahan/Kecamatan	227	227	227	225	225
Jumlah Perpustakaan yang dibina	120	90	83	46	44
Persentase Peningkatan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	-	2,24%	2,84%	3,35%	3,96%
Persentase Koleksi Daerah Dan Naskah Kuno Yang Dilestarikan	-	91%	91,52%	92,13%	93,02%

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan, 2025

Tabel di atas menunjukkan perkembangan sektor perpustakaan di Kabupaten Lamongan yang cukup signifikan dalam beberapa aspek pada tahun 2020 hingga 2024. Dengan kecenderungan positif ini, diharapkan ekosistem literasi di Kabupaten Lamongan terus berkembang untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Dalam peningkatan kualitas SDM perlu dilaksanakan pengembangan perpustakaan dalam tempat belajar yang efektif sebagai upaya meningkatkan literasi masyarakat. Definisi Operasional tahun 2021 terdiri dari 3 indikator yaitu frekuensi membaca (FB), durasi membaca (DB) dan jumlah bahan bacaan (JBB) sedangkan mulai tahun 2022 indikatornya menjadi 5 yaitu frekuensi membaca (FB), durasi membaca (DB), jumlah bahan bacaan (JBB), frekuensi akses internet (FAT) dan durasi akses internet (DAI).

18. KEARSIPAN

Manajemen kearsipan memiliki peran krusial dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan, baik dalam perencanaan, pengambilan keputusan, hingga perlindungan hak dan kewajiban masyarakat. Arsip tidak hanya menjadi sumber informasi yang akurat, tetapi juga berfungsi sebagai bukti sah dalam berbagai aspek administrasi

dan hukum. Kearsipan menjadi fondasi yang mendukung kelancaran administrasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memperkuat akuntabilitas. Secara keseluruhan kinerja pada urusan kearsipan menunjukkan kecenderungan positif yang mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Capaian pada setiap indikator urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-40 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban	N/A	N/A	53,42%	70,03%	80,11%
Capaian Nilai Audit Kearsipan Eksternal Kabupaten Lamongan	90,6	77,81	89,09	87,11	94,73
Persentase Ketersediaan Arsip Yang Autentik, Utuh, dan Terpercaya	-	25%	30,42%	35,81%	40,02%
Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja Alat Bukti yang Sah dan Pertanggung Jawaban Nasional	n/a	n/a	75.54	75.76	76.85
Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara pemerintah, layanan publik, dan kesejahteraan rakyat	n/a	n/a	100	83.33	83.33

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lamongan, 2025

C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. PERTANIAN

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah sentra pertanian unggulan di Jawa Timur yang memiliki peran penting dalam sektor agrikultur regional. Penerapan teknologi pertanian modern, inovasi dalam metode budidaya, serta dukungan Pemerintah Daerah melalui program peningkatan kesejahteraan petani telah mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Dengan perkembangan ini, Kabupaten Lamongan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga turut berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani yang diukur melalui

Nilai Tukar Petani. Sepanjang tahun 2020-2024 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Lamongan kecenderungannya mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

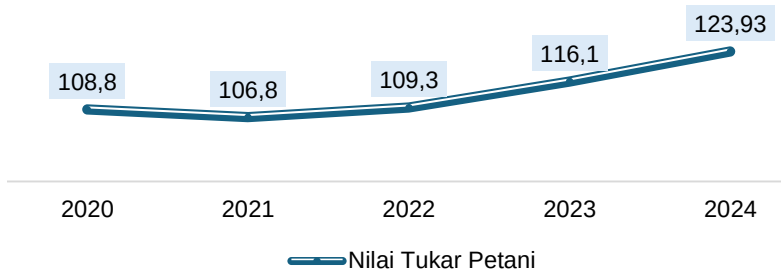

Gambar 2-56 Nilai Tukar Petani Tahun 2020-2024
Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lamongan, Tahun 2025

Adapun hasil produksi pertanian di Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-41 Produksi Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

Produksi Pertanian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah produksi pa (ton)	1.131.952,00	1.196.310,50	1.199.869,00	1.211.189,00	1.138.539,00
Jumlah produksi jagung (ton)	603.967,00	570.200,30	616.046,00	622.086,00	480.505,00
Jumlah produksi kedelai (ton)	8.356,00	9.405,90	8.440,00	13.213,00	5.329,00
Jumlah produksi kacang tanah (ton)	10.093,00	11.737,60	10.497,00	13.929,90	7.238,00
Jumlah produksi kacang hijau (ton)	13.482,00	11.628,00	8.429,00	9.453,10	8.313,00
Ubi kayu (ton)	45.935,00	44.696,00	46.624,00	56.476,50	32.298,00
Ubi jalar (ton)	1.273,00	1.687,00	1.289,00	1.816,80	400
Bawang merah (ku)	14.227,00	12.365,60	7.948,20	4.952,60	2.983,90
Cabe rawit (ku)	115.381,00	461.300,00	266.216,40	262.308,10	330.992,50
Cabe besar (ku)	354	1.314,00	2.314,10	1.765,50	1.485,30
Tomat (ku)	3.455,00	2.604,00	2.724,60	2.495	1.556,50
Mangga (ku)	89.150,00	186.905,30	25.738,00	349.745	261.058,70
Nangka (ton)	13.269,20	2.248,70	2.297,20	26.641,20	21.807,70
Pepaya (ton)	1.376,60	1.045,50	1.431,60	9.163,00	859
Pisang (ton)	15.375,90	22.614,90	470.09,693	18.645,80	23.966,30
Tebu (ton)	258.825,00	197.797,00	226.994,00	248.466	214.104,00
Tembakau (ton)	14.557,50	10.005,00	4.054,00	13 166	9.834,00
Jumlah Populasi Ternak Sapi (ekor)	101.285	117.889	93.891	96.632	107.333
Jumlah Populasi Ternak Kuda (ekor)	58	103	98	98	92
Jumlah Populasi Ternak Kambing (ekor)	85.248	92.109	84.857	94.635	95.811
Jumlah Populasi Ternak Domba (ekor)	62.528	68.707	67.594	70.238	84.721
Jumlah Populasi Ternak Ayam (ekor)	5.304.893	27.817.836	37.797.255	33.537.206	31.063.644
Jumlah Populasi Ternak Itik (ekor)	301.484	296.818	172.100	172.560	271.328

Produksi Pertanian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Daging Sapi (Kg)	749.614	4.949.796	5.086.414	4.960.048	3.802.901
Jumlah Produksi Daging Kambing (Kg)	220.769	618.072	643.541	624.338	639.759
Jumlah Produksi Daging Domba (Kg)	182.597	362.852	346.368	344.586	377.669
Jumlah Produksi Daging Ayam Pedaging (Kg)	6.063.426	14.536.171	14.336.508	16.065.118	15.472.161
Jumlah Produksi Daging Itik (Kg)	133.198	426.215	494.828	521.924	543.612
Nilai Produksi Daging Sapi (Rp)	505.290.025.068	519.728.580.000	584.937.610.000	571.400.459.826	426.069.422.238
Nilai Produksi Daging Kambing (Rp)	48.883.932.552	66.751.776.000	74.007.215.000	68.677.224.000	86.367.465.000
Nilai Produksi Daging Domba (Rp)	28.698.327.532	39.188.016.000	39.832.320.000	37.904.460.000	50.985.315.000
Nilai Produksi Daging Ayam Pedaging (Rp)	212.219.910.000	548.013.646.700	517.547.938.800	577.759.245.629	552.634.646.598
Nilai Produksi Daging Itik (Rp)	4.229.036.500	17.901.030.000	2.004.264.000	23.404.855.400	21.200.868.000
Jumlah Produksi Telur Itik (Kg)	766.524	500.742	331.421	5.788.911	364.563
Jumlah Produksi Telur Ayam (Kg)	1.524.883	4.975.087	5.474.671	291.786	4.712.690
Nilai Produksi Telur Ayam (Rp)	139.879.418.624	614.774.175.600	1.035.644.787.000	159.279.972.211	846.111.535.272
Nilai Produksi Telur Itik (Rp)	9.572.117.000	11.130.675.000	6.453.750.000	11.296.883.823	11.000.993.760

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, Tahun 2025

Capaian tersebut menjadikan Kabupaten Lamongan menjadi salah satu daerah yang berkontribusi besar dalam ketahanan pangan regional dan nasional, dengan terus didorongnya program inovasi teknologi pertanian, pemberdayaan petani, dan perbaikan sistem distribusi hasil pertanian. Melalui optimalisasi, diharapkan produksi pertanian Lamongan dapat kembali meningkat di masa mendatang. Jika dilihat dari persentase peningkatan produksi pada urusan pertanian selama 5 tahun terakhir kecenderungannya masih fluktutif. Hal tersebut dipengaruhi banyak hal diluar kendali Pemerintah Daerah. Kondisi tersebut terlihat pada capaian indikator yang tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2-42 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan produksi tanaman pangan	N/A	N/A	2.56%	3.34%	3.01%
Peningkatan Produksi Hortikultura	N/A	N/A	1.54%	0.99%	1.03%
Persentase Peningkatan Produksi Daging	-58.25%	87.42%	1.13%	10.37%	-7.85%
Persentase Peningkatan Produksi Telur	-77.35%	159.19%	1.00%	2.84%	-14.23%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2025

2. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sektor kelautan dan perikanan merupakan pilar penting dalam struktur ekonomi daerah Kabupaten Lamongan, dengan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan, kesejahteraan nelayan, serta daya saing wilayah pesisir. Optimalisasi potensi perikanan tangkap dan budidaya, penguatan sistem rantai pasok, serta peningkatan nilai tambah hasil perikanan menjadi fokus utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi para nelayan dan pembudidaya yang direpresentasikan dengan Indeks Harga yang diterima nelayan/pembudidaya. Kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan secara umum sangat positif dan kecenderungannya mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2-43 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Harga yang diterima nelayan/ pembudidaya	127	120,17	133,88	139,18	146,3
Produksi Perikanan Tangkap	100.35%	103.40%	103.04%	107.37%	101.81%
Produksi Perikanan Budi Daya	100.42%	100.46%	98.99%	76.32%	72.30%
Jumlah Kapal (Unit)	3,423	3,423	3,423	3,423	3423
Jumlah Nelayan (Orang)	25,382	25,382	25,382	25,382	25382
Jumlah Alat Tangkap Ikan di Laut (Unit)	52,269	52,269	52,269	52,269	52269
Jumlah Pembudidaya (RTP)	27,790	27,788	27,788	37.516	37516
Produksi Garam (Ton)	7,947.60	22,149.10	2,599.32	31,648.85	30166,62
Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI)	1227	1243	1269	1308	1307
Jumlah Ikan yang diolah (Ton)	89,179.36	90,179.71	91,352.30	91.825,32	92906,44
Pengolah Ikan (Orang)	5,975	6,010	6,060	6,094	6104
Pemasar (Orang)	929	1,105	1,105	1,105	1105

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, Tahun 2025

3. PARIWISATA

Kabupaten Lamongan memiliki potensi pariwisata yang berkembang pesat dengan daya tarik alam, budaya, dan kuliner yang khas. Sektor pariwisata terus didorong sebagai salah satu pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi

daerah. Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan infrastruktur, aksesibilitas, serta fasilitas wisata guna memberikan kenyamanan bagi wisatawan.

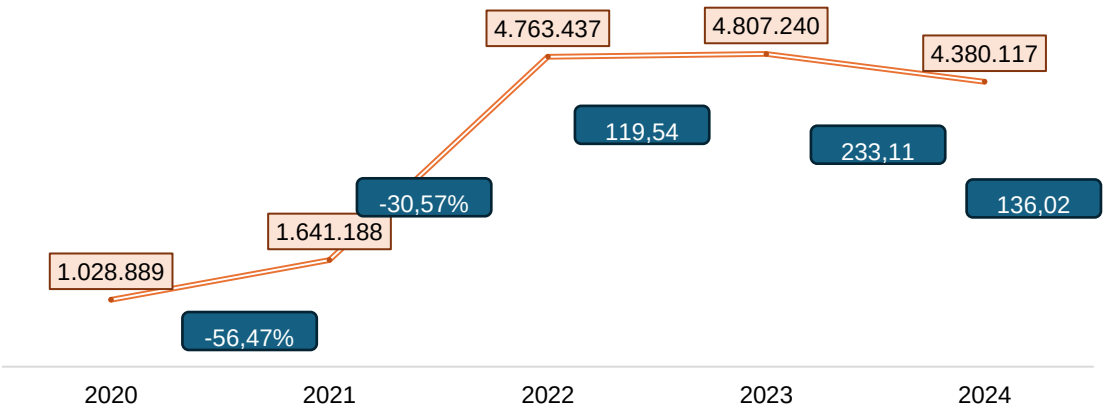

Gambar 2-57 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan, 2025

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Lamongan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2020-2024. Namum demikian, angka kunjungan pada tahun 2024 masih cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan menunjukkan bahwa sektor pariwisata Kabupaten Lamongan tetap memiliki daya tarik yang kuat bagi wisatawan. Selain itu peningkatan jumlah unit usaha di sektor pariwisata ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, peningkatan minat wisatawan, serta pengembangan infrastruktur yang semakin mendukung industri wisata di Kabupaten Lamongan. Kinerja Pemerintah Daerah dalam optimalisasi potensi sektor pariwisata dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-44 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	1,64	1,7	1,75	1,88	1,98
Jumlah Wisatawan Nusantara	1.028.844	1.641.160	4.763.350	4.807.240	4.379.637
Jumlah Wisatawan Mancanegara	45	28	98	541	480
Perjalanan Wisata / Biro Wisata	47	49	52	51	84

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Minum/Caffe	23	23	28	30	82
Restoran/Rumah Makan	23	25	28	33	66
SPA	5	6	8	17	24
Hotel	12	13	13	13	15
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	17	19	21	20	22

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan, 2025

4. PERINDUSTRIAN

Sektor industri pengolahan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Kinerja PDRB industri pengolahan mencerminkan tingkat produktivitas, nilai tambah, serta daya saing sektor industri di wilayah tersebut. Penguatan sektor industri tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja, mendorong inovasi, serta memperkuat keterkaitan antar sektor ekonomi lainnya seperti pertanian, perdagangan, dan jasa logistik. Kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan perindustrian setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2-45 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	-2.08%	7.20%	7.98%	6.71%	7.66%
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	10.56%	11.28%	11.38%	11.74%	12.23%
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan	52,163	54,935	60,823	64,585	68,293
Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan	1,747,331,800,000	2,684,585,413,605	3,273,673,997,144	3,570,782,519,226	4,759,282,095,176

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, 2025

5. PERDAGANGAN

Urusan perdagangan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui penguatan tata kelola pasar

rakyat, pengembangan sistem distribusi yang efisien, pemanfaatan teknologi informasi dalam perdagangan, dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok, Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan daya saing produk lokal serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Urusan perdagangan bukan hanya tentang transaksi jual beli, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan perdagangan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan nilai ekspor melalui kurasi produk, diversifikasi produk, dan promosi ekspor. Capaian pada urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-46 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Ekspor Barang	Rp.43.742.000.000	Rp.1.888.725.000.000	Rp.107.530.554.591.540	Rp. 96.511.365.385.445,6	Rp.20.781.794.661.355
Persentase peningkatan jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	6.698 unit	1.680 unit	4.467 unit	3.150 Unit	4.303 Unit
Persentase peningkatan omset produk lokal	4.65%	5.25%	6%	6.88%	7.00%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, 2025

6. TRANSMIGRASI

Urusan transmigrasi merupakan salah satu bagian dari kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk pemerataan penduduk, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan ketahanan wilayah. Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam menyukseskan program transmigrasi, baik sebagai daerah asal (pengirim) maupun daerah tujuan (penerima), melalui sinergi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Transmigrasi bukan semata perpindahan penduduk, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan wilayah yang mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru, membuka akses sumber daya alam secara produktif, serta memperkuat integrasi sosial dan ekonomi antara masyarakat lokal dan transmigran. Dukungan

Pemerintah Daerah terhadap gerakan transmigrasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-47 Jumlah Kepala Keluarga Transmigran dari Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kepala Keluarga Transmigran yang diberangkatkan	0	0	0	5	0

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan, 2024

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 hingga 2022 tidak ada warga yang diberangkatkan dalam program transmigrasi. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan dengan adanya 5 kepala keluarga yang mengikuti program tersebut sebagai upaya pemerataan pembangunan serta pemberian fasilitas pendukung bagi calon transmigran.

D. URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN

1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Sekretariat Daerah memiliki peran strategis sebagai simpul koordinasi dan integrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks reformasi birokrasi, Sekretariat Daerah menjadi motor penggerak transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, efisien, dan berbasis hasil. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip good governance, Sekretariat Daerah berperan penting dalam menciptakan pelayanan publik yang responsif, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta menjamin keterpaduan dalam pelaksanaan program strategis daerah. Peningkatan kinerja Sekretariat Daerah meliputi berbagai aspek diantaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintahan, pengadaan barang jasa, pengelolaan sumber daya alam, penyusunan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing perangkat daerah. Adapun capaian kinerja pada urusan administrasi pemerintahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-48 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Penilaian Kepatuhan Penyelanggaraan Layanan Publik Tahun n	-	83,13	76,00	91,20	93.67
Pemanfaatan sistem pengadaan	-	-	-	-	23.87
Tingkat kematangan UKPBJ	-	-	-	-	31.11
Nilai Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Indeks Reformasi Hukum				57,25	97,20
Tingkat Kepuasan Standard Pelayanan Publik				91,2	93,67
Indeks Berakhlak				62	72,08
Indeks Kualitas Kebijakan				50	68,31
Indeks Pelayanan Publik				4,04	4,38

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, 2025

2. KEUANGAN

Tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah bukan sekedar aktivitas administratif, tetapi mencerminkan integritas, transparansi, dan tanggung jawab atas penggunaan anggaran. Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu merencanakan, mengalokasikan, merealisasikan, serta mempertanggungjawabkan anggaran secara tepat sasaran dan berbasis hasil. Kualitas tata kelola keuangan daerah menjadi indikator kunci keberhasilan pembangunan.

Dalam upaya mendukung akuntabilitas keuangan daerah, Pemerintah Daerah menyediakan layanan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah melalui berbagai kanal pembayaran. Indikator utama yang digunakan dalam aspek implementasi adalah transaksi belanja, transaksi pendapatan dan pemanfaatan kanal pembayaran. Indikator

utama yang digunakan dalam aspek implementasi adalah pemanfaatan kanal pembayaran yang tercermin dari transaksi belanja dan pendapatan.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam tata kelola keuangan untuk mewujudkan good governance dan mendukung upaya reformasi birokrasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-49 Capaian Bidang Keuangan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	16.97	20.32	17.31	16.47	17.01%
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	94.58%	94.48%	94.59%	89.24%	91.07%
Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	4.18%	2.25%	5.05%	2.36%	2.41%
Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	WTP	N/A	WTP	WTP	WTP
Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	N/A	88,7 %	92,5 %	91,5 %	91,9 %
Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	49%	52%	47%	44%	51%
Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	N/A	N/A	94,98%	94,98%	89,60%
Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	N/A	N/A	1,47%	1,12%	6,34%
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	N/A	N/A	0,33%	0,34%	0,34%
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	0,144	0,1423	0,0392	0,042	0,1412

Sumber: Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, 2025

3. PENGAWASAN

Pengawasan dalam pemerintahan daerah memegang peranan strategis sebagai instrumen pengendali penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Urusan ini tidak semata-mata bersifat korektif, tetapi juga preventif dan edukatif, guna memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Pemerintah Daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta sejalan dengan tujuan pembangunan daerah.

Melalui sistem pengawasan internal yang terintegrasi, Inspektorat Daerah berperan sebagai motor penguatan integritas dan perbaikan tata kelola. Pengawasan juga menjadi penopang utama dalam mewujudkan reformasi birokrasi, mencegah praktik penyimpangan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Dalam konteks perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, pengawasan berfungsi memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, efisiensi penggunaan anggaran, serta ketepatan pencapaian sasaran.

Oleh karena itu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Level Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan indikator strategis untuk mengukur sejauh mana proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab. Keduanya menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Capaian kinerja Pemerintah Daerah bidang pengawasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-50 Capaian Indikator Pengawasan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP	81,30 (A)	81,59 (A)	82,64 (A)	83,00 (A)	83,18 (A)
Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Lamongan, 2025

4. KEPEGAWAIAN

Urusan kepegawaian merupakan fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, dan responsif. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola Aparatur Sipil Negara (ASN) secara sistematis dan berintegritas, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, hingga pembinaan karier dan disiplin. Manajemen kepegawaian merupakan strategi dalam penguatan kapasitas SDM aparatur agar mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam era reformasi birokrasi, pengelolaan kepegawaian harus berbasis pada prinsip merit, akuntabilitas, serta menjunjung tinggi etika profesi.

Melalui manajemen kepegawaian yang baik, Pemerintah Daerah dapat mendorong hadirnya ASN yang profesional, adaptif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Adapun capaian kinerja urusan kepegawaian tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2-51 Capaian Kinerja Kepegawaian Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN	60,68	60,63	72,54	79,28	79,28
Jumlah ASN	8.581	8.791	8.896	10.156	11.959
Rasio Pegawai Pendidikan tinggi Dan menengah/ dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga kesehatan)	65,21%	70,59%	69,51%	70,72%	73.14%
Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga kesehatan)	11,34%	17,35%	25,53%	26,73%	32.54%
Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	52,34%	44,27%	34,16%	38,24%	19.26%

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan, 2025

Capaian di atas menunjukkan bahwa Indeks Profesionalitas ASN mengalami kenaikan dalam 4 tahun terakhir, sedikit poin yang menurun dari tahun 2020 ke tahun 2021 disebabkan karena kenaikan jumlah ASN yang tidak diikuti kenaikan jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dan penyetaraan jabatan struktural pengawas ke jabatan

fungsional, sehingga menyebabkan jabatan fungsional penyetaraan kehilangan nilai dari diklatpim yg telah diikuti. Ini dapat berdampak pada penurunan nilai dimensi kompetensi pada jabatan fungsional hasil penyetaraan tersebut.

Selanjutnya terkait kompetensi jabatan fungsional yang capaiannya cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir ini perlu mendapat dukungan dan komitmen, diharapkan pegawai jabatan fungsional yang memiliki setifikat kompetensi ini akan terus bertambah sehingga kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah juga semakin berkualitas. Kecenderungan capaian yang positif menandakan adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam memperkuat kualitas aparatur melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, serta reformasi sistem manajemen ASN. Namun demikian ke depan perlu melakukan transformasi budaya kerja ASN yang lebih inovatif, adaptif, dan melayani untuk meningkatkan kepercayaan publik.

5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Penelitian dan pengembangan (litbang) daerah memegang peranan penting dalam mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis bukti serta memperkuat kualitas pelayanan publik di daerah. Litbang yang efektif tidak hanya menghasilkan rekomendasi kebijakan, tetapi juga mampu mendorong inovasi pelayanan dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat secara adaptif. Kinerja pada urusan penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-52 Kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penelitian Daerah yang Diterbitkan	5	14	8	7	12

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan, 2025

6. KEWILAYAHAN

Kebijakan pembangunan kewilayahan diarahkan untuk menjamin pemerataan pelayanan publik yang berkeadilan dan berbasis pada potensi serta kebutuhan spesifik tiap wilayah. Dalam lingkup pemerintahan

daerah memiliki keterkaitan erat dengan fungsi dan peran kecamatan sebagai unit administratif terdepan yang menjembatani antara Pemerintah Daerah dan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Kecamatan memegang peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan wilayah secara langsung, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Melalui kecamatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemetaan potensi kewilayahan, mengoordinasikan lintas desa, serta memastikan pemerataan pembangunan secara spasial dan sektoral.

Kecamatan menjadi simpul penting dalam pengendalian ruang, penyebaran layanan publik, dan penguatan kapasitas wilayah, sehingga mampu menjadi motor penggerak pembangunan kawasan sesuai dengan arah kebijakan penataan ruang. Dalam konteks reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif, peran kecamatan harus diperkuat sebagai pusat pelayanan publik dan penghubung antarwilayah yang responsif serta memiliki daya dorong terhadap pengembangan kawasan. Adapun indikator kinerja Pemerintah Daerah yang merepresentasikan kinerja kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-53 Capaian Kinerja Urusan Kewilayahan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat	81,78	82,62	83,78	84,98	88,02

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, 2025

7. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dalam upaya memperkuat kesatuan bangsa dan stabilitas politik daerah, Pemerintah Daerah menempatkan pengelolaan konflik sosial sebagai salah satu aspek strategis. Kesatuan bangsa dan politik yang kokoh menjadi prasyarat utama bagi terciptanya iklim pembangunan yang kondusif. Penanganan konflik secara cepat, tepat, dan berkelanjutan mencerminkan kapasitas pemerintahan yang responsif serta komitmen terhadap terwujudnya masyarakat yang damai, toleran, dan bersatu dalam keberagaman.

Tabel 2-54 Konflik Sosial yang Tertangani di Kabupaten Lamongan 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Konflik Sosial Yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, 2025

Potensi konflik sosial di Kabupaten Lamongan umumnya dipicu oleh isu-isu yang berkaitan dengan keberagaman sosial budaya, distribusi sumber daya, dan dinamika politik lokal, termasuk menjelang pemilihan umum maupun pilkada. Namun demikian, pendekatan kolaboratif antara Pemerintah Daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga adat mampu meminimalisir eskalasi konflik dan mendorong penyelesaian secara damai. Kinerja ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan dan strategi pencegahan konflik telah berjalan efektif dalam menciptakan harmoni sosial dan memperkuat kesatuan bangsa di tingkat lokal.

E. STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Standar Pelayanan Minimum atau SPM adalah bentuk kehadiran negara yang paling nyata di tengah masyarakat, karena menyangkut hak dasar setiap warga negara atas pelayanan publik yang layak, merata, dan berkualitas yang diamanatkan dalam konstitusi yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar, yaitu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta sosial. Setiap Kepala Daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan target SPM secara bertahap dan berkelanjutan, dengan mengedepankan pendekatan berbasis data, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Secara teknis, penerapan SPM pada pemerintahan daerah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Secara umum penerapan SPM di Kabupaten Lamongan sepanjang tahun 2023 hingga 2024 telah berjalan dengan baik dan dilakukan dalam pendekatan yang kolaboratif serta partisipatif. Keseluruhan indikator pada masing-masing urusan realisasinya telah mencapai target. Bahkan pada indikator tertentu telah melampaui target yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-55 Capaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Lamongan Tahun 2023-2024

No	Urusan Wajib	Indikator SPM	Satuan	Target		Realisasi	
				2023	2024	2023	2024
1	**Pendidikan**	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Orang	35.698	35.341	35.698	35.341
2		Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Orang	158.584	157.666	158.584	157.666
3		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	Orang	56.548	1.750	56.548	1.750
1	**Kesehatan**	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100	100	96,56	100
2		Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu 1 tahun	%	100	100	100	100
3		Jumlah semua bayi baru lahir yang ada di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu 1 tahun	%	100	100	100	100
4		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100
5		Persentase anak usia Pendidikan dasar kelas 1 dan 7 ysng mendapatkan pelayanan skrinning Kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100
6		Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja kabupaten tersebut dalam kurun waktu 1 tahun yang sama	%	100	100	100	100
7		Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun keatas yang ada di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan	%	100	100	100	100
8		Jumlah penyandang Diabetes Melitus berdasarkan	%	100	100	100	100

No	Urusan Wajib	Indikator SPM	Satuan	Target		Realisasi	
				2023	2024	2023	2024
		angka prevalensi diabetes melitus nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama					
9		Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	%	100	100	100	100
10		Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun satu tahun yang sama	%	100	100	100	100
11		Persentase estimasi penderita hipertensi berdasarkan prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama	%	100	100	100	100
12		Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama	%	100	100	100	100
1	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Orang	8.000	3.404	8.000	8.000
2		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Orang	600	800	600	800
1	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Rumah	15	72	15	72
2		Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	Rumah	15	-	15	-
1	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda	Orang	160	160	160	160
2		Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	50	50	229	126
3		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	Orang	558.635	290.171	558.635	290.171

No	Urusan Wajib	Indikator SPM	Satuan	Target		Realisasi	
				2023	2024	2023	2024
		informasi rawan bencana					
4		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	280.761	4.500	280.761	4.500
5		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	6.607	100.000	6.607	100.000
6		Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum	Orang	160	160	160	160
1	**Sosial**	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	123,9
2		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100,45
3		Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	108,05
4		Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	134,62
5		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	137,59

Sumber: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Bakesbangpol, Satpol PP dan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, 2025

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

2.2.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan masa lalu merupakan suatu evaluasi dan analisis terhadap performa keuangan daerah pada periode sebelumnya. Kinerja keuangan sendiri dapat meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama 1 periode anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD. Kinerja keuangan dinilai melalui aspek kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi neraca daerah. Secara umum realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Lamongan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan terutama didominasi oleh Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan komponen Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Berikut rekapitulasi Realisasi Kinerja Pelaksanaan APBD Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2020-2024.

Tabel 2-56 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	**PENDAPATAN**	**2.838.272.211.782,49**	**2.975.019.936.520,51**	**2.933.713.997.200,59**	**3.209.621.138.515,87**	**3.299.245.104.194,33**	**3,91%**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**481.752.331.399,49**	**604.587.635.067,78**	**507.680.928.067,59**	**528.609.550.761,87**	**559.457.630.113,33**	**4,86%**
1.1.1	Pajak daerah	134.050.166.691,00	134.404.544.416,00	154.084.289.422,00	160.188.575.701,56	177.555.992.706,00	7,43%
1.1.2	Retribusi daerah	15.570.854.054,00	14.295.271.274,00	23.605.842.847,89	18.816.306.531,00	17.863.416.952,00	7,90%
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	11.584.041.643,40	19.176.236.923,05	17.199.695.333,86	22.627.048.677,73	21.206.931.503,21	20,13%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	320.547.269.011,09	436.711.582.454,73	312.791.100.463,84	326.977.619.851,58	342.831.288.952,12	4,31%
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.702.108.557.689,00**	**2.249.492.084.740,00**	**2.379.301.966.110,00**	**2.679.601.219.354,00**	**2.739.787.474.081,00**	**13,20%**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**1.542.723.757.256,00**	**2.021.549.509.887,00**	**2.158.626.556.653,00**	**2.372.970.211.933,00**	**2.495.357.079.194,00**	**13,23%**
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.542.723.757.256,00	1.637.147.692.887,00	1.742.176.617.653,00	1.910.562.329.933,00	2.038.812.875.194,00	7,23%
1.2.1.1.1	*Dana Bagi Hasil*	112.200.869.038,00	148.887.946.403,00	167.649.781.321,00	287.273.233.421,00	261.213.163.000,00	26,90%
1.2.1.1.2	*Dana Alokasi Umum (DAU)*	1.098.971.379.000,00	1.086.400.453.000,00	1.081.677.782.784,00	1.138.999.743.328,00	1.240.024.937.541,00	3,15%
1.2.1.1.3	*Dana Alokasi Khusus (DAK)*	331.551.509.218,00	401.859.293.484,00	492.849.053.548,00	484.289.353.184,00	537.574.774.653,00	13,28%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	16.542.801.000,00	31.710.550.000,00	42.914.751.000,00	46.488.968.000,00	33,84%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.1.5	Dana Desa	-	367.859.016.000,00	384.739.389.000,00	419.493.131.000,00	410.055.236.000,00	2,84%
1.2.2	**Transfer Antar-Daerah**	**159.384.800.433,00**	**227.942.574.853,00**	**220.675.409.457,00**	**306.631.007.421,00**	**244.430.394.887,00**	**14,62%**
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	159.384.800.433,00	211.028.919.353,00	204.464.150.457,00	252.270.960.500,00	213.723.691.387,00	9,35%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	16.913.655.500,00	16.211.259.000,00	54.360.046.921,00	30.706.703.500,00	46,91%

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**654.411.322.694,00**	**120.940.216.712,73**	**46.731.103.023,00**	**1.410.368.400,00**	**-**	**-84,97%**
1.3.1	Hibah	103.310.987.694,00	14.431.221.275,00	46.731.103.023,00	1.410.368.400,00	-	-14,80%
1.3.2	Dana Darurat	-	6.329.516.437,73	-	-	-	-25,00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	551.100.335.000,00	100.179.479.000,00	-	-	-	-45,46%
2	**BELANJA**	**2.823.137.926.114,77**	**2.871.007.882.801,56**	**3.188.162.740.326,07**	**3.161.814.099.392,23**	**3.207.611.153.293,61**	**3,34%**
2.1	**Belanja Operasi**	**1.861.982.448.324,36**	**1.911.338.698.892,07**	**2.008.508.123.439,87**	**2.033.266.925.984,73**	**2.207.057.836.253,55**	**4,38%**
2.1.1	Belanja Pegawai	995.849.756.334,00	980.281.672.747,00	942.838.850.247,00	921.124.909.913,00	1.129.756.185.828,00	3,74%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	610.356.704.432,44	706.748.069.748,07	813.027.034.924,23	790.209.752.344,73	795.835.423.579,55	7,18%
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	1.798.705.622,06	9.914.315.232,00	1.671.604.633,00	92,01%
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.5	Belanja Hibah	242.509.921.057,92	212.397.406.497,00	236.900.950.146,58	296.399.243.445,00	269.739.822.213,00	3,81%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	13.266.066.500,00	11.911.549.900,00	13.942.582.500,00	15.618.705.050,00	10.054.800.000,00	-4,19%
2.2	**Belanja Modal**	**325.359.777.833,41**	**327.391.789.305,79**	**492.502.248.778,20**	**340.701.844.161,50**	**387.758.173.264,06**	**8,51%**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	836.328.700,00	-	42.354.601.601,00	-	-	-50,00%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212.670.388.785,65	117.818.225.581,72	133.859.921.691,00	65.249.341.808,50	96.038.188.540,00	-8,76%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.758.991.651,51	58.426.028.680,18	74.106.837.292,15	82.677.140.425,00	53.237.324.951,21	13,38%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.343.516.692,25	135.958.909.722,89	229.769.914.025,05	179.969.688.164,00	220.926.231.354,00	42,99%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.750.552.004,00	12.149.605.228,00	12.410.974.169,00	12.805.673.764,00	17.489.428.418,85	38,30%

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	3.039.020.093,00	-	-	67.000.000,00	-25,00%
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**30.458.335.442,00**	**19.385.935.437,00**	**2.909.275.800,00**	**163.000.000,00**	**4.154.276.306,00**	**558,22%**
2.4	**Belanja Transfer**	**605.337.364.515,00**	**612.891.459.166,70**	**684.243.092.308,00**	**787.682.329.246,00**	**608.640.867.470,00**	**1,32%**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.514.378.515,00	15.934.507.526,70	16.710.399.300,00	9.695.206.282,00	27.966.140.538,00	275,89%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	603.822.986.000,00	596.956.951.640,00	667.532.693.008,00	777.987.122.964,00	580.674.726.932,00	0,47%
	SURPLUS/ DEFISIT	15.134.285.667,72	104.012.053.718,95	-254.448.743.125,48	47.807.039.123,64	91.633.950.900,72	
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**43.165.160.938,77**	**53.575.446.606,49**	**354.152.823.586,90**	**73.653.824.577,12**	**24.186.513.840,76**	**109,70%**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	30.127.893.188,77	51.424.446.606,49	155.087.500.325,44	73.502.909.577,12	24.186.513.840,76	38,14%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	198.935.958.261,46	-	-	-25,00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	129.365.000,00	150.915.000,00	-	-20,84%
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	13.037.267.750,00	2.151.000.000,00	-	-	-	-83,50%
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**6.875.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**26.200.772.165,10**	**97.273.427.460,00**	**77.273.427.463,00**	**283,77%**
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang	-	-	26.200.772.165,10	97.273.427.460,00	-	42,82%

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Jatuh Tempo						
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	6.875.000.000,00	2.500.000.000,00	-	-	-	-63,63%
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	77.273.427.463,00	0,00%
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	0,00%
	Pembiayaan Netto	36.290.160.938,77	51.075.446.606,49	327.952.051.421,80	-23.619.602.882,88	-53.086.913.622,24	
	SILPA	51.424.446.606,49	155.087.500.325,44	73.503.308.296,32	24.187.436.240,76	38.547.037.278,48	

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan, 2025 (data diolah)

2.2.2 KINERJA PELAKSANAAN APBD

2.2.2.1 PENDAPATAN DAERAH

Pemerintah Daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain- Lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lamongan dalam 5 tahun mengalami kondisi fluktutif, pada tahun 2022 pendapatan daerah mengalami penurunan. Penurunan pendapatan tersebut terjadi dikarenakan adanya penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sehingga mempengaruhi total jumlah pendapatan daerah. Penurunan pendapatan transfer tersebut dapat disebabkan berbagai hal, salah satunya yakni adanya perubahan dalam kebijakan pendapatan daerah. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah, misalnya saja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencakup pajak daerah, reribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Selain itu penurunan dana perimbangan juga dapat mempengaruhi pendapatan daerah. Berikut ini merupakan pendapatan daerah dan komponen penyusun pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Lamongan dalam lima tahun terakhir:

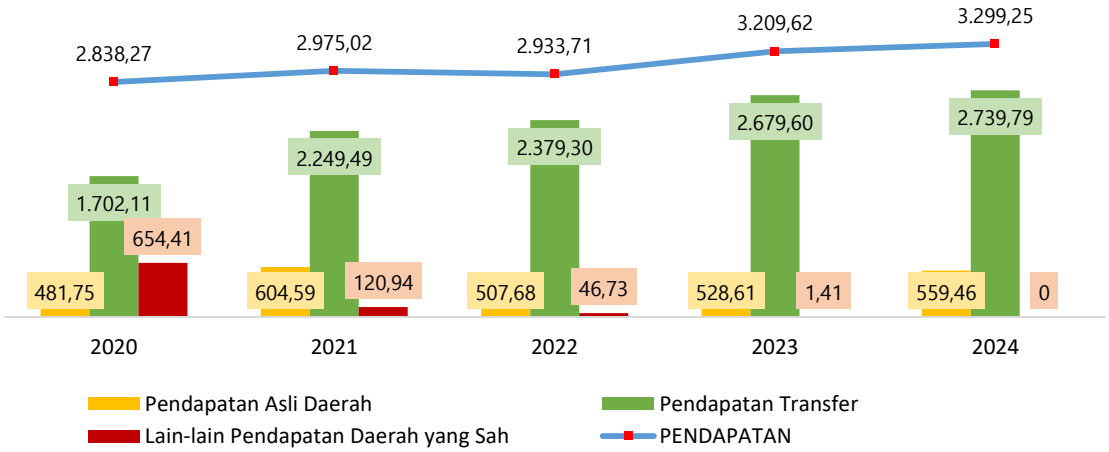

Gambar 2-58 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024
Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Pemerintah Daerah secara keseluruhan mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2024 dimana pada tahun tersebut pendapatan transfer mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 2,25% dibandingkan tahun 2022 dengan rincian tertinggi merupakan kenaikan pendapatan transfer dari Pemerintah Daerah. Meningkatnya pendapatan transfer dapat mengindikasikan berbagai hal positif seperti meningkatnya dukungan pemerintah pusat, adanya kebijakan desentralisasi fiskal yang lebih kuat, pulihnya ekonomi nasional dan pendapatan nasional yang meningkat, peningkatan kinerja dan efisiensi daerah serta adanya program Pembangunan dan proyek khusus.

Meningkatnya transfer pendapatan dari pemerintah pusat menunjukkan adanya peningkatan dukungan dan bantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Hal ini menandakan adanya Upaya pemerintah pusat dalam mendukung Pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Daerah. Selain itu peningkatan pendapatan transfer juga mengindikasikan adanya kebijakan desentralisasi fiskal yang kuat. Hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Daerah mendapatkan urusan otonomi dan sumber daya yang melimpah dari Pemerintah Pusat untuk dikelola sendiri.

Tidak hanya itu saja, peningkatan pendapatan nasional juga memberikan efek positif kepada Pemerintah Daerah karena pemerintah pusat memiliki lebih banyak sumber daya untuk dialokasikan kepada daerah. Adanya peningkatan kinerja dan efisiensi dari Pemerintah Daerah dalam memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk mendapatkan transfer dana juga menjadi salah satu alasan meningkatnya pendapatan transfer. Hal ini dapat diartikan sebagai bentuk reward atau apresiasi kepada Pemerintah Daerah karena telah melakukan pelaksanaan program pembangunan yang efektif dan penggunaan dana yang transparan serta akuntabel. Dengan kata lain, meningkatnya pendapatan transfer yang cukup tinggi di 2024 pada Pemerintah Daerah merupakan suatu tanda positif yang dilihat dari berbagai aspek ekonomi dan kebijakan. Dengan tujuan untuk mendorong pembangunan yang lebih

merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Selain melihat dari jumlah pendapatan daerah dari komponen pendukungnya, peningkatan pendapatan daerah juga dapat dilihat dari pertumbuhan pendapatan setiap tahunnya dan dilihat dari rata-rata pertumbuhannya dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Lamongan:

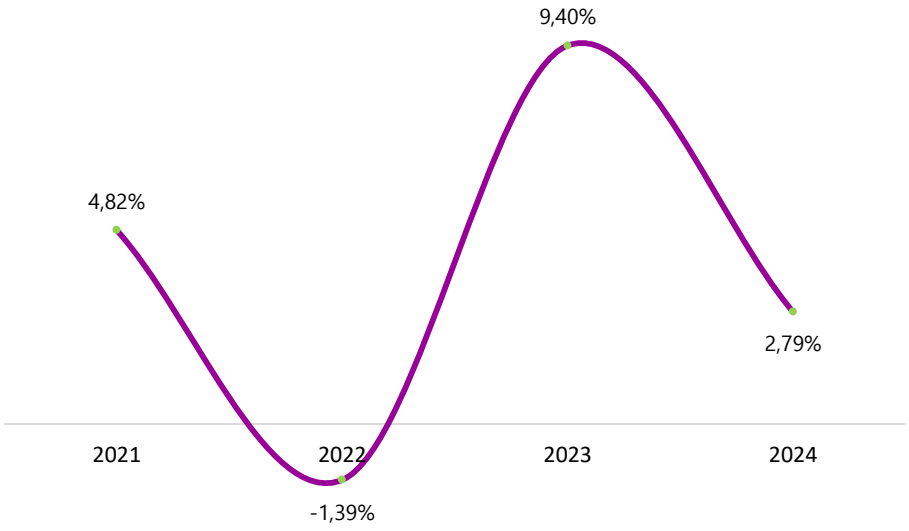

Gambar 2-59 Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Grafik pertumbuhan pendapatan daerah diatas menggambarkan perubahan atau peningkatan pendapatan daerah dari satu periode dengan periode berikutnya. Persentase pertumbuhan pendapatan daerah dapat juga mengindikasikan seberapa cepat atau lambat pendapatan daerah tumbuh dan berkurang. Hasil analisis pertumbuhan pendapatan secara rutin dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mengambil langkah-langkah yang tepat guna meningkatkan pendapatan dan mengelola keuangan daerah secara efisien. Dari hasil grafik pertumbuhan pendapatan daerah di atas, maka dapat dilihat bahwa pergerakan pendapatan daerah Kabupaten Lamongan mengalami pertumbuhan yang cepat setiap tahunnya.

Tahun 2021 kondisi perekonomian Kabupaten Lamongan mengalami pertumbuhan sebesar 4,82%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi di Kabupaten Lamongan, dimana pada tahun tersebut terjadi peningkatan aktivitas ekonomi dan pelonggaran

pembatasan. Terjadinya krisis ekonomi di tahun 2020 memberikan dorongan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan stimulus ekonomi yang membantu dalam meningkatkan pendapatan melalui peningkatan konsumsi dan investasi. Dengan kata lain aktivitas ekonomi di Kabupaten Lamongan sedikit demi sedikit mulai aktif kembali sehingga penerimaan pajak dan retribusi daerah kembali mengalami peningkatan. Suatu kondisi yang tidak dapat diprediksikan di tahun 2022 membalikkan keadaan. Terdapat penurunan pertumbuhan pada tahun tersebut. Hal ini dikarenakan adanya ketidakpastian ekonomi global seperti gangguan kelangkaan pangan pada beberapa daerah yang menjadi pemasok terbesar dan adanya inflasi akibat dari pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020. kebijakan dari pemerintah terkait perdagangan yang berubah-ubah juga dapat mempengaruhi pendapatan daerah. Selain itu lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2022. Terombang-ambingnya kondisi perekonomian Kabupaten Lamongan memberikan dorongan untuk memperbaiki ekonomi daerah.

Di tahun 2023 pendapatan ekonomi Kabupaten Lamongan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 9,40%. Peningkatan pertumbuhan pendapatan daerah tersebut merupakan suatu cerminan akan keberhasilan daerah dalam memulihkan kondisi ekonominya yang lebih berkelanjutan dan stabil. Kembali pulihnya kondisi ekonomi tersebut didukung dengan kebijakan ekonomi yang efektif seperti peningkatan dalam pengumpulan pajak, retribusi dan pengelolaan aset daerah serta meningkatnya UMKM lokal yang dapat menjadi salah satu sumber pajak daerah. Begitu pula pada tahun 2024 sama dengan tahun 2022 pertumbuhan di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan, hal ini terlihat pada tahun 2024 terjadi penurunan hingga mencapai angka 2,79%. Fluktuasi dalam persentase pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Lamongan dari tahun 2020 hingga 2024 dapat mencerminkan dinamika ekonomi lokal dan global serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Adanya pertumbuhan negatif tidak mengesampingkan bahwa secara keseluruhan pemulihan dan peningkatan pendapatan daerah Kabupaten

Lamongan dapat dinyatakan telah berhasil. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan dan kebijakan ekonomi daerahnya dengan baik dalam menghadapi tantangan patut diapresiasi. Keterpurukan akan kondisi ekonomi saat pandemi Covid-19 tidak membuat ekonomi Kabupaten Lamongan mengalami penurunan untuk tahun-tahun selanjutnya. Hal inilah yang membuktikan bahwa Pemerintah Daerah telah berhasil bangkit dari keterpurukan kondisi ekonominya. Berikut rincian persentase pertumbuhan pendapatan dan rata-rata pertumbuhan pada komponen pendukung pendapatan daerah Kabupaten Lamongan:

Tabel 2-57 Persentase Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2024

No.	Uraian	Pertumbuhan				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	25,50%	-16,03%	4,12%	5,84%	4,86%
1.2	Pendapatan Transfer	32,16%	5,77%	12,62%	2,25%	13,20%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	31,04%	6,78%	9,93%	5,16%	13,23%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	43,01%	-3,19%	38,95%	-20,29%	14,62%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-81,52%	-61,36%	-96,98%	-100,00%	-84,97%

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

2.2.2.2 BELANJA DAERAH

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur terkait regulasi belanja daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam tugasnya, pemerintah daerah mencari pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah daerahnya sendiri. Pendapatan tersebut diatur penggunaannya untuk belanja daerah yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah sendiri dapat dibedakan menjadi 4 jenis belanja, yakni: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Belanja operasi merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja pemeliharaan. Belanja modal merupakan belanja yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pembelian data Pembangunan aset tetapi, seperti infrastruktur, bangunan dan peralatan. Belanja tak terduga merupakan belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan sifatnya tidak terduga serta tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti adanya bencana alam atau keadaan darurat lainnya, dan yang terakhir merupakan belanja transfer, belanja ini digunakan untuk transfer kepada pemerintah desa atau badan lainnya. Oleh karena itu, penggunaan belanja daerah dalam penggunaannya diatur dengan ketat untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel dan efektif. Berikut ini merupakan realisasi belanja daerah Kabupaten Lamongan dalam 5 tahun terakhir:

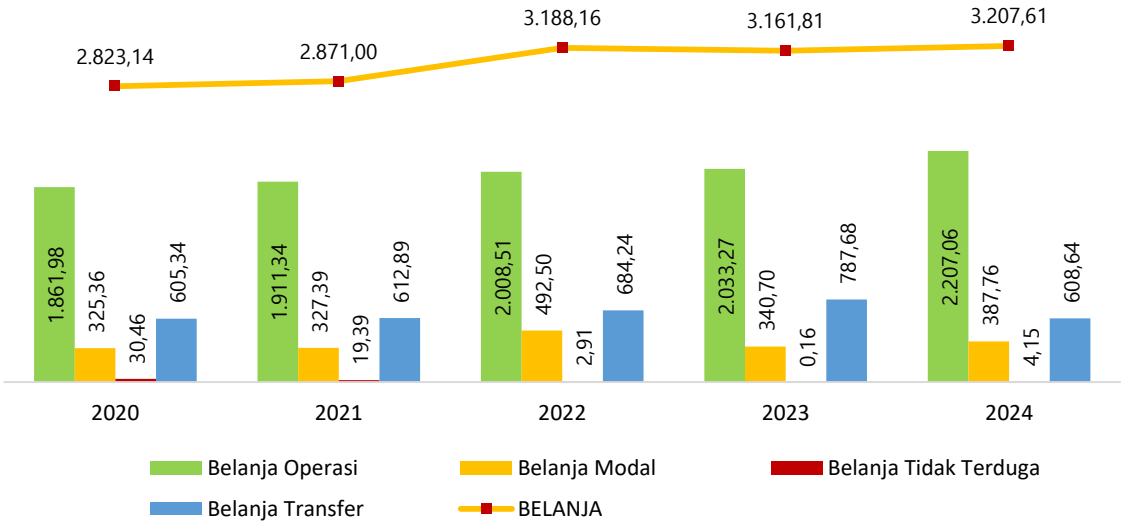

Gambar 2-60 Struktur Belanja Daerah berdasarkan Penggunaannya Tahun 2020-2024
Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Berdasarkan struktur belanja di atas maka dapat dilihat bahwa penggunaan tertinggi ada pada belanja operasi, kemudian belanja transfer, belanja modal dan terakhir belanja tidak terduga. Belanja operasi merupakan pengeluaran yang konsisten mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini dapat dikarenakan adanya kebutuhan rutin dan konsisten yakni seperti gaji pegawai, pemeliharaan aset dan biaya operasional yang setiap bulan selalu dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan pada tahun tersebut. Selain itu, belanja operasi juga digunakan untuk mendukung layanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat seperti pelayanan wajib dasar yang

terdapat Standar Pelayanan Minimum (SPM). Selain itu belanja operasi yang rutin juga dapat memastikan fungsi pemerintahan berjalan lancar tanpa gangguan pembiayaannya. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam merawat aset yang dimilikinya juga menjadi sebuah bentuk investasi berjangka agar aset tidak mengalami kerusakan parah sehingga menimbulkan biaya berlebih untuk perawatannya dimasa mendatang.

Dengan kata lain, belanja daerah di Kabupaten Lamongan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif dengan peningkatan belanja daerah yang signifikan ada pada tahun 2022. Melihat dari penggunaan belanja daerah, belanja operasi menjadi yang paling tinggi penggunaannya. Hal ini dikarenakan pentingnya pendanaan kegiatan operasional rutin yang dapat mendukung pemberian layanan publik sehingga stabilitas fungsi dari Pemerintah Daerah dapat terjaga. Struktur dan kecenderungan belanja daerah di atas, dapat memberikan gambaran pada Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Pembangunan yang berkelanjutan. Berikut ini merupakan persentase pertumbuhan belanja daerah di Kabupaten Lamongan tahun 2020 hingga 2024.

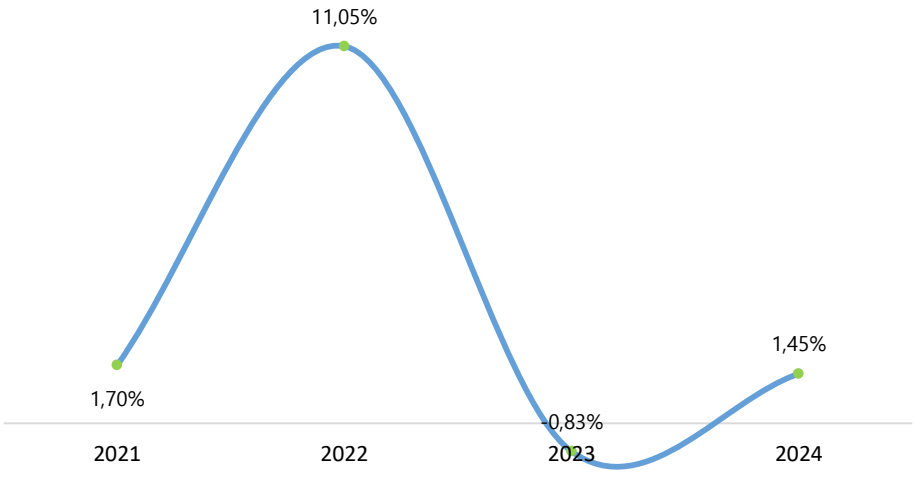

Gambar 2-61 Persentase Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 saat kondisi pandemi mulai dapat terkendali terdapat peningkatan pertumbuhan belanja daerah menjadi 1,70%. Meskipun dalam kondisi masa pandemi,

Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan mulai melanjutkan program pemulihan ekonomi daerah. Hal ini juga dibantu dengan ditemukannya vaksin, sehingga pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam melaksanakan program vaksinasi massal yang tujuannya untuk mengembalikan kondisi masyarakat agar pandemi tidak berakibat fatal pada masyarakat yang terjangkit, selain itu harapannya masyarakat juga dapat bekerja atau melakukan aktivitas ekonomi dan sosial kembali.

Tahun 2022, pertumbuhan belanja mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun tersebut. Salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan belanja adalah meningkatnya belanja modal daerah. Dengan kondisi yang mulai berangsur-angsur membaik, maka Pembangunan yang sempat tertunda di tahun 2020 mulai digalakan kembali. Ekonomi yang mulai pulih secara lebih signifikan diiringi dengan peningkatan aktivitas ekonomi sehingga pendapatan daerah juga mengalami peningkatan. Hal ini membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan program yang sempat tertunda dan sedikit demi sedikit mengalihkan pembiayaan pada kesehatan serta bantuan sosial kepada kegiatan pelayanan dan proyek Pembangunan infrastruktur untuk memberikan pelayanan pada masyarakat secara maksimal.

Sedangkan di tahun 2023, pertumbuhan belanja mulai mengalami penurunan kembali. Penurunan ini dinilai cukup jauh dibandingkan dengan tahun 2022 yakni sebesar -0,83%. Adanya penurunan belanja daerah di tahun 2023 dikarenakan penurunan belanja modal dan belanja tidak terduga. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian anggaran, yang dimana di tahun 2022 pada belanja modal mengalami peningkatan hingga 50,43% dan di tahun 2023 menurun menjadi - 30,82%. Sedangkan untuk alokasi belanja tidak terduga mengalami penurunan -94,40% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Daerah melakukan upaya dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan mengurangi belanja yang dianggap tidak mendesak atau tidak efisien. Kemudian pada tahun 2024 terjadi peningkatan pada belanja daerah Kabupaten Lamongan atau menjadi sebesar 1,45%. Peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan

signifikan pada komponen belanja tidak terduga menjadi sebesar 2448,64% dimana pada tahun sebelumnya memiliki pertumbuhan sebesar -94,40%. Berikut ini merupakan uraian pertumbuhan penggunaan belanja daerah di Kabupaten Lamongan untuk tahun 2021 hingga 2024:

Tabel 2-58 Persentase Pertumbuhan Pengunaan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2024

No.	Uraian	Pertumbuhan				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	
2.1	Belanja Operasi	2,65%	5,08%	1,23%	8,55%	4,38%
2.2	Belanja Modal	0,62%	50,43%	-30,82%	13,81%	8,51%
2.3	Belanja Tidak Terduga	-36,35%	-84,99%	-94,40%	2448,64%	558,22%
2.4	Belanja Transfer	1,25%	11,64%	15,12%	-22,73%	1,32%

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

2.2.2.3 PEMBIAYAAN DAERAH

Analisis pembiayaan memberikan gambaran mengenai selisih antara pendapatan yang diterima daerah secara agregat, dengan belanja yang merepresentasikan upaya perencanaan di daerah. Asumsi pembiayaan memiliki perbedaan yang signifikan dengan upaya perhitungan pendapatan dan pengeluaran. Pembiayaan bermaksud untuk menutup kekurangan (defisit) antara pendapatan dengan belanja pada tahun tersebut. Asumsi yang digunakan adalah pembiayaan tidak memiliki kepastian untuk naik atau turun dengan maksud pembiayaan dapat mencapai angka equilibrium yakni Rp 0,-. Sesuai dengan tujuan dan maksud analisis pembiayaan daerah diupayakan dapat menutup kekurangan atas angka belanja yang melebihi pendapatan yang diterima daerah (asumsi defisit), maka SILPA tahun berkenaan ditinjau dari efektivitas keuangan juga dapat difungsikan sebagai saving yang tidak diduga. Namun dalam hal perencanaan SILPA yang tinggi menunjukkan adanya perencanaan/ pelaksanaan belanja yang kurang baik.

Secara umum pembiayaan daerah terbagi menjadi dua kategori utama yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah meliputi pertama, sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang merupakan sisa lebih anggaran dari tahun sebelumnya yang dapat digunakan pada tahun anggaran berjalan. Kedua, pencairan dana cadangan yang penggunaan dananya telah dicadangkan

pada tahun-tahun sebelumnya untuk tujuan tertentu. Ketiga, Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan yakni penerimaan dari penjualan aset daerah yang tidak termasuk dalam penggunaan rutin. Keempat, pinjaman daerah yakni dana yang diperoleh dari pihak ketiga misalnya saja dari pemerintah pusat, bank, atau lembaga keuangan lainnya yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan tanpa bunga. Kelima, penerimaan kembali pemberian pinjaman yakni pengembalian dana yang telah dipinjamkan kepada pihak lain.

Dalam pengeluaran pembiayaan daerah sendiri meliputi pertama, pembentukan dana cadangan yakni pengalokasian dana untuk keperluan yang telah direncanakan di masa mendatang seperti pembangunan infrastruktur atau program-program tertentu. Kedua, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah yakni dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Daerah dalam BUMD atau perusahaan lainnya untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Ketiga, pembayaran utang pokok yakni pembayaran kembali pokok pinjaman yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah. Keempat, Pemberian pinjangam kepada pihak ketiga yakni penyaluran dana kepada masyarakat atau lembaga lain yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Berikut ini merupakan pertumbuhan pembiayaan di Kabupaten Lamongan Tahun 2021 hingga 2024:

Tabel 2-59 Persentase Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2024

No.	Uraian	Pertumbuhan				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	24,12%	561,04%	-79,20%	-67,16%	109,70%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-63,64%	948,03%	271,26%	-20,56%	283,77%

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

2.2.3 NERACA DAERAH

Neraca Daerah merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah yang nantinya menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Neraca Daerah menggambarkan posisi aset, hutang dan kekayaan bersih (modal) yang

dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan Neraca Daerah berdasar pada standar akuntansi Pemerintah Daerah yang meliputi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana.

a) Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar.

- Aset Lancar

  Aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari kas atau aset lainnya yang dapat diuangkan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan mendatang.
- Aset Non Lancar

  Aset yang tidak dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

b) Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

  Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

c) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi.

Secara lebih rinci berikut merupakan realisasi aset, kewajiban dan ekuitas dana Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024:

Tabel 2-60 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Lamongan 2020-2024

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**ASET**						
1.1.	**ASET LANCAR**	**119.387.482.217,18**	**290.506.574.851,43**	**143.914.659.819,86**	**84.642.283.802,07**	**96.454.877.466,93**	**16,41%**
1.1.1.	Kas	51.429.558.606,49	155.123.570.927,44	73.503.308.296,32	24.187.436.240,76	38.552.546.974,48	35,33%
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.3.	Piutang Pendapatan	28.045.815.651,00	18.140.758.055,00	33.170.488.672,00	44.060.602.856,25	39.134.419.045,80	17,30%
1.1.4.	Penyisihan Piutang	(4.005.220.529,54)	(4.905.758.370,16)	(5.560.323.777,04)	(5.765.898.721,19)	(5.650.842.388,02)	9,38%
1.1.5.	Belanja Dibayar Dimuka	-	-	-	-	40.790.568,00	0,00%
1.1.6.	Persediaan	21.743.292.605,13	41.869.960.924,88	20.296.439.782,14	21.722.782.437,79	24.351.963.266,67	15,04%
1.1.7.	Piutang Lainnya	20.793.949.551,15	79.913.631.921,40	21.961.340.407,64	-	26.000.000,00	27,95%
1.1.8.	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	1.000.000.000,00	-	-	-	-	-25,00%
1.1.9.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	380.086.332,95	364.411.392,87	543.406.438,80	437.360.988,46	-	-18,63%
1.2.	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**758.942.312.644,06**	**764.849.338.650,94**	**774.075.933.650,73**	**786.765.996.734,18**	**819.284.223.841,21**	**1,94%**
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	995.000.000,00	-	-	-	-	-25,00%
1.2.2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	757.947.312.644,06	764.849.338.650,94	774.075.933.650,73	786.765.996.734,18	819.284.223.841,21	1,97%
1.3.	**ASET TETAP**	**4.441.896.295.297,41**	**4.541.671.776.744,17**	**4.770.947.700.700,97**	**4.883.606.599.934,17**	**5.015.211.563.322,90**	**3,09%**
1.3.1.	Tanah	1.438.806.815.502,59	1.437.160.954.235,59	1.478.690.767.466,59	1.500.919.321.049,59	1.461.174.632.902,59	0,41%
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	1.151.535.117.367,13	1.280.547.912.671,93	1.421.064.759.912,13	1.468.899.266.626,63	1.561.099.993.737,48	7,95%
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	1.575.522.171.108,57	1.678.732.518.484,41	1.756.256.163.189,21	1.791.407.679.704,55	1.850.691.105.269,76	4,12%

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.764.759.829.625,09	2.896.341.515.578,83	3.127.774.621.855,50	3.366.572.572.161,50	3.529.235.549.128,50	6,30%
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	59.215.256.420,00	62.361.330.952,00	66.337.345.165,00	73.278.242.758,00	83.489.543.282,00	9,02%
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	1.613.850.000,00	-	8.195.117.483,63	33.643.402.592,63	42.722.854.613,63	59,38%
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	(2.549.556.744.725,97)	(2.813.472.455.178,59)	(3.087.371.074.371,09)	(3.351.113.884.958,73)	(3.513.202.115.611,06)	8,37%
1.4.	**DANA CADANGAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
1.4.1.	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00%
1.5.	**ASET LAINNYA**	**94.432.382.699,06**	**92.368.859.508,51**	**96.605.452.971,79**	**106.338.436.194,77**	**14.155.600.795,14**	**-18,55%**
1.5.1.	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	4.892.393.502,52	5.037.829.355,90	0,74%
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	4.757.874.074,15	4.481.094.794,64	4.648.056.187,51	-	-	-25,52%
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	58.043.736.405,00	58.043.736.405,00	58.043.736.405,00	58.043.736.405,00	-	-25,00%
1.5.4.	Aset Tidak Berwujud	8.671.760.790,00	8.802.841.790,00	8.873.760.708,00	8.906.360.708,00	9.111.569.208,00	1,25%
1.5.5.	Aset Lain-lain	43.150.321.181,55	41.131.470.699,55	41.652.355.791,55	40.307.587.442,55	20.777.426.400,55	-13,77%
1.5.6.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.942.559.255,09)	(7.699.298.232,56)	(8.350.613.664,92)	(8.720.368.254,41)	(8.855.285.849,75)	6,33%
1.5.7.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(13.248.750.496,55)	(12.390.985.948,12)	(23.503.739.876,35)	(24.791.166.763,89)	(11.976.253.553,56)	9,25%
1.5.8.	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	-	-	-	81.857.155,00	60.315.234,00	-6,58%
1.5.9.	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	15.241.897.421,00	27.618.036.000,00	-	-4,70%

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.6.	**PROPERTI INVESTASI**	**-**	**-**	**-**	**-**	**58.043.736.405,00**	**0,00%**
1.6.1.	Properti Investasi	-	-	-	-	58.043.736.405,00	0,00%
	JUMLAH ASET	**5.414.658.472.857,71**	**5.689.396.549.755,05**	**5.785.543.747.143,35**	**5.861.353.316.665,19**	**6.003.150.001.831,18**	**2,62%**
2	**KEWAJIBAN**						
2.1.	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**61.931.987.103,59**	**90.029.660.069,42**	**148.770.908.112,94**	**257.752.186.962,51**	**129.123.230.029,00**	**33,49%**
2.1.1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	201.266.102,00	-	81.857.155,00	65.824.930,00	-29,90%
2.1.2.	Utang Bunga	-	-	-	71.591.796,00	-	-25,00%
2.1.3.	Utang Pajak	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	116.364.569.943,94	77.273.427.456,34	-	-33,40%
2.1.5.	Pendapatan Diterima Dimuka	1.815.235.566,16	1.655.696.873,42	1.609.547.520,00	4.893.561.229,17	5.424.070.048,00	50,82%
2.1.6.	Utang Belanja	58.147.495.485,43	59.542.876.542,00	28.820.401.397,00	152.977.435.825,00	120.883.584.039,00	90,15%
2.1.7.	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.969.256.052,00	28.629.820.552,00	1.976.389.252,00	22.454.313.501,00	2.749.751.012,00	552,28 %
2.2.	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**-**	**-**	**58.182.284.972,40**	**-**	**-**	**-25,00%**
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2.	Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3.	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	58.182.284.972,40	-		-25,00%
	JUMLAH KEWAJIBAN	**61.931.987.103,59**	**90.029.660.069,42**	**206.953.193.085,34**	**257.752.186.962,51**	**129.123.230.029,00**	**37,47%**

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
3	**EKUITAS**						
3.1.	**EKUITAS**	**5.352.726.485.754,12**	**5.599.366.889.685,63**	**5.578.590.554.058,01**	**5.603.601.129.702,68**	**5.874.026.771.802,18**	**2,38%**
3.1.1.	Ekuitas	5.352.726.485.754,12	5.599.366.889.685,63	5.578.590.554.058,01	5.603.601.129.702,68	5.874.026.771.802,18	2,38%
	JUMLAH EKUITAS	**5.352.726.485.754,12**	**5.599.366.889.685,63**	**5.578.590.554.058,01**	**5.603.601.129.702,68**	**5.874.026.771.802,18**	**2,38%**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**5.414.658.472.857,71**	**5.689.396.549.755,05**	**5.785.543.747.143,35**	**5.861.353.316.665,19**	**6.003.150.001.831,18**	**2,62%**

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Berdasarkan pada tabel di atas, maka kondisi keuangan Pemerintah Daerah yang disajikan dalam neraca daerah selama tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.3.1 ASET

Aset Kabupaten Lamongan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Sedangkan Dana Cadangan yang merupakan komponen pada standar akuntansi neraca Pemerintah Daerah tidak terdapat realisasi pada Neraca Daerah Kabupaten Lamongan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024). Secara nilai totalnya, jumlah Aset Kabupaten Lamongan terus mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2.62%. Pada tahun 2020 nilai total aset Kabupaten Lamongan sebesar Rp5.414.658.472.857,71 yang kemudian tumbuh 5,07% di tahun 2021 menjadi Rp5.689.396.549.755,05 dan terus tumbuh 1.69% di tahun 2022 menjadi Rp5.785.543.747.143,35. Pada tahun 2023 total Aset Kabupaten Lamongan kembali meningkat 1.31% menjadi Rp5.861.353.316.665,19. Tahun 2024 merupakan tahun dengan nilai aset tertinggi dengan kenaikan sebesar 2,42% atau menjadi sebesar Rp6.003.150.001.831,18.

Peningkatan pada jumlah Aset Kabupaten Lamongan dipengaruhi oleh hampir keseluruhan komponen asetnya yang juga tumbuh positif dalam 5 (lima) tahun terakhir. Kecuali pada komponen Aset Lancar yang menunjukkan kecenderungan menurun dari Rp290.506.574.851,43 di tahun 2021 menjadi Rp84.642.283.802,07 di tahun 2023. Sedangkan komponen aset yang memiliki pertumbuhan paling progresif dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah Aset Lancar dan Aset Tetap dengan rata-rata pertumbuhan 16,41% dan 3.09%.

2.2.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban dalam Neraca Daerah diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Akan tetapi, Kewajiban yang dimiliki Kabupaten Lamongan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-

2024) didominasi oleh adanya Kewajiban Jangka Pendek. Sedangkan Kewajiban Jangka Panjang hanya terdapat pada tahun 2022 sebesar Rp58.182.284.972,40. Kewajiban Jangka Pendek yang dimiliki Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 sampai 2024 terlihat mengalami peningkatan pada setiap tahunnya namun mengalami penurunan pada tahun 2024. Tahun 2020 tercatat sebesar Rp61.931.987.103,59 menjadi Rp257.752.186.962,51 di tahun 2023 dan menurun pada tahun 2024 menjadi Rp129.123.230.029,00 sehingga pada tahun 2020 hingga 2024, Kewajiban Jangka Pendek yang dimiliki Kabupaten Lamongan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 33,49%. Adapun komponen Kewajiban Jangka Pendek yang mengalami peningkatan paling signifikan ada pada Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang memiliki rata-rata pertumbuhan mencapai 90,15% dan 552,28%.

2.2.3.3 EKUITAS

Ekuitas merupakan nilai selisih antara Aset dan Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Sehingga nilai yang muncul pada ekuitas dapat menggambarkan kekayaan bersih atau modal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Sesuai yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa besaran nilai kewajiban yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan dalam 5 (lima) tahun terakhir berada pada persentase kurang dari 5% dibandingkan nilai asetnya. Dengan kondisi tersebut, maka kekayaan bersih atau ekuitas yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan pada tahun 2020-2024 menunjukkan nilai yang tidak jauh berbeda dengan nilai asetnya. Yakni sebesar Rp5.352.726.485.754,12 di tahun 2020 yang kemudian tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,38% dalam 5 (lima) tahun hingga menjadi Rp5.874.026.771.802,18 di tahun 2024. Apabila dilihat berdasarkan keseimbangan neraca daerah, maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas dana tercatat sebesar 2,62% atau memiliki nilai yang sama dengan pertumbuhan asetnya. Melihat data nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang disajikan dalam neraca, maka selanjutnya dapat

dilakukan perhitungan dan analisis mengenai rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas keuangan Pemerintah Daerah.

A. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang digunakan dalam neraca daerah adalah rasio lancar dan rasio *quick*. Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang/ kewajiban jangka pendek yang segera harus dipenuhi dengan aset lancar. Sedangkan rasio *quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, yaitu nilai aset lancar yang telah dikurangi dengan nilai persediaan. Berikut merupakan rumus perhitungan beserta hasil perhitungan pada rasio lancar dan rasio *quick*:

(a) Rasio lancar = aktiva lancar: kewajiban jangka pendek

(b) Rasio *quick* = (aktiva lancar – persediaan): kewajiban jangka pendek

Berdasarkan formula di atas, perhitungan rasio lancar dan rasio *quick* Kabupaten Lamongan dalam 5 (lima) tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2-61 Perhitungan Rasio Likuiditas Kabupaten Lamongan 2020-2024

Rasio Keuangan	2020	2021	2022	2023	2024
Aset Lancar	119.387.482.217,18	290.506.574.851,43	143.914.659.819,86	84.642.283.802,07	96.454.877.466,93
Persediaan	21.743.292.605,13	41.869.960.924,88	20.296.439.782,14	21.722.782.437,79	24.351.963.266,67
Kewajiban Jangka Pendek	61.931.987.103,59	90.029.660.069,42	148.770.908.112,94	257.752.186.962,51	129.123.230.029,00
Rasio Lancar	**1,9277**	**3,2268**	**0,9674**	**0,3284**	**0,7470**
Rasio Quick	**1,9116**	**3,2268**	**0,9674**	**0,3284**	**0,7470**

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Nilai Aset Lancar yang dimiliki Kabupaten Lamongan terlihat mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam 4 (empat) tahun terakhir. Peningkatan kewajiban yang cukup tinggi pada tahun 2022 dan 2023 merupakan sumber pendanaan yang diigunakan sebagai peningkatan infrastruktur jalan Kabupaten serta pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara. Dengan kondisi tersebut maka kemampuan aset lancar dalam membayar kewajiban jangka pendek yang tergambar dalam Rasio Lancar

juga menunjukkan angka yang terus menurun dari 1,9 kali di tahun 2020 hingga menjadi 0,75 kali di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan kesehatan keuangan Pemerintah Daerah mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023 dengan nilai Rasio Lancar dibawah angka 1%. Sedangkan pada Rasio *Quick* yang menyertakan nilai persediaan dalam perhitungannya juga menunjukkan kecenderungan yang tidak jauh berbeda, yakni mengalami penurunan dari kemampuan membayar hutang jangka pendek menggunakan aset lancar yang lebih liquid (aset lancar- persediaan) sebanyak 1,9 kali di tahun 2020 menjadi 0,75 di tahun 2024. Secara lebih jelas, capaian Rasio Lancar dan Rasio *Quick* yang dimiliki Kabupaten Lamongan dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik berikut:

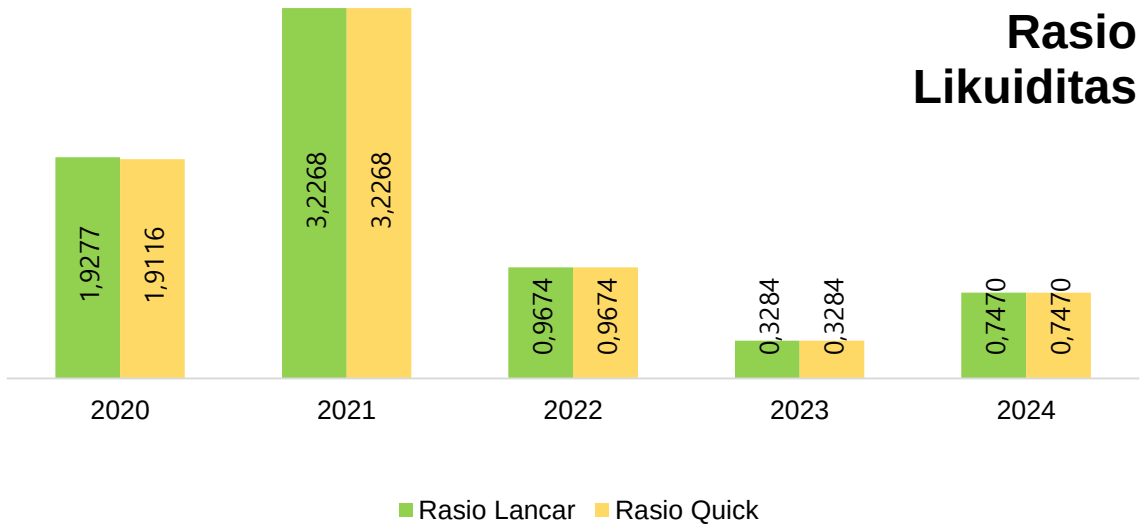

Gambar 2-62 Rasio Likuiditas Kabupaten Lamongan 2020-2024
Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

B. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan Rasio Total Hutang terhadap Total Aset yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aset, serta Rasio Hutang terhadap Modal yang menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki. Berikut merupakan rumus perhitungan beserta hasil perhitungan pada Rasio Total Hutang terhadap Total Aset dan Rasio Hutang terhadap Modal.

(a) Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset

(b) Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas

Pengaruh hutang terhadap Aset maupun modal (Ekuitas) Kabupaten Lamongan dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang tidak jauh berbeda dalam setiap tahunnya. Yakni pada tahun 2020 pengaruh hutang terhadap total aset maupun modal Kabupaten Lamongan berada pada angka 1,14%. Sedangkan pada tahun 2021 pengaruh hutang terhadap total aset meningkat menjadi 1,58% dan pengaruh hutang terhadap modal meningkat menjadi 1,61%. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan nilai hutang yang dimiliki Kabupaten Lamongan. Seiring meningkatnya nilai kewajiban yang dimiliki Kabupaten Lamongan pada 3 (tiga) tahun berikutnya (2021-2023) maka pengaruh hutang (kewajiban) terhadap aset dan modalnya juga meningkat hingga pada tahun 2023 pengaruh hutang terhadap asetnya menjadi 4,4% dan pengaruh hutang terhadap modalnya menjadi 4,6%. Secara lebih jelas, capaian Rasio Total Hutang terhadap Total Aset dan Rasio Hutang terhadap Modal Kabupaten Lamongan dalam 5 tahun terakhir tersaji dalam grafik berikut:

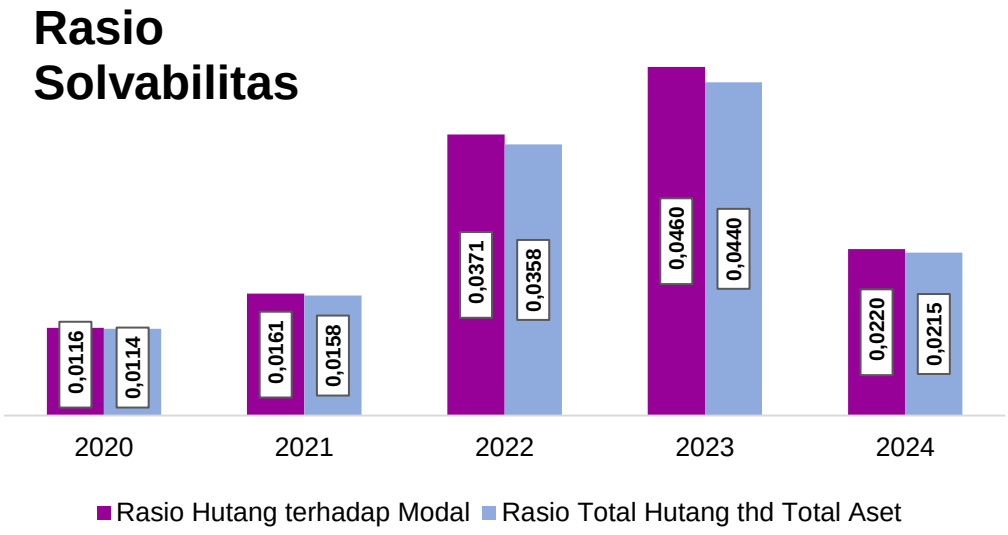

Gambar 2-63 Rasio Solvabilitas Kabupaten Lamongan 2020-2024
Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

C. Rasio Aktivitas

Analisis pada rasio aktivitas bertujuan untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Rasio aktivitas yang digunakan adalah rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Rata-rata umur piutang adalah rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin lama jangka waktu pelunasannya, semakin besar pula risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Sedangkan rata-rata umur persediaan adalah rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Perputaran persediaan yang tinggi menandakan semakin tingginya persediaan berputar dalam satu tahun. Hal ini menandakan efektivitas manajemen persediaaan. Sebaliknya, jika perputaran persediaan rendah menunjukkan pengendalian atas persediaan kurang efektif. Berikut merupakan rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan Kabupaten Lamongan 2020 - 2024:

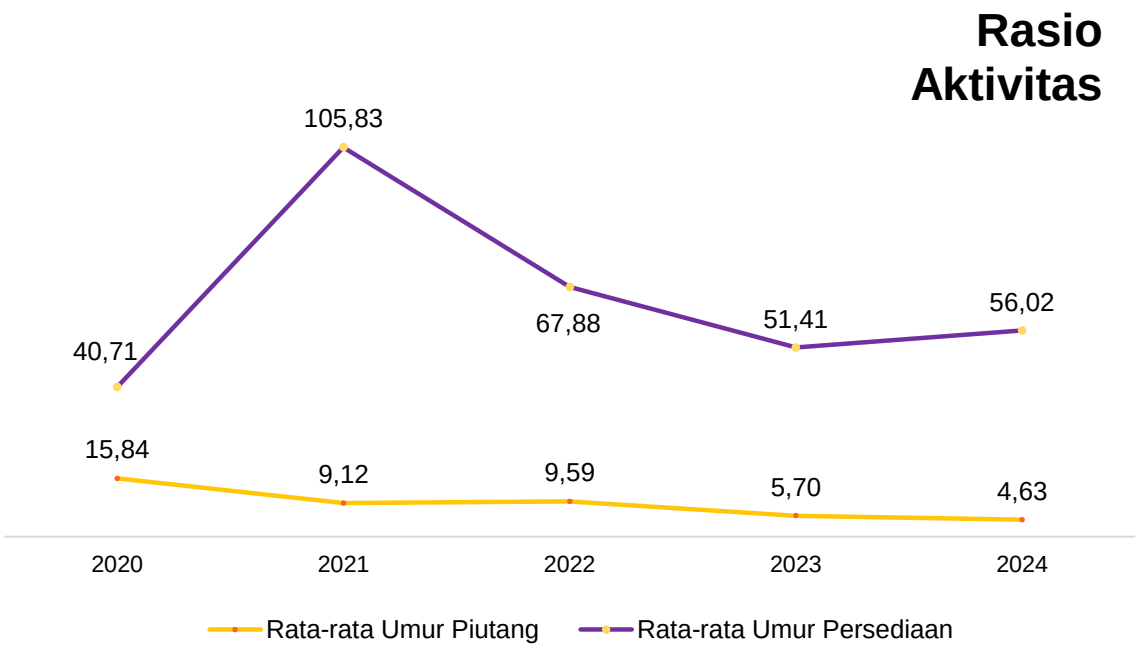

Gambar 2-64 Rasio Aktivitas Kabupaten Lamongan 2020-2024
Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

1.

1. Rata-rata Umur Piutang

Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Rumus perhitungan rata-rata umur piutang yang digunakan adalah sebagai berikut:

Rata-rata umur piutang = 365 : perputaran piutang*

**** Dimana :***

- Perputaran piutang = pendapatan daerah / rata-rata piutang pendapatan daerah.
- Rata-rata piutang pendapatan daerah = (saldo awal piutang + saldo akhir piutang) : 2.

Lama waktu piutang tertagih yang dimiliki Kabupaten Lamongan dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat menurun dari 16 (enam belas) hari di tahun 2020 menjadi 7 (tujuh) hari di tahun 2024. Kondisi ini disebabkan adanya peningkatan Pendapatan Daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir serta adanya kecenderungan yang menurun pada rata-rata piutang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir.

2. Rata-rata Umur Persediaan

Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Rumus perhitungan rata-rata umur persediaan yang digunakan adalah sebagai berikut.

Rata-rata umur persediaan = 365 : perputaran persediaan*

**** Dimana :***

- Perputaran persediaan = nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun : rata-rata nilai persediaan.
- Rata-rata nilai persediaan = (saldo awal persediaan + saldo akhir persediaan) : 2.

Rata-rata umur persediaan Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 dapat menunjukkan lama waktu 40,71 (empat puluh koma tujuh satu) hari atau sekitar 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu, kemudian pada tahun 2021 rata-rata umur persediaan Kabupaten Lamongan dapat meningkat signifikan hingga menjadi kondisi paling baik dalam 5 (lima) tahun terakhir yakni mencapai 105,83 (seratus lima koma delapan tiga) hari atau sekitar 3 (tiga) bulan 1 (satu) minggu. Akan tetapi pada tahun 2022 dan tahun 2023, efektifitas pengelolaan persediaan tertanam untuk memberikan pelayanan publik terlihat kembali menurun hingga rata-rata umur persediaannya menjadi 2 (dua) bulan 1 (satu) minggu di tahun 2022 dan 1 (satu) bulan 3 (tiga) minggu di tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 56 (lima puluh enam) hari dari tahun sebelumnya sebanyak 51 (lima puluh satu) hari.

2.2.4 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

2.2.4.1 PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN

A. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah paling banyak disumbang oleh Pendapatan Transfer dengan rata-rata proporsi sebesar 76,64%. Dengan kata lain bahwa lebih dari tiga seperempat Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Transfer. Sedangkan sisanya sebesar 17,61% berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebesar 5,75% Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perbandingan proporsi secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut:

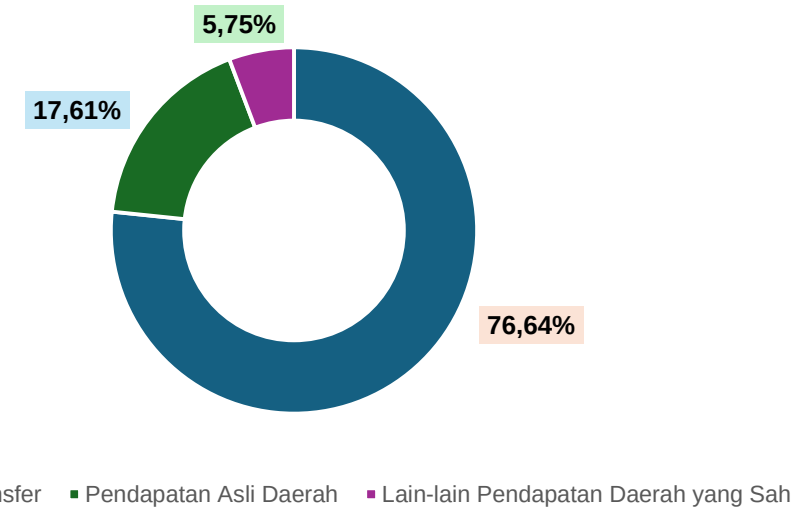

Gambar 2-65 Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Secara lebih rinci proporsi masing-masing komponen pembentuk PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2-62 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata Proporsi
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**PENDAPATAN**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**16,97%**	**20,32%**	**17,31%**	**16,47%**	**16,96%**	**17,61%**
1.1.1.	Pajak daerah	4,72%	4,52%	5,25%	4,99%	5,38%	4,97%
1.1.2.	Retribusi daerah	0,55%	0,48%	0,80%	0,59%	0,54%	0,59%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0,41%	0,64%	0,59%	0,70%	0,64%	0,60%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	11,29%	14,68%	10,66%	10,19%	10,39%	11,44%
1.2	**Pendapatan Transfer**	**59,97%**	**75,61%**	**81,10%**	**83,49%**	**83,04%**	**76,64%**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**54,35%**	**67,95%**	**73,58%**	**73,93%**	**75,63%**	**69,09%**
1.2.1.1	Dana Perimbangan	54,35%	55,03%	59,38%	59,53%	61,80%	58,02%
1.2.1.1.1	*Dana Bagi Hasil*	3,95%	5,00%	5,71%	8,95%	7,92%	6,31%
1.2.1.1.2	*Dana Alokasi Umum (DAU)*	38,72%	36,52%	36,87%	35,49%	37,59%	37,04%
1.2.1.1.3	*Dana Alokasi Khusus (DAK)*	11,68%	13,51%	16,80%	15,09%	16,29%	14,67%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0,00%	0,56%	1,08%	1,34%	1,41%	0,88%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.1.5	Dana Desa	0,00%	12,36%	13,11%	13,07%	12,43%	10,20%
1.2.2	**Transfer Antar-Daerah**	**5,62%**	**7,66%**	**7,52%**	**9,55%**	**7,41%**	**7,55%**

No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata Proporsi
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	5,62%	7,09%	6,97%	7,86%	6,48%	6,80%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,00%	0,57%	0,55%	1,69%	0,93%	0,75%
1.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**23,06%**	**4,07%**	**1,59%**	**0,04%**	**0,00%**	**5,75%**
1.3.1	Hibah	3,64%	0,49%	1,59%	0,04%	0,00%	1,15%
1.3.2	Dana Darurat	0,00%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	19,42%	3,37%	0,00%	0,00%	0,00%	4,56%

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Berdasarkan data di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan dalam periode 2020-2024 memiliki rata-rata proporsi sebesar 17,61% terhadap total pendapatan daerah. PAD terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Kontribusi terbesar berasal dari lain-lain PAD yang sah dengan rata-rata 11,44%, diikuti oleh pajak daerah dengan 4,97%, sementara retribusi daerah dan hasil pengelolaan keuangan daerah menyumbang masing-masing 0,59% dan 0,60%. Pendapatan Transfer menjadi sumber utama pendapatan daerah dengan rata-rata proporsi sebesar 76,64%. Pendapatan ini didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat yang mencakup Dana Perimbangan (58,02%), terdiri dari Dana Bagi Hasil (6,31%), Dana Alokasi Umum (37,04%), dan Dana Alokasi Khusus (14,67%). Selain itu, terdapat transfer antar-daerah yang mencakup Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, meskipun kontribusinya relatif kecil dengan rata-rata 6,80% dan 0,75%.

Sementara itu, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi paling kecil dengan rata-rata 5,75%. Komponen ini didominasi oleh pendapatan dari Dana Darurat dengan rata-rata 4,56%, sementara hibah hanya menyumbang 0,04%, dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menyumbang 1,15% dari total pendapatan daerah. Secara keseluruhan, struktur pendapatan Kabupaten Lamongan selama periode 2020-2024 masih sangat bergantung pada

Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat, sementara kontribusi PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah masih relatif kecil. Pada sisi pendapatan daerah, analisis kesehatan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Adapun Analisis Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Keberhasilan suatu daerah dalam mengelola keuangannya sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah tercermin dalam tingkat kemandirian keuangannya. Kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kebutuhan sendiri tanpa ketergantungan pada dana dari Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, daerah bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatannya. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah bantuan dari pemerintah pusat serta pinjaman yang diterima. Untuk melihat tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lamongan, dapat merujuk pada gambar di bawah ini.

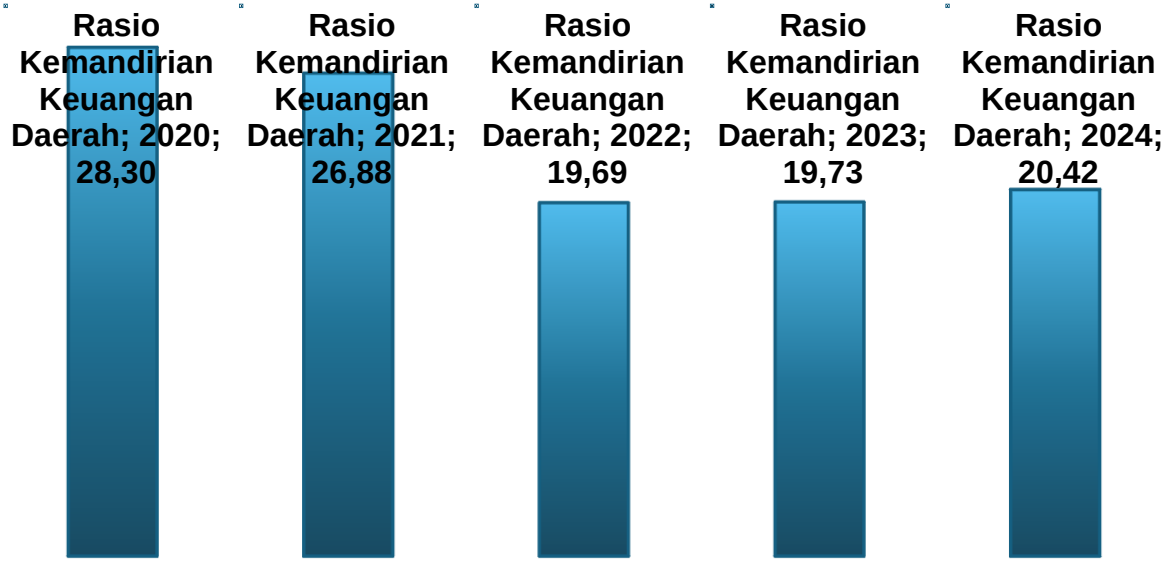

Gambar 2-66 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merepresentasikan kemampuan keuangan daerah dan pola hubungannya dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan rincian berikut:

Tabel 2-63 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Sesuai dengan klasifikasi pola hubungan di atas, maka rasio kemandirian keuangan Kabupaten Lamongan dalam 5 (lima) tahun terakhir termasuk dalam predikat sebagai berikut:

Tabel 2-64 Predikat Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
28,30	26,88	19,69	19,73	20,42
KONSULTATIF	KONSULTATIF	INSTRUKTIF	INSTRUKTIF	INSTRUKTIF

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan mengalami kecenderungan penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2020, tingkat kemandirian keuangan daerah tercatat sebesar 28,30%, kemudian menurun menjadi 26,88% pada tahun 2021. Penurunan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2022, di mana angka kemandirian turun menjadi 19,69% dan bertahan di angka 19,73% pada tahun 2023. Meski terdapat sedikit kenaikan pada tahun 2024 menjadi 20,42%, angka ini masih tergolong rendah. Berdasarkan kriteria tingkat desentralisasi fiskal, Kabupaten Lamongan berada dalam kategori sangat rendah, karena rasio kemandiriannya berada di bawah 25% sejak tahun 2022. Hal ini menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Dalam aspek hubungan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat, Kabupaten

Lamongan memiliki pola hubungan "Konsultatif" pada tahun 2020 dan 2021, sebelum akhirnya turun menjadi "Instruktif" sejak 2022 hingga 2024.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam menjalankan pembangunan. Rasio ini mencerminkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap keseluruhan penerimaan daerah. Peran PAD dalam struktur keuangan daerah menjadi tolok ukur keberhasilan suatu daerah dalam menerapkan desentralisasi. Semakin besar porsi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, serta administrasi pemerintahan. Rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada gambar berikut:

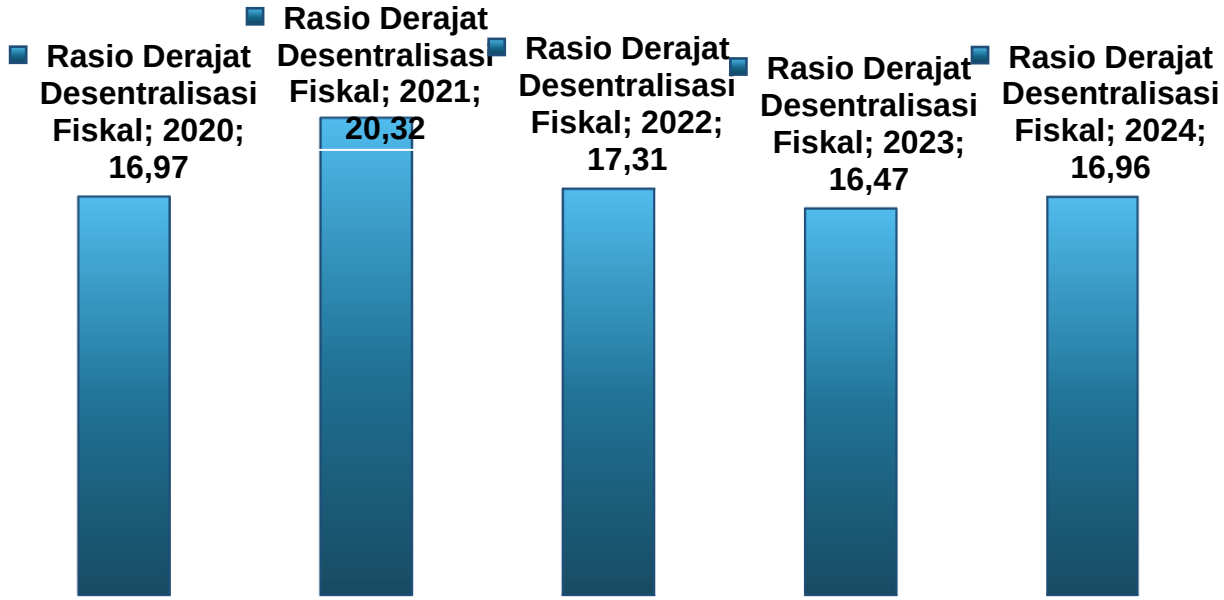

Gambar 2-67 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Nilai Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal merepresentasikan tingkat desentralisasi fiskal atas persentase PAD terhadap total pendapatan daerah yang dapat dikategorikan dalam beberapa tingkatan sebagai berikut:

Tabel 2-65 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Presentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan, 2025 (data diolah)

Berdasarkan kategori tingkat desentralisasi fiskal di atas, maka derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Lamongan dalam lima tahun terakhir termasuk dalam predikat sebagaimana berikut:

Tabel 2-66 Predikat Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
16,97	20,32	17,31	16,47	16,96
KURANG	SEDANG	KURANG	KURANG	KURANG

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

mber:

Rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Lamongan dalam periode 2020-2024 mengalami fluktuasi yang mencerminkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 16,97%, kemudian meningkat menjadi 20,32% pada tahun 2021, yang masuk dalam kategori "Sedang." Namun, pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan, dengan rasio sebesar 17,31% pada tahun 2022, 16,47% pada tahun 2023, dan 16,96% pada tahun 2024, yang semuanya berada dalam kategori "Kurang." Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya peningkatan PAD, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi, sehingga diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah secara mandiri.

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Daerah mengukur sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kegiatan pembangunannya sendiri melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah dana transfer yang diterima pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah secara keseluruhan. Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah, semakin besar pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang diberikan oleh pemerintah pusat atau provinsi. Tingkat ketergantungan keuangan Kabupaten Lamongan dapat dianalisis lebih lanjut melalui grafik berikut:

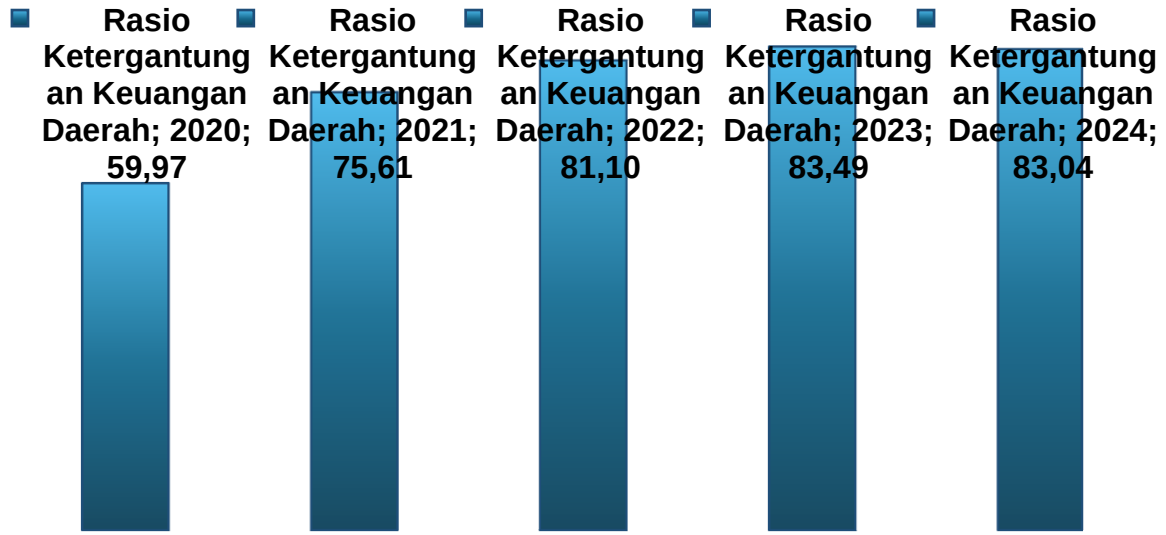

Gambar 2-68 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Nilai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dikelompokkan dalam 5 (lima) tingkatan sesuai dengan rentang interval nilai yang didapatkan sebagai berikut:

Tabel 2-67 Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Berdasarkan kelima kategori dan Nilai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah yang dimiliki Kabupaten Keuangan Daerah, berikut merupakan Predikat Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024:

Tabel 2-68 Predikat Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
59,97	75,61	81,10	83,49	83,04
SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Berdasarkan data rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Lamongan tahun 2020-2024, terlihat bahwa nilai ketergantungan keuangan daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan tercatat sebesar 59,97% dan terus meningkat hingga mencapai 83,04% pada tahun 2024. Sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan, nilai rasio ini masuk dalam kategori "Sangat Tinggi," yang menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan masih sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat atau Provinsi dalam pembiayaan pembangunan daerahnya. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat.

4. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Indeks Kapasitas Fiskal merupakan alat ukur untuk menilai sejauh mana Pemerintah Daerah mampu mengelola keuangan secara berkelanjutan. Indeks ini menunjukkan kemampuan suatu entitas dalam memenuhi kewajiban keuangannya untuk jangka panjang tanpa menghadapi tekanan finansial yang berat. Dalam perhitungannya, indeks ini mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi, seperti pendapatan per kapita, komposisi pendapatan, beban utang, akses terhadap pinjaman, serta kebijakan fiskal yang diterapkan.

Tujuan utama dari Indeks Kapasitas Fiskal adalah untuk menilai tingkat kemandirian keuangan suatu entitas dan memproyeksikan

kemampuannya dalam menghadapi risiko ekonomi jangka panjang. Pemerintah Daerah sering menggunakan indeks ini sebagai dasar dalam menyusun kebijakan fiskal jangka panjang, mengelola risiko keuangan, serta menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah. Dengan demikian, Indeks Kapasitas Fiskal berperan penting dalam menilai serta meningkatkan stabilitas keuangan suatu entitas dalam jangka panjang. Berikutnya, ditampilkan indeks kapasitas fiskal Kabupaten Lamongan beserta daerah sekitarnya.

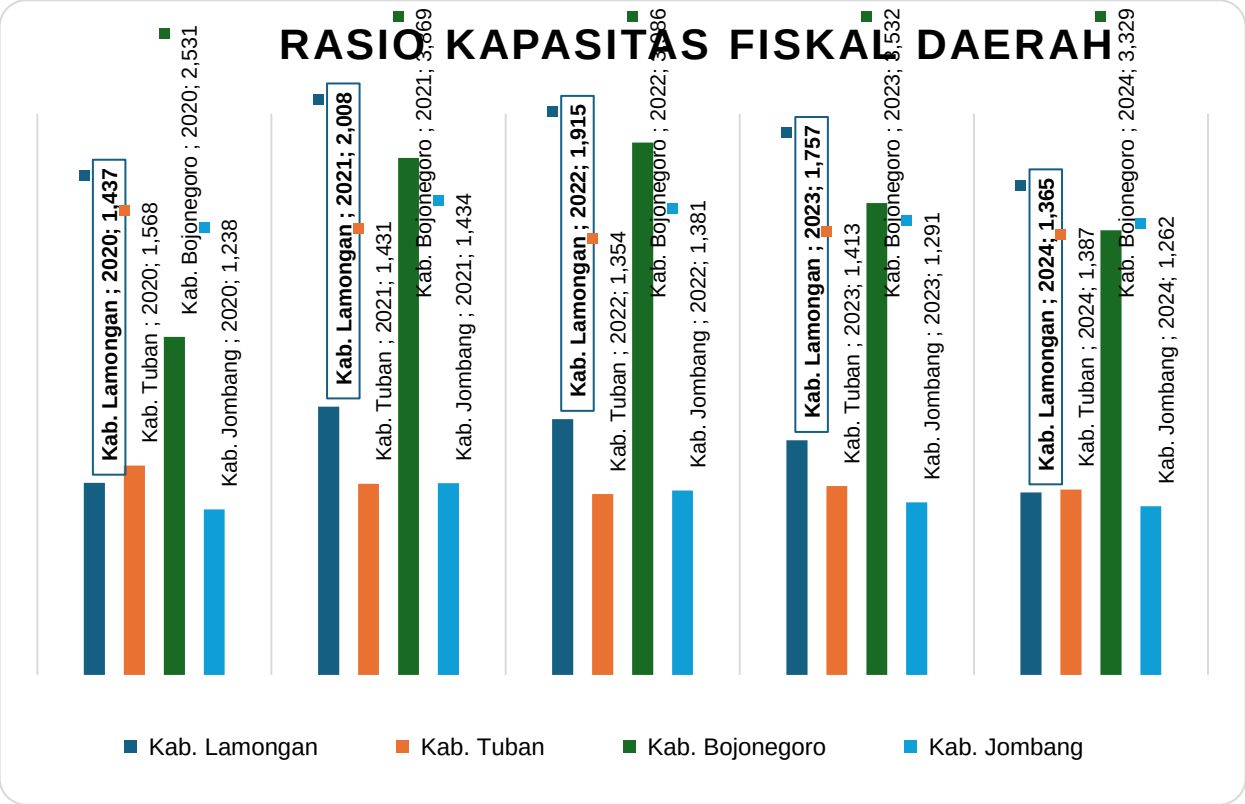

Gambar 2-69 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020-2024

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2020 - 2024

Berikut merupakan ketentuan penilaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Berdasarkan PMK Nomor 127/PMK.07/2024 yang terbagi dalam 5 (lima) kriteria:

Tabel 2-69 Kriteria Penilaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Berdasarkan PMK Nomor 127/PMK.07/2024

Nilai IKFD	Kriteria
IKFD > 1,615	Sangat Tinggi

Nilai IKFD	Kriteria
1,615 < IKFD < 1,378	Tinggi
1,378 < IKFD < 1,141	Sedang
1,141 < IKFD < 0,905	Rendah
IKFD < 0,905	Sangat Rendah

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam mengelola keuangan secara berkelanjutan. Berdasarkan data rasio kapasitas fiskal daerah untuk Kabupaten Lamongan dan daerah sekitarnya pada tahun 2020-2024, terlihat adanya variasi nilai IKFD yang mencerminkan perbedaan kemampuan fiskal masing-masing wilayah. Nilai IKFD diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu sangat tinggi (IKFD > 1,615), tinggi (1,615 < IKFD ≤ 1,378), sedang (1,378 < IKFD ≤ 1,141), rendah (1,141 < IKFD ≤ 0,905), dan sangat rendah (IKFD < 0,905). Dengan klasifikasi ini, dapat dilakukan analisis lebih lanjut mengenai posisi fiskal Kabupaten Lamongan dibandingkan dengan daerah lain, seperti Tuban, Bojonegoro, dan Jombang. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih optimal guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana dari Pemerintah Pusat atau provinsi.

5. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas dalam pelaksanaan anggaran suatu daerah dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Rasio ini mencerminkan sejauh mana Pemerintah Daerah mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan, dengan membandingkannya terhadap target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik pula kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola anggarannya. Dengan demikian, rasio efektivitas keuangan daerah menjadi ukuran penting dalam menilai efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Data mengenai rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada grafik berikut:

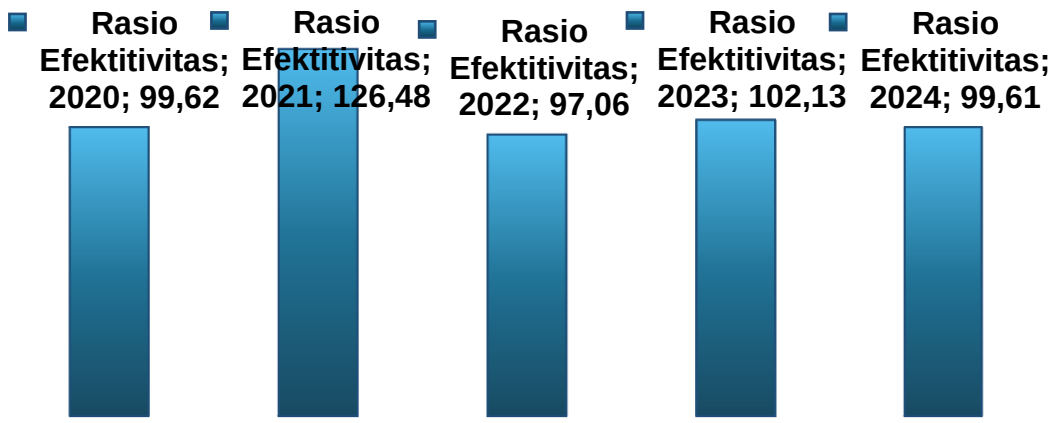

Gambar 2-70 Rasio Efektivitas Keuangan Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024
Sumber: Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Tabel 2-70 Predikat Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
99,62	126,48	97,06	102,13	99,61
CUKUP EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	CUKUP EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	CUKUP EFEKTIF

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Berdasarkan data rasio efektivitas keuangan Kabupaten Lamongan pada periode 2020–2024, terlihat adanya fluktuasi dalam tingkat efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2020, rasio efektivitas mencapai 99,62%, yang dikategorikan sebagai cukup efektif. Pada tahun 2021, rasio ini mengalami peningkatan signifikan hingga 126,48%, menunjukkan kinerja yang sangat efektif. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan menjadi 97,06%, kembali ke kategori cukup efektif. Selanjutnya, pada tahun 2023, rasio meningkat lagi menjadi 102,13% dengan predikat sangat efektif, sebelum akhirnya sedikit turun menjadi 99,61% pada tahun 2024, tetap dalam kategori cukup efektif. Data ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lamongan cenderung stabil dengan beberapa peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya.

6. Rasio PAD terhadap PDRB

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang menggambarkan kontribusi PAD dalam struktur perekonomian daerah, yang diukur melalui PDRB. PAD sendiri mencakup penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber asli daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sementara itu, PDRB mencerminkan nilai keseluruhan produksi barang dan jasa di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat kemandirian fiskal daerah, di mana semakin tinggi rasio PAD terhadap PDRB, maka semakin besar kontribusi pendapatan daerah dalam mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

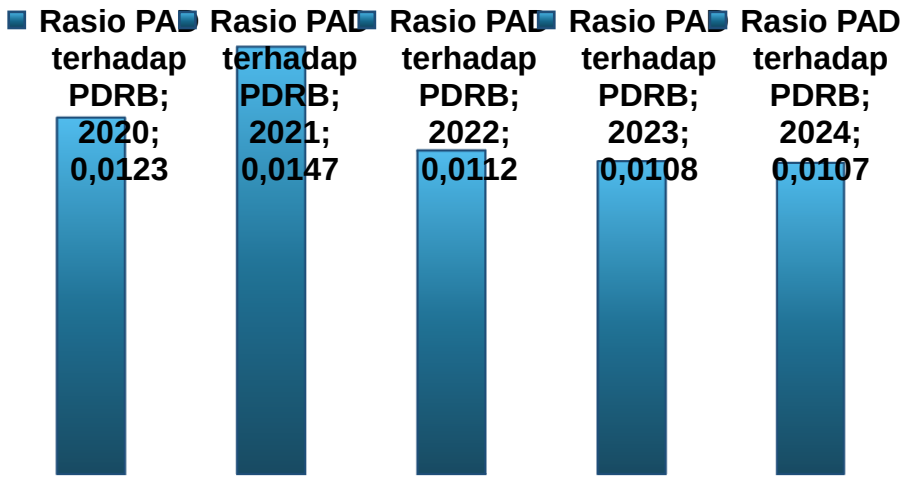

Gambar 2-71 Rasio PAD Terhadap PDRB Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024
Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Rasio PAD terhadap PDRB Kabupaten Lamongan pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio PAD terhadap PDRB tercatat sebesar 0,0123. Rasio ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 0,0147, yang menandakan adanya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, setelah tahun 2021, rasio ini mengalami penurunan berturut-turut. Pada tahun 2022, rasio menurun menjadi 0,0112, kemudian kembali menurun menjadi 0,0108 pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,0107. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam meningkatkan PAD atau adanya pertumbuhan PDRB yang lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan PAD.

Kecenderungan penurunan ini perlu menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Perlu adanya strategi yang lebih optimal dalam menggali potensi PAD, seperti melalui pengembangan sektor unggulan daerah, peningkatan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi, serta pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

7. Rasio Ruang Fiskal

Rasio Ruang Fiskal adalah perbandingan antara ruang fiskal yang tersedia dengan total belanja daerah atau pendapatan daerah dalam suatu periode tertentu. Ruang fiskal sendiri mengacu pada kapasitas keuangan daerah setelah memenuhi kewajiban belanja yang sifatnya mengikat, seperti belanja pegawai, belanja subsidi, serta pengeluaran wajib lainnya. Indikator ini digunakan untuk menilai fleksibilitas keuangan Pemerintah Daerah dalam membiayai program dan kegiatan yang bersifat prioritas atau strategis. Semakin tinggi rasio ruang fiskal, semakin besar keleluasaan daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan keterbatasan fiskal akibat tingginya beban belanja yang tidak fleksibel, sehingga dapat menghambat efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

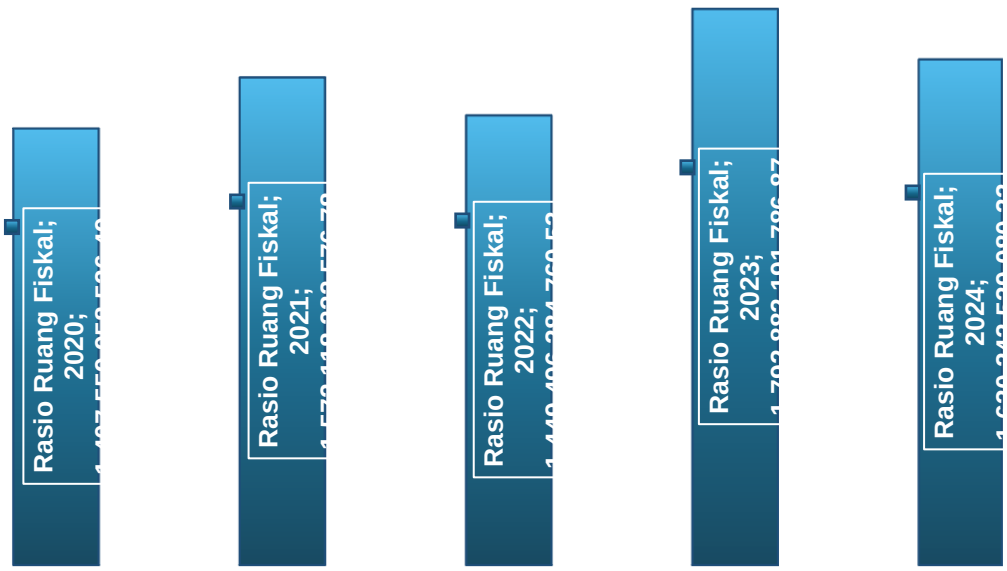

Gambar 2-72 Rasio Ruang Fiskal Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024
Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Rasio Ruang Fiskal (RF) merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja setelah memenuhi kewajiban belanja yang sifatnya mengikat, seperti belanja pegawai dan belanja wajib lainnya. Berdasarkan data, nilai Rasio Ruang Fiskal Kabupaten Lamongan mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai RF tercatat sebesar Rp1.407.559.958.536,49 (satu triliun empat ratus tujuh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah empat puluh sembilan sen), dengan rasio terhadap Belanja Daerah (RF/BD) sebesar 49,86% dan rasio terhadap Pendapatan Daerah (RF/PD) sebesar 49,59%. Pada tahun 2021, RF meningkat menjadi Rp1.572.118.232.576,78 (satu triliun lima ratus tujuh puluh dua miliar seratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh delapan sen), dengan RF/BD sebesar 54,76% dan RF/PD sebesar 52,84%, mencerminkan peningkatan ruang fiskal yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2022, RF mengalami penurunan menjadi Rp1.449.496.284.760,53 (satu triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh

empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah lima puluh tiga sen), dengan RF/BD sebesar 45,46% dan RF/PD sebesar 49,41%, yang menunjukkan adanya peningkatan beban belanja daerah atau penurunan pendapatan yang memengaruhi ruang fiskal. Tahun 2023 kembali mencatat kenaikan RF menjadi Rp1.792.882.191.786,87 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh tujuh sen), dengan RF/BD tertinggi di periode ini, yakni sebesar 56,70%, serta RF/PD sebesar 55,86%, menandakan peningkatan kapasitas keuangan daerah dalam membiayai belanja yang lebih fleksibel. Pada tahun 2024, RF menurun menjadi Rp1.630.242.539.080,33 (satu triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah tiga puluh tiga sen), dengan RF/BD sebesar 50,82% dan RF/PD sebesar 49,41%, menunjukkan ruang fiskal yang lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, rasio ruang fiskal yang berkisar antara 45% hingga 56% terhadap belanja daerah dan sekitar 49% hingga 56% terhadap pendapatan daerah mencerminkan kemampuan yang relatif stabil dalam menjaga fleksibilitas fiskal, meskipun terdapat fluktuasi yang perlu dicermati untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan optimalisasi belanja daerah.

B. BELANJA DAERAH

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja *(performance budget)* yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Oleh karenanya diperlukan analisis terhadap proporosi peruntukkan Belanja Daerah untuk mengetahui jenis Belanja Daerah yang paling dominan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lamongan 5 (lima) tahun terakhir. Berikut proporsi realisasi belanja daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 hingga 2024:

Tabel 2-71 Rasio Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proporsi (%)	Rata-

		2020	2021	2022	2023	2024	rata Proporsi (%)
2	**BELANJA**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00%**
2.1	**Belanja Operasi**	**65,95%**	**66,57%**	**63,00%**	**64,31%**	**68,81%**	**65,73%**
2.1.1	Belanja Pegawai	35,27%	34,14%	29,57%	29,13%	35,22%	32,67%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21,62%	24,62%	25,50%	24,99%	24,81%	24,31%
2.1.3	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,06%	0,31%	0,05%	0,08%
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.5	Belanja Hibah	8,59%	7,40%	7,43%	9,37%	8,41%	8,24%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,47%	0,41%	0,44%	0,49%	0,31%	0,43%
2.2	**Belanja Modal**	**11,52%**	**11,40%**	**15,45%**	**10,78%**	**12,09%**	**12,25%**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0,03%	0,00%	1,33%	0,00%	0,00%	0,27%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,53%	4,10%	4,20%	2,06%	2,99%	4,18%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,37%	2,04%	2,32%	2,61%	1,66%	2,00%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2,39%	4,74%	7,21%	5,69%	6,89%	5,38%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,20%	0,42%	0,39%	0,41%	0,55%	0,39%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**1,08%**	**0,68%**	**0,09%**	**0,01%**	**0,13%**	**0,40%**
2.4	**Belanja Transfer**	**21,44%**	**21,35%**	**21,46%**	**24,91%**	**18,97%**	**21,63%**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,05%	0,56%	0,52%	0,31%	0,87%	0,46%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	21,39%	20,79%	20,94%	24,61%	18,10%	21,17%

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Secara garis besar, peruntukan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan didominasi oleh Belanja Operasi dengan rata-rata proporsi sebesar 65,73%. Khususnya pada komponen Belanja Pegawai yang memiliki rata-rata proporsi sebesar 32,67%. Pada tahun 2022 dan 2023, proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Lamongan berada pada angka 29,57% dan 29,19%. Dominasi paling besar selanjutnya ada pada Belanja Barang dan Jasa dengan rata-rata proporsi sebesar 24,31% serta Belanja Bantuan Keuangan ke Desa dengan rata-rata proporsi sebesar 21,17%. Sedangkan komponen Belanja Daerah Kabupaten Lamongan dengan proporsi paling kecil ada

pada belanja tak terduga dan belanja modal yang hanya menunjukkan rata-rata proporsi sebesar 0,40% dan 12,25% dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, meskipun proporsinya sudah menurun dan memenuhi aturan normatif, akan tetapi Belanja Pegawai masih menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2020-2024.

Secara lebih luas, pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa rasio sebagai berikut:

1. Capaian Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah menggambarkan mengenai ketercapaian realisasi belanja daerah berdasarkan/terhadap anggaran yang telah ditetapkan dalam setiap tahunnya. Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan bahwa realisasi belanja pada tahun tersebut semakin mendekati jumlah belanja yang dianggarkan, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah telah berjalan dengan baik. Berikut merupakan rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah Kabupaten Lamongan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024):

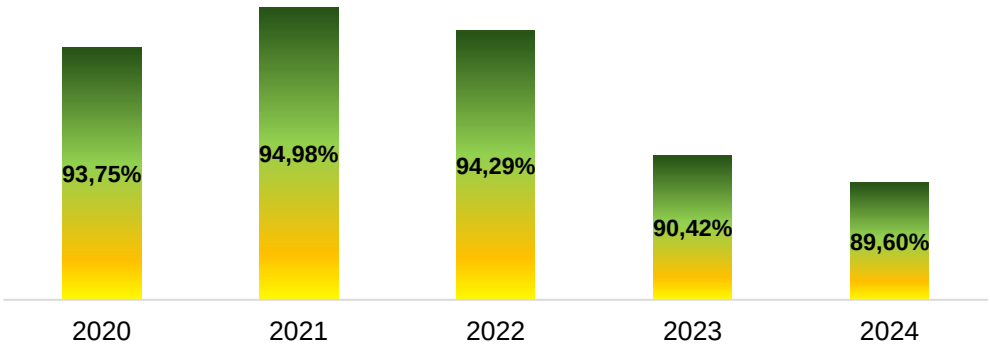

Gambar 2-73 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Rasio realisasi Belanja Daerah terhadap anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lamongan dalam 5 (lima) tahun terakhir terlihat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Yakni dari 94,98% di tahun 2020

menjadi 89,60% di tahun 2024. Secara keseluruhan, capaian realiasi Belanja Daerah terhadap anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lamongan belum dapat mencapai angka 100% sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah yang dilaksanakan tidak mencapai target anggaran yang telah ditetapkan.

2. Realisasi dan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Analisis ini memberikan gambaran mengenai proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap total pengeluaran daerah. Semakin tinggi angka proporsinya maka menunjukkan semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk operasional pemenuhan kebutuhan aparatur dalam pengeluaran daerah. Adapun yang dimaksud dengan pengeluaran daerah adalah nilai pada Belanja Daerah ditambah dengan nilai Pengeluaran Pembiayaan. Berikut merupakan realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 - 2024:

Tabel 2-72 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/ (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2020	1.135.667.871.612,00	2.830.012.926.114,77	40,13%
2	Tahun Anggaran 2021	1.253.318.005.804,65	2.873.507.882.801,56	43,62%
3	Tahun Anggaran 2022	1.119.572.205.111,72	3.214.363.512.491,17	34,83%
4	Tahun Anggaran 2023	888.485.758.657,50	3.259.087.526.852,23	27,26%
5	Tahun Anggaran 2024	1.095.757.501.142,00	3.284.884.580.756,61	33,36%

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Lamongan 2020-2024 terlihat fluktuatif dengan selisih nilai yang tidak terlalu signifikan. Sumber terbesar Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Lamongan ada pada Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll), Belanja Tambahan Penghasilan dan Belanja Perjalanan Dinas. Dibandingkan dengan total pengeluaran Kabupaten Lamongan (Belanja dan Pembiayaan) maka Belanja

Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Lamongan mencapai persentase tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 43,62% dengan Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur sebesar Rp1.253.318.005.804,65 (satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus delapan belas juta lima ribu delapan ratus empat rupiah enam puluh lima sen) sedangkan pada tahun 2024 tercatat dengan persentase sebesar 33,36%.

3. Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja

Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja menggambarkan rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa alokasi Belanja Pegawai maksimal 30% dari total Belanja Daerah. Adapun proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada grafik di bawah ini:

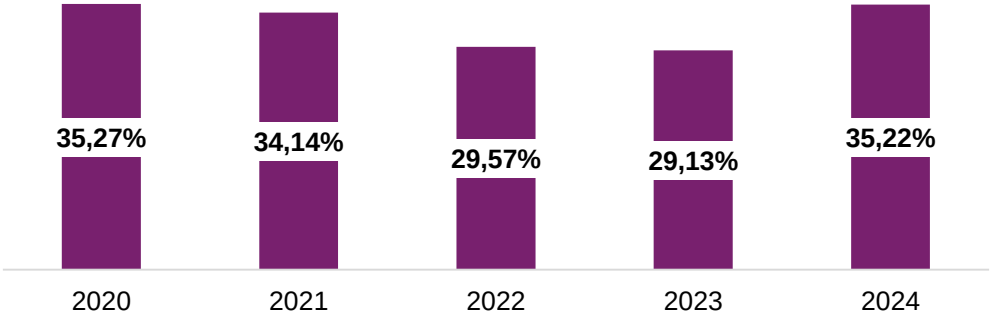

Gambar 2-74 Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 hingga 2023 terlihat semakin menurun hingga pada tahun 2022 dan tahun 2023 dapat berada pada angka di bawah 30% sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan atau menjadi sebesar 35,22%.

4. Proporsi Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum

Proporsi Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum + Dana Bagi Hasil) merupakan gambaran seberapa besar anggaran suatu daerah digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan seperti percepatan pembangunan infrastruktur. Secara normatif, alokasi Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum (DTU) minimal adalah sebesar 25% dari total Belanja Daerah. Hal ini dikarenakan pengeluaran belanja modal akan memberikan manfaat yang besar dalam jangka menengah dan panjang, mengingat belanja modal yang secara umum diperuntukkan bagi pembangunan fisik terutama infrastruktur akan menjadi pengungkit *(leverage)* di berbagai sektor pembangunan lain. Infrastruktur memegang peranan penting dalam percepatan pembangunan daerah, terutama daerah di kawasan Jawa Timur seperti Kabupaten Lamongan. Adapun proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum Kabupaten Lamongan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

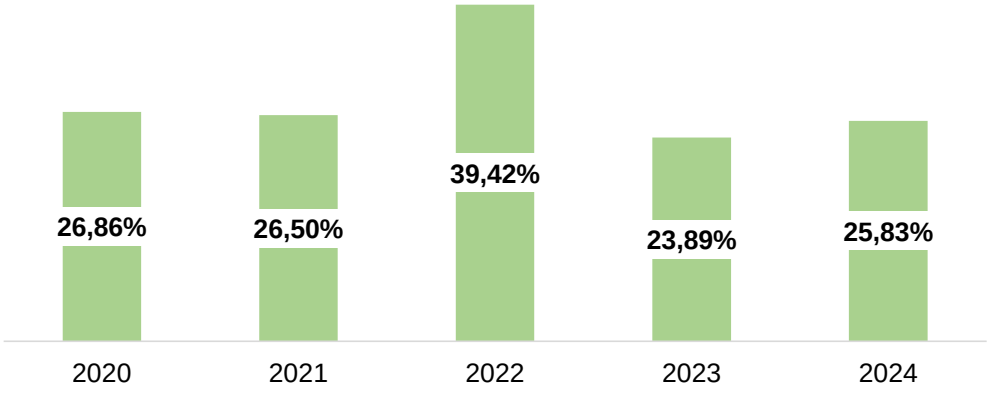

Gambar 2-75 Proporsi Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (DTU) Kabupaten Lamongan dalam beberapa tahun yaitu tahun 2020, 2021 dan 2024 dapat mencapai angka lebih dari 25% dengan kecenderungan yang fluktuatif cenderung meningkat. Sedangkan pada tahun 2023, proporsi belanja modal terhadap DTU Kabupaten Lamongan menurun hingga mencapai angka 23,89%. Sehingga pada tahun 2023 ini proporsi Belanja Modal terhadap DTU berada pada angka kurang dari 25%. Kondisi ini

disebabkan adanya penurunan nilai Belanja Modal sebesar -30,81% di tahun 2023 jika dibandingkan dengan nilai Belanja Modal pada tahun 2022.

5. Proporsi SiLPA Tahun sebelumnya terhadap Belanja Daerah

Proporsi SiLPA terhadap belanja menunjukkan penggunaan dana yang tertunda atau tidak terserap. Artinya, semakin kecil angka proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah, maka semakin efektif penyerapan anggarannya. Proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

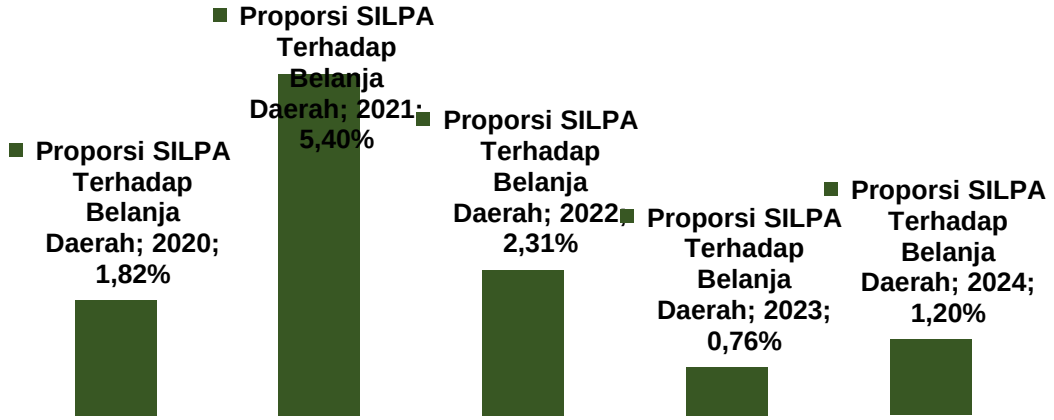

Gambar 2-76 Proporsi SiLPA Tahun Sebelumnya terhadap Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan, (data diolah) 2025

Pada tahun 2020-2024, proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah Kabupaten Lamongan terlihat meningkat dari 1,82% di tahun 2020 menjadi 5,40% di tahun 2021. Hal ini mengindikasikan menurunnya efektifitas penyerapan anggaran yang dilaksanakan Pemerintah Daerah. Akan tetapi pada tahun 2023, proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah Kabupaten Lamongan dapat menurun cukup signifikan menjadi 2,31%. Sehingga pada tahun 2023 ini terdapat peningkatan efektifitas penyerapan anggaran yang dilaksanakan Pemerintah Daerah. Keadaan ini terus menurun hingga pada tahun 2024 menjadi sebesar 1,20%.

6. Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama biasanya berupa belanja dan pengeluaran yang bersifat periodik. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah. Pengeluaran dan belanja wajib mengikat dan prioritas utama terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan serta Insentif Pimpinan Daerah), Belanja Bunga, Belanja Subsidi, dan Belanja Bagi Hasil. Pengeluaran Pembiayaan terutama untuk pembentukan Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Hutang dan Penyertaan Modal. Realisasi dan rata-rata pertumbuhan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah Daerah tahun 2020 - 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-73 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**811.579.088.152,00**	**835.421.319.011,70**	**873.366.344.984,06**	**669.672.277.756,00**	**814.283.415.048,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	798.878.609.637,00	807.508.691.485,00	842.851.615.062,00	638.082.121.242,00	773.515.529.877,00
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	11.186.100.000,00	11.978.120.000,00	12.005.625.000,00	11.980.635.000,00	11.130.140.000,00
3	Belanja Bunga	-	-	1.798.705.622,06	9.914.315.232,00	1.671.604.633,00
4	Belanja Bagi Hasil	1.514.378.515,00	15.934.507.526,70	16.710.399.300,00	9.695.206.282,00	27.966.140.538,00
B	**Pengeluaran Pembiayaan**					
1	Pembentukan Dana Cadangan	6.875.000.000,00	-	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	26.200.772.165,10	97.273.427.460,00	-
	TOTAL (A+B)	**811.579.088.152,00**	**835.421.319.011,70**	**873.366.344.984,06**	**669.672.277.756,00**	**814.283.415.048,00**

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Lamongan di masa mendatang, maka dibutuhkan proyeksi anggaran yang merupakan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama. Proyeksi belanja yang wajib dan mengikat adalah perkiraan pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan pada data historis yang merupakan belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama Pemerintah Daerah seperti yang telah dibahas sebelumnya, yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan, serta pengeluaran pembiayaan yang meliputi pembentukan dana Cadangan dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Total Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama Pemerintah Daerah pada tahun 2025 hingga 2030 diperkirakan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 2,78%, dimana nilai total pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp986.476.917.448,21 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah dua puluh satu sen), sedangkan pada tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp1.003.126.337.694,84 (satu triliun tiga miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh empat sen), pada tahun 2027 Total Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama Pemerintah Daerah diperkirakan mengalami peningkatan hingga mencapai Rp1.021.695.340.128,98 (satu triliun dua puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah sembilan puluh delapan sen), dan selama tahun 2028 hingga 2030 diperkirakan terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2030 diperkirakan mencapai Rp1.077.402.347.431,42 (satu triliun tujuh puluh tujuh miliar empat ratus dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh dua sen). Belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama

Kabupaten Lamongan terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan yang diperkirakan memiliki rata-rata pertumbuhan pada tahun 2025 hingga 2030 sebesar 1,99%, Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH sebesar 1,20%, Belanja Bagi Hasil dengan nilai yang sama setiap tahun sehingga memiliki pertumbuhan sebesar 0,00%, dan Pembayaran Pokok Utang yang pada tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar rupiah) dan pada tahun 2026 hingga 2030 mencapai Rp. 56.000.000.000 (lima puluh enam miliar rupiah), sehingga secara akumulasi total keseluruhan Belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama Kabupaten Lamongan pada tahun 2030 mengalami peningkatan. Berikut disajikan data hasil proyeksi belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 hingga 2030.

Tabel 2-74 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2030

No	Uraian	Data Tahun Dasar	Tingkat Pertumbuhan	Proyeksi					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Belanja Wajib dan Mengikat								
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	773.515.529.877	1,99%	890.988.162.403	909.410.072.956	927.831.983.509	946.253.894.063	964.675.804.616	983.097.715.169
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH	11.130.140.000	1,20%	13.260.555.886,89	13.488.065.580	13.635.157.461	13.782.249.342	13.929.341.223	14.076.433.104
3	Belanja Bunga	1.671.604.633	0,00%	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Bagi Hasil	27.966.140.538	0,00%	24.228.199.158	24.228.199.158	24.228.199.158	24.228.199.158	24.228.199.158	24.228.199.158
B	Pengeluaran Pembiayaan								
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang	-	-0,69%	58.000.000.000	56.000.000.000	56.000.000.000	56.000.000.000	56.000.000.000	56.000.000.000
	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	**814.283.415.048**	**1,78%**	**986.476.917.448**	**1.003.126.337.694**	**1.021.695.340.128**	**1.040.264.342.563**	**1.058.833.344.997**	**1.077.402.347.431**

Sumber : BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

2.2.4.2 ANALISIS PEMBIAYAAN

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah diluar kapasitas Pendapatan Daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban Pemerintah Daerah. Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit maka diperlukan pembiayaan daerah. Oleh karenanya melalui analisis pembiayaan ini diharapkan akan diperoleh gambaran mengenai kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis ini dilaksanakan melalui analisis pada sumber penutup defisit rill, analisis pada realisasi SiLPA, analisis pada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan serta analisis pada proyeksi pembiayaan daerah sebagai berikut :

A. ANALISIS SUMBER PENUTUP DEFISIT RIIL

Defisit Riil merupakan nilai yang muncul atas selisih antara Pendapatan Daerah dengan Pengeluaran Daerah (Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan). Sedangkan yang dimaksud oleh penutup Defisit Riil merupakan anggaran-anggaran yang bersumber dari penerimaan pembiayaan. Sehingga analisis pada sumber penutup Defisit Riil merupakan analisis yang dilaksanakan dengan membandingkan nilai Defisit Riil yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan dengan penutup Defisit Riil anggaran pada tahun tersebut. Sehingga analisis ini akan memberikan gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup Defisit Riil anggaran Pemerintah Daerah serta proporsi masing-masing penutup Defisit Riil terhadap Defisit Riil yang di miliki Kabupaten Lamongan dalam setiap tahunnya. Secara lebih jelas, berikut tabel Defisit Riil dan penutup Defisit Riil Kabupaten Lamongan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020 - 2024) beserta komponennya :

Tabel 2-75 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.838.272.211.782,49	2.975.019.936.520,51	2.933.713.997.200,59	3.209.621.138.515,87	3.299.245.104.194,33
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	2.823.137.926.114,77	2.871.007.882.801,56	3.188.162.740.326,07	3.161.814.099.392,23	3.207.611.153.293,61
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.875.000.000,00	2.500.000.000,00	26.200.772.165,10	97.273.427.460,00	77.273.427.463,00
A	**Defisit riil**	**8.259.285.667,72**	**101.512.053.718,95**	**(280.649.515.290,58)**	**(49.466.388.336,36)**	**14.360.523.437,72**
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	30.127.893.188,77	51.424.446.606,49	155.087.500.325,44	73.502.909.577,12	24.186.513.840,76
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	198.935.958.261,46	-	-
8	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	129.365.000,00	150.915.000,00	-
9	Penerimaan Piutang Daerah	13.037.267.750,00	-	-	-	-
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**43.165.160.938,77**	**51.424.446.606,49**	**354.152.823.586,90**	**73.653.824.577,12**	**24.186.513.840,76**
A-B	**Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan**	**51.424.446.606,49**	**152.936.500.325,44**	**73.503.308.296,32**	**24.187.436.240,76**	**38.547.037.278,48**

Sumber : BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan nilai yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Belanja Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga pada kedua tahun tersebut terdapat Defisit Riil sebesar Rp280.649.515.290,58 (dua ratus delapan puluh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah lima puluh delapan sen) di tahun 2022 dan Rp49.466.388.336,36 (empat puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) di tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2020 tahun 2021, dan tahun 2024 nilai Pendapatan Daerah yang dimiliki Kabupaten Lamongan dapat mencapai angka yang lebih tinggi dari Belanja Daerah. Sehingga pada ketiga tahun tersebut tidak terdapat Defisit Riil melainkan terdapat Surplus Anggaran masing-masing sebesar Rp8.259.285.667,72 (delapan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah tujuh puluh dua sen) di tahun 2020, Rp101.512.053.718,95 (seratus satu miliar lima ratus dua belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah sembilan puluh lima sen) di tahun 2021, dan Rp14.360.523.437,72 (empat belas miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah tujuh puluh dua sen) di tahun 2024.

Melihat pada data pengeluaran pembiayaan yang digunakan sebagai penutup Defisit Riil, menunjukkan bahwa nilai pengeluaran pembiayaan tersebut masih lebih tinggi dibanding nilai Defisit Riil yang ada pada setiap tahunnya. Sehingga pada setiap tahunnya pengeluaran pembiayaan dapat meng-cover Defisit Riil dan menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Dari tabel diatas, terlihat bahwa penutup Defisit Riil Kabupaten Lamongan tahun 2022 hingga 2023 secara umum didominasi oleh SiLPA yang pada tahun 2022 mencapai 55,26% dan pada tahun 2023 sebesar 148,59%, yang artinya bahwa keberadaan SiLPA pada tahun 2022 hanya sebesar 55,26% dari defisit riil, sehingga selanjutnya ditutup oleh pinjaman daerah, karena adanya nilai Belanja yang cukup tinggi pada

tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2023 keberadaan SiLPA tercatat sebesar 148,59% dari defisit riil, sehingga keberadaannya mampu menutup keseluruhan defisit yang terjadi pada tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan nilai Defisit Riil, proporsi SiLPA dan beberapa komponen pembiayaan sebagai penutup defisit dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2-76 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2020	2021	2022	2023	2024
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	364,78%	50,66%	-55,26%	-148,59%	168,42%
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00%	0,00%	-70,88%	0,00%	0,00%
5	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00%	0,000%	-0,046%	-0,31%	0,00%
6	Penerimaan Piutang Daerah	157,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber : BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

B. ANALISIS REALISASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan, sehingga analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur.

Realisasi SiLPA Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 hingga 2024 diperoleh dari 1 sumber, dimana pada tahun 2020 hingga 2024 secara keseluruhan dihasilkan dari adanya kegiatan Sisa penghematan belanja

atau akibat lainnya sebesar 100,00%. Adapun rata-rata Realisasi SiLPA Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 hingga 2024 sebesar 35,31%. Berikut disajikan data terkait dengan sumber perolehan SiLPA Kabupaten Lamongan selama tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2-77 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024		Rata-rata Pertumbuhan
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
	Jumlah SiLPA	**51.424.446.606,49**	**100,00%**	**155.087.500.325,00**	**100,00%**	**73.503.308.296,00**	**100,00%**	**24.187.436.240,76**	**100,00%**	**38.547.037.278,48**	**100,00%**	**35,31%**
1	Pelampauan penerimaan PAD	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	51.424.446.606,49	100,00%	155.087.500.325,00	100,00%	73.503.308.296,00	100,00%	24.187.436.240,76	100,00%	38.547.037.278,48	100,00%	35,31%
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
6	Kegiatan lanjutan/ Sisa Belanja Lainnya	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%

Sumber : BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

C. ANALISIS SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis tersebut memperhitungkan saldo kas neraca yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dikurangi dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta adanya kegiatan lanjutan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan. Secara lebih jelas perhitungan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Kabupaten Lamongan 5 (lima) tahun terakhir (2020 - 2024) tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2-78 Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	51.429.558.606	155.123.570.927	73.503.308.296	24.187.436.240	38.552.546.974
	Dikurangi :					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	0
3	Kegiatan lanjutan	0	0	0	0	0
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	**51.429.558.606**	**155.123.570.927**	**73.503.308.296**	**24.187.436.240**	**38.552.546.974**

Sumber : BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Daerah pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yaitu dari Rp51.429.558.606 (lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam rupiah) di tahun 2020 menjadi Rp38.552.546.974 (tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) di tahun 2024. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Daerah mencapai nilai tertinggi pada tahun 2021 sebesar Rp155,123,570,927 (seratus lima puluh lima miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu

sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dan nilai terendah pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 24.187.436.240 (dua puluh empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah). Nilai yang muncul pada Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Daerah hampir sama dengan nilai yang muncul dari neraca daerah. Hal ini dikarenakan pada 5 (lima) tahun terakhir tidak terdapat kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan maupun kegiatan lanjutan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

D. ANALISIS PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar perhitungan kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Melihat pada Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan data historis 5 (lima) tahun terakhir (2020 - 2024), selanjutnya dapat dilakukan perhitungan proyeksi guna mengetahui perkiraan sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 hingga 2030. Proyeksi sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran dihitung berdasarkan hasil proyeksi saldo kas neraca daerah dikurangi dengan hasil proyeksi kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan nilai kegiatan lanjutan.

Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 hingga tahun 2030 diperkirakan memiliki nilai yang sama hingga mencapai Rp10.000.829.975,59 (Sepuluh miliar delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah dan lima puluh sembilan sen). Adapun dalam setiap tahun rata-rata pertumbuhan diperkirakan mencapai 0,00%. Terjadinya Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran yang stabil dan lebih rendah dari kondisi pada tahun 2024 yang mencapai Rp38.552.546.974,48 (tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah dan empat puluh delapan sen) lebih banyak

disebabkan oleh adanya optimalisasi penggunaan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) untuk membiayai belanja daerah. Untuk mengetahui hasil proyeksi sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 hingga 2030 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-79 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2030

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)	Tingkat Pertumbuhan	Proyeksi					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo Kas Neraca Daerah	38.552.546.974,48	0,00%	10.000.829.975,59	10.000.829.975,59	10.000.829.975,59	10.000.829.975,59	10.000.829.975,59	10.000.829.975,59
	Dikurangi:								
1	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	**38.552.546.974,48**	**0,00%**	**10.000.829.975,59**	**10.000.829.975,59**	**10.000.829.975,59**	**10.000.829.975,59**	**10.000.829.975,59**	**10.000.829.975,59**

Sumber : BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

2.2.5 KERANGKA PENDANAAN

Perencanaan pembangunan daerah jangka menengah tidak terlepas dari perhitungan kapasitas keuangan daerah. Sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilaksanakan untuk memperoleh gambaran yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Proyeksi pada kapasitas keuangan dilaksanakan dengan memperkirakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Terkait dengan hal terebut diatas, maka untuk mendukung analisis terhadap proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan untuk kurun waktu beberapa tahun ke depan perlu dilakukan analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun yang lalu. Analisis ini sangat penting dalam upaya untuk mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode dimaksud serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya, termasuk dukungan terhadap pencapaian target sasaran prioritas nasional dan program prioritas provinsi.

Salah satu metode sederhana yang digunakan untuk memperkirakan kemampuan anggaran (proyeksi) adalah fungsi *forecast*, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan kumpulan data historis selama 5 (lima) tahun terakhir, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi, kebijakan terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta kondisi ekonomi makro. Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam dokumen ini disajikan dengan menggunakan format sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana terdapat perbedaan rekening dengan peraturan sebelumnya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) khususnya pada pos Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan daerah secara umum terbagi menjadi 3 jenis, yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan pada belanja derah secara umum terbagi menjadi 4 jenis, yaitu : Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

2.2.5.1 PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA

Proyeksi pada Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan yang menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pada aspek pelayanan publik maupun pada Pembangunan daerah. Posisi peningkatan Pendapatan Daerah melalui PAD diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang secara tidak langsung memberikan kewajiban sekaligus legitimasi hukum bagi daerah untuk terus melakukan peningkatan pendapatan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) didukung dengan adanya kebijakan sumber-sumber pajak baru, restrukturisasi jenis pajak, dan penyederhadaan jenis retribusi. Melalui beberapa kebijakan tersebut, diproyeksikan PAD Kabupaten Lamongan pada tahun 2026 hingga 2030 memiliki rata-rata pertumbuhan mencapai 2,30%, yaitu dari nilai sebesar Rp684.912.843.048,45 (enam ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat puluh delapan rupiah dan empat puluh lima sen) di tahun 2026 kemudian di proyeksikan meningkat menjadi Rp750.968.268.060,40 (tujuh ratus lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam puluh rupiah dan empat puluh sen) pada tahun 2030. Peningkatan pada proyeksi PAD tersebut ditopang oleh pertumbuhan Pajak Daerah dengan memasukkan Opsen PKB dan BBNKB sebagai konsekuensi disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya pertumbuhan Pajak, Retribusi dan PAD Kabupaten Lamongan pada tahun 2026 hingga 2030 yang rata-rata pertumbuhannya mencapai 5,00%, 5,00% dan 2,30%,

maka Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan diperkirakan juga akan terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2026 hingga 2030, hingga pada tahun 2030 mencapai Rp3.281.112.143.582,81 (tiga triliun dua ratus delapan puluh satu miliar seratus dua belas juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah dan delapan puluh satu sen) dengan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah sebesar 0,39%. Sedangkan pada Pendapatan Transfer, diproyeksikan pada tahun 2026 hingga tahun 2030 akan tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,14%. Kondisi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa alokasi Pendapatan Transfer khususnya pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) banyak dipengaruhi oleh kebijakan anggaran dari Pemerintah Pusat. Sehingga dengan mempertimbangkan adanya kebijakan efisiensi anggaran dan defisit keuangan pemerintah pusat yang semakin meningkat, maka Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan *flat* dan cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar -0,28%. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam setiap tahun diperkirakan memiliki nilai yang sama dengan anggaran pada tahun 2025. Selain itu, pada kondisi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan keuangan dari pemerintah Pusat dan Provinsi, dimana proporsi PAD diperkirakan semakin mengalami peningkatan dari 21,19% pada tahun 2026 menjadi 22,89% pada tahun 2030 atau lebih tinggi dari kondisi pada tahun 2024 yang mencapai 16,96%. Walaupun pertumbuhan Pendapatan Transfer cenderung mengalami penurunan, namun Pendapatan Transfer masih menjadi sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang paling dominan pada tahun 2026 hingga 2030, yaitu dengan rata-rata proporsi sebesar 77,99% atau mengalami penurunan dari tahun 2024 yang masih mencapai 83,04%.

Belanja Daerah juga diarahkan untuk dapat memenuhi penyelenggaraan rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2026 hingga 2030. Melalui beberapa pertimbangan, pada tahun 2026 Belanja Daerah Kabupaten Lamongan diproyeksikan mencapai Rp3.436.798.062.819,45 (tiga triliun empat ratus tiga puluh enam miliar

tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah dan empat puluh lima sen) yang kemudian pada tahun 2027 mengalami penurunan menjadi Rp3.202.123.703.029,87 (tiga triliun dua ratus dua miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh sembilan rupiah dan delapan puluh tujuh sen). Tingginya belanja daerah pada tahun 2026 dipengaruhi oleh adanya pinjaman daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Lamongan. Belanja daerah pada tahun 2028 terus meningkat hingga pada tahun 2030 mencapai Rp3.235.112.143.582,81 (tiga triliun dua ratus tiga puluh lima miliar seratus dua belas juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah dan delapan puluh satu sen).

Proyeksi ini didasarkan pada data historis, dimana Belanja Daerah Kabupaten Lamongan terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga 2024. Selain itu, peningkatan pada nilai Belanja Daerah juga mempertimbangkan asumsi-asumsi seperti analisis logis terhadap kebutuhan peningkatan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lamongan serta adanya penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja. Untuk Belanja Operasi pada tahun 2026 hingga 2030 diperkirakan memiliki rata-rata proporsi sebesar 65,73%. Sebagian besar belanja operasi dialokasikan untuk Belanja Pegawai maupun Belanja Barang dan Jasa, dimana untuk belanja pegawai pada tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp1.301.448.502.083 (satu triliun tiga ratus satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua ribu delapan puluh tiga rupiah) dengan nilai yang sama hingga tahun 2030. Semakin tingginya belanja pegawai dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 antara lain disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah pegawai yang dihasilkan dari penyelenggaraan seleksi CASN pada tahun 2024 yang didalamnya terdapat pengangkatan honorer menjadi PPPK. Sehingga dengan demikian, proporsi belanja pegawai di Kabupaten Lamongan kembali mengalami peningkatan dengan rata-rata mencapai 39,92%. Sehingga untuk memenuhi *mandatory spending* proporsi belanja pegawai

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mencapai 30%, maka diperlukan adanya upaya yang serius dari Pemerintah Daerah melalui efektivitas pengelolaan ASN, peningkatan belanja daerah yang produktif, serta diimbangi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk belanja barang dan jasa rata-rata memiliki proporsi sebesar 23,17%.

Pada Belanja Modal diproyeksikan cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2026 hingga 2030, walaupun pada tahun 2026 belanja modal Kabupaten Lamongan diperkirakan memiliki nilai yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya alokasi anggaran yang diperoleh dari pinjaman daerah. Adapun rata-rata pertumbuhan belanja modal diperkirakan mencapai 4,13%. Peningkatan belanja modal menjadi bagian yang penting untuk diupayakan oleh Pemerintah Daerah, dimana dengan adanya peningkatan dalam setiap tahunnya proporsi belanja modal di Kabupaten Lamongan juga semakin besar, sehingga dengan adanya peningkatan yang bertahap dan dilakukan secara konsisten, maka *mandatory spending* proporsi infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dapat tercapai. Sedangkan pada Belanja Tak Terduga diproyeksikan pada tahun 2026 hingga 2030 sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dengan mempertimbangkan antisipasi/penanggulangan terjadinya bencana, seperti bencana alam dan bencana sosial, serta pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Dan untuk Belanja Transfer yaitu Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan proyeksikan dengan angka yang sama dalam setiap tahunnya dan memiliki rata-rata proporsi dalam setiap tahunnya mencapai 20,03%.

Pembiayaan Daerah merupakan instrumen penting dalam kerangka penyusunan APBD karena menjadi penopang saat kemampuan Pendapatan Daerah belum sepenuhnya memadai untuk menopang Belanja Daerah dalam rangka mendukung agenda Pembangunan. Pembiayaan Daerah dibutuhkan untuk menutup *financing gap*. Pembiayaan Daerah dapat bersumber dari utang maupun non utang, oleh karenanya Pembiayaan Daerah harus dikelola secara *prudent* dan *sustainable*. Pada proyeksi

Pembiayaan Daerah, pertumbuhan penerimaan pembiayaan tahun 2026 hingga 2030 diperkirakan rata-rata sebesar 19,50%, yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dengan nilai yang sama dalam setiap tahunnya (2026 - 2030), yaitu mencapai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan penerimaan pinjaman daerah pada tahun 2026 yang diperkirakan sebesar Rp250.000.000.000,00 (Dua ratus lima puluh miliar rupiah). Untuk menutup defisit anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja daerah pada tahun 2025 dan 2026, maka Pemerintah Daerah berencana melakukan pinjaman daerah sebesar Rp300.000.000.000,00(tiga ratus miliar rupiah) yang diawali dengan penarikan pertama pada tahun 2025, yaitu sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan dilanjutkan sisanya pada tahun 2026. Pada tahun 2026 hingga 2030 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dioptimalkan untuk membiayai belanja daerah, sehingga diperkirakan dalam setiap tahun nilainya lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 yang mencapai Rp24.186.513.840,76 (dua puluh empat miliar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah dan tujuh puluh enam sen). Sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan dalam setiap tahunnya (2026 - 2030) Pemerintah Daerah diperkirakan melakukan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang diperkirakan mencapai Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar rupiah) sebagai kewajiban atas pinjamana daerah yang diterima pada tahun 2025 dan 2026.

Untuk mengetahui hasil proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2026 hingga 2030 secara lebih jelas dan terperinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-80 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Lamongan Tahun 2026-2030

No.	Uraian	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	**PENDAPATAN**	**3.263.889.825.771**	**3.276.529.121.171**	**3.307.471.063.771**	**3.333.781.398.271**	**3.375.596.692.771**	**0,84%**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**679.941.971.000**	**721.389.801.400**	**752.331.744.000**	**778.642.078.500**	**820.457.373.000**	**3,78%**
1.1.1.	Pajak daerah	277.543.728.900	283.674.113.500	291.699.679.400	297.002.181.000	311.889.583.500	2,89%
1.1.2.	Retribusi daerah	293.191.876.100	281.937.693.700	290.435.895.600	296.609.751.800	307.027.749.800	-0,25%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	24.276.000.000	26.325.000.000	28.449.000.000	29.568.000.000	30.635.000.000	11,37%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	84.930.366.000	129.452.994.200	141.747.169.000	155.462.145.700	170.905.039.700	17,41%
1.2	**Pendapatan Transfer**	**2.570.773.654.771**	**2.555.139.319.771**	**2.555.139.319.771**	**2.555.139.319.771**	**2.555.139.319.771**	**0,00%**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**2.436.371.689.000**	**2.417.919.754.000**	**2.417.919.754.000**	**2.417.919.754.000**	**2.417.919.754.000**	**0,00%**
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.995.172.201.000	1.976.720.266.000	1.976.720.266.000	1.976.720.266.000	1.976.720.266.000	0,00%
1.2.1.1.1	*Dana Bagi Hasil*	266.006.019.000	266.006.019.000	266.006.019.000	266.006.019.000	266.006.019.000	0,00%
1.2.1.1.2	*Dana Alokasi Umum (DAU)*	1.270.851.680.000	1.270.851.680.000	1.270.851.680.000	1.270.851.680.000	1.270.851.680.000	0,00%
1.2.1.1.3	*Dana Alokasi Khusus (DAK)*	458.314.502.000	439.862.567.000	439.862.567.000	439.862.567.000	439.862.567.000	0,03%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	28.609.579.000	28.609.579.000	28.609.579.000	28.609.579.000	28.609.579.000	0,00%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0,00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	0	0	0	0	0	0,00%
1.2.1.5	Dana Desa	412.589.909.000	412.589.909.000	412.589.909.000	412.589.909.000	412.589.909.000	0,00%
1.2.2	**Transfer Antar-Daerah**	**134.401.965.771**	**137.219.565.771**	**137.219.565.771**	**137.219.565.771**	**137.219.565.771**	**0,01%**
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	121.774.065.771	121.774.065.771	121.774.065.771	121.774.065.771	121.774.065.771	0,00%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	12.627.900.000	15.445.500.000	15.445.500.000	15.445.500.000	15.445.500.000	0,00%
1.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**13.174.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1.3.1	Hibah	0	0	0	0	0	0,00%
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0,00%

No.	Uraian	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	13.174.200.000		0	0	0	0,00%
2	**BELANJA**	**3.434.211.428.140**	**3.222.264.415.289**	**3.253.206.357.889**	**3.279.516.692.389**	**3.383.096.692.771**	**0,40%**
2.1	**Belanja Operasi**	**2.288.267.751.199**	**2.284.654.850.913**	**2.280.443.576.403**	**2.276.397.040.455**	**2.272.699.123.789**	**0,23%**
2.1.1	Belanja Pegawai	1.287.841.684.367	1.333.558.684.367	1.333.558.684.367	1.333.558.684.367	1.333.558.684.367	1,31%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	799.079.519.232	755.407.021.487	755.407.021.487	755.407.021.487	755.407.021.487	-0,91%
2.1.3	Belanja Bunga	10.000.000	11.955.727.124	7.744.452.614	3.697.916.666	0	0,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0,00%
2.1.5	Belanja Hibah	187.527.147.600	170.304.017.935	170.304.017.935	170.304.017.935	170.304.017.935	-2,15%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	13.809.400.000	13.429.400.000	13.429.400.000	13.429.400.000	13.429.400.000	0,02%
2.2	**Belanja Modal**	**465.086.755.283**	**279.995.142.718**	**315.148.359.828**	**345.505.230.276**	**452.783.147.324**	**4,66%**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3.550.051.100	5.693.500.000	5.693.500.000	5.693.500.000	5.693.500.000	0,00%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.703.023.122	57.566.389.900	57.566.389.900	57.566.389.900	57.566.389.900	-2,03%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.891.747.759	34.404.881.094	34.404.881.094	34.404.881.094	34.404.881.094	-1,67%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	369.793.301.502	181.478.371.324	216.631.588.434	246.988.458.882	354.266.375.930	8,80%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	93.631.800	797.000.400	797.000.400	797.000.400	797.000.400	131,07%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	-11,71%
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**10.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**10,00%**
2.4	**Belanja Transfer**	**670.856.921.658**	**652.614.421.658**	**652.614.421.658**	**652.614.421.658**	**652.614.421.658**	**0,08%**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	24.228.199.158	24.228.199.158	24.228.199.158	24.228.199.158	24.228.199.158	0,05%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	646.628.722.500	628.386.222.500	628.386.222.500	628.386.222.500	628.386.222.500	0,09%
	SURPLUS/ (DEFISIT)	-170.321.602.369	54.264.705.882	54.264.705.882	54.264.705.882	-7.500.000.000	

No.	Uraian	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**238.547.037.278**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**14,72%**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	38.547.037.278	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-14,81%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0,00%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0,00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	200.000.000.000	0	0	0	0	0,00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0,00%
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	0	0	0	0	0	0,00%
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**68.225.434.909**	**64.264.705.882**	**64.264.705.882**	**64.264.705.882**	**2.500.000.000**	**0,00%**
3.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	68.225.434.909	61.764.705.882	61.764.705.882	61.764.705.882	0	0,00%
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah		2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00%
3.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0,00%
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0,00%
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	0	0	0	0	0	0,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	170.321.602.369	-54.264.705.882	-54.264.705.882	-54.264.705.882	7.500.000.000	
	SILPA	0	0	0	0	0	

Sumber : BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Melihat pada hasil proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagaimana yang terdapat pada tabel di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kebijakan yang dapat dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka merealisasikan target/ proyeksi Pendapatan Daerah yang telah dirumuskan diatas, maka terdapat beberapa arah kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan yang perlu dilaksanakan khususnya pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan antara lain sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
   a. Optimalisasi pajak dan retribusi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanpa harus menambah beban bagi masyarakat Kabupaten Lamongan;
   b. Memperbaiki pengelolaan *database* wajib pajak dan potensi pajak serta retribusi, utamanya dengan adanya sumber-sumber perpajakan baru, restrukturisasi pajak serta penyederhanaan jenis restribusi, sehingga dapat mengurangi *potential loss* yang terjadi baik dari sektor pajak maupun retribusi;
   c. Menyusun Peraturan Daerah terkait kebijakan pajak dan retribusi daerah sebagai tindak lanjut atas apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
   d. Melakukan sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
   e. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;

f. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan Pendapatan Asli Daerah disertai dengan pelaksanaan *Law enforcement* (penegakan hukum) dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
g. Penguatan SDM dan infrastruktur perpajakan sejalan dengan dinamika perekonomian daerah serta memberi penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran;
h. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), Aset Daerah¸BUMD, Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan serta sumber-sumber lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai sumber PAD;
i. Penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk meningkatkan perekonomian daerah antara lain melalui penguatan hilirisasi yang diarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, akselerasi investasi serta peningkatan daya saing daerah;

2. Pendapatan Transfer
   a. Mengoptimalkan pencapaian kinerja keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat untuk tetap mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID).
   b. Mencari alternatif sumber Pendapatan Daerah yang non mainstream seperti Dana Alokasi Khusus yang spesifik pada DAK Fisik terutama pada projek-projek major Nasional RPJMN, pemberdayaan sosial masyarakat melalui pendanaan CSR maupun membentuk skema hutang serta mandat pembentukan BLUD;
   c. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil pajak melalui kerjasama dengan instansi vertikal, daerah (provinsi) dan daerah lain dalam menyerap basis pajak, termasuk PKB dan BBNKB;

d. Mengoptimalkan upaya untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar dari pemerintah pusat dengan memperkuat/memperluas jaringan, pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan, serta peningkatan koordinasi dan informasi.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka merealisasikan target/proyeksi Belanja Daerah yang telah dirumuskan diatas, maka terdapat beberapa arah kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan yang perlu dilaksanakan khususnya antara lain sebagai berikut :

1. Belanja Daerah Kabupaten Lamongan diprioritaskan untuk membiayai program-program yang bersifat strategis sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2024-2029 dengan menerapkan belanja berbasis kinerja dan efisiensi belanja non prioritas;
2. Pemenuhan belanja wajib pendidikan dan kesehatan *(mandatory spending)* yang merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas SDM daerah menuju regional *well-being* sebagai motor pertumbuhan ekonomi;
3. Mendorong pelaksanaan Belanja Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa Belanja Pegawai (diluar Tunjangan Guru) tidak boleh melebihi 30% serta alokasi Belanja Infrastruktur minimal 40%;
4. Pemberian tunjangan pada ASN dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas kerja dan disiplin kerja;
5. Penyusunan Belanja Daerah dilaksanakan dengan berdasar pada standar harga dan Analisis Standar Belanja (ASB);
6. Meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dengan mensinergikan fokus pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa;

7. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;
8. Penggunaan dana tidak terduga dilakukan untuk menangani hal-hal bersifat darurat dan mendesak *(stanby budget)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam rangka merealisasikan target/ proyeksi Pembiayaan Daerah yang telah dirumuskan di atas, maka terdapat beberapa arah kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan yang perlu dilaksanakan khususnya antara lain sebagai berikut :

1. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (SiLPA) diupayakan nilainya semakin kecil dan dioptimalkan untuk menutup defisit anggaran belanja daerah dan peningkatan/pemenuhan anggaran belanja daerah;
2. Mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan *sustainable;*
3. Pembentukan dan Pembelanjaan dana cadangan memperhatikan keseimbangan dengan belanja prioritas daerah. Dana cadangan ditujukan untuk membiayai kegiatan, seperti penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) atau kegiatan mendesak lainnya yang tidak dapat dianggarkan dalam satu tahun anggaran;
4. Mendorong peningkatan kerja sama pembiayaan daerah dengan pihak swasta/masyarakat/Non-Governmental Organization melalui *Publik Private Partnership*, seperti : KPBU (Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha) atau optimalisasi pelaksanaan program CSR *(Corporate Social Responsibility).*

   Pemerintah Daerah melalui program prioritas “Lamongan Menyala” akan mengembangkan proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ). Melalui skema KPBU ini, pembangunan dan pengelolaan APJ akan dilakukan di 10.000 (sepuluh ribu) titik secara berkelanjutan

dengan melibatkan pihak swasta, guna meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan jangkauan penerangan di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan.

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik dan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur disebutkan bahwa penyediaan infrastruktur dapat dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema ini memberikan ruang bagi pihak swasta untuk berperan aktif dalam pembiayaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur publik.

Peraturan Presiden ini mengatur bahwa KPBU dapat diterapkan pada berbagai sektor infrastruktur strategis yang menyentuh kepentingan masyarakat luas. Adapun sektor-sektor infrastruktur yang dapat dikembangkan melalui skema KPBU antara lain:

1. Transportasi

   Meliputi pembangunan dan pengelolaan infrastruktur seperti jalan tol dan non-tol, jembatan, pelabuhan, bandara, serta prasarana dan sarana kereta api.
2. Sumber Daya Air dan Irigasi

   Termasuk pembangunan bendungan, saluran irigasi, pengendalian banjir, dan sistem penyediaan air baku.
3. Air Minum

   Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM), mulai dari pengambilan air baku hingga distribusi ke konsumen.
4. Pengelolaan Air Limbah

   Mencakup pembangunan sistem pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah domestik maupun industri.
5. Pengelolaan Sampah

   Termasuk pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, daur ulang, dan pembuangan akhir sampah secara berwawasan lingkungan.

6. Telekomunikasi dan Informatika

   Seperti pengembangan jaringan fiber optik, pusat data, menara komunikasi, dan infrastruktur pendukung teknologi informasi lainnya.

7. Ketahanan Energi

   Termasuk pembangkit listrik, transmisi dan distribusi listrik, serta infrastruktur energi terbarukan dan energi alternatif lainnya.

8. Minyak dan Gas Bumi

   Infrastruktur hilir migas seperti terminal, jaringan distribusi, dan fasilitas penyimpanan bahan bakar.

9. Ketenagalistrikan

   Pembangunan pembangkit listrik dan jaringan distribusi untuk mendukung kebutuhan nasional akan energi listrik.

10. Fasilitas Pendidikan

    Mencakup pembangunan sekolah, kampus, asrama, dan sarana pendukung pendidikan lainnya.

11. Fasilitas Kesehatan

    Termasuk rumah sakit, puskesmas, laboratorium kesehatan, dan fasilitas penunjang lainnya.

12. Fasilitas Penunjang Pariwisata

    Seperti kawasan wisata, fasilitas transportasi pariwisata, dan sarana pendukung lainnya.

13. Fasilitas Teknologi Industri

    Mencakup kawasan industri, pusat riset, dan fasilitas teknologi pendukung lainnya.

14. Perumahan Rakyat dan Permukiman

    Termasuk pembangunan rumah susun, kawasan permukiman, dan infrastruktur pendukungnya.

15. Prasarana Olahraga

    Seperti stadion, arena olahraga, dan fasilitas olahraga berstandar nasional maupun internasional.

16. Fasilitas Penunjang Ketertiban Umum dan Keselamatan Masyarakat

    Misalnya kantor kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan sarana pemadam kebakaran.

Dengan cakupan sektor yang luas tersebut, KPBU diharapkan mampu menjadi solusi inovatif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional, memperbaiki kualitas layanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Inisiatif pelaksanaan program KPBU ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat infrastruktur dasar, akan tetapi memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat secara luas terkait dengan keamanan, kenyamanan, serta berdampak pada kemudahan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan pada malam hari. Program ini sejalan dengan misi ke-3, yaitu mewujudkan infrastruktur daerah yang mantap dan berwawasan lingkungan. Sedangkan kerja sama pembiayaan daerah melalui CSR dapat dilakukan dengan membentuk forum CSR, melakukan koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan daerah dengan rencana kegiatan CSR yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan, serta melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara berkala.

2.2.5.2 PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan paruh waktu transisi. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana yang disajikan pada pembahasan sebelumnya, maka selanjutnya dapat diketahui nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Lamongan pada tahun 2026 hingga 2030. Nilai kapasitas riil kemampuan keuangan

Kabupaten Lamongan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2026 - 2030) diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2026 kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diproyeksikan mencapai Rp3.186.798.062.819,45 (tiga triliun seratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah dan empat puluh lima sen) dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi Rp3.235.112.143.582,81 (tiga triliun dua ratus tiga puluh lima miliar seratus dua belas juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah dan delapan puluh satu sen) di tahun 2030 dengan rata-rata pertumbuhan dalam setiap tahunnya mencapai 0,38%. Kondisi ini dipengaruhi dengan adanya peningkatan pada Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2026 nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Pemerintah Daerah hanya mencapai Rp3.186.798.062.819,45 (tiga triliun seratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah dan empat puluh lima sen), dengan kebutuhan belanja daerah yang mencapai Rp3.436.798.062.819,45 (tiga triliun empat ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah dan empat puluh lima sen), sehingga diperlukan pinjaman daerah yang mencapai sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar). Pinjaman daerah tersebut memberikan konsekuensi adanya pengeluaran pembiayaan dalam bentuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang mengurangi nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Lamongan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Secara lebih jelas, nilai Kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah pada 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2026 hingga 2030) tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2-81 81Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2026-2030

No	Uraian	Proyeksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	3.232.798.062.819,45	3.248.123.703.029,87	3.264.215.625.250,82	3.264.215.625.250,82	3.281.112.143.582,81
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Total Penerimaan	3.242.798.062.819,45	3.258.123.703.029,87	3.274.215.625.250,82	3.274.215.625.250,82	3.291.112.143.582,81
	Dikurangi :					
1	Pengeluaran Pembiayaan	56.000.000.000,00	56.000.000.000,00	56.000.000.000,00	56.000.000.000,00	56.000.000.000,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**3.186.798.062.819,45**	**3.202.123.703.029,87**	**3.218.215.625.250,82**	**3.218.215.625.250,82**	**3.235.112.143.582,81**

Sumber : BPKAD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Tabel 2-8282 83Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan

No	Uraian	Proyeksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**3.186.798.062.819,45**	**3.202.123.703.029,87**	**3.218.215.625.250,82**	**3.218.215.625.250,82**	**3.235.112.143.582,81**
1	Jalan Alus dan Mantap Lamongan (Jamula Mantap)	316.995.889.750,00	135.065.725.082,00	170.218.942.192,00	200.575.812.640,00	307.853.729.688,00
2	Lamongan Menyala	22.244.264.063,00	22.253.670.141,00	22.253.670.141,00	22.253.670.141,00	22.253.670.141,00
3	Lamongan Hijau	13.105.223.995,00	12.564.124.293,00	12.564.124.293,00	12.564.124.293,00	12.564.124.293,00
4	Lamongan Tangguh	19.760.992.750,00	19.769.348.756,00	19.769.348.756,00	19.769.348.756,00	19.769.348.756,00
5	Lumbung Pangan Lamongan	92.962.994.200,00	84.385.195.585,00	84.385.195.585,00	84.385.195.585,00	84.385.195.585,00
6	Young Enterpreneur Success	1.972.735.700,00	1.973.569.872,00	1.973.569.872,00	1.973.569.872,00	1.973.569.872,00
7	UMKM Naik Kelas	7.435.187.878,00	7.438.331.872,00	7.438.331.872,00	7.438.331.872,00	7.438.331.872,00
8	Pariwisata Rama dan Terintegrasi (RAMASINTA)	3.245.400.000,00	3.246.772.322,00	3.246.772.322,00	3.246.772.322,00	3.246.772.322,00
9	Lamongan Sehat	87.598.183.328,00	87.635.224.575,00	87.635.224.575,00	87.635.224.575,00	87.635.224.575,00
10	Pendidikan Berkualitas dan Gratis Bagi Keluarga Kurang Sejahtera (PERINTIS)	191.742.007.400,00	191.823.086.318,00	191.823.086.318,00	191.823.086.318,00	191.823.086.318,00
11	Lamongan Generasi Emas	9.284.952.500,00	9.288.878.673,00	9.288.878.673,00	9.288.878.673,00	9.288.878.673,00
12	Yakin Semua Sejahtera	13.549.915.800,00	13.555.645.434,00	13.555.645.434,00	13.555.645.434,00	13.555.645.434,00
13	Lamongan Nyantri	465.618.550,00	465.815.438,00	465.815.438,00	465.815.438,00	465.815.438,00

No	Uraian	Proyeksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**3.186.798.062.819,45**	**3.202.123.703.029,87**	**3.218.215.625.250,82**	**3.218.215.625.250,82**	**3.235.112.143.582,81**
14	Transformasi Digital Pelayanan Publik	914.010.046.660,00	902.816.066.725,00	898.604.792.215,00	894.558.256.267,00	890.860.339.601,00
15	Desa Pintar	6.868.406.204,12	6.871.310.519,00	6.871.310.519,00	6.871.310.519,00	6.871.310.519,00
	Total	1.701.241.818.778,12	1.499.152.765.605,00	1.530.094.708.205,00	1.556.405.042.705,00	1.659.985.043.087,00

Sumber : SIPD RPJMD Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan dan merujuk pada identifikasi permasalahan secara riil dan aktual serta memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lamongan. Permasalahan dapat diketahui dengan pendekatan "*gap expectation*" yaitu membandingkan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta membandingkan antara hal-hal yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil pada saat dokumen RPJMD dibuat. Selain itu perumusan permasalahan pembangunan juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk merespon kondisi yang terjadi dimasyarakat. Secara umum permasalahan pembangunan di Kabupaten Lamongan timbul karena potensi dan kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal serta peluang yang belum dikelola secara maksimal. Adapun hasil pemetaan permasalahan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan cenderung stagnan. Disisi yang lain pengeluaran perkapita dan daya beli masih dibawah rata-rata provinsi serta belum merata.
2. Kemiskinan di Kabupaten Lamongan masih berada di atas angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur.
3. Rata-rata lama sekolah mengalami stagnasi dan belum mencapai target wajib belajar 13 (tiga belas) tahun.
4. Masih terdapat perundungan anak di lingkungan sekolah dan perkawinan usia dini.
5. Perlu penurunan prevalensi stunting dan gizi buruk serta percepatan penanganan penyakit menular dan tidak menular.
6. Masih 55% Jalan Kabupaten dan Poros Strategis dalam kondisi baik.
7. Belum optimalnya ketersedian air baku dan perluasan akses layanan air bersih.

8. Masih terdapat kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni.
9. Sarana pemadam kebakaran perlu diperbanyak.
10. Kepatuhan masyarakat terhadap penegakan Perda masih lemah.
11. Masih terdapat wilayah yang rawan bencana banjir dan kekeringan.
12. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum berbasis pemberdayaan yang berkelanjutan.
13. Angka pengangguran terbuka (TPT) masih cukup tinggi. Disisi yang lain belum kesesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja.
14. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional belum optimal.
15. Konsumsi pangan per kapita mengalami ketidakstabilan.
16. Kelancaran distribusi dan stabilitas ketersediaan pangan belum optimal.
17. Penegakan Alih Fungsi Lahan Pertanian/ LP2B
18. Adanya penurunan produksi tanaman pangan dan komoditas perkebunan.
19. Adanya penurunan pada produksi perikanan.
20. Pemanfaatan modernisasi pertanian masih lambat.
21. Penggunaan teknologi modern untuk peternakan belum optimal.
22. Pengendalian pencemaran, rehabilitasi lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang lestari belum optimal.
23. Proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) serta timbulan sampah yang didaur ulang masih rendah.
24. Masih terdapat tantangan dalam proses perekaman atau distribusi KTP terutama pada kelompok rentan.
25. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan potensi desa masih lemah.
26. Kesadaran masyarakat dalam mendukung program Keluarga Berencaca masih rendah.
27. Belum semua jalan kabupaten dan strategis terdapat sarana prasarana jalan, khususnya lampu penerangan.
28. Realisasi investasi masih fluktuatif.

29. Pembinaan, perluasan akses ermodalan, inovasi, dan pengembangan pasar belum dilakukan secara berkelanjutan tehadap usaha mikro.
30. Masih diperlukan pembinaan dan penguatan pada koperasi.
31. Prestasi pemuda mengalami stagnasi, ditengah partisipasi aktif pemuda dalam wadah organisasi formal yang belum optimal.
32. Prestasi seni dan budaya belum optimal.
33. Belum semua situs, seni dan budaya terlestarikan.
34. Persentase ketersediaan perpustakaan yang sesuai standar nasional masih minim ditengah upaya peningkatan minat baca masyarakat.
35. Kompetensi dan pemahaman terkait pengelolaan arsip masih rendah.
36. Integrasi pariwisata dengan berbagai sektor belum berjalan dengan optimal.
37. Pengembangan Ekonomi Kreatif masih belum optimal.
38. Tata kelola digital menuju satu data belum optimal.
39. Belum optimalnya penerapan manajemen talenta ditengah sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi.
40. Belum optimalnya digitalisasi tata kelola pendapatan asli daerah.
41. Ekosistem riset dan inovasi daerah belum optimal.

2.3.2 ISU STRATEGIS DAERAH

2.3.2.1 ISU GLOBAL

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika global mengalami perubahan yang sangat cepat dan kompleks, ditandai oleh meningkatnya ketegangan geopolitik, ketidakpastian ekonomi, disrupsi teknologi, serta krisis lingkungan yang semakin nyata. Isu-isu tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, penting bagi Kabupaten Lamongan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi isu-isu global tersebut agar dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang adaptif, resilien, dan berdaya saing di tengah ketidakpastian global.

A. Geopolitik dan Geoekonomi

Meningkatnya ketegangan geopolitik dan dinamika geoekonomi di berbagai kawasan dunia. Konflik bersenjata seperti perang Rusia-Ukraina, eskalasi militer di Timur Tengah, serta persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menciptakan ketidakpastian global yang luas. Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi global melalui disrupsi rantai pasok, lonjakan harga energi dan pangan, serta terhambatnya arus perdagangan internasional. Bagi Indonesia, dinamika ini menempatkan posisi negara dalam tantangan sekaligus peluang. Sebagai negara dengan ekonomi terbuka dan posisi geografis strategis di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia terdampak oleh gejolak global tersebut, terutama melalui fluktuasi harga komoditas, tekanan inflasi, dan potensi perlambatan investasi asing. Di sisi lain, posisi Indonesia yang netral dan aktif dalam forum multilateral seperti ASEAN memberi peluang untuk memainkan peran sebagai penyeimbang kawasan dan penghubung antara berbagai kekuatan global. Selain itu, situasi ini mendorong Indonesia memperkuat ketahanan ekonomi domestik.

B. Pelemahan Ekonomi Cina

Pelemahan ekonomi Cina menjadi salah satu isu global yang patut dicermati karena negara tersebut merupakan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan rantai pasok global. Dalam beberapa tahun terakhir, China menghadapi berbagai tekanan domestik, seperti krisis sektor properti, perlambatan konsumsi, serta ketegangan dagang dengan Amerika Serikat yang belum mereda. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonominya melambat secara signifikan, dan memberikan dampak terhadap mitra dagangnya, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu mitra dagang utama, pelemahan ekonomi China berpotensi menurunkan permintaan ekspor Indonesia, terutama untuk komoditas unggulan seperti batu bara, kelapa sawit, dan produk perikanan. Bagi Indonesia, kondisi ini menjadi pengingat

pentingnya diversifikasi pasar ekspor, penguatan industri hilir di dalam negeri, serta peningkatan nilai tambah produk lokal agar lebih tahan terhadap gejolak ekonomi eksternal.

C. Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim global merupakan salah satu isu strategis yang dampaknya semakin nyata dan meluas di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama di sektor-sektor vital seperti pertanian, perikanan, dan kelautan. Kerugian akibat gangguan cuaca ekstrem dan degradasi lingkungan juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan, produktivitas ekonomi, serta pembiayaan pembangunan yang semakin berat karena kebutuhan adaptasi dan mitigasi meningkat. Oleh karena itu, perubahan iklim menuntut respons strategis melalui penguatan kebijakan lingkungan, perlindungan ekosistem, serta integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam seluruh aspek kebijakan nasional.

2.3.2.2 ISU NASIONAL

Isu-isu nasional merupakan permasalahan strategis yang dihadapi secara luas oleh bangsa Indonesia dan memerlukan penanganan terpadu serta lintas sektor. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, identifikasi isu nasional menjadi dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang responsif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Isu-isu ini mencakup berbagai dimensi, mulai dari ekonomi, sosial, lingkungan, tata kelola pemerintahan, hingga ketahanan nasional. Bagi Pemerintah Daerah, pemahaman terhadap isu nasional menjadi penting agar terjadi keselarasan antara prioritas pembangunan pusat dan daerah, serta untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan mampu menjawab tantangan nyata dan mendukung pencapaian tujuan nasional secara holistik.

A. Asta Cita

Sebagai arah kebijakan pembangunan nasional jangka menengah tahun 2025–2029, Pemerintah Pusat menetapkan Asta Cita sebagai delapan misi utama pembangunan yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Asta Cita mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun negara yang berdaulat, adil, makmur, dan berkelanjutan dengan menekankan pada transformasi struktural, penguatan demokrasi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta pemantapan ketahanan nasional. Delapan agenda prioritas ini menjadi pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).



Gambar 2-77 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Sumber: RPJMN 2024-2029, 2025

Berlandaskan pada Asta Cita, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah menetapkan Program Prioritas dan 8 Program hasil Terbaik Cepat yang harus diselaraskan serta diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 2-83 Program Prioritas dan 8 Program hasil Terbaik Cepat

17 Program Priorotas	8 Program Hasil Terbaik Cepat
Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesankecenderungan, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
Pemberantasan Kemiskinan	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan	

17 Program Priorotas	8 Program Hasil Terbaik Cepat
Internasional yang Kondusif	
Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	
Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	
Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	
Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	
Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif: Karakteristik Mandiri Lainnya	
Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-Luasnya bagi Warga dan Ketahanan Ekonomi	
Menstabilkan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendidikan, dan Perawatan Rumah Ibadah	
Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

Sumber: RPJMN 2025-2029, 2025

B. Isu Pembangunan RPJMN

1. Inefisiensi Kawasan Perkotaan dan Metropolitan

Terdapat inefisiensi kawasan perkotaan dan metropolitan dalam menjalankan fungsi layanannya, baik untuk kota itu sendiri maupun wilayah sekitarnya. Hal ini tercermin dari nilai rata-rata *Metropolitan Performance Index* yang masih di bawah 50 persen. Rendahnya indeks ini

menunjukkan bahwa kawasan metropolitan belum optimal sebagai pusat pertumbuhan yang inklusif dan terintegrasi. Sebagai pusat ekonomi nasional, keterbatasan performa kota-kota besar di Jawa menjadi penghambat akselerasi pembangunan kawasan sekitarnya, memperlebar ketimpangan antardaerah, dan menekan kualitas hidup masyarakat urban.

2. Ketimpangan Infrastruktur dan Integrasi Logistik

Infrastruktur logistik di Pulau Jawa masih menghadapi tantangan besar, khususnya keterbatasan integrasi antarwilayah. Infrastruktur yang ada belum sepenuhnya mendukung konektivitas antara pusat pertumbuhan utama dan kawasan hinterland, terlebih di Jawa bagian selatan. Kesenjangan pembangunan antara koridor utara dan selatan menyebabkan disparitas ekonomi. Ketidakseimbangan ini juga menyebabkan tingginya biaya logistik. Hal ini menuntut kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih adil dan terarah secara spasial.

3. Tingginya Risiko dan Kerentanan Bencana

Pulau Jawa merupakan wilayah dengan risiko bencana geologis dan hidrometeorologis yang tinggi. Tingginya tingkat kerentanan ini tidak hanya mengancam keselamatan penduduk, tetapi juga mengganggu kelangsungan aktivitas ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan wilayah yang berbasis mitigasi risiko bencana dan peningkatan ketahanan iklim.

4. Mismatch Pendidikan dan Dunia Kerja

Masalah kesenjangan keterampilan (skills gap) masih menjadi tantangan besar di Pulau Jawa. Sistem pendidikan dan pelatihan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dunia industri yang terus berubah, baik dalam hal keterampilan teknis maupun digital. Hal ini terlihat dari tingginya angka pengangguran lulusan SMK dan SMA. Mismatch ini berpotensi menurunkan produktivitas, menciptakan beban sosial-ekonomi, dan menurunkan kualitas bonus demografi jika tidak segera diatasi melalui transformasi pendidikan dan pelatihan vokasional berbasis industri.

5. Masalah Gizi: Stunting, Wasting, dan Underweight

Permasalahan gizi buruk masih menjadi tantangan kesehatan utama di wilayah Jawa, meskipun secara umum wilayah ini relatif lebih maju dibanding wilayah lain. Prevalensi stunting, wasting, dan underweight rata-rata masih di atas 14%. Tingginya angka gizi buruk ini menunjukkan bahwa intervensi yang ada belum cukup efektif atau belum menjangkau kelompok sasaran secara merata, terutama di kantong-kantong kemiskinan.

6. Tingginya Beban Penyakit TBC di Wilayah Padat Penduduk

Wilayah-wilayah padat penduduk di Pulau Jawa juga menghadapi beban penyakit menular yang tinggi, terutama Tuberkulosis (TBC). Penyakit ini menjadi beban kesehatan masyarakat karena penyebarannya cepat dan membutuhkan penanganan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan, khususnya di wilayah urban, masih menghadapi keterbatasan dalam pengendalian penyakit menular, dan perlu diperkuat dari sisi promotif, preventif, hingga penguatan layanan primer.

7. Tingkat Kemiskinan dan Keterbatasan Integrasi Program Pengentasan

Tingkat kemiskinan di Pulau Jawa masih cukup tinggi, dengan rata-rata 8,11 persen. Meskipun secara umum wilayah ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional, namun ketimpangan antarwilayah dan kantong-kantong kemiskinan struktural masih kuat. Salah satu penyebabnya adalah belum terpadunya program pengurangan kemiskinan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan dan inovasi pemberdayaan ekonomi lokal.

C. Potensi Kewilayahan RPJMN

Wilayah Jawa merupakan kawasan strategis nasional dengan peran vital dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan kontribusi lebih dari 58% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, wilayah ini menjadi episentrum

pertumbuhan ekonomi. Potensi kewilayahan yang tertuang dalam RPJMN menjadi landasan sekaligus peluang bagi Pemerintah Daerah dalam optimalisasi potensi daerah sehingga bisa semakin berdaya saing. Potensi tersebut yakni:

1. Pertanian dan Ketahanan Pangan. Pulau Jawa memiliki peran sangat vital dalam menopang ketahanan pangan nasional. Kawasan ini menyumbang 54,22 persen dari total produksi beras nasional, menjadikannya sebagai sentra utama produksi padi di Indonesia. Dengan tingkat produktivitas lahan yang relatif tinggi, serta dukungan infrastruktur irigasi dan pasar yang luas, Pulau Jawa memiliki posisi krusial dalam menjaga ketahanan pangan jangka panjang Indonesia.
2. Ketahanan Energi dan Energi Bersih. Pulau Jawa juga menyimpan potensi besar dalam bidang energi, baik energi fosil maupun energi terbarukan. Sehingga Jawa berpeluang menjadi pusat pengembangan energi hijau nasional menuju pembangunan rendah karbon.
3. Industri Pengolahan, Pulau Jawa merupakan jantung industri pengolahan nasional dan menciptakan rantai nilai dan rantai pasok yang kuat dan terintegrasi. Keberadaan kawasan industri besar dan pusat manufaktur di Jawa menjadikan kawasan ini sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
4. Sumber Daya Manusia (SDM) Terampil, Sebagai pusat pendidikan tinggi nasional, Pulau Jawa memiliki ratusan perguruan tinggi dengan berbagai disiplin ilmu. Hal ini menciptakan keunggulan kompetitif dalam penyediaan SDM untuk berbagai sektor strategis. Ketersediaan SDM berkualitas ini menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi ekonomi dan peningkatan produktivitas nasional.
5. Infrastruktur Transportasi yang Terhubung, Pulau Jawa telah memiliki jaringan transportasi darat yang relatif lengkap, termasuk jalan nasional, jalan tol lintas Jawa, dan jalur kereta api antarkota. Selain itu, kawasan ini juga dilengkapi dengan beberapa pelabuhan laut dan bandara utama yang menjadi simpul logistik nasional dan internasional. Konektivitas ini mempercepat arus barang dan mobilitas

manusia, serta memperkuat integrasi pasar antardaerah maupun antarnegara.

2.3.2.3 ISU REGIONAL

A. Isu Strategis Provinsi Jawa Timur

Isu strategis di Provinsi Jawa Timur dalam 5 (lima) tahun kedepan menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam perumusan isu strategis, strategi dan arah kebijakan karena memiliki dampak langsung pada pembangunan di Kabupaten Lamongan. Merujuk pada dokumen rancangan akhir RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 terdapat 6 (enam) isu strategis yakni:

Isu Strategis Pertama, Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah. Pemantapan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah meliputi peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal dalam rangka menggerakkan perekonomian regional, memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, serta mengoptimalkan sumber daya ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan akses pasar. Pengembangan investasi berbasis sumber daya lokal di Provinsi Jawa Timur masih menghadapi beberapa tantangan yang menghambat optimalisasi potensi ekonomi dan pembangunan daerah. Dalam rangka pemerataan ekonomi, dibutuhkan percepatan keseimbangan pembangunan antara koridor pertumbuhan wilayah utara-selatan dan kepulauan sebagai upaya mengurangi disparitas antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. implementasi konsep pengembangan wilayah yang ada di Jawa Timur seperti Agropolitan, Minapolitan, Pariwisata, Industri, dan sebagainya belum efektif.

Untuk menjawab isu tersebut, strategi penataan ruang dalam RTRWP Jawa Timur diarahkan pada pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila) serta pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) seperti Agroindustri Gelang (Gresik dan Lamongan) dan

Lamongan Integrated Shorebase (LIS). Hal ini menunjukkan peran spasial Lamongan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

Isu Strategis Kedua, Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; pengembangan program program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi, sehinggayang memerlukan pendekatan yang holistik dalam upaya untuk mengatasinya. Kemiskinan bisa disebabkan oleh berbagai faktor kompleks. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan meliputi PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kenaikan Harga Barang Secara umum (Inflasi) dan pertumbuhan ekonomi. Realisasi investasi Jawa Timur yang meningkat 1,5 persen tahun 2024 pada kondisi perekonomian dunia yang dinamis juga belum dapat menyerap tenaga kerja secara optimal di pasar kerja formal. Dibutuhkan upaya kompleks dalam membuka kesempatan kerja yang luas dan berkualitas bagi masyarakat.

Secara keruangan, upaya perluasan kesempatan kerja ini didukung oleh strategi penataan ruang RTRWP Jawa Timur yang mendorong pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi secara berjenjang, termasuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) seperti Perkotaan Paciran-Brondong dan Perkotaan Babat. Pengembangan PKL ini berfungsi sebagai pusat perdagangan, jasa, dan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan mengurangi tingkat kemiskinan. Secara khusus, penetapan KSP Lamongan Integrated Shorebase (LIS), KSP Agroindustri Gelang (Gresik dan Lamongan) Utara, dan KSP Minapolitan Lamongan-Tuban-Gresik menjadi landasan spasial untuk menarik investasi di sektor industri dan perikanan, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan dan sekitarnya.

Isu Strategis Ketiga, Pengembangan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas. Masalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) karena layanan pendidikan yang tidak memadai adalah isu serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Kurangnya layanan pendidikan yang baik dapat memperbesar kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial masyarakat. Perubahan demografi menyebabkan kebutuhan akan layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya menjadi terbatas. Ketika kualitas SDM masih belum dapat bersaing, fenomena *unemployment* dan *under employment* sangat rentan berkembang dan memicu permasalahan-permasalahan sosial-ekonomi yang lebih kompleks dan rumit.

Dukungan spasial untuk isu ini tertuang dalam misi penataan ruang RTRWP untuk mewujudkan pembangunan daerah berupa sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas) yang memadai. Strategi ini diwujudkan melalui pengembangan sistem perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan, termasuk pelayanan pendidikan dan kesehatan, hingga ke tingkat Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di setiap kecamatan, sehingga akses masyarakat terhadap layanan dasar menjadi lebih merata.

Isu Strategis Keempat, Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. Penguatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu Provinsi Jawa Timur perlu akan adanya Kepemimpinan lokal yang berwawasan global berlandaskan kearifan lokal yang dapat menggerakkan masyarakatnya untuk berwawasan global namun tetap berpijak pada landasan nilai-nilai budayanya sebagai kearifan lokal.

Isu Strategis Kelima, Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip

pembangunan berkelanjutan. Lingkungan hidup beserta sumber daya alam yang ada di dalamnya memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Adanya peningkatan jumlah penduduk menyebabkan ketersediaan sumber daya alam menjadi semakin terbatas seiring dengan meningkatnya kebutuhan makhluk hidup melebihi ketersediaan sumber daya alam yang ada. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta berdampak pada peningkatan risiko bencana. Pelestarian warisan budaya lokal memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana berbasis kearifan lokal.

Secara keruangan, isu ini dijawab melalui strategi RTRWP yang menekankan pada pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) strategis seperti DAS Bengawan Solo dan pengembangan serta pelestarian kawasan yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap bencana alam, yang sangat relevan dengan kondisi geografis Kabupaten Lamongan.

Isu Strategis Keenam, Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani. Kedaulatan Pangan Jawa Timur terkonfirmasi dari tingginya kontibusi komoditas agro (pertanian dalam arti luas) terhadap nasional, sehingga menjadi lumbung pangan nasional. Kebutuhan pangan di Jawa Timur hampir seluruhnya dapat dipenuhi dari produksi domestik. Surplus komoditas pangan pertanian di Jawa Timur selain didukung potensi sumber daya alam yang sesuai, juga sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur pendukung yang cukup baik. Pertumbuhan NTP tahunan menandakan semakin baiknya kesejahteraan petani. Peningkatan kesejahteraan ini perlu dipertahankan lebih lanjut dengan upaya menjaga stabilitas harga komoditas pertanian, meningkatkan efisiensi produksi melalui intensifikasi dan penguatan saprodi hulu produksi, dan membuat nilai tambah hilir olahan produk pangan pertanian di tingkat petani.

Isu kedaulatan pangan ini secara spasial didukung oleh strategi penataan ruang provinsi melalui penetapan Kawasan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (KP2B) untuk menjaga fungsi lahan pertanian dari alih fungsi lahan, yang relevan untuk menjaga status Lamongan sebagai salah satu lumbung pangan KSP Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo dan KSP Minapolitan Lamongan-Tuban-Gresik. Kedua KSP ini memprioritaskan Lamongan sebagai wilayah strategis untuk pengembangan pertanian dan perikanan berkelanjutan di tingkat provinsi.

B. Arah Pembangunan dalam Pola Kewilayahan Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan sinergitas antar pemerintahan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan fokus pembangunan berbasis kewilayahan. Tujuan utama dari kebijakan kewilayahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari peningkatan cakupan pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan), pengembangan peningkatan sektor unggulan (pengurangan kemiskinan) dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Hal tersebut dikarenakan perumusan kebijakan kewilayahan didasarkan pada faktor sosial dan ekonomi kabupaten/kota, yang meliputi pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi. Adapun prioritas pembangunan dan lokasi penanganan kewilayahan yang memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lamongan sebagai bagian dari aglomerasi Gerbang Kertasusila sebagai berikut:

Tabel 2-8484 Lokasi Prioritas dan Highlight Indikasi Intervensi Arah Kebijakan Kewilayahan

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
Kawasan Gerbangkertasusila	1) Pengembangan Pariwisata Terpadu: Pengembangan destinasi wisata ziarah Wali Songo (Makam Sunan Drajat) yang terintegrasi dengan destinasi lain di Gerbangkertosusila. 2) Peningkatan Konektivitas: Dukungan terhadap proyek strategis seperti Jalan Tol Gresik-Lamongan-Tuban untuk memperlancar arus logistik. 3) Pengelolaan Lingkungan Bersama: Inisiasi pengembangan TPST Regional dan SPAL Regional sebagai bagian dari pengelolaan Wilayah Metropolitan Surabaya.
Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi. Ziarah Waliullah.	1) Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan. 2) Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan bidang usaha

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	pariwisata. 3) Perlindungan dan pemberian insentif untuk mendorong usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai peraturan perundang-undangan. 4) Perkuatan kemitraan rantai nilai usaha di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif. 5) Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam perwujudan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat. 6) Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata. 7) Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata. 8) Peningkatan dan pemantapan pemosisian dan citra pariwisata Jawa Timur. 9) Pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata. 10) Pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju dan di dalam destinasi pariwisata. 11) Pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan.
Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo Jawa Timur. Kab. Pacitan,Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab.Lamongan dan Kab. Gresik.	1) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Colo, D.I. Asin Bawah, D.I. Bengawan Jero, D.I.Gondang, D.I. Wd. Prijetan, D.I. SIM, D.I. Waduk Pondok, D.I. Jejeruk, D.I. Sungkur, D.I. Beron, dan D.I. Pacal. 2) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah. 3) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi). 4) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan). 5) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura. 6) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura. 7) Pembangunan Jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik dan Rembang-Tuban. 8) Preservasi jalan ruas Bojonegoro-Babat-Lamongan-Gresik dan Tuban-Babat. 9) Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agrania, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisas: lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	10) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern, benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konekivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen. 11) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/ gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama. 12) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Lamongan-Tuban	1) Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Brondong dan PPP Bulu 2) Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap 3) Pengembangan input produksi sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya 4) Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat 5) Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan 6) Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan 7) Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produksi perikanan 8) Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam di Lamongan dan Tuban

Sumber: Ranwal RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029 (diolah), 2025

ISU STRATEGIS KABUPATEN LAMONGAN

A. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan 2025-2045 mengusung Visi "**Lamongan Maju, Harmonis, dan**

Berkelanjutan”. Visi besar tersebut dapat diwujudkan melalui 5 misi utama yaitu:



Gambar 2-78 Kerangka Visi dan Misi RPJPD Tahun 2025-2045

Sumber: Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045

Visi dan Misi Jangka Panjang tersebut dirinci ke dalam arah kebijakan yang membagi periodisasi pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke dalam 4 (empat) tahapan. Pada tahapan pertama yang berlangsung pada rentang tahun 2025-2029, Kabupaten Lamongan akan berfokus pada Penguatan Landasan-Landasan Pembangunan (Pondasi). Pada tahapan ini Kabupaten Lamongan fokus menyiapkan pondasi utama pembangunan jangka panjang seperti peningkatan kualitas pelayanan dasar, peningkatan pengelolaan sumber daya usaha, peningkatan kelembagaan dan proses bisnis tata kelola pemerintahan, pemenuhan infrastruktur penunjang kebutuhan dasar, dan penguatan kapasitas mitigasi bencana dan lingkungan.

Secara spesifik, arah kebijakan Kabupaten Lamongan pada tahun 2025-2029 sesuai dengan 5 (lima) misi RPJPD adalah sebagai berikut:

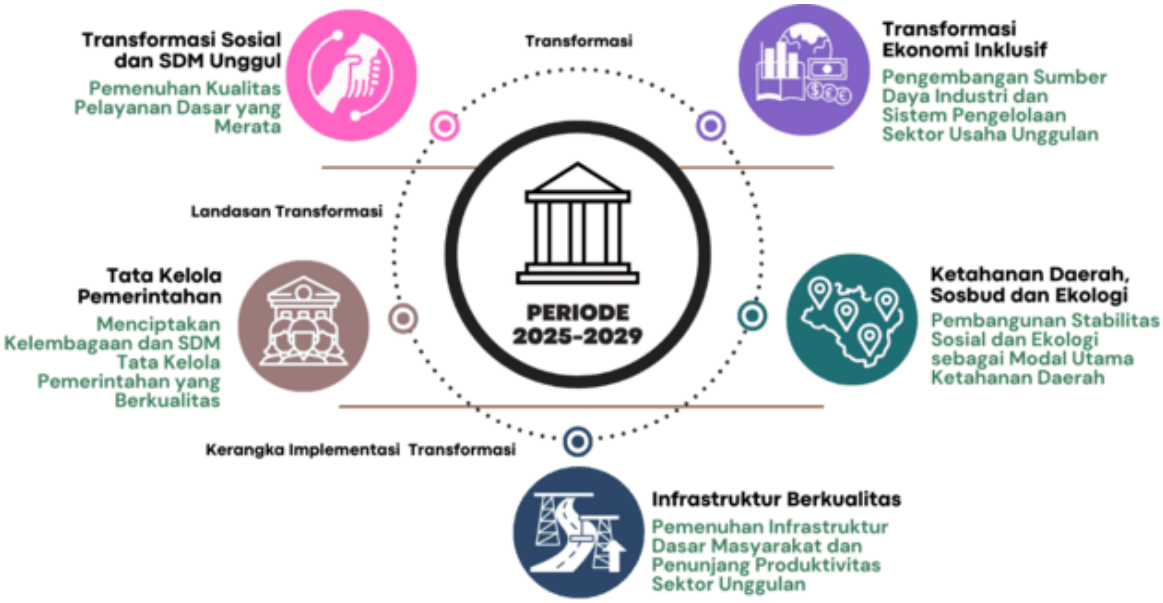

Gambar 2-79 Arah Kebijakan Pada RPJPD Kabupaten Lamongan Untuk Tahun 2025-2029

Sumber: Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045

Kelima arah kebijakan Kabupaten Lamongan 2025-2029 ini juga telah selaras dengan arah kebijakan nasional 2025-2029 sesuai RPJPN tahap pertama dan Rancangan Teknokratik RPJMN sebagaimana yang tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-8685 Linerietas Arah Kebijakan RPJPN dan Arah Kebijakan RPJPD

Kode	Arah Kebijakan Nasional 2025-2029	Kode	Arah Kebijakan Lamongan 2025-2029
N1	Pemenuhan Pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	LA1	Pemenuhan Kualitas Pelayanan Dasar yang Merata
N2	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	LA2	Pengembangan Sumber Daya Industri dan Sistem Pengelolaan Sektor Usaha Unggulan
N3	Kelembagaan Tepat Fungsi, Peningkatan Kualitas ASN, Regulasi yang Efektif, Digitalisasi Pelayanan Publik, Peningkatan Integritas Partai Politik, dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil	LA3	Menciptakan Kelembagaan dan SDM Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas
N4	Memperkuat Supremasi Hukum dan Stabilitas, serta Membangun Kekuatan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan dan Ketangguhan Diplomasi sebagai Landasan Transformasi dan Pembangunan	LA4	Pembangunan Stabilitas Sosial dan Ekologi sebagai Modal Utama Ketahanan Daerah
N5	Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi sebagai Landasan dan Modal Dasar Pembangunan	LA5	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat dan Penunjang Produktivitas Sektor Unggulan

Sumber: Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 (diolah), 2025

Sedangkan apabila arah kebijakan Daerah disandingkan dengan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur 2025-2029, terdapat 2 (dua) arah kebijakan Provinsi Jawa Timur yang selaras dan diakomodir dengan 1 arah kebijakan Kabupaten Lamongan yaitu arah kebijakan Provinsi yang berkaitan dengan "**Memperkuat ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, kelembagaan Demokrasi dan penataan kebijakan pendukung stabilitas ekonomi daerah"** Dan **"Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan"** yang selaras dengan arah kebijakan ke 4 Kabupaten Lamongan yaitu "Pembangunan Stabilitas Sosial dan Ekologi sebagai Modal Utama Ketahanan Daerah". Secara lebih rinci, berikut matriks penyelarasan antara arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur 2025-2029 dengan Araha Kebijakan Kabupaten Lamongan di periode yang sama:

Tabel 2-86 Linerietas Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Timur dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Lamongan

Kode	Arah Kebijakan Jatim 2025-2029	Kode	Arah Kebijakan Lamongan 2025-2029
JT1	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan	LA1	Pemenuhan Kualitas Pelayanan Dasar yang Merata

Kode	Arah Kebijakan Jatim 2025-2029	Kode	Arah Kebijakan Lamongan 2025-2029
	perlindungan sosial		
JT2	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	LA2	Pengembangan Sumber Daya Industri dan Sistem Pengelolaan Sektor Usaha Unggulan
JT3	Tata kelola pemerintahan yang tepat fungsi dan penyederhanaan regulasi	LA3	Menciptakakan Kelembagaan dan SDM Tata Kelola Pemeritnahan yang Berkualitas
JT4	Memperkuat ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, kelembagaan Demokrasi dan penataan kebijakan pendukung stabilitas ekonomi daerah.	LA4	Pembangunan Stabilitas Sosial dan Ekologi sebagai Modal Utama Ketahanan Daerah
JT 5	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan		
JT6	Peningkatan Pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui pemenuhan dan pemanfaatan sarana prasarana yang berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan.	LA5	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat dan Penunjang Produktivitas Sektor Unggulan

Sumber: Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 (diolah), 2025

B. Telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2039

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lamongan telah ditetapkan dalam Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039. Muatan telaah RTRW dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setidaknya memperhatikan Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang Kabupaten. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten diwujudkan melalui rencana pengembangan perdesaan dan perkotaan.

Tabel 2-87 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029

Perwujudan Struktur Ruang	Pengembangan	Program Utama	Lokasi

Perwujudan Struktur Ruang	Pengembangan	Program Utama	Lokasi
Perwujudan Pusat kegiatan	Pengembangan Pusat Kegiatan Perkotaan	Penyusunan RDTR Perkotaan yang ditetapkan menjadi PPK	1. Kecamatan Sukorame 2. Kecamatan Bluluk 3. Kecamatan Sambeng 4. Kecamatan Mantup 5. Kecamatan Kembangbahu 6. Kecamatan Sugio 7. Kecamatan Kedungpring 8. Kecamatan Modo 9. Kecamatan Pucuk 10. Kecamatan Tikung 11. Kecamatan Sarirejo 12. Kecamatan Deket 13. Kecamatan Glagah 14. Kecamatan Karangbinangun 15. Kecamatan Turi 16. Kecamatan Kalitengah 17. Kecamatan Karanggeneng 18. Kecamatan Sekaran 19. Kecamatan Maduran 20. Kecamatan Laren dan 21. Kecamatan Solokuro
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana	Sistem Jaringan Transportasi	Rencana pemantapan jalan nasional sebagai jalan arteri primer	1. Batas Kabupaten, Tuban-Widang 2. Widang/Bedahan-Batas Kabupaten Lamongan; 3. Jln. Jagung Suprapto; 4. Batas Kota Lamongan - Batas Kabupaten Gresik; dan 5. Jln. P.B. Sudirman (Lamongan)
		Rencana pemantapan jalan nasional sebagai jalan kolektor primer JKP-1	1. Lohgung (km.93.175 - Sadang) – Batas Kabupaten. Lamongan dan 2. Widang/ Bedahan – Babat
		Rencana pengembangan jalan nasional sebagai jalan nasional sebagai jalan tol	Jalan Tol Ngawi - Bojonegoro - Toban - Lamongan -Gresik (Manyar - Sunder)
		Rencana pengembangan jalan lingkar utara Lamongan	Menghubungkan Deket- Lamongan - Turi
		Rencana Pemantapan Jalan Provinsi sebagai Jalan Kolektor Primer Dua (JKP2)	1. Babat - batas Kabupaten Jombang; 2. Jalan Lamongrejo; 3. Jalan Achmad Dahlan; 4. Jalan Sunan Drajad; 5. Jalan Raya Mantup; 6. Lamongan - batas Kabupaten Mojokerto.
		Rencana Peningkatan Fungsi Menjadi Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)	1. Sukodadi - Karanggeneng; 2. Karanggeneng - Peti'in; 3. Peti'in - Banjarwati ; 4. Mantup - Balongpanggang (Gresik)
		Rencana Pengembangan Jalan Lingkar Selatan Lamongan	Menghubungkan Jalan Pahlawan - Jalan Sumargo
		Rencana Pengembangan Jalan Lingkar Selatan Babat	Menghubungkan Kecamatan Babat - Kahupaten Bojonegoro
		Rencana Pengembangan Jalan Lingkar Selatan	Menghubungkan Kecamatan Paciran - Kecamatan Solokuro - Kecamatan

Perwujudan Struktur Ruang	Pengembangan	Program Utama	Lokasi
		Pantura	Brondong
		Rencana Pengembangan Jalan Lingkar Timur Lamongan	Menghubungkan Desa Bakalanpule-Desa Tambakrigadung
		Rencana Pengembangan Frontage Road	Menghubungkan Deket - Lamongan-Sukodadi - Pucuk -Babat
		Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Babat - Sekaran - Maduran - Karanggeneng - Kalitengah - Karangbinangun
		Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Pucuk - Sekaran - Maduran - Laren - Solokuro - Brondong – Paciran
		Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Deket-Karanghinangun - Dukun (Gresik)
		Rencana Pengem bangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Solokuro - Laren - Dukun (Gresik)
		Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Glagah - Manyar (Gresik)
		Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Tikung - Sarirejo - Kabupaten Gresik
		Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Solokuro - Paciran;
		Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Tikung - Sarirejo - Benjeng (Gresik)
		Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Lamongan – Sukodadi
		Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Lamongan - Sukodadi - Sugio - Kedungpring;
		Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Tikung - Kembangbahu – Mantup
		Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Tikung - Kembangbahu – Sugio
		Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghu bungkan Tikung - Mantup - Sugio - Kedungpring;
		Reneana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Modo - Kedungpring - Modo - Bluluk – Sukorame
		Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghu bungkan Sukorame – Jombang
		Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghu bungkan Bluluk - Sukorame – Bojonegoro
		Rencana Pengem bangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghu bungkan Ngimbang – Bluluk
		Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer
		Rencana Pemantapan Dan Pengem bangan Jalan Desa	Seluruh desa di Kabupaten Lamongan

Perwujudan Struktur Ruang	Pengembangan	Program Utama	Lokasi
		Rencana Pengembangan Terminal Tipe C	1. Kecamatan Babat; 2. Kecamatan Sukodadi; 3. Kecamatan Paciran; 4. Kecamatan Brondong; 5. Kecamatan Ngimbang; 6. Kecamatan Sugio; 7. Kecamatan Mantup; dan 8. Kecamatan Sukorame.
	Sistem Jaringan transportasi Laut	Rencana Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	Kecamatan Paciran
		Rencana Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional Brondong	Kecamatan Brondong
		Rencana Pengembangan Terminal Khusus	Kecamatan Paciran Kecamatan Brondong
	Sistem jaringan transportasi udara		
	Sistem jaringan energi	Rencana Pengembangan energi lainnya (energi biogas dan biomassa)	Seluruh kecamatan
	Sistem jaringan Telekomunikasi	Rencana Pengembangan Jaringan Bergerak Terestrial	Kabupaten Lamongan
		Rencana Pengembangan Jaringan ergerak Seluler	Kabupaten Lamongan
		Rencana Pengembangan Jaringan Bergerak Satelit - Rencana Pengembangan Menara Telokumu nikasi (BTS)	Kabupaten Lamongan
	Sistem jaringan Sumberdaya Air	Rencana pemantapan sistem jaringan air lintas kabupaten	1. Kali Lamong di Kabupaten Lamongan - Kabupaten Gresik; 2. Kali Corong di Kabupaten Lamongan - Kabupaten Gresik; 3. Kali Wangen di Kahupaten Lamongan - Kabupaten Gresik; 4. Kali S ming di Kabupaten Lamongan - Kabupaten Bojonegoro; 5. Kali Semarmendem di Kahupaten Lamongan - Kabupaten Bojonegoro; 6. Kali Lohgung di Kabupaten Lamongan - Kabupaten Tuban.
		Pemeliharaan DAS	1. DAS Bengawan Solo, 2. DAS Suwuk, 3. DAS Karangklumpuk, 4. DAS Gayaran, 5. DAS Asinan, 6. DAS Lohgung, 7. DAS Tunggul, 8. DAS Lamong, 9. DAS Sidokelar, 10.DAS Labuhan

Perwujudan Struktur Ruang	Pengembangan	Program Utama	Lokasi
		Penataan Sistem Jaringan Bengawan Jero	Kabupaten Lamongan
		Normalisasi Sungai/Kali	KabupatenLamongan
		Normalisasi dan pengembangan waduk dan rawa	Kabupaten Lamongan
		Pelestarian dan Pengendalian Cekungan Air Tanah	1. Cekungan Air Tanah (CAT) Surabaya - Lamongan {Kabupaten Toban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Surabaya); 2. Cekungan Air Tanah (CAT) Tuban (Kab. Tuban, Kab. Lamongan); dan 3. Cekungan Air Tanah (CAT) Panceng (Kab.Lamongan, Kab.Gresik)
		Pelestarian dan Pengendalian lmbuhan Air Tanah	1. Kecamatan Kembangbahu 2. Kecamatan Sugio 3. Kecamatan Kedungpring 4. Kecamatan Modo 5. Kecamatan Babat 6. Kecamatan Pucuk 7. Kecamatan Sukodadi

Sumber: RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 (di olah)

Selanjutnya, terkait kesesuaian atau keselarasan program prioritas dengan program pada pola dan struktur ruang sebagai acuan pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-88 Keselarasan RTRW 2020-2039 dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029

RPJMD 2025-2029				RTRW 2020-2039	
No	**Program Prioritas**	**Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikasi Program Pola Ruang dan Struktur Ruang**	**Lokasi**
1	Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula Mantap)	Pembangunan Jalan Tol	Lamongan	Rencana pengembangan jalan nasional sebagai jalan tol Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro- Tuban – Lamongan –Gresik	Lamongan
2		Peningkatan Jalan Raya Gresik, Raya Lamongan	Lamongan	Rencana Pemantapan Jalan Nasional sebagai jalan arteri primer	Lamongan-Gresik
3		Jalan radial menuju Pelabuhan Paciran	Paciran	Rencana Peningkatan Fungsi Menjadi Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)	Sukodadi, Karanggeneng, Solokuro, Paciran, Mantup-Balongpanggang (Gresik)
4		Percepatan pembangunan Jalan Lingkar Selatan Lamongan	Deket Lamongan, Mantup	Rencana Pengembangan Jalan Lingkar Selatan Lamongan	Deket Lamongan, Mantup

RPJMD 2025-2029				RTRW 2020-2039	
No	**Program Prioritas**	**Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikasi Program Pola Ruang dan Struktur Ruang**	**Lokasi**
5		Percepatan pembangunan Jalan Lingkar Selatan Babat	Babat	Percepatan pembangunan Jalan Lingkar Selatan Babat	Babat
6		Pembangunan drainase Jalan Nasional Arteri Primer (Widang Batas Kota Lamongan, JL. Jagung Suprapto, Batas Kota Lamongan Batas Kab. Gresik, JL. P. B. Sudirman)	Babat – Lamongan	Rencana Pemantapan Jalan Nasional sebagai jalan arteri primer	1. Batas Kabupaten. Tuban – Widang; 2. Widang/Bedahan – Batas Kabupaten Lamongan; 3. Jln. Jagung Suprapto; 4. Batas Kota Lamongan – Batas Kabupaten. Gresik; dan 5. Jln. P.B. Sudirman (Lamongan)
7		Peningkatan Jalan Nasional Kolektor Primer / Daendels (Lohgung (KM 93,175) - BTS. Kota Gresik	Brondong, Paciran	Rencana Pemantapan jalan nasional sebagai jalan kolektor primer JKP – 1	1. Lohgung (km.93.175 – Sadang) – BatasKabupaten. Lamongan dan 2. Widang/Bedahan – Babat
8	Lamongan Tangguh	Pengendalian Banjir Kali Lamong dan Bengawan Jerru, Bengawan Solo	Lamongan, Gresik dan Surabaya	Pengelolaan dan Pengendalian kawasan rawan bencana banjir	Kabupaten Lamongan
9		Desa tangguh Bencana	Seluruh Kecamatan		
10	Lumbung Pangan Lamongan	Rehabilitasi Daerah Irigasi Gondang	Kec. Sugio, Kec. Kembangbahu, Kec. Sukodadi, Kec. Lamongan, Kec. Tikung	Rencana Pemeliharaan Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Pusat	DI Kewenangan Pusat: 1. DI Bengawan Jero; 2. DI Waduk Prijetan; dan 3. DI Waduk Gondang.
11		Percepatan penuntasan Saluran primer Daerah Irigasi Bengawan Jero (Lanjutan saluran primer Intake Babat Barrage)	Kec. Babat	Penataan Sistem Jaringan Bengawan Jero	Kabupaten Lamongan
12		Rehabilitasi Daerah Irigasi Bengawan Jero	Kec. Pucuk, Kec. Maduran, Kec. Karanggeneng, Kec. Kalitengah, Kec. Turi, Kec. Karangbinangun, Kec. Glagah	Penataan Sistem Jaringan Bengawan Jero	Kabupaten Lamongan
13		Pembangunan Waduk Pedes dalam rangka ketahanan pangan dan pengendalian banjir Kali Lamong	Kec. Sambeng	Normalisasi Waduk dan rawa	Kabupaten Lamongan
14		Pengembangan Agropolitan dan	Kabupaten Lamongan	Pengembangan Kawasan Agropolitan	a. Kecamatan Mantup

RPJMD 2025-2029				RTRW 2020-2039	
No	**Program Prioritas**	**Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikasi Program Pola Ruang dan Struktur Ruang**	**Lokasi**
		Penataan Pasar Lamongan			b. Kecamatan Kembangbahu
					c. Kecamatan Sukorame
					d. Kecamatan Bluluk
					e. Kecamatan Sambeng
					f. Kecamatan Modo
					g. Kecamatan Sugio
					h. Kecamatan Kedungpring
15		Program Agropolitan Gerbangkertosusila	Kawasan GKS	Pengembangan Kawasan Agropolitan	a. Kecamatan Mantup
					b. Kecamatan Kembangbahu
					c. Kecamatan Sukorame
					d. Kecamatan Bluluk
					e. Kecamatan Sambeng
					f. Kecamatan Modo
					g. Kecamatan Sugio
					h. Kecamatan Kedungpring
16		Pengembangan Minapolitan (Pemberdayaan	Pantura	Pengembangan Kawasan Minapolitan Tangkap	Brondong dan Paciran
		Kelompok Nelayan)		Pengembangan Minapolitan Budidaya	1. Kecamatan Pucuk;
					2. Kecamatan Deket;
					3. Kecamatan Glagah;
					4. Kecamatan Karangbinangun;
					5. Kecamatan Turi;
					6. Kecamatan Lamongan;
					7. Kecamatan Kalitengah;
					8. Kecamatan Karanggeneng;
					9. Kecamatan Paciran;
					10. Kecamatan Brondong.
17	Pariwisata Rama dan Terintegrasi (Ramasinta)	Program Dewi Cemara (Desa Wisata Masyarakatnya Cerdas Mandiri Sejahtera)	Di Seluruh Kecamatan	Pengembangan kawasan pariwisata	Kabupaten Lamongan

RPJMD 2025-2029				RTRW 2020-2039	
No	**Program Prioritas**	**Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikasi Program Pola Ruang dan Struktur Ruang**	**Lokasi**
		Melestarikan cagar budaya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata;	1. Makam Sunan Drajad, di Kecamatan Paciran;	melestarikan cagar budaya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata;	1. Makam Sunan Drajad, di Kecamatan Paciran;
			2. Makam Sendangduwur, di Kecamatan Paciran;		2. Makam Sendangduwur, di Kecamatan Paciran;
			3. Makam Syech Maulana Ishak di Kecamatan Paciran;		3. Makam Syech Maulana Ishak di Kecamatan Paciran;
			4. Makam Mbah Lamong di Kecamatan Lamongan:		4. Makam Mbah Lamong di Kecamatan Lamongan:
			5. Makam Jaka Tingkir di Kecamatan Maduran;		5. Makam Jaka Tingkir di Kecamatan Maduran;
			6. Makam Nyai Putri Andongsari di Kecamatan Ngimbang;		6. Makam Nyai Putri Andongsari di Kecamatan Ngimbang;
			7. Desa Balun di Kecamatan Turi;		7. Desa Balun di Kecamatan Turi;
			8. Makam Rangga Aboe Amin di Kecamatan Lamongan;		8. Makam Ronggo Abu Amin di Kecamatan Lamongan;
			9. Monumen Van Der Wijck, di Kecamatan Brondong;		9. Monumen Van Der Wijck, di Kecamatan Brondong;
			10. Situs Candi Pataan di kecamatan Sambeng; dan		10.Situs Candi Pataan di kecamatan Sambeng; dan
			11. Kawasan cagar budaya lainnya		11.Kawasan cagar budaya lainnya
		Pengembangan obyek wisata, event-event wista, akomodasi wisata dan kemasan wisata	Seluruh Kecamatan	Pengembangan obyek wisata, event-event wista, akomodasi wisata dan kemasan wisata	Seluruh Kecamatan
		Perlindungan terhadap wisata budaya, heritage dan religi	Seluruh Kecamatan	Perlindungan terhadap wisata budaya, heritage dan religi	Seluruh Kecamatan
		Pelestarian lingkungan alam pantai dan mengembangkan pertanian sebagai penarik wisata.	Seluruh Kecamatan	Pelestarian lingkungan alam pantai dan mengembangkan pertanian sebagai penarik wisata.	Seluruh Kecamatan
		Peningkatan dan Pengembangan kualitas lingkungan objek wisata	Seluruh Kecamatan	Peningkatan dan Pengembangan kualitas lingkungan objek wisata	Seluruh Kecamatan

RPJMD 2025-2029				RTRW 2020-2039	
No	**Program Prioritas**	**Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikasi Program Pola Ruang dan Struktur Ruang**	**Lokasi**
		Penyediaan prasarana dan sarana pariwisata pada kawasan pariwisata	Seluruh Kecamatan	Penyediaan prasarana dan sarana pariwisata pada kawasan pariwisata	Seluruh Kecamatan
		Peningkatan peran masyarakat/pengembang Desa Wisata	Seluruh Kecamatan	Peningkatan peran masyarakat/pengembang	Seluruh Kecamatan
		Perlindungan kawasan Gua Maharani dan Zoo sebagai kawasan lindung geologi	Kecamatan Paciran	Perlindungan kawasan Gua Maharani dan Zoo sebagai kawasan lindung geologi	Kecamatan Paciran
18	Pendidikan Berkualitas dan Gratis Bagi Masyarakat Kurang Sejahtera (PERINTIS)	Beasiswa Pendidikan Sampai S2			
		Beasiswa Bagi Hafidz			
		Pembangunan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Kabupaten Lamongan	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman	Kabupaten Lamongan
		Peningkatan Kesejahteraan tenaga pendidik			
19	Lamongan Sehat	Bantuan Layanan Kesehatan di Pesankecenderungan	Kabupaten Lamongan	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman	Kabupaten Lamongan
		Homecare Servis	Kabupaten Lamongan	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman	Kabupaten Lamongan
		Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana RSUD Puskesmas Posyandu	Kabupaten Lamongan	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman	Kabupaten Lamongan
20	Young Enterpreneur Succes (YES)	Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja	Kabupaten Lamongan	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	a. Kecamatan Paciran;
					b. Kecamatan Brondong;
					c. Kecamatan Solokuro;
					d. Koridor jalan arteri primer, meliputi:
					1. Kecamatan Deket
					2. Kecamatan Lamongan
					3. Kecamatan Sukodadi
					4. KecamatanPucuk
					5. Kecamatan Babat
					e. Koridor jalan kolektor primer, meliputi:
					1. Kecamatan Tikung
					2. Kecamatan Kembangbahu
					3. Kecamatan Ngimbang

RPJMD 2025-2029				RTRW 2020-2039	
No	**Program Prioritas**	**Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikasi Program Pola Ruang dan Struktur Ruang**	**Lokasi**
					4. Kecamatan Sambeng
					5. Kecamatan Kedungpring
					6. Kecamatan Mantup
					7. Kecamatan Modo
		Peningkatan Kompetensi Tenaga kerja			
		10.000 Wirausaha Baru (Santripreneur dan Kepala Keluarga Perempuan Kurang Sejahtera)	Kabupaten Lamongan	Pengembangan kawasan sentra industri	Seluruh Kecamatan
21		Pengembangan Kawasan Industri	Brondong – Paciran	Pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri	a. Kecamatan Paciran;
					b. Kecamatan Brondong;
					c. Kecamatan Solokuro;
					d. Koridor jalan arteri primer, meliputi:
					1. Kecamatan Deket
					2. Kecamatan Lamongan
					3. Kecamatan Sukodadi
					4. KecamatanPucuk
					5. Kecamatan Babat
					e. Koridor jalan kolektor primer, meliputi:
					1. Kecamatan Tikung
					2. Kecamatan Kembangbahu
					3. Kecamatan Ngimbang
					4. Kecamatan Sambeng
					5. Kecamatan Kedungpring
					6. Kecamatan Mantup
					7. Kecamatan Modo
22	Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula Mantap)	Pembangunan SPAM	Karangbinangun	Rencana Pengembangan SPAM Regional	1. SPAM Klaster Kecil (Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik)

RPJMD 2025-2029				RTRW 2020-2039	
No	**Program Prioritas**	**Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikasi Program Pola Ruang dan Struktur Ruang**	**Lokasi**
23		Peningkatan SPAM	Brondong		2. SPAM Klaster Besar (Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan)
24	Lamongan Menyala	Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan	Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis		
		Pemeliharaan dan Penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum	Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis		
25	Lamongan Hijau	Ketersediaan ruang terbuka hijau	Seluruh Kecamatan		
		Pengendalian Kawasan kumuh	Seluruh Kecamatan		
		Perluasan ketersediaan air bersih	Seluruh Kecamatan		
		Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Seluruh Kecamatan		
26	UMKM Naik Kelas	Fasilitasi Pengembangan UMKM			
		Fasilitasi Pengembangan IKM	Seluruh Kecamatan	Pengembangan kawasan sentra industri	Seluruh Kecamatan
		Gerakan Membeli Produk Lamongan			
		Revitalisasi Pasar Desa	Kabupaten Lamongan	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman	Kabupaten Lamongan
		Membangunan Sentra UMKM	Seluruh Kecamatan	Pengembangan kawasan sentra industri	Seluruh Kecamatan
27	Generasi Emas Lamongan	Revitalisasi Sport Center dan pembangunan sarana olahraga desa	Kabupaten Lamongan	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman	Kabupaten Lamongan
		Pembinaan Atlet Sejak Dini			
		Peningkatan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan			
28	Yakin Semua Sejahtera	Jaminan Sosial bagi PPKS			
		Bedah Rumah Bagi Masyarakat Kurang Sejahtera	Kabupaten Lamongan	Penyediaan Perumahan berimbang yang terjangkau semua lapisan masyarakat	Kabupaten Lamongan
			Kabupaten Lamongan	Perbaikan lingkungan bagi kawasan kumuh baik di perkotaan maupun pedesaan	Kabupaten Lamongan
29	Lamongan Nyantri	Penguatan pendidikan berkarakter	Kabupaten Lamongan		
		Menjaga syiar agama	Kabupaten Lamongan		
		Peningkatan minat baca	Kabupaten		

RPJMD 2025-2029				RTRW 2020-2039	
No	**Program Prioritas**	**Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikasi Program Pola Ruang dan Struktur Ruang**	**Lokasi**
		literatur serta Alqur'an	Lamongan		
30	Transformasi Digital Pelayanan Publik	Kemudahan dan Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan	Kabupaten Lamongan	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman	Kabupaten Lamongan
		Digitalisasi Pelayanan Publik	Kabupaten Lamongan	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman	Kabupaten Lamongan
		Interasi satu data dan sistem keamanan	Kabupaten Lamongan	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman	Kabupaten Lamongan
		Integrasi Layanan Kependudukan	Kabupaten Lamongan	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman	Kabupaten Lamongan
31	Desa Pintar	Bantuan Program Infrastruktur khusus jalan	Seluruh Desa Di Kabupaten Lamongan	Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan	Kabupaten Lamongan
		Pembangunan Desa Berdasarkan Potensi Unggulan	Seluruh Desa Di Kabupaten Lamongan	Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan	Kabupaten Lamongan
		Transformasi manajemen desa berbasis teknologi	Seluruh Desa Di Kabupaten Lamongan	Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan	Kabupaten Lamongan

Sumber: Dokumen RPJP dan RTRW Kabupaten Lamongan (diolah), 2025

C. Telaah Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIP-JPID) Tahun 2025 – 2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 telah memperhatikan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIP-JPID) Tahun 2025 – 2029. Dalam pelaksanaan program prioritas telah mensinkronkan pada aspek tantangan dan peluang riset inovasi daerah serta peta jalan riset dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dalam dokumen RIP-JIPD telah dijabarkan Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah, Penataan Basis Data Riset dan Inovasi, Pengembangan Infrastruktur Dasar Riset dan Inovasi, Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi, Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Penguatan Kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah, Penyediaan Sarana Pendukung Riset dan Inovasi Di Daerah, Peningkatan Implementasi dan Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi, sebagai upaya peningkatan daya saing daerah sesuai dengan perencanaan. Keselarasan arah kebijakan Prioritas RIPJPID dengan RPJMD Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-8987 Keselerasan Arah Kebijakan Prioritas RIPJPID dengan RPJMD

Tahun 2025-2029

RPJPD	RPJMD	RIP-JPID
Transfrormasi Ekonomi Inklusif	Untuk perluasan kesempatan kerja dan menumbuhkan minat generasi muda terhadap penciptaan lapangan kerja (wirausaha baru)	Penguatan dan pengembangan kurikulum berbasis, potensi, dan keunggulan daerah, dan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)
		Penguatan BUMDes dalam mempromosikan produk unggulan
		Kajian hilirisasi produk unggulan daerah
	Memberikan pembinaan dan pendampingan serta perluasan akses permodalan dan pasar kepada pelaku UMKM dan IKM sehingga dapat bersaing dan naik kelas. Menjaga keamanan dan kenyamanan pasar maupun sentra. Penguatan Koperasi melalui transformasi digital dan peningkatan kapasitas penyelenggara agar menjadi koperasi yang berkualitas.	Penguatan sentra IKM dalam meningkatkan pendapatan Masyarakat
		Kajian strategi inovasi IKM
Ketahanan Daerah, Sosial Budaya dan Ekologi	Untuk memastikan ketersediaan ruang terbuka hijau, pengendalian Kawasan kumuh, perluasan ketersediaan air bersih dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di seluruh kawasan permukiman, sehingga masyarakat dapat merasakan lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan.	Tata Kelola sampah berbasis industri
	Meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana alam	• Kajian ketahan bencanaan • Kajian livable city • Penguatan daya dukung lingkungan dan manajemen kebencanaan di wilayah yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi
	Memastikan ketersediaan pangan, mendorong terwujudnya peningkatan produksi dan produktvitas pertanian, perikanan serta populasi perternak. Menyalurkan bantuan sarana dan prasarana yang tepat guna dan sasaran serta	Identifikasi produk unggulan dan penerapan TTG serta pengelolaan dan pemasaran produk pertanian dan perikanan

RPJPD	RPJMD	RIP-JPID
	menjaga ketersedian air baku, sehingga Lamongan tetap berstatus sebagai lumbung pangan nasional	
	Mengintegrasikan potensi alam dan budaya Lamongan kedalam sektor pariwisata, menjaga kelestarian budaya. Meningkatkan promosi melalui festival agar dapat menumbuhkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	
Infrastruktur Berkualitas	Pemeliharaan dan peningkatan kemantapan jalan, jembatan serta drainase, sehingga dapat menjaga konektivitas antar wilayah agar dapat menumbuhkan pusat ekonomi baru.	Pemantapan kolaborasi atau kerjasama dalam penyediaan infrastruktur
	Pemeliharaan dan peningkatan jumlah sarana penerangan jalan raya, sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan serta kegairahan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial ekonomi	
Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan aksesibilitas pelayanan publik bagi masyarakat melalui digitalisasi. Menjaga status Lamongan sebagai Kabupaten ramah investasi.	Pengembangan sistem reformasi birokrasi
		Pemantapan inovasi peningkatan kualitas pelayanan publik
Transformasi Sosial Dan SDM Unggul	Peningkatan kesehatan masyarakat secara holistik mulai dari kandungan sampai lansia, termasuk dalam penanganan stunting. Memperluas akses layanan Kesehatan dengan ketersediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta layanan kunjungan kerumah.	Identifikasi upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
	Pionir dalam menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua melalui peningkatan ketersediaan sarana prasarana dan	

RPJPD	RPJMD	RIP-JPID
	kualitas pendidik. Perluasan akses beasiswa untuk memastikan tidak boleh ada masyarakat yang tidak bisa mengenyam pendidikan karena keterbatasan biaya	
	Membentuk generasi pemuda yang unggul melalui pembinaan, pengembangan karakter, dan potensi individu (atlet dan pelaku kreatif) sehingga dapat menjadi tulang punggung pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.	
	Untuk menciptakan rasa yakin bahwa setiap warga Lamongan dapat mencapai taraf sejahtera melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan. Pemerintah Daerah ingin memastikan tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan sosial dan ekonomi.	Identifikasi penyelesaian masalah kemiskinan, stunting, dan pengangguran
	Merawat nilai-nilai kesalehan sosial agar dapat mempertahakan budaya yang beradab dan berakhlakul karimah bagi generasi masa depan melalui syiar agama dan peningkatan minat baca literatur serta Alqur'an	
	Untuk mendorong aparatur desa yang inovatif agar desa bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berbasis teknologi, potensi unggulan dan koperasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.	

Sumber: Bappeitbangda Kabupaten Lamongan (data diolah), 2025

Selanjutnya sinkronisasi atau keselarasan program prioritas dalam RPJPD, RPJMD dan RIP-JPID Kabupaten Lamongan pada periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-90 Linerietas Program Prioritas dengan Program pda Perangkat Daerah

RPJPD	RPJMD	RIP-JPID

Program Prioritas	Program Perangkat Daerah	Program Perencanaan Dasar, Riset dan Inovasi Daerah
Infrastruktur Berkualitas	Program Penyelenggaraan Jalan	Rencana induk jaringan jalan
	Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
Ketahanan Daerah, Sosial Budaya dan Ekologi	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/ Kota	
	Program Pengolahan Persampahan	Analisis pengelolaan sampah
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rencana Induk penyediaan air (SPAM)
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
	Program Kawasan Permukiman	
	Program Penanggulangan Bencana	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rencana induk irigasi
Ketahanan Daerah, Sosial Budaya dan Ekologi	Program Penanganan Bencana	Pemetaan wilayah rawan bencana dan pemutakhiran data risiko bencana melalui *early warning system*
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rencana induk dan roadmap pertanian dan perikanan strategis
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
Transfrormasi Ekonomi Inklusif	Program Penempatan Tenaga Kerja	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
	Program Pengembangan UMKM	Rencana induk produk unggulan daerah
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	

RPJPD	RPJMD	RIP-JPID
Program Prioritas	**Program Perangkat Daerah**	**Program Perencanaan Dasar, Riset dan Inovasi Daerah**
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
	Program Pengembangan Kebudayaan	
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
	Program Pemasaran Pariwisata	
Transformasi Sosial Dan SDM Unggul	Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	Penyusunan rencana induk peningkatan dan pemerataan kualitas Kesehatan
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Perencanaan sistem basis data kemiskinan, stunting dan pengangguran
	Program Pengelolaan Pendidikan	Kajian strategis percepatan capaian indeks pendidikan
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	Program Rehabilitasi Sosial	
Tata Kelola Pemerintahan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
	Program Pengelolaan Pendidikan	
	Program Aplikasi Informatika	Pelatihan intensif bagi staf OPD untuk adopsi teknologi
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	
	Program Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal	

RPJPD	RPJMD	RIP-JPID
Program Prioritas	**Program Perangkat Daerah**	**Program Perencanaan Dasar, Riset dan Inovasi Daerah**
	Program Pendaftaran Penduduk	
	Program Pencatatan Sipil	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan Master Plan dan Pedoman SPBE serta Analisa Indeks Profesionalitas ASN
		Analisis kualitas pelayanan publik
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	Program Kepegawaian Daerah	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
	Program Penataan Desa	Membuat kebijakan pengembangan IKM satu desa satu produk
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lamngan Data Diolah, 2025.

D. Telaah Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Salah satu telaah dalam penyusunan dokumen perencanaan RPJMD adalah mempertimbangkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaktubkan bahwa penyusunan dokumen RPJMD disusun secara bersamaan dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan maksud dalam dokumen RPJMD perlu mengakomodir Isu dan Muatan Lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil telaah dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029 didapatkan hasil berkaitan dengan profile pencapaian SDG yakni sebanyak 202 indikator yang merupakan kewenangan Kabupaten Lamongan di mana 121 (seratus dua puluh satu)

indikator atau 59,9% merupakan indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, sebanyak 62 indikator atau 30,69% merupakan indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target, serta dua indikator atau 1% merupakan indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target. sementara tersisa 8,42% atau 17 indikator yang merupakan indikator dengan data yang tidak tersedia.

Dilihat dari hasil hitung daya tampung penggunaan air serta ketersediaannya di semua Kecamatan secara agregat di Kabupaten Lamongan maka disimpulkan bahwa jumlah kebutuhan total air bersih dinyatakan tidak mampu mencukupi kebutuhan akan air. Dari 27 (dua puluh tujuh) kecamatan di Kabupaten Lamongan terdapat beberapa kecamatan yang masih memiliki angka surplus ketersediaan air, sementara beberapa daerah secara umum memiliki ambang batas yang terlampaui meskipun penggunaan air di Kabupaten Lamongan baik domestik maupun industri telah dibantu menggunakan penghitungan sistem grid dimana hanya terdapat 10 Kecamatan yang memiliki nilai surplus dan kecamatan dengan surplus tertinggi adalah pada kecamatan Maduran sementara Kecamatan dengan total defisit air terdalam ada pada kecamatan Kembangbahu yang disebabkan karena tinggi kebutuhan air untuk sektor ekonomi. Ambang batas kebutuhan air di Kabupaten Lamongan hampir melebihi 20% dari total ketersediaan air. Hal ini perlu untuk menjadi perhatian bahwa jumlah konsumsi air di Kabupaten Lamongan melebihi batas kemampuan produksi air yang mana hal tersebut dapat menyebabkan beberapa kekeringan atau kesulitan sumber air di beberapa wilayah yang memang memiliki jumlah produksi air defisit. Dari sisi proyeksi daya dukung air jumlah kebutuhan air total yang meningkat tidak diimbangi dengan jumlah ketersediaan air maka diprediksi dalam 5 tahun kedepan angka nilai ambang batas akan mengalami defisit dimana pada tahun 2025 diprediksi akan mengalami defisit sebesar -258,552,272 akan menjadi -357,170,719 pada tahun 2029.

Sementara Prediksi daya dukung pangan Kabupaten Lamongan Tahun 2029 melalui sistem grid dinyatakan adalah surplus dengan nilai status kebutuhan pangan 10.49; artinya bahwa Kabupaten Lamongan belum melebihi ambang batas kebutuhan pangan. Namun dari tahun ke tahun nilai status kebutuhan pangan di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan artinya bahwa Pemerintah Daerah perlu untuk memperhatikan hal tersebut. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan agar adanya penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, konservasi tanah dan air dan pemanfaatan teknologi.

Selain daya dukung dan daya tampung dalam telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis perlu untuk menjelaskan kondisi aktual lingkungan Hidup sebenarnya yang ditandai dengan performa kinerja Indeks Kualitas lingkungan Hidup. Pada 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2021 hingga tahun 2023, IKLH Kabupaten Lamongan terlihat mengalami penurunan. Yakni dari angka 72.67 di tahun 2020 menjadi 64.92 di tahun 2021 kemudian menjadi 64.70 di tahun 2022 dan terus menurun pada tahun 2023 hingga menjadi 64.27. Penurunan nilai IKLH tahun 2021 terjadi adanya penyesuaian target berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/MENLHK/Setjen/KUN.1/4/2021 tanggal 4 April 2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, bahwa kabupaten/kota diharapkan melakukan penyesuaian target capaian sesuai dengan rencana target capaian yang telah direncanakan KLHK. Penyesuaian target dimaksudkan sebagai upaya standarisasi perhitungan dan acuan baku dalam kinerja pengelolaan lingkungan hidup ditingkat nasional dan daerah. Tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan diakibatkan adanya penambahan jumlah variabel kualitas air yang dipantau oleh pihak KLHK dan Provinsi Jawa Timur diluar sungai yang menjadi kewenangan Daerah. Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa IKLH Kabupaten Lamongan masih berada di bawah IKLH Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, sehingga kedepan perlu untuk mendapatkan perhatian.

Penurunan kualitas air dapat dilihat dari indeks kualitas air, dimana indeks kualitas air Kabupaten Lamongan Tahun 2023 sebesar 56,90, pada tahun 2022 mencapai 58,39 sedangkan pada Tahun 2021 mencapai 59,52. Kecenderungan peningkatan Indeks Kualitas Air Kabupaten Lamongan terjadi pada kurun waktu Tahun 2017 – Tahun 2021. Sedangkan pada Tahun 2022-2023 terjadi penurunan, hal ini disebabkan beberapa hal penggunaan acuan yang berbeda dalam melakukan perhitungan Indeks Kualitas Air dari tahun sebelum nya dengan tahun 2022 dan 2023, dimana menggunakan acuan baru (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup) No. 27 Tahun 2022). Menurunnya kualitas air di Kabupaten Lamongan karena pada pengujian kualitas air sungai kadar BOD, COD dan fecal kaliform memberikan faktor yang dominan sehingga akan mempengaruhi kualitas air. hal ini disebabkan adanya sumber pencemar dari berbagai aktivitas manusia, seperti industri, permukiman, dan pertanian, telah memberikan tekanan signifikan terhadap sumber daya air di wilayah ini. Perluasan area industri sebesar 20 (dua puluh) hektar dan area permukiman sebesar 2 (dua) hektar, serta penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara (1.091.911 ton/tahun) dan solar (42.123 ton/tahun) oleh industri, menghasilkan limbah cair dan emisi gas yang mencemari air. Selain itu, timbulan sampah domestik yang besar (552.57 ton/hari) juga berkontribusi pada pencemaran air jika tidak dikelola dengan baik

Kualitas udara di Kabupaten Lamongan menghadapi tantangan dari berbagai sumber polusi. Aktivitas pertambangan yang mencakup area seluas 443,86 hektar menjadi salah satu faktor pendorong utama, menghasilkan debu yang mencemari udara. Selain itu, pertumbuhan penduduk sebesar 0,32% dan kepadatan penduduk 7,91 jiwa/Ha meningkatkan kebutuhan energi dan transportasi, yang pada gilirannya meningkatkan emisi dan polusi udara. Pengelolaan sampah yang belum optimal juga menjadi masalah, dengan memiliki 2 TPA dengan kapasitas total 201,686.44 ton per tahun dan luas 9,4 Ha, serta timbulan dengan baik menghasilkan gas metana, gas rumah kaca yang lebih kuat dari

karbon dioksida. Estimasi emisi yang dihasilkan dari TPA di Kabupaten Lamongan dengan total timbulan sampah 201.686,44 ton pada Tahun 2023 adalah 1,895,852.54 ton CO_2eq atau sekitar 3%. Tekanan langsung terhadap kualitas udara berasal dari pembakaran bahan bakar fosil di sektor industri, dengan konsumsi batu bara mencapai 1.091.911 ton/tahun, solar 42.123 ton/tahun, dan gas alam 104.986 ton/tahun. Selain itu, emisi gas buang dari kendaraan bermotor, dengan total emisi CO_2 sebesar 56.661 ton/tahun, juga memberikan kontribusi signifikan terhadap polusi udara, terutama di perkotaan.

Indeks kualitas lahan di Kabupaten Lamongan dari tahun 2018 sebesar 56,60 kemudian mengalami peningkatan pada Tahun 2019 menjadi 57,67 dan kembali mengalami kenaikan pada Tahun 2020 menjadi 58,91. Peningkatan ini tidak luput dari program program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam menjadi lingkungan. Namun indeks kualitas lahan mengalami penurunan yang cukup tajam dimana pada tahun 2021 sebesar 38,84 dan pada Tahun 2022 menjadi 39,76 dan pada tahun 2023 sebesar 40.21

Berdasarkan telaah hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan aspek aspek lingkungan seperti Daya Dukung Daya Tampung, prakiraan dampak resiko lingkungan hidup dan muatan-muatan lain sebagaimana tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis disepakati bahwa terdapat 11 (sebelas) isu strategis berkaitan dengan KLHS RPJMD. Berikut merupakan 11 (sebelas) isu strategis sebagaimana hasil dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis :

1. Penurunan kemiskinan dan peningkatan perlindungan sosial yang tepat sasaran;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat;
3. Pemenuhan kualitas kesehatan;
4. Peningkatan ketahanan Pangan;
5. Penurunan Tingkat pengangguran terbuka dan penciptaan lapangan pekerjaan;

6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi kontribusi sektor pertanian, perdagangan, Industri, UMKM dan Pariwisata;
7. Peningkatan dan pembangunan infrastruktur yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan Pelayanan Dasar;
8. Pengelolaan sampah, limbah dan Limbah B3 yang belum optimal;
9. Membangun ketahanan terhadap bencana dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim;
10. Alih fungsi lahan dan kurangnya Ruang Terbuka Hijau; dan
11. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

E. Isu Strategis Kabupaten Lamongan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan zaman, penting untuk mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis daerah secara komprehensif. Isu strategis merupakan persoalan-persoalan mendasar yang memiliki dampak luas terhadap kualitas kehidupan masyarakat serta pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil telaah permasalahan dan potensi, memperhatikan isu strategis prioritas pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) dan memperhatikan isu strategis Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Timur serta hasil konsensus atau kesepakatan antar stakeholder yang telah melewati forum konsultasi publik serta pembahasan bersama DPRD, maka rumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1.

1. Pemenuhan Kualitas Kesehatan

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan. Dengan program prioritas "Lamongan Sehat" Pemerintah Daerah berupaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan bagi semua lini masyarakat, melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi penguatan sistem kesehatan, serta menguatkan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.

2. Peningkatan Ketahanan Pangan

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan hortikultura. Berbagai sinkronisasi upaya percepatan peningkatan swasembada pangan dilaksanakan melalui perbaikan sistem irigasi, subsidi pupuk, dan penyuluhan pertanian.

3. Percepatan Transformasi ekonomi melalui hilirisasi sektor ekonomi unggulan

Pertumbuhan ekonomi di Lamongan masih bertopang pada sektor pertanian. Selama empat tahun terakhir, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mendominasi struktur PDRB menurut lapangan usaha dengan kontribusi diatas 30 persen. Namun perubahan iklim yang ekstrim yang tidak bisa dipastikan perubahannya memberikan dampak pada sektor pertanian yang akhirnya berpengaruh terhadap menurunnya produksi pada sektor pertanian. Maka yang harus dilakukan kedepan adalah pengembangan pengelolaan sumber daya air dalam rangka menghadapi bencana kekeringan dan banjir serta peningkatan ketersediaan sarana-prasarana penunjang produktivitas sektor pertanian dan perikanan.

Selanjutnya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi ke depan perlu dipacu dengan membangun ekosistem petani dan peternak milenial agar dapat menjaga keberlangsungan sektor tersebut. Memberikan nilai

tambah pertanian yang terintegrasi dengan pelaku UMKM dan IKM yang bergerak dalam pengolahan hasil produksi pertanian dan perikanan. Peningkatan industri pengolahan sebagai sektor yang dapat tumbuh dengan cepat menjadi prioritas utama seiring dengan peningkatan sarana prasarana perdagangan dan langkah memaksimalkan koperasi yang aktif dan sehat, pengelolaan sektor ekonomi kreatif ditengah masifnya ekonomi digital serta pengelolaan sektor pariwisata yang terintegrasi sebagai penggerak pemasaran produk UMKM melalui kunjungan wisatawan.

Hilirisasi menjadi salah satu strategi untuk mendorong sektor ekonomi unggulan tumbuh secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu percepatan pengembangan kawasan industri melalui komitmen ramah investasi dan dukungan pembangunan infrastruktur dasar harus dilakukan dengan pendekatan kolaborasi, sehingga berdampak pada perluasan lapangan pekerjaan dan memperkuat kemandirian fiskal.

4. Akselerasi kemantapan Infrastruktur Pendukung ekonomi

Akselerasi kemantapan infrastruktur pendukung ekonomi merupakan langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan konektivitas, mempercepat distribusi barang dan jasa, mendukung perkembangan sektor industri, serta menciptakan peluang pekerjaan. Infrastruktur bukan sekedar jalan dan jembatan, tetapi juga ketersediaan air baku, kawasan peruntukan industri yang terkoneksi dengan bahan baku dan pasar, sehingga dapat mendorong investasi masuk dan menjadikan Kabupaten Lamongan sebagai salah satu wilayah strategis pembangunan ekonomi Jawa Timur dan nasional.

Saat ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur mengalami peningkatan seiring dengan upaya Pemerintah Daerah melakukan berbagai pembangunan terhadap infrastruktur dasar. Namun demikian tantangan kedepan adalah menuntaskan pembangunan jalan kabupaten, jalan poros strategis dan jalan desa yang dilengkapi dengan lampu penerangan. Saat ini jalan dalam kondisi baik masih 55%

dari total panjang jalan dan ketersediaan lampu penerangan masih minim.

Ke depan Pemerintah Daerah perlu menangkap peluang proyek strategis nasional yang direncanakan di Kabupaten Lamongan. Untuk mencapai hal ini, pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan secara efisien dan terintegrasi, dengan melibatkan sektor swasta dan memanfaatkan inovasi pembiayaan yang kreatif. Selain itu, pengelolaan infrastruktur juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam jangka panjang.

5. Pengentasan Kemiskinan melalui penguatan kelembagaan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Pemberdayaan menjadi pendekatan yang tepat dalam pengentasan kemiskinan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk pemberdayaan adalah melalui penguatan kelembagaan desa, terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Koperasi. BUMDesa dan koperasi menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan memberikan akses kepada masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan juga dapat diarahkan pada pemberdayaan ekonomi melalui keberdayaan UMKM. Pemerintah Daerah juga perlu mendorong pertumbuhan UMKM dengan memberikan akses kepada pelatihan, bantuan permodalan, serta pemasaran produk secara digital.

Namun demikian, pengentasan kemiskinan tidak hanya terbatas pada upaya ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan akses bagi masyarakat rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga dengan keterbatasan sumber daya. Akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, serta program perlindungan sosial, menjadi elemen penting yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa kelompok rentan ini mendapatkan perhatian khusus melalui kebijakan yang inklusif dan fasilitas yang memadai.

Dengan langkah-langkah strategis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses, Kabupaten Lamongan memiliki peluang besar untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Pendekatan inklusif ini akan menjadi fondasi bagi kemajuan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan

6. Tata Kelola Birokrasi integratif yang adaptif, efisien dan berorientasi layanan

Tata kelola birokrasi yang integratif, adaptif, efisien, dan berorientasi pada layanan adalah kunci dalam menciptakan good governance dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis. Dengan demikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemerintahan dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu ditengah tantangan yang semakin komplek dan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah perlu terus mengembangkan kapasitas SDM, memanfaatkan teknologi, dan memperbaiki proses bisnis setiap layanan sehingga birokrasi semakian efektif dan mendapatkan kepercayaan publik.

Belum optimalnya standarisasi data dan pengelolaan data sektoral serta integrasi satu data masin menjadi tantangan bagi Kabupaten Lamongan kedepan. Pemanfaatan dan pengelolaan data yang baik akan mempermudah upaya pemerintah dalam pemerataan kualitas fasilitas pelayanan dasar, pengembangan ekonomi melalui peningkatan potensi lokal, peningkatan iklim investasi dan peningkatan daya saing UKM.

Melalui optimalisasi penerapan Reformasi Birokrasi yang berdampak, kinerja pembangunan dan kualitas pelayanan publik semakin baik begitu pula dengan kemandirian fiskal. Berdasarkan analisis derajat desentralisasi fiskal, tingkat ketergantungan Kabupaten Lamongan pada dana transfer daerah masih tinggi. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pertumbuhannya masih mengalami stagnan. Untuk optimalisasi peningkatan PAD, Pemerintah Daerah perlu membuat peta dan data terpadu potensi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaannya berbasis digital. Disamping itu peran BUMD sebagai

salah satu sumber pendapatan daerah perlu dioptimalkan melalui pengembangan usaha dan penambahan modal usaha. Dalam 5 (lima) tahun kedepan sudah saatnya Kabupaten Lamongan dengan potensi yang dimiliki tidak hanya fokus pada digitalisasi manajemen pemerintahan dan pelayanan publik tapi dapat menerapkan dan mengembangkan *smart city*.

7. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Unggul dan Berdaya Saing sebagai Pondasi Pembangunan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan isu strategis yang selalu relevan di setiap masa. Sebagai isu mainstream, SDM menjadi pusat perhatian dalam berbagai aspek pembangunan, terutama bagi Kabupaten Lamongan yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang. SDM berkualitas tidak hanya menjadi elemen penting dalam pembangunan daerah, tetapi juga menjadi pondasi utama yang menentukan keberhasilan dan daya saing Lamongan di tingkat nasional maupun global. Kualitas SDM yang unggul adalah kunci dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Peningkatan SDM bukan hanya soal pendidikan formal, tetapi juga tentang membekali masyarakat dengan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja, khususnya di sektor industri. Seiring berkembangnya era teknologi dan globalisasi, kebutuhan akan SDM yang memiliki keahlian teknis, kemampuan adaptasi, dan daya inovasi semakin mendesak. Industri memerlukan tenaga kerja yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki soft skill, seperti kemampuan komunikasi, kerja tim, dan penyelesaian masalah.

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pembangunan SDM dilakukan secara merata di seluruh wilayah. Langkah strategis seperti peningkatan akses pendidikan berkualitas, pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri, dan pengembangan program kewirausahaan menjadi prioritas utama. Program pelatihan vokasional yang berfokus pada keahlian teknis tertentu, seperti pengelasan, manufaktur, atau teknologi informasi, dapat menjembatani kesenjangan antara kebutuhan industri dengan

kompetensi tenaga kerja lokal. Selain itu, kolaborasi dengan dunia industri juga menjadi langkah yang penting.

Pemerataan peningkatan SDM harus mencakup semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil juga merupakan hal yang penting. Edukasi dan pelatihan keterampilan yang inklusif akan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan ini. Dengan mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas SDM akan memperkuat ekonomi daerah, tetapi juga akan menjadikan Lamongan sebagai salah satu kabupaten yang siap menghadapi tantangan dan peluang global di masa depan.

8. Resiliensi Ekologis sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan dan Ketahanan Daerah

Kabupaten Lamongan, yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa menghadapi risiko kebencanaan yang tinggi akibat kondisi geografis dan dinamika meteorologi. kebencanaan yang tinggi akibat kondisi geografis dan dinamika meteorologi. Ancaman bencana seperti banjir, gelombang pasang, kebakaran hutan, kekeringan, longsor, dan gempa bumi menjadi tantangan utama yang membutuhkan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan. Aktivitas oceanografi yang tinggi di wilayah pesisir juga meningkatkan potensi bencana, seperti banjir rob dan gelombang pasang, yang tidak hanya mengancam keselamatan tetapi juga keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat. Dampak dari bencana ini tidak terbatas pada kerugian materiil, tetapi juga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi daerah. Bencana jika tidak dikelola dengan baik juga memiliki dampak sosial yang signifikan, yaitu peningkatan jumlah masyarakat rentan.

Kondisi metrologi merupakan faktor eksternal diluar prediksi yang diakibatkan karena kerusakan lingkungan khususnya global warming yang berdampak pada bencana-bencana metrologi. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menjaga kondisi lingkungan yakni berupaya menjaga kondisi lingkungan tetap stabil. Hal yang perlu disorot

pada Kabupaten Lamongan adalah terkait persampahan. Baik pengangkutan, pengurangan dan pengolahan sampah serta pengelolaan limbah B3 yang dapat menjadi ancaman kesehatan. Perilaku sosial masyarakat yang salah terhadap sampah dapat menyebabkan penyumbatan dan banjir pada wilayah kota-kota dengan didukung oleh debit hujan tinggi maupun kiriman.

Disisi lain pengolahan sampah yang lambat dan pengelolaan yang tidak tepat dimana teknologi pengolahan sampah rendah yang berakibat pada *sanitary landfill* maupun dumping akan berakibat laten pada pelepasan emisi gas karbon yang mendukung percepatan *global warming*. Selain itu pada permasalahan terkait menurunya kualitas udara yang diakibatkan karena penggunaan bahan bakar fosil perlu untuk diberikan perhatian mengingat pelepasan gas karbon dan emisi yang diproduksi oleh pembakaran fosil memiliki ancaman terhadap emisi karbon. Salah satu langkah strategis dalam menjembatani dan meminimalisir derasan air saat hujan dan meningkatkan penyerapan karbon adalah reboisasi wilayah kota-kota melalui peningkatan titik-titik hijau. Dengan demikian kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka hijau tidak hanya dapat menanggulangi kondisi metrologi secara mikro, juga dapat mereduksi emisi karbon serta memberikan nilai ekonomi pada aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.

Integrasi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan bencana yang tangguh. Teknologi juga dapat dimanfaatkan, seperti penggunaan sistem peringatan dini berbasis data untuk mengantisipasi ancaman bencana lebih dini. Dengan langkah-langkah ini, Kabupaten Lamongan dapat menciptakan ketahanan bencana yang tidak hanya melindungi masyarakat dari risiko fisik tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi dan sosial. Keberhasilan strategi ini akan membantu Kabupaten Lamongan menjadi wilayah yang lebih tangguh di tengah tantangan kebencanaan yang kompleks.

9. Harmonisasi Sosial dan Pengarusutamaan Gender

Kabupaten Lamongan, sebuah daerah yang kaya akan keanekaragaman, menghadapi tantangan dalam menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan karakter masyarakat. Kabupaten Lamongan merupakan cerminan dinamika masyarakat yang sangat heterogen. Kekayaan seni dan budaya di Lamongan adalah aset yang luar biasa. Mulai dari tari-tarian tradisional, seni pertunjukan, hingga adat istiadat yang berbeda di setiap sudut wilayah, semuanya menjadi identitas kuat yang memperkaya Lamongan.

Di sisi lain, budaya gotong royong yang masih kental di Lamongan adalah landasan yang sangat kuat untuk mencapai harmoni sosial. Tradisi ini telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Lamongan, di mana mereka saling membantu dalam berbagai kegiatan, mulai dari acara keluarga hingga pembangunan desa. Gotong royong menciptakan ikatan yang mendalam antar warga dan memupuk rasa kebersamaan yang menjadi kunci utama untuk mengatasi tantangan sosial. Namun, ancaman disasosiasi sosial tetap ada, khususnya dalam kelompok-kelompok tertentu yang memiliki selisih paham. Persaingan antar kelompok-kelompok tersebut berpotensi menimbulkan konflik yang merusak harmoni masyarakat.

Salah satu strateginya adalah pendekatan dialog terbuka dan mediasi antar kelompok silat menjadi sangat penting untuk mencegah perpecahan. Selain itu, melibatkan kelompok-kelompok silat dalam kegiatan budaya dan gotong royong dapat menjadi cara yang efektif untuk meredam gesekan sosial. Harmonisasi sosial di masyarakat dapat terwujud apabila secara individu masyarakat saling memahami dan saling toleransi. Isu terhadap kekerasan pada perempuan dan anak adalah salah satu faktor terjadinya ketidakharmonisan sosial pada level keluarga. Ketidaksetaraan hak ataupun lemahnya perlindungan terhadap perempuan memberikan ancaman kekhawatiran pada perempuan.

Pengarusutamaan gender bertujuan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang setara dalam berbagai

aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Dalam konteks harmonisasi sosial, hal ini berarti menciptakan lingkungan di mana peran perempuan dalam menjaga budaya gotong royong dan kearifan lokal diakui secara adil. Dengan menjadikan pengarusutamaan gender sebagai bagian integral dari strategi menjaga harmoni sosial, Kabupaten Lamongan dapat lebih efektif memanfaatkan potensi seluruh warganya.

Dalam konteks ini, menjaga harmoni sosial di Kabupaten Lamongan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Mengintegrasikan seni dan budaya dengan nilai gotong royong, serta mengelola potensi konflik dengan pendekatan yang bijak, akan menjadikan Lamongan sebagai kabupaten yang nyaman bagi siapapun.

10. Penguatan Ekosistem Riset, Inovasi, dan Teknologi untuk Mendorong Daya Saing Daerah

Dalam era transformasi digital dan tantangan ekonomi global yang semakin dinamis, Kabupaten Lamongan dituntut untuk tidak hanya bertumpu pada kekuatan sektor primer seperti pertanian, kelautan, dan UMKM, tetapi juga mampu berinovasi dalam membangun keunggulan kompetitif jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan ekosistem riset, inovasi, dan teknologi menjadi isu strategis yang mendesak sebagai penggerak utama daya saing daerah dan pilar menuju Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan.

Sejauh ini, ekosistem riset dan inovasi di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan terutama terkait dengan hilirisasi riset lokal, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pelayanan publik dan sektor ekonomi. Selain itu belum tersedianya pusat riset daerah yang adaptif terhadap kebutuhan lokal, serta belum optimalnya integrasinya hasil riset dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

Di tengah derasnya arus digitalisasi dan globalisasi, inovasi adalah kunci. Oleh karena itu kedepan diperlukan strategi yang holistik dan berkelanjutan, melalui langkah membangun ekosistem riset berbasis

kebutuhan daerah, mendorong integrasi hasil riset ke dalam program pembangunan daerah dan memperkuat kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, pelaku industri, serta lembaga litbang nasional.

Kedepan Kabupaten Lamongan perlu menempatkan riset dan inovasi sebagai jantung dari proses pembangunan, bukan sekadar pelengkap. Melalui langkah tersebut diharapkan Pemerintah Daerah mampu menjadi aktor perubahan yang responsif dan kompetitif di tengah dinamika nasional dan global.

F. Potensi Kabupaten Lamongan

Lamongan dengan luas wilayah ±1.752,21 KM^2 atau setara dengan ±3.67 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur menjadi bagian dari aglomerasi **gerbangkertasusila** dan kawasan strategis nasional. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan laut Jawa, Gresik, Tuban, Bojonegoro, Jombang dan Mojokerto, dengan potensi di sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan UMKM serta peninggalan budaya yang selama ini menjadi lokomotif ekonomi Lamongan**.** Ditengah bonus demografi yang terjadi secara global, penduduk Lamongan didominasi umur produktif yakni sebesar 70,18 % dari total 1.385.835 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima) jiwa yang tersebar di 462 desa dan 12 kelurahan di 27 kecamatan. kehadiran bonus demografi didukung dengan karakter masyarakatnya yang megilan (mandiri, elegan, energik, inovatif, loyal, adaptif dan dapat memberikan rasa nyaman) menjadi soft power yang terus dikelolah sebagai investasi masa depan yang akan mengantarkan lamongan menorehkan prestasi dan berdaya saing yang unggul.

Potensi kekayaan laut di sepanjang garis pantai 47 kilometer dan aliran sungai bengawan solo memberikan dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi nelayan dan petani. Lamongan sudah sejak lama dikenal sebagai daerah penghasil ikan terbesar di Jawa Timur. di Lamongan terdapat tempat pelelangan ikan (TPI) Brondong dan terbesar di Jawa Timur. Saat ini produk perikanan Lamongan sudah merambah

pasar ekspor. Tidak hanya itu, di sektor pertanian, Lamongan masuk dalam 5 (lima) besar penghasil beras terbesar di Jawa Timur dan Indonesia sehingga dikukuhkan sebagai lumbung pangan dan penopang katahanan pangan nasional. Dikaruniai tanah yang subur dan petani yang gigih, serta didukung dengan modernisasi, kini komoditas jagung, hortikultura dan perkebunan, seperti melon, semangka, jambu kristal, pisang cavendis dan durian terus meningkat produksinya serta diintegrasikan dengan pengembangan wisata agro.

Dalam perjalanannya, ekonomi kreatif dan sektor perdagangan semakin tumbuh. banyak kuliner khas lamongan yang sudah menyebar ke seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri yang dibawa, diperkenalkan, dan diperdagangkan oleh masyarakat rantau dari Lamongan sebagai identitas yang tak bisa dipisahkan. Kabupaten dengan segala pesonanya, menawarkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan dan di balik setiap hidangan, tersimpan cerita panjang akan tradisi, proses pembuatan, serta nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak hanya kulinernya yang mendunia, batik, konveksi, olahan makanan dan minuman Lamongan juga sudah merambah pasar internasional dan nasional serta dapat ditemukan di sentra-sentra produk unggulan yang bisa dijadikan buah tangan bagi siapapun yang berkunjung ke Lamongan.

Disamping kuliner dan UMKM, Lamongan juga dikenal dengan wisata alamnya yang menakjubkan mata seperti, Waduk Gondang, Maharani Zoo & Goa, Pantai Kutang, wisata desa Sendang Bawono, wisata desa Gunung Suru, wisata desa Pantai Pengkolan, wisata desa Pantai Lorena, wisata desa pantai Joko Mursodo. Wisata Bahari lamongan juga tak kalah indah dan menjadi daya tarik para wisatawan. Untuk wisata religinya, di Lamongan ada makam Sunan Drajat, makam sendang duwur, gunung ratu nyi andong sari, syekh maulana ishak, masjid namira, makam mbah balun dan makam joko tingkir. Peninggalan budaya nenek moyang terdahulu seperti (ritual adat mendhak sangring, perahu ijon-ijon khas Lamongan) sebagai Warisan Budaya Tak Benda

(WBTB) nasional dan berbagai peninggalan budaya lainnya serta seni (tari boran) terus dilestarikan melalui berbagai festival yang dipadukan dengan kekuatan rasa kulinernya yang dirangkai dalam kalender event menjadikan lamongan sebagai salah satu tujuan destinasi wisata favorit di Jawa Timur dengan peningkatkan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya. Berikut adalah potensi unggulan yang mengungkit pertumbuhan ekonomi Lamongan.



Gambar 2-80 Potensi Lamongan Dalam Angka

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 menjadikan ekonomi Lamongan terkontraksi 2,65%. Di Tahun 2021 ekonomi Lamongan kembali bangkit atau reborn diangka 3,43% dan terus tumbuh hingga 4,81% ditahun 2024. Kontribusi Terbesar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (33%) adalah PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan.

Dukungan infrastruktur yang memadai dan iklim investasi yang sehat, Lamongan kini menjadi tujuan investasi di Jawa Timur. Panjang pantai, keberadaan Lamongan Integrated Shorbase, pengelolaan limbah industri yang cukup besar dan potensi pertanian serta perikanan yang didukung dengan karakter masyarakatnya yang memiliki etos kerja yang tinggi serta menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku investor menjalankan industrinya di sektor maritim dan agro. Saat ini industri

besar (PMDN) dan (PMA) berkembang pesat dan masih terdapat 3.855 ha lahan yang tersedia untuk kawasan industri di Lamongan. Grafis potensi industrialisasi Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2-81 Potensi Industrialisasi di Lamongan

Selain memiliki potensi alam dan industrialisasi, Lamongan juga memiliki potensi yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan yakni daya saing sumber daya manusia (SDM). Sebagai warisan tonggak kejayaan masa lampau para tokoh-tokoh pendahulu (Airlangga, Gajah Mada, Joko Tingkir, Sunan Drajad, Sunan Sendang Duwur serta Mbah Lamong) memiliki keragaman etnis, suku dan agama serta peninggalan budaya masa lalu yang direkonstruksi kembali untuk menguatkan nilai toleransi, menjaga solidaritas dan merawat syiar agama.

Bahkan dengan letak geografis yang begitu luas, Lamongan memiliki jumlah desa terbanyak di Jawa Timur (462) desa dan sudah tidak ada yang berkembang apalagi yang tertinggal. Keberadaan desa menjadi potensi dan pondasi utama dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Segala keunikan dan potensi yang dimiliki Lamongan, kini terus dioptimalkan dan dirawat dengan baik melalui transformasi tata

kelola pemerintahan dan pelayanan publik dalam pembangunan dan kesejahteraan keluarga. Kabupaten Lamongan bertekad mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan budaya sebagai kekuatan utama daerah.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

3.1 VISI DAN MISI

Dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, terdapat sejumlah dinamika yang menjadi bagian penting dari transisi pemerintahan, yakni bergantinya kepemimpinan daerah dari bupati periode sebelumnya kepada bupati terpilih. Meskipun dengan status *incumbent* namun transisi dari periode pertama ke periode kedua tentunya sedikit banyak terdapat perbedaan khususnya dalam penekanan Visi dan Misi maupun hal-hal lain yang menyesuaikan perkembangan isu. Perumusan dokumen ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam instruksi terbaru tersebut ditegaskan bahwa perumusan visi merupakan gambaran umum mengenai kondisi ideal yang ingin dicapai Kabupaten Lamongan di akhir periode perencanaan, yaitu tahun 2029, sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Visi dan misi kepala daerah terpilih dapat dikaji dalam tahapan penyusunan teknokratik RPJMD untuk memastikan konsistensi arah pembangunan, sekaligus menjamin adanya kesinambungan antara dokumen teknokratik dan

aspirasi politik yang telah mendapatkan legitimasi melalui proses demokrasi.

Memperhatikan uraian mengenai isu-isu strategis sebagaimana telah diidentifikasi dalam BAB sebelumnya, serta mencermati arah kebijakan dan visi politik kepala daerah terpilih, maka disepakati bahwa visi pembangunan Kabupaten Lamongan untuk periode 2025-2029 tetap mengacu kepada visi yang telah ditetapkan dalam proses politik. Visi tersebut dinilai mampu merepresentasikan harapan masyarakat Lamongan menuju tahun 2029.

Adapun Visi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKELANJUTAN



Gambar 3-1 Visi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029

Secara tersurat Visi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 dapat dikatakan sangat sederhana, namun kaya akan makna. Secara umum terdapat 2 (dua) poin besar dalam visi di atas yakni makna “Kejayaan” dan “Berkelanjutan”. Berikut merupakan gambaran makna utama visi Kabupaten Lamongan:

Visi "Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan" mencerminkan tekad dan komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan daerah yang maju, unggul, serta dikenal luas dalam berbagai bidang, terutama sosial dan ekonomi. Kejayaan diartikan sebagai kondisi daerah yang mampu bersaing secara regional maupun nasional, ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter. Selain itu, pengelolaan potensi sumber daya alam dan pelestarian budaya lokal juga menjadi

kekuatan pendorong dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Capaian tersebut diiringi dengan penyediaan layanan publik yang profesional dan responsif, sehingga masyarakat Kabupaten Lamongan tidak hanya merasakan kemajuan secara fisik dan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup yang lebih baik secara lahir dan batin.

Sementara itu, prinsip berkelanjutan dalam visi ini menegaskan pentingnya kesinambungan pembangunan yang adil dan merata, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup serta harmoni sosial. Kabupaten Lamongan berkomitmen membangun sistem pembangunan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, solidaritas, dan toleransi, sehingga masyarakat yang majemuk dapat hidup berdampingan secara damai. Selain itu mewujudkan Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan juga memiliki *tagline* yakni tumbuh ekonominya, merata pembangunannya, dan harmonis warganya. Berkaitan dengan misi pembangunan sebagai agregat yang tidak dapat dipisahkan dari instrumen pencapaian visi. Berikut ilustrasi keterkaitan *tagline* visi



terhadap misi Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029:

Gambar 3-2 Keterkaitan *Tagline* Visi terhadap Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029

Misi merupakan pernyataan umum yang menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2025-2029. Melalui perumusan misi, arah pencapaian visi menjadi lebih jelas, karena misi menjelaskan upaya-upaya prioritas yang perlu dilakukan secara sistematis dan terarah. Misi yang diusung oleh kepala daerah terpilih ini telah mendapatkan legitimasi dari masyarakat melalui proses pemilihan demokratis, sekaligus menjadi pedoman utama dalam mengarahkan pelaksanaan program pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Berikut merupakan gambaran misi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029:

1. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah;
2. Menguatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berakhlak Serta Adaptif Terhadap Perubahan Zaman;
3. Meningkatkan Kemantapan Infrastruktur Daerah Yang Berwawasan Lingkungan;
4. Merawat Harmonisasi Sosial Ditengah Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Berbudaya Dan Partisipatif Dalam Pembangunan; dan
5. Percepatan Reformasi Birokrasi Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Birokrasi Yang Responsif

Berdasarkan hasil kajian teknokratik, rumusan misi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah terpilih Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 telah mencerminkan arah kebijakan yang sejalan dengan visi “Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”. Namun, dalam rangka penyusunan dokumen RPJMD yang memerlukan penjabaran yang lebih operasional dan terukur, rumusan misi tersebut perlu diperjelas dan dipertegas kembali. Penyesuaian ini dilakukan agar misi tidak hanya menggambarkan aspirasi politik kepala daerah terpilih, tetapi juga mampu menjadi panduan yang lebih fokus dan aplikatif dalam menjawab tantangan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam proses penyempurnaannya, rumusan misi diperhalus atau disempurnakan untuk memberikan penekanan pada aspek pencapaian yang bersifat lebih nyata dan terukur. Penajaman ini mencakup penguatan aspek inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga berakhlak dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Di sisi lain, penataan infrastruktur diarahkan secara lebih jelas pada pembangunan yang mantap dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan. Harmonisasi sosial yang selama ini menjadi kekuatan Kabupaten Lamongan juga ditegaskan kembali sebagai pondasi dalam mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, dan partisipatif. Selain itu, reformasi birokrasi difokuskan pada penguatan sistem pemerintahan berbasis digital yang akuntabel dan responsif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyesuaian ini tidak hanya merepresentasikan komitmen politik, tetapi juga menjawab kebutuhan teknokratis atas arah pembangunan yang lebih adaptif, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Lamongan. Berikut merupakan penyempurnaan misi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan;
2. Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman;
3. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan;
4. Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat Yang Religius, Berbudaya Dan Partisipatif Dalam Pembangunan.; dan
5. Mewujudkan Reformasi Birokasi Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif.

Berikut merupakan penjelesan lebih detail dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029:

3.1.1 Misi I: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan

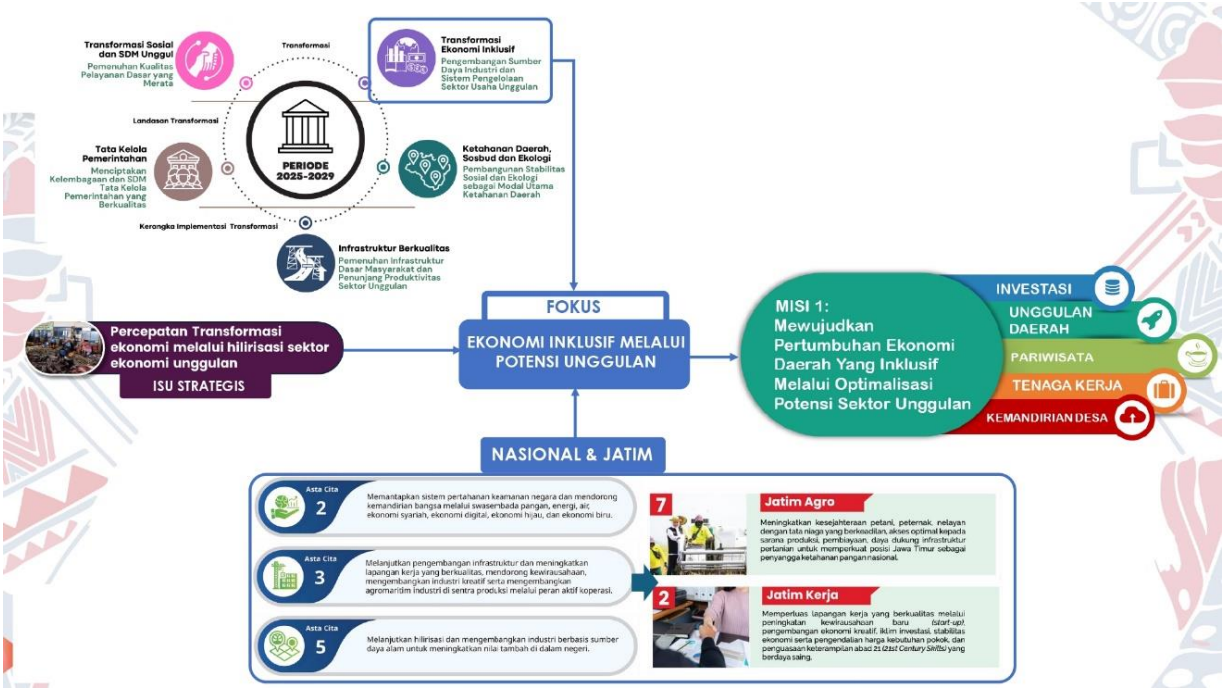

Gambar 3-3 Pemetaan Misi 1 Kabupaten Lamongan

Sumber: Data Diolah, 2025

Misi "Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan" merupakan komitmen Kabupaten Lamongan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan. Fokus utama misi ini adalah mendorong hilirisasi sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri olahan, dan pariwisata agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri. Melalui penguatan investasi, pengembangan desa mandiri berbasis potensi lokal, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, misi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus memastikan pemerataan manfaat pembangunan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat desa. Transformasi ini selaras dengan tema tahapan pertama RPJPD tahun 2025-2045, yaitu pengembangan sumber daya industri dan sistem Pengelolaan sektor/usaha unggulan yang mendukung terwujudnya visi Lamongan sebagai daerah dengan ekonomi yang tumbuh inklusif dan

berkelanjutan. Gambar 3-3 merupakan gambaran konstruksi keterkaitan misi 1 Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 dengan landasan perencanaan jangka menengah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Lebih jauh, misi ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029, khususnya dalam mendukung Asta Cita ke-2, ke-3, dan ke-5, yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan, energi, ekonomi hijau dan digital, serta melanjutkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di daerah. Pada level provinsi, misi ini juga memperkuat Jatim Kerja dan Jatim Agro, melalui penciptaan kewirausahaan baru (start-up), penguatan ekonomi kreatif, stabilitas iklim investasi, serta peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Dengan demikian, implementasi misi ini diharapkan mampu menjadikan Kabupaten Lamongan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.

3.1.1 Misi II: Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Berakhlak Dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman

Misi "Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak, dan Adaptif terhadap Perubahan Zaman" merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamongan yang harmonis, sehat, cerdas, dan produktif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia difokuskan pada pemenuhan layanan dasar yang merata, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan kepemudaan. Melalui penyediaan akses pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkeadilan, peningkatan kompetensi generasi muda, serta penguatan pendidikan karakter, diharapkan terwujud insan-insan Lamongan yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan adaptif terhadap dinamika perkembangan zaman. Di sisi lain, pembangunan kesehatan masyarakat menjadi prioritas dengan memperluas cakupan

layanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, dan berkeadilan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Berikut merupakan gambaran konstruksi keterkaitan misi 2 Kabupaten Lamongan tahun 2025- dengan landasan perencanaan jangka menengah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

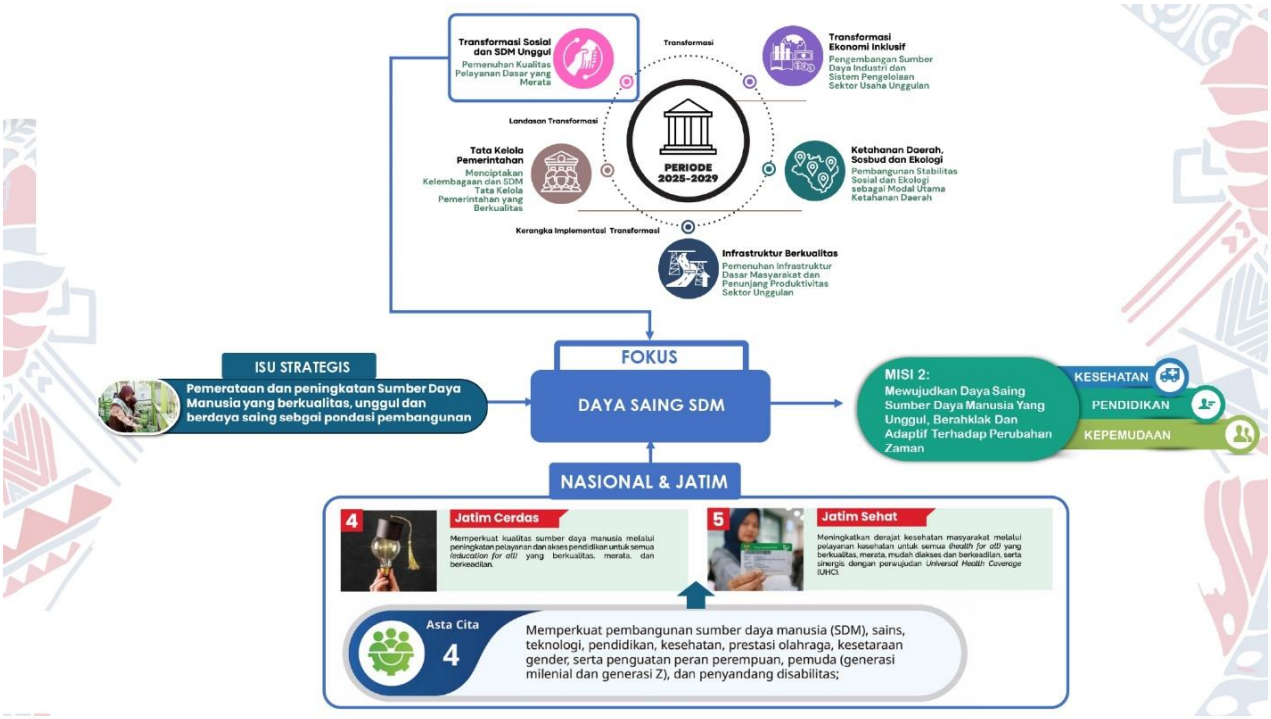

Gambar 3-4 Pemetaan Misi 2 Kabupaten Lamongan

Sumber: Data Diolah, 2025

Misi ini juga mendukung prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029, terutama Asta Cita ke-4, yang menekankan penguatan pembangunan SDM, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan pemuda dan perempuan. Sejalan dengan itu, misi ini memperkuat arah pembangunan Jatim Cerdas dan Jatim Sehat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029, yang mendorong pemerataan akses layanan pendidikan dan kesehatan untuk semua *(education for all dan health for all).* Dengan penguatan kapasitas SDM ini, Kabupaten Lamongan diharapkan mampu mencetak generasi emas yang berdaya saing tinggi, menjadi motor penggerak pembangunan daerah, sekaligus memperkokoh kohesi sosial dalam masyarakat yang religius, berbudaya, dan partisipatif.

3.1.2 Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Mantap Dan Berwawasan Lingkungan

Misi "Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan" menegaskan komitmen Kabupaten Lamongan dalam membangun infrastruktur yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Fokus pembangunan infrastruktur diarahkan pada peningkatan kualitas dan keterpaduan sistem transportasi, jaringan irigasi, penyediaan air bersih, dan fasilitas publik lainnya yang merata hingga pelosok desa. Di saat yang sama, aspek lingkungan menjadi perhatian utama dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan fisik dengan pelestarian ekosistem, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Berikut merupakan gambaran konstruksi keterkaitan misi 3 Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 dengan landasan perencanaan jangka menengah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

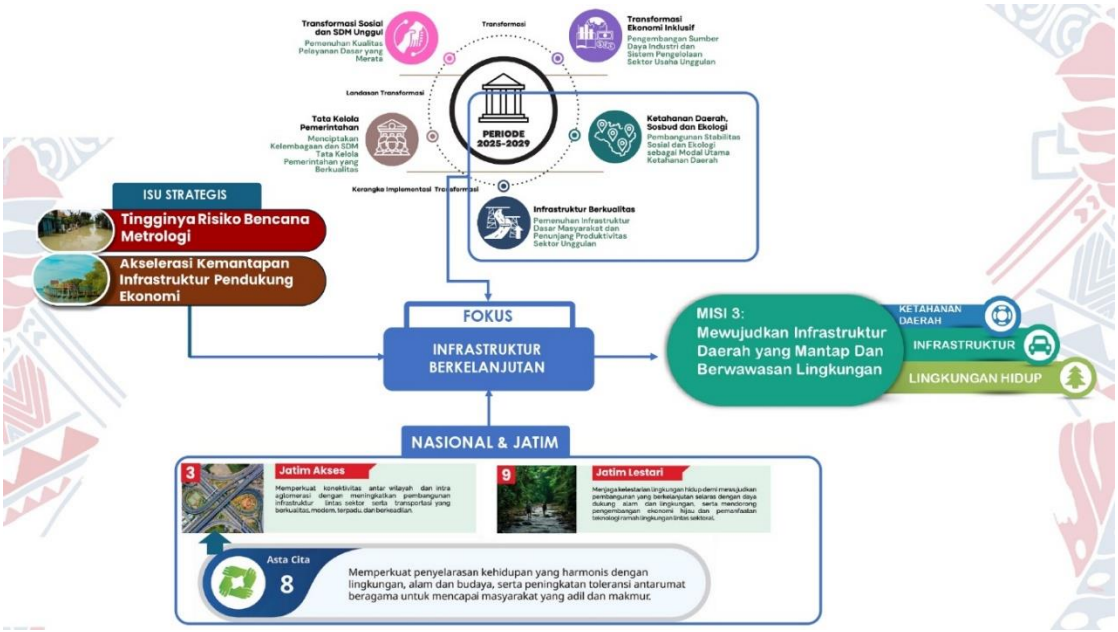

Gambar 3-5 Pemetaan Misi 3 Kabupaten Lamongan
Sumber: Data Diolah, 2025

Misi ini juga beriringan dengan prioritas RPJMN 2025-2029, khususnya Asta Cita ke-8, yang menitikberatkan pada harmoni kehidupan manusia dengan alam dan penguatan nilai-nilai sosial budaya sebagai pondasi masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029, misi ini mendukung agenda Jatim Akses dan Jatim Lestari, yang menargetkan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur modern, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dengan mendorong ekonomi hijau dan teknologi ramah lingkungan. Dengan visi pembangunan yang merata, Lamongan diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan wilayah yang tangguh, berkelanjutan, serta selaras dengan daya dukung alam.

3.1.3 Misi IV: Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat Yang Religius, Berbudaya Dan Partisipatif Dalam Pembangunan

Misi "Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat Yang Religius, Berbudaya Dan Partisipatif Dalam Pembangunan." mencerminkan komitmen Kabupaten Lamongan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan sosial sebagai pondasi utama pembangunan daerah. Pemberdayaan masyarakat desa, penguatan kelembagaan lokal, serta peningkatan peran aktif seluruh elemen masyarakat termasuk perempuan, difabel, lansia, dan kelompok rentan lainnya didorong untuk mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkeadilan. Upaya ini juga sejalan dengan semangat pembangunan dari desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat. Melalui partisipasi masyarakat yang luas dan adil, Lamongan mendorong terbentuknya komunitas sosial yang inklusif, di mana nilai-nilai toleransi, religiusitas, budaya lokal, dan kearifan tradisi menjadi kekuatan kolektif dalam memperkuat ikatan sosial dan ketahanan masyarakat. Berikut merupakan gambaran konstruksi keterkaitan misi 4 Kabupaten

Lamongan tahun 2025-2029 dengan landasan perencanaan jangka menengah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

:

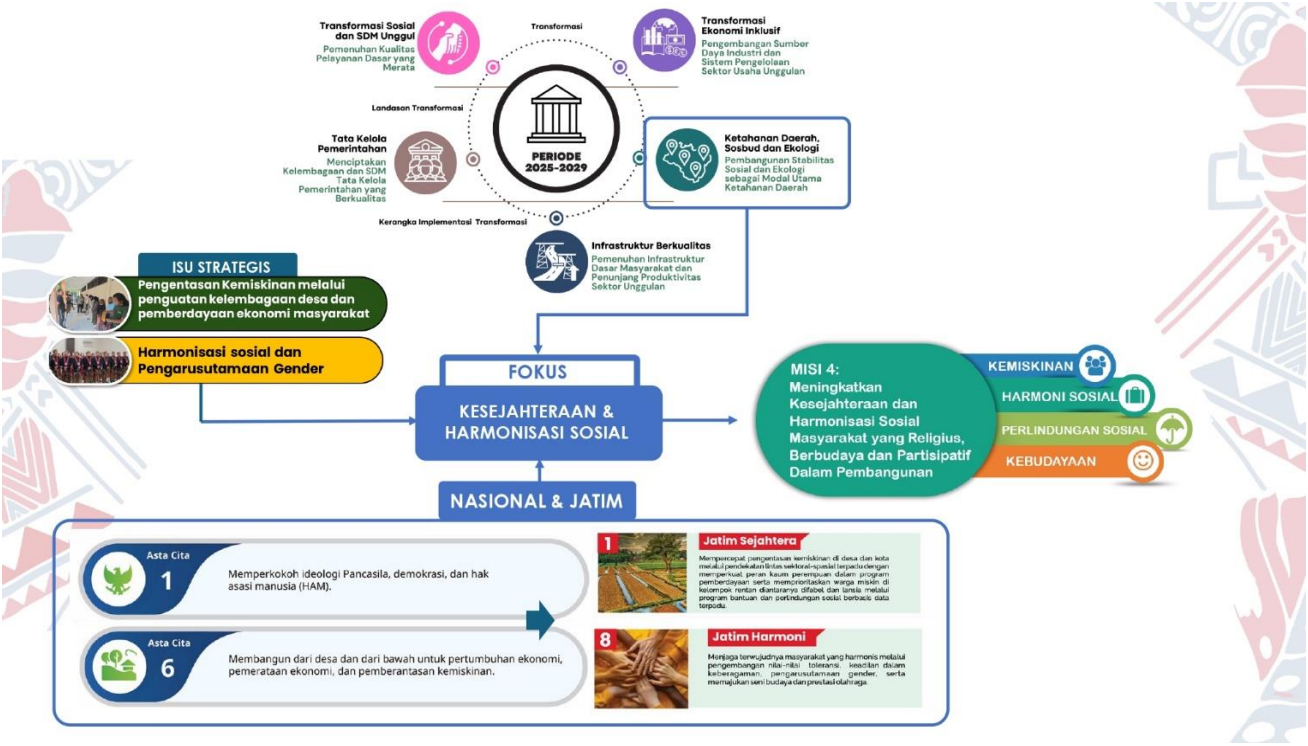

Gambar 3-6 Pemetaan Misi 4 Kabupaten Lamongan
Sumber: Data Diolah, 2025

Misi ini mendukung pelaksanaan RPJMN 2025-2029, khususnya Asta Cita 1 dan 6, yang menekankan penguatan demokrasi berbasis nilai-nilai Pancasila serta pembangunan dari desa untuk pemerataan kesejahteraan dan pemberantasan kemiskinan. Di tingkat Provinsi Jawa Timur, misi ini selaras dengan agenda Jatim Sejahtera dan Jatim Harmoni, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial, serta penguatan harmoni sosial melalui pengarusutamaan gender dan pelestarian budaya. Dengan pendekatan pembangunan yang berbasis kearifan lokal, partisipatif, dan berlandaskan nilai-nilai religiusitas, Kabupaten Lamongan diharapkan mampu menjaga kohesi sosial, menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dalam bingkai keberagaman.

3.1.4 Misi V: Mewujudkan Reformasi Birokasi Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Responsif

Misi "Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif" merupakan komitmen Kabupaten Lamongan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Di tengah tantangan dinamika pembangunan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan transparan, birokrasi Lamongan diarahkan menjadi lebih integratif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai pengungkit utama. Reformasi ini tidak hanya bertujuan menciptakan pelayanan publik yang lebih mudah diakses, transparan, dan akuntabel, tetapi juga mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, efisien dalam pengelolaan sumber daya, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Berikut merupakan gambaran konstruksi keterkaitan misi 5 Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 dengan landasan perencanaan jangka menengah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

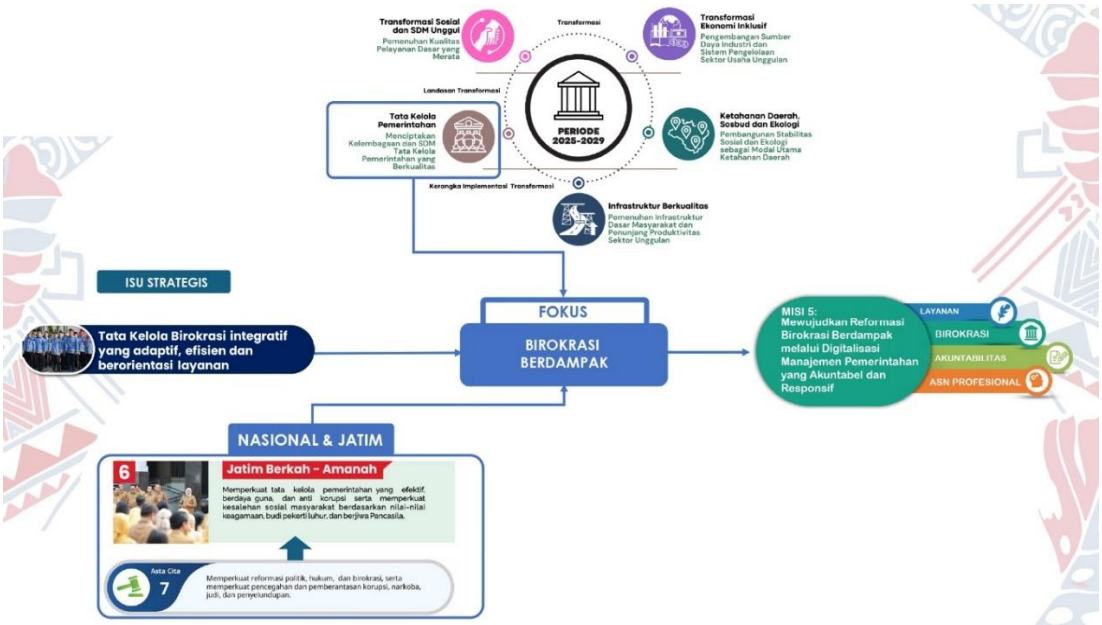

Gambar 3-7 Pemetaan Misi 5 Kabupaten Lamongan
Sumber: Data Diolah, 2025

Selaras dengan RPJMN 2025-2029, khususnya Asta Cita 7, misi ini mempertegas langkah Lamongan dalam memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas kelembagaan, serta mencegah praktik korupsi melalui tata kelola pemerintahan berbasis nilai-nilai integritas dan akuntabilitas. Di tingkat regional, misi ini mendukung Jatim Berkah – Amanah 6, dengan menempatkan birokrasi Lamongan sebagai motor penggerak pelayanan publik yang efektif dan berdaya guna. Digitalisasi manajemen pemerintahan akan dioptimalkan untuk mendukung terciptanya sistem pelayanan terpadu berbasis teknologi informasi, memastikan keterbukaan informasi, serta menghadirkan birokrasi yang tidak hanya taat aturan, namun juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, Lamongan terus melangkah menuju pemerintahan modern yang responsif, inklusif, dan mampu mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 merupakan amanah rakyat yang telah memperoleh legitimasi melalui proses demokrasi. Namun, untuk memastikan visi “Kejayaan Lamongan Yang Berkelanjutan” benar-benar dapat diwujudkan secara terukur pada akhir periode perencanaan tahun 2029, diperlukan penjabaran lebih teknis dan sistematis ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran ini tidak hanya menjadi panduan arah pembangunan yang ingin dicapai, tetapi juga berfungsi sebagai peta jalan operasional yang menjelaskan perubahan nyata yang diharapkan terjadi di masyarakat, sekaligus siapa yang bertanggung jawab melaksanakannya, dengan indikator keberhasilan yang jelas. Penyusunan tujuan dan sasaran ini juga mempertimbangkan keterkaitan dan konsistensi dengan dokumen perencanaan jangka panjang, yaitu RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045, serta sinergi dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029.

Sebagaimana prinsip dasar penyusunan RPJMD, rumusan tujuan dan sasaran Kabupaten Lamongan 2025-2029 disusun dengan pendekatan yang *measurable* dan *tangible*. Measurable berarti bahwa setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur, sehingga capaian pembangunan dapat dievaluasi secara periodik dan objektif. IKU ini juga menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja kepala daerah yang dipertanggungjawabkan setiap tahun melalui laporan kinerja Pemerintah Daerah. Sementara itu, tangible bermakna bahwa tujuan dan sasaran yang dirumuskan harus memberikan dampak nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat Lamongan, baik dalam peningkatan kualitas hidup, pelayanan publik, maupun dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi daerah. Dengan landasan ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan lebih fokus, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Berikut rumusan tujuan dan sasaran Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 beserta indikator kinerjanya.

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Misi I

Misi I Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, yaitu “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan”, menjadi landasan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Melalui misi ini, pembangunan ekonomi Lamongan diarahkan untuk tidak hanya tumbuh secara akseleratif, tetapi juga inklusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan, dapat merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi yang dilakukan. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkeadilan, dengan memaksimalkan potensi sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, pariwisata, dan UMKM. Upaya ini diimplementasikan melalui berbagai program prioritas, seperti UMKM Naik Kelas, Young Entrepreneur Success (YES), Lamongan Lumbung Pangan, hingga penguatan digitalisasi pelayanan publik yang

diharapkan mampu mendorong produktivitas dan daya saing daerah secara signifikan.

Sasaran pembangunan ekonomi pada misi 1 ini mencakup 6 (enam) aspek strategis, yaitu bertambahnya kesempatan kerja bagi masyarakat, meningkatnya produktivitas sektor unggulan, meningkatnya daya tarik wisata daerah, bertambahnya realisasi investasi, serta terwujudnya kemandirian desa. Program seperti Ramasinta dan Desa Pintar dirancang untuk memberdayakan desa, agar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inovatif dan mandiri. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat ekosistem investasi dan wirausaha di Lamongan. Dengan sinergi berbagai pihak dan optimalisasi potensi lokal, misi ini akan menjadi motor penggerak bagi Lamongan menuju ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian diatas berikut merupakan uraian tujuan dan sasaran Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:
Pertumbuhan Ekonomi Yang Akseleratif Dan Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah, sebagai kesatuan rangkaian kinerja dari agregat pembangunan Kabupaten Lamongan maka berikut merupakan sasaran pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029:

a. Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat;
b. Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan; dan
c. Meningkatnya Daya Tarik Wisata Daerah;
d. Meningkatnya Realisasi Investasi; dan
e. Meningkatnya Kemandirian Desa.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi I RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran serta program prioritas, dapat dengan mudah dipahami melalui desain cascading misi I yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 3-8 *Cascading* Misi I Kabupaten Lamongan
Sumber: Data Diolah, 2025

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Misi II

Misi II Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, yaitu "Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak, dan Adaptif terhadap Perubahan Zaman", menegaskan komitmen daerah dalam membangun manusia Lamongan yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan keterampilan. Tujuan besar dari misi ini adalah meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing, yang menjadi fondasi utama dalam menghadapi dinamika dan tantangan global. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan, tetapi juga pada kesehatan dan pembangunan karakter, sehingga masyarakat Lamongan mampu menjadi agen perubahan yang adaptif di tengah kemajuan teknologi dan era digital. Program prioritas seperti Perintis, Lamongan Generasi Emas, dan Lamongan Sehat menjadi instrumen utama dalam mendorong kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan kepemudaan yang inklusif dan merata.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam misi ini meliputi meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, serta meningkatnya kualitas

pembangunan kepemudaan. Melalui program Perintis, diharapkan terjadi perluasan akses pendidikan berkualitas di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Sementara program Lamongan Sehat bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh, dari aspek promotif, preventif hingga kuratif. Program Lamongan Generasi Emas difokuskan untuk menyiapkan generasi muda yang tidak hanya sehat dan cerdas, tetapi juga berkarakter kuat serta siap bersaing di tingkat regional, nasional, hingga global. Dengan sinergi kebijakan ini, pembangunan manusia di Lamongan diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah menuju Lamongan yang lebih maju dan sejahtera.

Berdasarkan uraian diatas berikut merupakan uraian tujuan dan sasaran Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing, sebagai kesatuan rangkaian kinerja dari agregat pembangunan Kabupaten Lamongan maka berikut merupakan sasaran pembangunan SDM yang Berdaya Saing Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029:

a. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan;
b. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
c. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kepemduaan

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi II RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran serta program prioritas, dapat dengan mudah dipahami melalui desain.

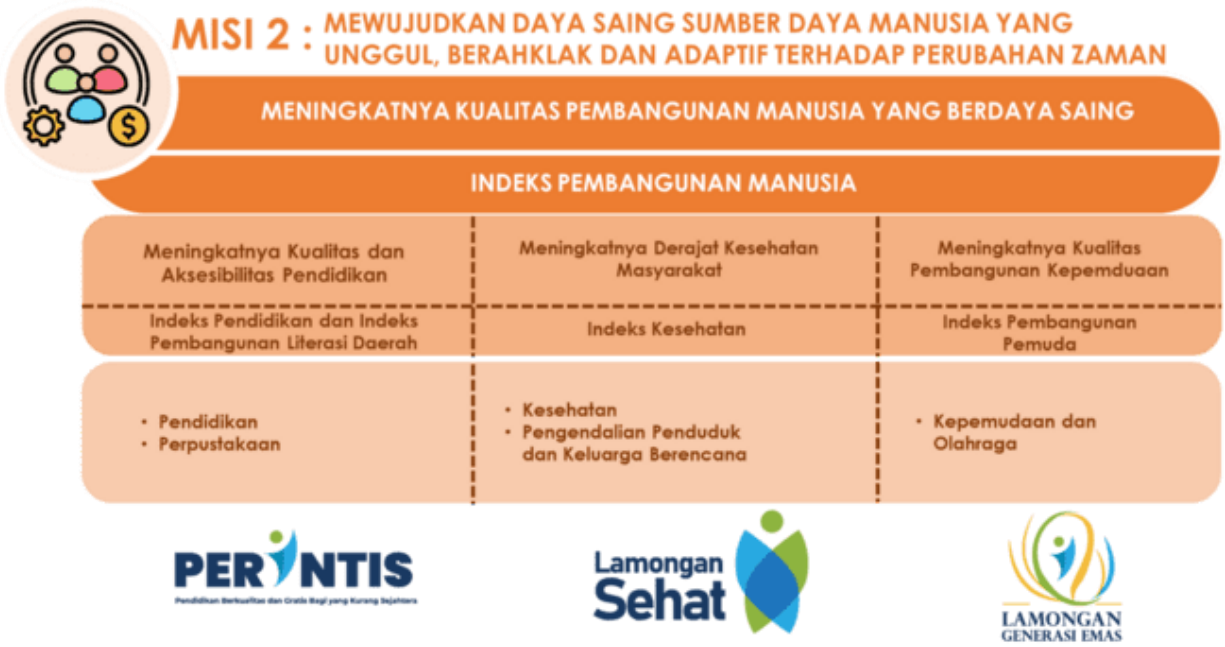

Gambar 3-9 *Cascading* Misi II Kabupaten Lamongan
Sumber: Data Diolah, 2025

3.2.3 Tujuan dan Sasaran Misi III

Misi III Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, yaitu "Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan", merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam menciptakan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya merata dan berkualitas, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Melalui tujuan "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berkelanjutan", Lamongan berupaya menghadirkan prasarana yang mendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat secara optimal. Infrastruktur jalan, listrik, dan pengelolaan lingkungan dikembangkan dengan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan, agar seluruh wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, menikmati manfaat yang merata. Program-program prioritas seperti Jamula (Jalan Mulus Lamongan) Mantap dan Lamongan Menyala menjadi pendorong utama dalam peningkatan kualitas infrastruktur, khususnya aksesibilitas jalan dan ketersediaan energi listrik di seluruh pelosok Lamongan.

Sasaran dari misi ini mencakup 3 (tiga) aspek penting, yaitu meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan merata, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, serta meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan bencana. Program Lamongan Hijau diarahkan untuk memperkuat upaya pelestarian lingkungan melalui penghijauan, pengelolaan sampah, dan peningkatan kualitas udara dan air. Sementara itu, program Lamongan Tangguh fokus pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam menghadapi potensi bencana alam, seperti banjir dan kekeringan. Dengan infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan, Kabupaten Lamongan tidak hanya membangun fondasi fisik pembangunan, tetapi juga memperkokoh ketahanan wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian diatas berikut merupakan uraian tujuan dan sasaran Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 :

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah Yang Mantap dan Berkelanjutan, sebagai kesatuan rangkaian kinerja dari agregat pembangunan Kabupaten Lamongan :

a. Meningkatnya Infrastruktur Berkualitas dan Merata;
b. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup; dan
c. Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi III



RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran serta program prioritas, dapat dengan mudah dipahami melalui desain cascading misi III yang disajikan sebagai berikut

Gambar 3-10 *Cascading* Misi III Kabupaten Lamongan
Sumber: Data Diolah, 2025

Indeks infrastruktur merupakan rata-rata indeks sebagai berikut Indeks jalan, indeks infrastruktur perumahan dan permukiman, indeks infrastruktur sumber daya air dan indeks lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3.2.4 Tujuan dan Sasaran Misi IV

Misi IV Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, yaitu "Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Harmoni Sosial Kehidupan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, dan Partisipatif dalam Pembangunan", menitikberatkan pada upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera secara sosial dan ekonomi, sekaligus menjaga nilai-nilai religiusitas, budaya, dan kerukunan antarwarga. Tujuan yang ingin dicapai dari misi ini adalah "Kesejahteraan Sosial yang Merata dan Stabilitas Wilayah Berbasis Kearifan Lokal Meningkat". Pemerintah

Daerah mendorong terwujudnya perlindungan sosial yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM, hingga penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Program-program unggulan seperti Yakin Semua Sejahtera, UMKM Naik Kelas, dan Young Entrepreneur Success menjadi motor penggerak utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus membuka lebih banyak peluang usaha, khususnya bagi kelompok rentan dan generasi muda.

Selain itu, untuk menjaga harmoni sosial dan memperkuat identitas daerah, Kabupaten Lamongan juga menitikberatkan pada pelestarian nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal. Melalui program seperti Lamongan Nyantri, diharapkan nilai-nilai religius tetap menjadi landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, sementara Ramasinta mendorong peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dan kesejahteraan keluarga. Sasaran yang dituju dalam misi ini mencakup meningkatnya perlindungan sosial, stabilitas kewilayahan untuk kerukunan masyarakat, pemberdayaan perempuan, pelestarian budaya lokal, hingga solidaritas sosial antarwarga. Dengan membangun masyarakat yang berdaya, rukun, dan aktif berpartisipasi, Kabupaten Lamongan bertekad mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan budaya sebagai kekuatan utama daerah.

Berdasarkan uraian di atas berikut merupakan uraian tujuan dan sasaran Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 :

Kesejahteraan Sosial Yang Merata Dan Stabilitas Wilayah Berbasis Kearifan Lokal Meningkat, sebagai kesatuan rangkaian kinerja dari agregat pembangunan Kabupaten Lamongan maka berikut merupakan sasaran kesejahteraan dan harmoni sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029:

a. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perlindungan Sosial;
b. Meningkatnya Stabilitas Kewilayahan untuk Kerukunan Masyarakat;
c. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat;

d. Meningkatnya Masyarakat Berbudaya;

e. Meningkatnya Toleransi Masyarakat; dan

f. Meningkatnya Solidaritas Masyarakat.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi IV RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai



dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran serta program prioritas, dapat dengan mudah dipahami melalui desain cascading Misi IV yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 3-11 *Cascading* Misi IV Kabupaten Lamongan
Sumber: Data Diolah, 2025

3.2.5 Tujuan dan Sasaran Misi V

Misi V Kabupaten Lamongan dalam RPJMD 2025-2029 adalah "Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif". Misi ini menjadi landasan dalam menciptakan birokrasi yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Tujuan yang ingin dicapai melalui misi ini adalah "Terwujudnya Reformasi Birokrasi Berdampak yang Berorientasi Layanan", yang menekankan pentingnya birokrasi yang tidak hanya efisien dalam prosedur, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Implementasi program

Transformasi Pelayanan Publik menjadi strategi utama untuk mempercepat proses digitalisasi layanan, memastikan pelayanan publik lebih inovatif, responsif, dan berbasis teknologi.

Sasaran dari misi ini difokuskan pada empat aspek penting, yaitu meningkatnya digitalisasi tata kelola pemerintahan, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Melalui tata kelola yang profesional dan berbasis sistem digital, Kabupaten Lamongan menargetkan terwujudnya pelayanan publik yang lebih terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan kapasitas ASN dilakukan secara berkelanjutan untuk menghadirkan sumber daya aparatur yang kompeten, inovatif, dan mampu merespon tuntutan perubahan zaman. Dengan demikian, reformasi birokrasi yang diusung tidak hanya sekadar administratif, melainkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Lamongan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Berdampak Yang Berorientasi Layanan, sebagai kesatuan rangkaian kinerja dari agregat pembangunan Kabupaten Lamongan maka berikut merupakan sasaran birokrasi yang berdampak Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029:

a. Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan;
b. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik;
c. Meningkatnya Kapasitas ASN Pemerintah Daerah; dan
d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi V RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran serta program prioritas, dapat dengan mudah dipahami melalui desain cascading Misi V yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 3-12 *Cascading* Misi V Kabupaten Lamongan Lamongan (disesuaikan)
Sumber: Data Diolah, 2025

Berikut merupakan gambaran umum target kinerja RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029:

Tabel 3-1 Gambaran Umum Target Kinerja RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi/ Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan	**Pertumbuhan Ekonomi yang Akseleratif dan Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**4,81**	**4,88**	**4,95**	**5,01**	**5,15**	**5,26**	**5,50**	**5,50**
		Gini Rasio	**Indeks**	**0,281**	**0,279**	**0,277**	**0,272**	**0,268**	**0,264**	**0,260**	**0,260**
	Meningkatnya Daya Tarik Wisata Daerah	Persentase Peningkatan Pengeluaran Wisatawan	Persen	2,6	2,68	2,79	2,91	3,03	3,15	3,27	3,27
	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan	Persentase Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	0.11	0.12	0.13	0.15	0.16	0.17	0.19	0.19
		Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	Persen	5.08	5.13	5.18	5.28	5.38	5.48	5.58	5.58
		Persentase Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	Persen	7.66	7.69	7.71	7.76	7.81	7.86	7.91	7.91
	Meningkatnya Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	Triliun Rupiah	2,14	2,17	2,17	2,22	2,23	2,23	2,23	2,23
	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,34	4,28	4,25	4,12	4,07	4,01	3,97	3,97
	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri	Persen	1.393,75	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	35,00

Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi/ Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman	**Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**	**75,90**	**76,50**	**77,10**	**77,80**	**78,40**	**79,10**	**79,80**	**79,80**
	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,672	0,673	0,674	0,675	0,676	0,677	0,678	0,678
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	65.76	65.80	65.86	65.96	66.06	66.16	66.26	66.26
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0,847	0,849	0,851	0,853	0,855	0,857	0,860	0,860
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	61,33	61,83	62,33	63,33	64,33	65,33	66,33	66,33
Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan	**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berkelanjutan**	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	**Indeks**	**81.33**	**81.63**	**81.83**	**82.33**	**82.83**	**83.33**	**83.83**	**83.83**
	Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur	Indeks	83,22	83,25	83,30	83,40	83,50	83,60	83,70	83,70
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,33	70,95	71,04	71,13	71,21	71,30	71,39	71,39
	Meningkatnya Kapasitas	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64	0,64

Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi/ Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Kesiapsiagaan Bencana										
Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya, dan Partisipatif Dalam Pembangunan	**Kesejahteraan Sosial yang Merata dan Stabilitas Wilayah Berbasis Kearifan Lokal Meningkat**	**Indeks Kesalehan Sosial**	**Indeks**	**89,33**	**89.45**	**89,50**	**89,77**	**90,05**	**90,27**	**90,60**	**90,60**
		Peresentase Penduduk Miskin	**Persen**	**12,16**	**11.95**	**11,87**	**11,43**	**11,02**	**10,80**	**10,35**	**10,35**
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perlindungan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos)	Indeks	56,85	56,95	57,01	57,09	57,17	57,26	57,34	57,34
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	67,90	68,05	68,9	69,1	69,2	69,3	69,4	69,4
		Nilai Tukar Petani	Nilai	123,93	124,00	124,10	124,60	125,05	125,55	126,05	126,05
		Indeks Daya Beli	Indeks	0.768	0.772	0.778	0.788	0.798	0.808	0.818	0.818
	Meningkatnya Stabilitas Kewilayahan untuk Kerukunan Masyarakat	Nilai Stabilitas	Nilai	88,11	88,50	88,87	89,25	89,86	90,34	91,02	91,02
	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Nilai Toleransi	Nilai	89,93	90,23	91,53	92,13	92,83	93,20	94,05	94,05
	Meningkatnya Solidaritas Masyarakat	Nilai Solidaritas	Nilai	90,57	90,80	91,02	91,57	92,07	92,47	92,98	92,98
	Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	67,64	67,90	68,10	69,10	70,10	71,05	72,15	73,05

Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi/ Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Mewujudkan Reformasi Birokasi Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif	**Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Berdampak Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**86,48**	**87.30**	**87,39**	**87,47**	**87,54**	**87,60**	**87,65**	**87,65**
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,02	88,32	88,61	88,89	89,16	89,42	89,67	89,67
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.38	4,40	4.42	4.44	4.46	4.48	4.50	4.50
	Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintah Daerah	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	N/A	N/A	1,8	1,9	2,1	2,2	2,4	2,4
	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	79,28	79,38	79.50	80	80.5	81	81.5	81.5
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	83,18	83,20	83,28	83,33	83,38	83,40	83,50	83,50
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	69.33	69.80	70.14	70.48	70.68	70.88	71.08	71.08
		Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

3.3 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Secara substansial, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan ini memuat kerangka manajemen strategis yang menetapkan tujuan dan sasaran pemerintah daerah beserta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai hal tersebut. Pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud, akan diwujudkan secara konkret dalam perumusan strategi dan arah kebijakan, serta prioritas pembangunan daerah selama jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam upaya perumusannya, permasalahan dan isu strategis yang telah teridentifikasi di bagian sebelumnya, dikaitkan dengan rangkaian solusi yang tercermin di dalam tujuan dan sasaran pembangunan, yang pada akhirnya menjadi modal utama dalam perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah hasil dari proses tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

3.3.1 STRATEGI

Secara mendasar, strategi merupakan rencana tindakan komprehensif yang dirumuskan untuk mencapai tujuan atau sasaran RPJMD. Strategi yang dirumuskan harus mampu menjawab permasalahan pembangunan daerah yang telah dipetakan sebelumnya. Maka, dalam rangka memperoleh strategi komprehensif yang mengungkit langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran serta mampu menjawab permasalahan dan isu strategis, dalam penentuan alternatifnya, dilakukan analisis *Skecenderungangths, Weaknesses, Opportunities* and *Threats* atau Analisis SWOT pada hasil telaah permasalahan dan isu-isu strategis yang sudah dilakukan sebelumnya. Metode ini merupakan salah

satu perangkat analisis yang direkomendasikan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, karena kesesuaiannya dengan prinsip perencanaan pembangunan yang sederhana namun memiliki hasil yang relatif kuat dan menyasar pada inti permasalahan sesuai katagorisasinya sebagai daya dukung atau hambatan internal maupun eksternal. Ilustrasi analisis SWOT untuk perumusan alternatif strategi pembangunan di Kabupaten Lamongan sebagai berikut

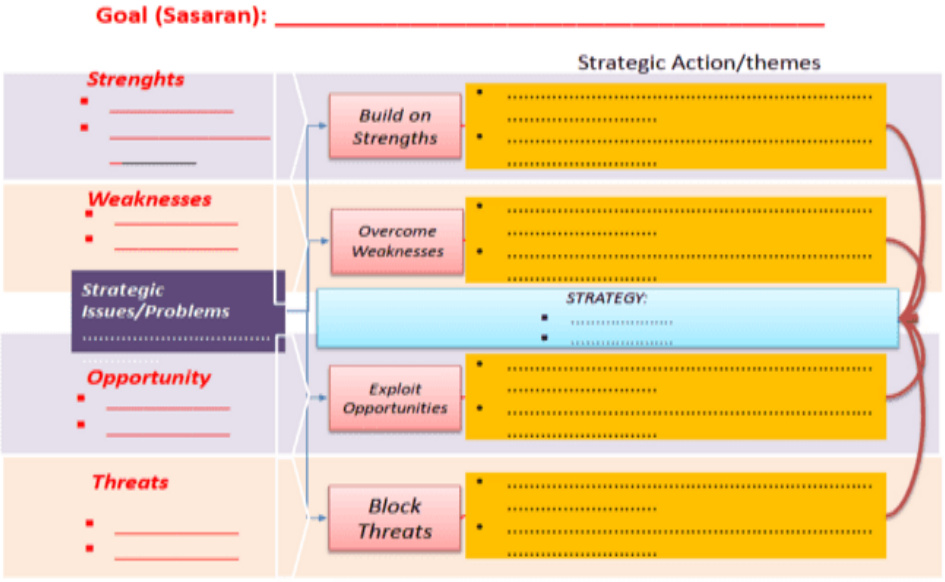

Gambar 3-13 Analisis SWOT dalam Perumusan Strategi Pembangunan
Sumber: Gambar G-B.8 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dengan prinsip komprehensivitas dan daya ungkit yang luas, suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu atau beberapa sasaran, dengan asumsi bahwa 1 (satu) strategi mampu mencapai sekurang-kurangnya 1 (satu) sasaran atau lebih. Dari sekian banyak alternatif strategi yang muncul dari hasil analisis SWOT pada kondisi pembangunan Kabupaten Lamongan, terdapat setidaknya 11 (sebelas) strategi yang ditetapkan sebagai upaya untuk mencapai 21 (dua puluh satu) sasaran pembangunan. Adapun perincian strategi tersebut antara lain sebagai berikut:

ST 1. Pengembangan destinasi wisata yang didukung dengan pemenuhan fasilitas penunjang pariwisata, peningkatan aktivitas wisata, serta penguatan *branding* dan kemitraan

Hasil analisis terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Lamongan mengidentifikasi berbagai tantangan yang relevan dengan kondisi Kabupaten Lamongan, terutama dalam hal integrasi destinasi wisata, keterbatasan fasilitas akomodasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola potensi wisata secara profesional. Permintaan wisatawan terhadap layanan berkualitas di Lamongan semakin meningkat, sementara pengelolaan objek wisata masih belum sepenuhnya berbasis kajian bisnis yang profesional. Selain itu, meskipun Lamongan memiliki keberagaman potensi unggulan dari segi geografis, budaya, dan ekonomi kreatif, pengembangannya masih terbatas dan belum memberikan dampak optimal terhadap perekonomian daerah. Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya kontribusi sebagian besar destinasi wisata terhadap pendapatan daerah, serta pengembangan ekonomi kreatif yang masih belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang mampu menjawab berbagai dinamika ini dengan pendekatan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Daya Tarik Wisata Daerah", Kabupaten Lamongan menerapkan strategi "Pengembangan destinasi wisata yang didukung dengan pemenuhan fasilitas penunjang pariwisata, peningkatan aktivitas wisata, serta penguatan branding dan kemitraan". Upaya ini mencakup peningkatan infrastruktur dan fasilitas wisata yang memadai guna meningkatkan kenyamanan wisatawan, serta penyelenggaraan berbagai aktivitas wisata berbasis budaya, alam, dan ekonomi kreatif untuk menarik lebih banyak pengunjung. Selain itu, branding pariwisata Lamongan akan diperkuat melalui promosi strategis dan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan komunitas lokal, guna meningkatkan daya saing daerah sebagai destinasi wisata unggulan. Strategi ini juga dirancang agar selaras dengan mandat kepala daerah terpilih

melalui program Ramasinta (Pariwisata Ramah dan Terintegrasi), yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif, berdaya saing, serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan.

ST 2. Peningkatan produksi dan nilai tambah sektor unggulan berbasis potensi unggulan yang ditunjang oleh inovasi dan iklim investasi yang kondusif, kemandirian desa, serta mampu meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Daya Saing Daerah, Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan, Meningkatnya Realisasi Investasi, serta Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat, Kabupaten Lamongan menerapkan strategi Peningkatan produksi dan nilai tambah sektor unggulan berbasis potensi unggulan yang ditunjang oleh inovasi dan iklim investasi yang kondusif, kemandirian desa, serta mampu meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Strategi ini mencakup optimalisasi pemanfaatan teknologi budidaya modern di sektor pertanian dan perikanan guna menjaga stabilitas produksi serta peningkatan akses pasar untuk memperluas jangkauan distribusi produk lokal. Selain itu, pemerintah daerah mendorong penguatan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk unggulan daerah. Stabilitas harga sarana produksi juga menjadi perhatian utama guna mendukung kesejahteraan petani dan nelayan. Di sektor ketenagakerjaan, strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, serta memfasilitasi pengembangan kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Strategi ini dirumuskan berdasarkan telaah terhadap kondisi pembangunan ekonomi di Kabupaten Lamongan, di mana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi struktur PDRB dengan kontribusi lebih dari 30% (tiga puluh persen).

Namun, sektor ini menghadapi tantangan besar, seperti perubahan iklim yang ekstrem, ancaman bencana pertanian, serta alih fungsi lahan yang mengancam ketahanan pangan. Selain itu, sektor perikanan dan kelautan masih terkendala oleh rendahnya kualitas hasil panen, kurang optimalnya sistem rantai dingin (cold chain), serta adanya praktik ilegal fishing dan overfishing yang mengancam keberlanjutan sumber daya. Dari sisi industri dan ketenagakerjaan, belum adanya kawasan industri serta rendahnya kualitas tenaga kerja menjadi faktor penghambat dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Untuk itu, strategi ini dipilih karena selaras dengan mandat kepala daerah terpilih yang tertuang dalam program UMKM Naik Kelas, Yakin Semua Sejahtera, dan Lamongan Lumbung Pangan, sehingga diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi daerah yang inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

ST 3. Akselerasi terciptanya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing melalui jaminan akses pendidikan dan pengembangan sekolah unggul

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan, Kabupaten Lamongan menerapkan strategi Akselerasi terciptanya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing melalui jaminan akses pendidikan dan pengembangan sekolah unggul. Strategi ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap warga, terutama kelompok kurang sejahtera, mendapatkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Langkah-langkah dalam strategi ini mencakup peningkatan infrastruktur pendidikan, penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga prasejahtera, serta penguatan kapasitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan. Selain itu, pengembangan sekolah unggul akan dilakukan untuk meningkatkan daya saing siswa melalui kurikulum yang adaptif, teknologi pendidikan, dan program

berbasis kompetensi global. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan sistem pendidikan di Kabupaten Lamongan semakin inklusif dan mampu mencetak generasi yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Strategi ini ditetapkan berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Lamongan yang menunjukkan bahwa berbagai indikator layanan pendidikan belum mengalami peningkatan yang signifikan. Kualitas tenaga pendidik, baik dari segi sertifikasi maupun rasio guru terhadap siswa, masih perlu diperbaiki guna memastikan proses belajar mengajar yang optimal. Selain itu, pemerataan akses dan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang masih menjadi tantangan, terutama bagi daerah-daerah terpencil. Isu literasi masyarakat yang belum optimal juga turut mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, strategi ini dipilih untuk mengatasi tantangan sekaligus selaras dengan mandat kepala daerah terpilih melalui Program Perintis (Pendidikan Gratis dan Berkualitas bagi Warga Kurang Sejahtera), yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi kurang beruntung.

ST 4. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan serta pengendalian penduduk melalui pencegahan stunting, deteksi dini penyakit, dan penguatan kesehatan ibu dan anak untuk mendukung pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing

Pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Lamongan menunjukkan sejumlah tantangan yang masih perlu diatasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan kasus penyakit menular seperti HIV serta penyakit tidak menular menjadi perhatian utama dalam kebijakan kesehatan daerah. Selain itu, angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) yang

mengalami kenaikan mencerminkan perlunya penguatan layanan kesehatan ibu dan anak. Partisipasi masyarakat dalam layanan kesehatan dasar, terutama melalui posyandu, masih kurang optimal, yang berdampak pada rendahnya kesadaran akan pentingnya pencegahan penyakit sejak dini. Kapabilitas tenaga kesehatan dalam menangani ibu hamil, bayi, dan balita juga masih perlu ditingkatkan agar layanan yang diberikan lebih optimal. Selain itu, cakupan kepesertaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum maksimal, serta keterbatasan sarana dan prasarana alat kesehatan di fasilitas kesehatan masih menjadi kendala dalam pelayanan medis yang lebih berkualitas.

Merespons berbagai tantangan tersebut, Kabupaten Lamongan menerapkan strategi meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan serta pengendalian penduduk melalui pencegahan stunting, deteksi dini penyakit, dan penguatan kesehatan ibu dan anak untuk mendukung pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing. Strategi ini mencakup penguatan layanan kesehatan primer dengan menitikberatkan pada upaya preventif seperti deteksi dini penyakit, peningkatan gizi untuk mencegah stunting, serta optimalisasi layanan kesehatan ibu dan anak di seluruh fasilitas kesehatan. Pengembangan kapasitas tenaga medis juga dilakukan agar mampu memberikan layanan yang lebih baik, terutama dalam menangani kasus kesehatan yang kritis. Selain itu, cakupan kepesertaan JKN ditingkatkan guna memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh, sejalan dengan mandat kepala daerah terpilih melalui program Lamongan Sehat, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.

ST 5. Pembinaan kepemudaan yang adaptif dan inovatif guna mencetak generasi unggul, berakhlak, dan siap menghadapi perubahan zaman

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kepemudaan, Kabupaten Lamongan menerapkan strategi Pembinaan kepemudaan yang adaptif dan inovatif guna mencetak generasi unggul, berakhlak, dan siap menghadapi perubahan zaman. Strategi ini bertujuan untuk membangun karakter kepemudaan yang tangguh serta meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi tantangan global. Pembinaan dilakukan melalui program pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan pengembangan kreativitas yang berbasis inovasi dan teknologi. Selain itu, strategi ini juga mencakup pembentukan ekosistem kepemudaan yang kondusif, dengan memperkuat peran organisasi kepemudaan serta meningkatkan akses pemuda terhadap sumber daya dan jejaring profesional. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemuda Lamongan tidak hanya memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan zaman, tetapi juga mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah melalui inovasi dan semangat kewirausahaan.

Strategi ini lahir dari hasil analisis terhadap kondisi pembangunan sektor pemuda dan olahraga di Kabupaten Lamongan yang masih menghadapi beberapa tantangan. Kurang optimalnya program pengembangan atlet menghambat potensi pemuda di bidang olahraga untuk bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, pembentukan karakter kepemudaan yang kuat masih menjadi isu, terutama dalam membangun kesadaran akan peran dan tanggung jawabnya dalam masyarakat. Partisipasi aktif pemuda dalam wadah organisasi formal juga masih perlu ditingkatkan guna mendorong keterlibatannya dalam pengambilan keputusan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, strategi ini

dipilih untuk menjawab berbagai tantangan tersebut sekaligus mendukung mandat kepala daerah terpilih melalui Program Generasi Emas Lamongan, yang bertujuan membentuk generasi muda yang unggul, berdaya saing tinggi, dan siap menghadapi dinamika perubahan zaman.

ST 6. Pemenuhan dan pemerataan infrastruktur bagi masyarakat diprioritaskan pada masyarakat berpenghasilan rendah

Kondisi infrastruktur yang berkualitas dan merata menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Kabupaten Lamongan menerapkan strategi Pemenuhan dan pemerataan infrastruktur bagi masyarakat diprioritaskan pada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memastikan akses yang lebih adil terhadap layanan infrastruktur. Strategi ini mencakup pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan guna meningkatkan konektivitas antarwilayah, penyediaan infrastruktur irigasi yang lebih baik untuk mendukung sektor pertanian, serta penanganan kawasan kumuh agar masyarakat mendapatkan lingkungan yang lebih layak. Selain itu, peningkatan kapasitas tampungan *floodway* dan pemeliharaan saluran irigasi dilakukan untuk mengantisipasi risiko banjir, sementara regulasi terkait penggunaan lahan dan tonase kendaraan juga diperkuat guna menjaga keberlanjutan infrastruktur yang ada. Dengan adanya pemerataan infrastruktur dasar, diharapkan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, dapat lebih mudah mengakses layanan publik, memperkuat perekonomian lokal, serta meningkatkan kualitas hidup mereka.

Strategi ini lahir dari hasil analisis terhadap kondisi pembangunan sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Lamongan yang masih menghadapi berbagai tantangan. Pemeliharaan jalan dan jembatan belum seluruhnya dalam kondisi mantap, yang menghambat aksesibilitas masyarakat di berbagai

wilayah. Kurangnya penerapan regulasi terkait volume dan tonase kendaraan yang melewati jembatan juga berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian di luar Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) serta pendangkalan waduk, rawa, embung, dan sungai menjadi faktor yang mempengaruhi daya dukung lingkungan terhadap pertanian dan sumber daya air. Penanganan kawasan kumuh pun masih kurang optimal sesuai dengan kewenangan Daerah, sehingga pemerataan pembangunan belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, strategi ini dipilih untuk menjawab tantangan sekaligus mendukung mandat kepala daerah terpilih melalui Program Jamula Mantap, yang bertujuan meningkatkan kemantapan jalan serta aksesibilitas masyarakat menuju konektivitas yang lebih baik.

ST 7. Penguatan pengawasan kegiatan berbasis penggunaan lahan serta pengendalian pencemaran

Kabupaten Lamongan menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama terkait penggunaan lahan dan pengendalian pencemaran. Banyaknya industri serta kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan tata ruang dan berpotensi merusak lingkungan. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta belum tersedianya masterplan pengelolaan sampah menghambat upaya menciptakan sistem pengelolaan limbah yang efektif. Beban pencemaran air limbah yang tinggi juga menjadi permasalahan serius, karena kapasitas sungai dalam melakukan self purification tidak sebanding dengan jumlah limbah yang masuk. Di sisi lain, topografi Lamongan yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana, seperti banjir dan kekeringan, semakin memperkuat urgensi adanya strategi pengelolaan lingkungan yang lebih ketat dan berkelanjutan. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan penguatan regulasi serta

pengawasan terhadap aktivitas yang berdampak langsung pada kelestarian lingkungan.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Kabupaten Lamongan menerapkan strategi Penguatan pengawasan kegiatan berbasis penggunaan lahan serta pengendalian pencemaran. Strategi ini mencakup penerapan regulasi yang lebih ketat terhadap pemanfaatan lahan agar sesuai dengan peruntukannya, serta pengawasan yang lebih intensif terhadap industri dan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan. Selain itu, optimalisasi pengelolaan sampah dilakukan dengan membangun infrastruktur yang memadai serta menyusun masterplan pengelolaan sampah sebagai panduan dalam menciptakan sistem yang lebih efisien. Pengendalian pencemaran air limbah juga diperkuat melalui pemantauan kualitas air secara berkala dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk meningkatkan daya dukung sungai. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, sejalan dengan mandat kepala daerah terpilih melalui Program Lamongan Hijau, yang bertujuan mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat Lamongan.

ST 8. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Kebencanaan fokus pada pos-pos wilayah-wilayah siaga bencana

Strategi Optimalisasi Sarana dan Prasarana Kebencanaan fokus pada pos-pos wilayah-wilayah siaga bencana diterapkan di Kabupaten Lamongan pada tahun 2025-2029 untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan wilayah dalam menghadapi risiko bencana melalui pengembangan dan peningkatan fasilitas kebencanaan, seperti pos siaga bencana, sistem peringatan dini (early warning system), serta integrasi koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam penanganan

bencana. Selain itu, optimalisasi mitigasi bencana juga menjadi fokus utama, termasuk penguatan kapasitas desa tangguh bencana serta pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesiapsiagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam menghadapi bencana semakin meningkat, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan.

Strategi ini lahir dari hasil telaah terhadap tingginya risiko bencana di Kabupaten Lamongan, terutama banjir, kekeringan, longsor, dan puting beliung yang dapat berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan. Dampak dari bencana ini mencakup pelambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, meningkatnya risiko kesehatan masyarakat, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup. Selain itu, dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dapat menyebabkan peningkatan jumlah Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan angka kemiskinan. Hasil analisis sektor kebencanaan juga menunjukkan bahwa mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Lamongan masih perlu dioptimalkan, termasuk dalam hal pembentukan desa tangguh bencana, pengelolaan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), serta integrasi sistem peringatan dini dengan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, strategi ini dipilih sebagai langkah konkret dalam merespons berbagai tantangan kebencanaan yang ada. Selain itu, strategi ini juga sejalan dengan mandat kepala daerah terpilih melalui Program Lamongan Tangguh yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana alam.

ST 9. Perluasan Jangkauan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Adaptif untuk Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Strategi Perluasan Jangkauan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Adaptif untuk Pemerataan Kesejahteraan

Masyarakat diterapkan di Kabupaten Lamongan pada tahun 2025-2029 untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perlindungan Sosial dan Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Pendapatan Masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan sosial serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan akses terhadap bantuan sosial yang tepat sasaran, pendirian Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau shelter untuk menangani permasalahan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta penyelenggaraan pelatihan dan pemberdayaan guna meningkatkan kapasitas, keahlian, dan kompetensi masyarakat agar lebih produktif. Selain itu, strategi ini juga mendorong kesetaraan gender dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial, sehingga perempuan memiliki akses yang lebih luas untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Strategi ini lahir dari hasil telaah terhadap tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan yang disebabkan belum optimalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengembangan kapasitas individu melalui pelatihan dan pendampingan menjadi kunci agar masyarakat mampu meningkatkan taraf hidup mereka secara mandiri. Selain itu, analisis terhadap sektor sosial dan pemberdayaan perempuan dan anak menunjukkan adanya peningkatan jumlah anak terlantar, lansia terlantar, dan disabilitas terlantar, serta belum tersedianya fasilitas khusus seperti UPT/Shelter untuk menangani permasalahan sosial. Tantangan lainnya adalah validasi data penerima bantuan sosial yang belum optimal, budaya patriarkis yang masih kuat, keterbatasan akses bagi korban kekerasan perempuan dan anak, serta kurangnya tenaga pendamping korban kekerasan. Oleh karena itu, strategi ini dipilih untuk merespons berbagai tantangan tersebut secara

holistik. Selain itu, strategi ini juga sejalan dengan mandat kepala daerah terpilih melalui Program UMKM Naik Kelas dan Yakin Semua Sejahtera, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat ekonomi berbasis pemberdayaan sosial.

ST 10. Penyemaian Nilai-Nilai Agama, Budaya dan Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial dalam Mewujudkan Kondusifitas Daerah dan Solidaritas Masyarakat

Strategi Penyemaian Nilai-Nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial dalam Mewujudkan Kondusifitas Daerah dan Solidaritas Masyarakat diterapkan di Kabupaten Lamongan pada tahun 2025-2029 untuk mencapai sasaran Meningkatnya Masyarakat Berbudaya, Meningkatnya Solidaritas Masyarakat, serta Meningkatnya Stabilitas Kewilayahan untuk Kerukunan Masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal sebagai perekat sosial yang dapat menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui strategi ini, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran lebih tinggi dalam melestarikan kebudayaan lokal, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, serta meningkatkan partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Selain itu, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam berbagai aspek sosial, termasuk anggota Linmas dan partisipasi politik masyarakat, juga menjadi bagian dari implementasi strategi ini guna menciptakan stabilitas kewilayahan yang lebih baik.

Strategi ini dipilih berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi pembangunan di Kabupaten Lamongan yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam melestarikan budaya cenderung menurun, menyebabkan potensi budaya lokal kurang dimanfaatkan secara optimal. Di bidang ketertiban dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), kurangnya kapabilitas SDM anggota Linmas menjadi tantangan dalam

menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Sementara itu, di sektor kesatuan bangsa dan politik, pendidikan politik yang belum merata menyebabkan rendahnya kesadaran politik masyarakat, yang berpotensi menghambat proses demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, strategi ini dipilih sebagai upaya komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memanfaatkan kekuatan agama, budaya, dan kearifan lokal sebagai modal sosial utama. Selain itu, strategi ini juga selaras dengan mandat kepala daerah terpilih melalui Program Lamongan Nyantri, yang berfokus pada penguatan karakter masyarakat berbasis nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam membangun harmoni sosial yang lebih kokoh.

ST 11. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Berorientasi Layanan

Permasalahan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lamongan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas layanan publik. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap implementasi Reformasi Birokrasi yang belum optimal, lemahnya komitmen Perangkat Daerah dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta keterbatasan SDM yang memahami regulasi tata kelola pemerintahan. Selain itu, masih terdapat masalah dalam legalitas kepemilikan aset pemerintah akibat lemahnya data dan informasi, keterlambatan laporan keuangan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta kurangnya tenaga ahli dalam bidang perpajakan dan penilaian aset. Masalah lainnya adalah belum sempurnanya sistem database pajak daerah, kurangnya integrasi dalam sistem aplikasi yang digunakan, serta rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, pemahaman terkait Reformasi Birokrasi Tematik masih belum merata, sementara implementasi kebijakan

seperti e-katalog lokal belum berjalan optimal akibat minimnya pemahaman penyedia lokal dan terbatasnya produk lokal yang tersedia.

Untuk merespons berbagai permasalahan tersebut, strategi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Berorientasi Layanan diterapkan di Kabupaten Lamongan pada tahun 2025-2029 guna mencapai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Terhadap Layanan Publik. Strategi ini akan memastikan integrasi sistem digital dalam tata kelola pemerintahan, meningkatkan kapasitas SDM dalam memahami kebijakan birokrasi, serta mempercepat proses administrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, strategi ini juga berupaya untuk meningkatkan efisiensi layanan publik berbasis teknologi, memperbaiki sistem database perpajakan daerah, serta mendorong digitalisasi dalam pengelolaan aset dan transaksi pemerintah. Dengan penerapan teknologi yang lebih maju, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Strategi ini juga selaras dengan mandat kepala daerah terpilih melalui Program Transformasi Digital Pelayanan Publik dan Desa Pintar, yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan berdaya saing dalam era digital.

Seluruh strategi yang telah dipilih dalam upaya mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Lamongan tersebut sejatinya memiliki keselarasan dengan sasaran dan tujuan yang mendukung langsung pada pencapaian visi misi pembangunan Kabupaten Lamongan selama 5 (lima) tahun yang akan datang. Keterkaitan antara strategi yang ditetapkan dengan sasaran, tujuan, misi serta visi pembangunan diuraikan secara lebih jelas di dalam matriks berikut:

Tabel 3-2 Keterkaitan Strategi dengan Sasaran, Tujuan, Misi Dan Visi Kabupaten Lamongan 2025-2029

VISI: KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKELANJUTAN			
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan	Pertumbuhan Ekonomi yang Akseleratif dan Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah	Meningkatnya Daya Tarik Wisata Daerah	ST 1. Pengembangan destinasi wisata yang didukung dengan pemenuhan fasilitas penunjang pariwisata, peningkatan aktivitas wisata, serta penguatan branding dan kemitraan
		Meningkatnya Realisasi Investasi	ST 2. Peningkatan produksi dan nilai tambah sektor unggulan berbasis potensi unggulan yang ditunjang oleh inovasi dan iklim investasi yang kondusif, kemandirian desa, serta mampu meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat
		Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan	
		Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	
		Meningkatnya Kemandirian Desa	
Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berahklak dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	ST 3. Akselerasi terciptanya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing melalui jaminan akses pendidikan dan pengembangan sekolah unggul
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	ST 4. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan serta pengendalian penduduk melalui pencegahan stunting, deteksi dini penyakit, dan penguatan kesehatan ibu dan anak untuk mendukung pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing
		Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kepemudaan	ST 5. Pembinaan kepemudaan yang adaptif dan inovatif guna mencetak generasi unggul, berakhlak, dan siap menghadapi perubahan zaman.
Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang	Meningkatnya Infrastruktur Dasar Berkualitas dan Merata	ST 6. Pemenuhan dan pemerataan infrastruktur bagi masyarakat yang diprioritaskan pada masyarakat berpenghasilan rendah

VISI: KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKELANJUTAN			
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
	Mantap dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	ST 7. Penguatan pengawasan kegiatan berbasis penggunaan lahan serta pengendalian pencemaran.
		Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	ST 8. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Kebencanaan fokus pada pos-pos wilayah-wilayah siaga bencana
Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmoni Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Partisipatif Dalam Pembangunan	Kesejahteraan Sosial yang Merata dan Stabilitas Wilayah Berbasis Kearifan Lokal Meningkat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perlindungan Sosial	ST 9. Perluasan Jangkauan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Adaptif untuk Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat	
		Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	ST 10. Penyemaian Nilai-Nilai Agama, Budaya dan Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial dalam Mewujudkan Kondusifitas Daerah dan Solidaritas Masyarakat
		Meningkatnya Solidaritas Masyarakat	
		Meningkatnya Stabilitas Kewilayahan untuk Kerukunan Masyarakat	
		Meningkatnya Toleransi Masyarakat	
Mewujudkan Reformasi Birokasi Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Berdampak yang Berorientasi Layanan	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	ST 11. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Berorientasi Layanan
		Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya Profesionalitas ASN Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	

3.3.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan pedoman yang menjadi dasar untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Selain itu, sebagai suatu rangkaian kerja yang merupakan perincian dari misi, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun periode Kepala Daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Arah kebijakan harus mampu menjabarkan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa pemerintahan perlu dipersiapkan baik sifatnya menyasar pada permasalahan maupun menjadi sarana menjawab isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Selain itu, arah kebijakan juga sudah seharusnya selaras dengan strategi yang telah dipilih serta dapat termanifestasi secara konkret di tiap-tiap tahun.

Meskipun periode dari RPJMD yang disusun ini adalah 2025-2029, namun tahapan arah kebijakan yang dipergunakan terhitung sejak tahun 2026 hingga tahun 2030, dengan dasar asumsi bahwa di tahun 2030 Kabupaten Lamongan masih di masa transisi antara periode pembangunan, sehingga tetap bisa memedomani arah kebijakan yang termuat di dalam dokumen ini. Berikut merupakan perincian dari arah kebijakan yang selaras dengan strategi pembangunan Kabupaten Lamongan di tahun 2026-2030:

Tabel 3-3 Arah Kebijakan Kabupaten Lamongan 2025-2029

Strategi	Arah Kebijakan
ST 1. Pengembangan destinasi wisata yang didukung dengan pemenuhan fasilitas penunjang pariwisata, peningkatan aktivitas wisata, serta penguatan	*City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan;
	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary*

Strategi	Arah Kebijakan
branding dan kemitraan	*services*, aktivitas, *available packages*);
	Sertifikasi SDM pelaku/pengelola wisata dalam rangka peningkatan SDM yang profesional;
	Penataan, penguatan, dan pemasaran daya tarik wisata berbasis alam, budaya, religi, agro, kuliner, belanja, dan sport secara kolaboratif dan partisipatif;
	Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan melalui pengembangan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif;
ST 2. Peningkatan produksi dan nilai tambah sektor unggulan berbasis potensi unggulan yang ditunjang oleh inovasi dan iklim investasi yang kondusif, kemandirian desa, serta mampu meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, Dunia Usaha dan Dunia Industri, masyarakat;
	Penciptaan Ekosistem Usaha Pertanian Berkelanjutan yang selaras dengan arahan Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo melalui pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, termasuk kebijakan perlindungan lahan, optimalisasi, dan revitalisasi lahan;
	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Bengawan Solo, Brantas, dan Tapal Kuda
	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian, Farming Corporation, dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca)
	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global
	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis
	Modernisasi dan Hilirisasi Pertanian guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform
	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian
	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian
	Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian

Strategi	Arah Kebijakan
	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha;
	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis;
	Standarisasi dan sertifikasi Produk barang dan jasa UKM dalam rangka meningkatkan daya saing menuju persaingan global;
	Peningkatan produktivitas BUMD;
	Modernisasi Kawasan Ekonomi Strategis melalui Revitalisasi Pasar Rakyat, Rebranding Sentra UMKM, serta Relokasi dan Pembangunan Pasar Ikan Modern yang dilengkapi fasilitas Cold Storage
	Peningkatan produksi dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak
	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform
	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak
	Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan dan petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan
	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan;
	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif;
	Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan;
	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya;
	Pembangunan Kawasan Agroindustri Lamongan
	Integrasi Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro berbasis Digital dengan Mendayagunakan Koperasi Desa yang selaras dengan Program Koperasi Merah

Strategi	Arah Kebijakan
	Putih
	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
	Lamongan 100% Desa Mandiri
ST 3. Akselerasi terciptanya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing melalui jaminan akses pendidikan dan pengembangan sekolah unggul	Pembangunan Perpustakaan Berstandar Internasional;
	Pembangunan Human Capital Development Center;
	Akselerasi Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar) yang Integral dengan Program Sekolah Rakyat Untuk Membuka Belenggu Keterbatasan Akses Pendidikan terutama Bagi Warga Rentan
	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan dasar;
	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi;
	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah;
	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan;
	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah);
	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;
	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan;
	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*);
	Beasiswa pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dan keagamaan serta vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global;
ST 4. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan serta pengendalian penduduk melalui pencegahan stunting, deteksi dini penyakit, dan penguatan	Membangun Sistem Layanan Kesehatan yang Terintegrasi secara Digital untuk Mendukung Program Cek Kesehatan Gratis dan Penurunan Stunting
	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal;
	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan;

Strategi	Arah Kebijakan
kesehatan ibu dan anak untuk mendukung pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya;
	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan;
	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan;
	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting;
	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan;
ST 5. Pembinaan kepemudaan yang adaptif dan inovatif guna mencetak generasi unggul, berakhlak, dan siap menghadapi perubahan zaman.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling;
	Mentoring dan pembinaan pemuda serta organisasi kepemudaan
	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana keolahragaan penunjang kebutuhan atlet daerah
ST 6. Pemenuhan dan pemerataan infrastruktur bagi masyarakat yang diprioritaskan pada masyarakat berpenghasilan rendah	Aktivasi Lapangan Gajah Mada Sebagai Pusat Fasilitas Publik
	Operasionalisasi Stadion Surajaya;
	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri;
	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan, termasuk berpartisipasi dalam **penyusunan masterplan penataan kawasan sebagai bagian dari Wilayah Metropolitan (WM) Surabaya;**
	Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage;
	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas;
	Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa;
	Pemantapan Infrastruktur Konektivitas Strategis untuk mendukung konektivitas regional (Standarisasi Ruas Jalan Kabupaten, Jalan antar Desa serta Pembangunan Ring Road Selatan dan Babat) dan **peningkatan ketangguhan terhadap banjir melalui pengendalian Kali Lamong.**
	Akselerasi Transformasi Digital pada Semua Aspek:
	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok;
	peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan

Strategi	Arah Kebijakan
	digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta
	peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.
	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis;
	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.);
	Peningkatan Aksesbilitas Daerah Melalui Pengembangan Jalan Ringroad Kota (Operasionalisasi Ringroad Utara seta Pembangunan Ringroad dan Flyover Ringroad Babat);
	Percepatan Peningkatan Struktur Jalan Kabupaten Menuju Mantap;
	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten;
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim;
	Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas;
	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi, termasuk melalui **Peningkatan SPAM Mojolagres dan inisiasi pengembangan SPAL Regional WM Surabaya**;
	Penyediaan rumah yang layak dan terjagkau dikawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya;
	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau, termasuk mendukung **pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial (PHTC)**;
	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan;
	Penyediaan perumahan yang layak;
	Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga

Strategi	Arah Kebijakan
	listrik; pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas, penginputan data rumah tangga miskin yang belum berlistrik untuk pemasangan instalasi rumah dan sambungan rumah bagi rumah tangga miskin;
	Percepatan pelaksanaan reforma agraria;
	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (antara lain jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, kawasan pergudangan/ stockyard yang modern terintegrasi);
	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (antara lain layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dan lain sebagainya);
	Peningkatan tata kelola, aksesbiilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal serta peningkatan konektivitas ke simpul transportasi lainnya (stasiun kereta api dan pelabuhan)
	Peningkatan kondisi ruas jalan yang terkonektifitas dengan akses masuk dan kelur rencana tol tuban – Gresik. Dan rencana pembangunan jalan lingkar selatan babat yang terhubung ke dalam rencana simpang susun Babat
	Penguatan infrastruktur jalan pesisir dan daerah perikanan untuk mendukung ekonomi biru berkelanjutan
ST 7. Penguatan pengawasan kegiatan berbasis penggunaan lahan serta pendengalian pencemaran	Peningakatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah, Limbah dan limbah B3;
	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas system pengelolaan sampah, limbah dan limbah B3
	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum;
	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy;
	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami;
	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang terintegrasi dengan rencana **pengembangan TPST Regional Gerbangkertosusila**;
	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy;
	Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah B3;
	Peningkatan Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau pada level desa;

Strategi	Arah Kebijakan
	Pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan.
	Penataan Kota berorientasi Estetika dan Fungsi melalui Pengelolaam Ruang Terbuka Hijau, Integrasi Fasilitas Pengelolaan Sampah serta Peningkatan Ketahanan Bencana dan Banjir
ST 8. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Kebencanaan fokus pada pos-pos wilayah-wilayah siaga bencana	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green dan grey infrastructure);
	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;
	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim;
	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko;
	Kabupaten Lamongan Tangguh Bencana;
ST 9. Perluasan Jangkauan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Adaptif untuk Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan
	Penuntasan kemiskinan dengan satu system regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi
	Pemberdayaan Masyarakat Miskin sebagai penuntasan kemiskinan jangka panjang
	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
ST 10. Penyemaian Nilai-Nilai Agama, Budaya dan Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial dalam Mewujudkan Kondusifitas Daerah dan Solidaritas Masyarakat	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila
	Sertifikasi Seniman, Budayawan agar mampu bersaing secara global
	Budaya Sebagai Soft Power Mendukung Pembangunan Lamongan
	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan

Strategi	Arah Kebijakan
	Penguatan keamanan dan ketertiban melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data untuk penanganan kriminalitas dan gangguan Trantibumlinmas
ST 11. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Berorientasi Layanan	Percepatan Pelayanan Publik yang Aksesibel, Andal dan Tanggap melalui penciptaan Mall Pelayanan Publik Mini di semua kecamatan dan Plattform Pengaduan Digital 1 Pintu seperti 1 Call Center untuk semua Pengaduan
	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;
	penguatan pemerintahan melalui digitalisasi layanan publik yang resposif dan pelaksanaan audit SPBE;
	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta;
	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN, termasuk mendukung pembentukan kelembagaan pengelolaan Wilayah Metropolitan.;
	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif;
	reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.";
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;
	Peningkatan pengelolaan pajak dan potensi PAD daerah;
	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;

Berangkat dari strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, dapat dirumuskan beberapa tema atau fokus pembangunan tahunan yang akan menjadi acuan umum penentuan prioritas di setiap tahunnya. Tema dan prioritas Daerah pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Penetapan tema tahunan pada RPJMD Tahun 2025-2029 juga

mengacu pada tema pembangunan tahap pertama RPJPD Kabupaten Lamongan 2025-2045. Sebagaimana gambar berikut ini :



Gambar 3-14 Tema/Pentahapan Tahunan Pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2026-2030

3.3.3 PROGRAM PEMBANGUNAN

Setelah merumuskan strategi dan arah kebijakan yang berisi serangkaian rencana tindakan untuk mencapai sasaran, tujuan misi dan visi bupati terpilih, langkah selanjutnya adalah menyelaraskan antara janji politis bupati terpilih dengan program prioritas, serta menyinkronkannya juga dengan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk program prioritas.

Urgensi lain dari bagian ini juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak, mampu merefleksikan tujuan strategis Kepala Daerah terpilih. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati terpilih.

Program prioritas sejatinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Bupati terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan ke dalam strategi atau kebijakan ataupun ke dalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jika bunyi janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level *output*, maka akan diterjemahkan ke dalam Kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level *outcome*, maka didefinisikan ke dalam program yang kemudian disebut program prioritas. Secara lebih lengkap, berikut ini merupakan matriks linieritas antara program politis Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan Program Nomenklatur beserta urusan dan perangkat daerah pengampunya:

Tabel 3-4 Linieritas Program Politis Kepala Daerah Terhadap Nomenklatur

No	Program Politis Kepala Daerah	Fokus Program Politis	Program Nomenklatur	Fokus Program PD	Perangkat Daerah
1	**Jalan Alus dan Mantap Lamongan (Jamula Mantap)**	Pemeliharaan dan peningkatan kemantapan jalan, jembatan serta drainase, sehingga dapat menjaga konektivitas antar wilayah agar dapat menumbuhkan pusat ekonomi baru.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rekonstruksi Jalan Kabupaten dan Poros Strategis	Dinas PU Bina Marga
			Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Kualitas Jalan dan Drainase pada Lingkungan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
2	**Lamongan Menyala**	Pemeliharaan dan peningkatan jumlah sarana prasarana jalan terutama yang berkaitan dengan penerangan jalan raya, sehingga dapat meningkatkan konektivitas, keselamatan dan kenyamanan serta geliat aktivitas sosial ekonomi masyarakat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas sarana prasana jalan terutama terkait Alat Penerangan Jalan (APJ)	Dinas Perhubungan
3	**Lamongan Hijau**	Untuk memastikan ketersediaan ruang terbuka hijau, pengendalian	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/ Kota	Pemeliharan dan Peningkatan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan

No	Program Politis Kepala Daerah	Fokus Program Politis	Program Nomenklatur	Fokus Program PD	Perangkat Daerah
		Kawasan kumuh, perluasan ketersediaan air bersih dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di seluruh kawasan permukiman, sehingga masyarakat dapat merasakan lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan.	Program Pengolahan Persampahan	Penanganan dan Pengurangan Sampah	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Apresiasi pada Masyarakat yang Berperan pada Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan Akses Layanan Air Minum di seluruh kawasan permukiman	
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pembangunan Sarana dan Prasaran Persampahan	
			Program Kawasan Permukiman	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	
4	**Lamongan Tangguh**	Meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana alam	Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Satpol PP
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pengendalian Banjir	Dinas PU Sumber Daya Air
			Program Penanganan Bencana	Bantuan pasca bencana	Dinas Sosial
5	**Lumbung Pangan Lamongan**	Memastikan ketersediaan pangan, mendorong terwujudnya peningkatan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Sarana Pertanian yang meliputi bibit/benih, alat mesin pertanian/teknologi pertanian, pupuk, dan pestisida.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Program Politis Kepala Daerah	Fokus Program Politis	Program Nomenklatur	Fokus Program PD	Perangkat Daerah
		produksi dan produktvitas pertanian, perikanan serta populasi perternak. Menyalurkan bantuan sarana dan prasarana yang tepat guna dan sasaran serta menjaga ketersedian air baku, sehingga Lamongan tetap berstatus sebagai lumbung pangan nasional	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyediaan Infrastruktur pertanian yang meliputi jalan usaha tani, jalan produksi perkebunan, pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi, embung pertanian, dan prasarana pertanian lainnya.	
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Fasilitasi asuransi pertanian, dan mitigasi bencana iklim (penerapan sekolah lapang iklim, pemanfaatan teknologi EWS bidang penanggulangan bencana pertanian).	
			Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Cadangan pangan daerah, cadangan pangan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan keluarga (bantuan pemanfataan pekarangan), dan peningkatan pangan berbasis B2SA (beragam, bergizi, seimbang, dan aman).	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan infrastruktur lumbung pangan (bangunan gudang lumbung, lantai jemur), dan prasarana lainnya.	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pemberian vaksinasi dan pengobatan pada hewan.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan populasi ternak melalui teknologi reproduksi, pemberian bantuan bibit ternak, pemberian bantuan hijauan pakan ternak, penanaman hijauan pakan ternak di lahan perhutani.	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyediaan jalan produksi peternakan, bank pakan, cooper, rehab puskeswan.	

No	Program Politis Kepala Daerah	Fokus Program Politis	Program Nomenklatur	Fokus Program PD	Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap meliputi pemberian perahu dan sarana alat tangkap maupun alat bantu penangkapan ikan	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya meliputi penyediaan benih, pakan,wadah budidaya dan sarana budidaya lainnya serta pembangunan atau rehabilitasi jalan produksi dan noramalisasi saluran air tersier	
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Hasil Olahan Perikanan melalui pembinaan dan pendampingan usaha pengolahan ikan serta sarana prasarana pengolahan melalui fasilitasi pelatihan diversifikasi olahan hasil perikanan, fasilitasi NIB dan sertifikat Halal serta pemasaran digital dan pemberian bantuan sarana coolbox, chest freezer, keranjang basket,serta Blong	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan Ketersediaan Air Baku dan Jaringan Irigasi	Dinas PU Sumberdaya Air
6	**Young Enterpreneur Success**	Untuk perluasan kesempatan kerja dan menumbuhkan minat generasi muda terhadap penciptaan lapangan kerja (wirausaha baru)	Program Penempatan Tenaga Kerja	Peningkatan Kesempatan Kerja melalui Job Market Fair Offline dan Online	Dinas Tenaga Kerja
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Kapasitas melalui Pelatihan	
			Program Pengembangan UMKM	Megpreneur	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
7	**UMKM Naik Kelas**	Memberikan pembinaan dan pendampingan serta perluasan akses	Program Pengembangan UMKM	Megpreneur	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Program Politis Kepala Daerah	Fokus Program Politis	Program Nomenklatur	Fokus Program PD	Perangkat Daerah
		permodalan dan pasar kepada pelaku UMKM dan IKM sehingga dapat bersaing dan naik kelas. Menjaga keamanan dan kenyamanan pasar maupun sentra. Penguatan Koperasi melalui transformasi digital dan peningkatan kapasitas penyelenggara agar menjadi koperasi yang berkualitas.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Penyelenggaraan SKKNI (Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) bagi pengurus koperasi	
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyelenggaraan pembinaan, pelatihan bagi IKM, serta pemberian bantuan alat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pembangunan *co-working space*	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Penataan PKL, pembinaan terhadap pedagang, peningkatan sarana perdagangan (pasar).	
8	**Pariwisata Rama dan Terintegrasi (RAMASINTA)**	Mengintegrasikan potensi alam dan budaya Lamongan kedalam sektor pariwisata, menjaga kelestarian budaya. Meningkatkan promosi melalui festival agar dapat menumbuhkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	Program Pengembangan Kebudayaan	Melaksanakan Festival Budaya Kupatan Tanjung Kodok dan festival budaya lainnya, Pengiriman duta seni ke TMII, Hari Jadi Lamongan (kirab budaya, pasamuan agung, pagelaran budaya), pengembangan balai seni dan budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pembukaan museum daerah, pemeliharaan cagar budaya dan ODCB (Obyek Diduga Cagar Budaya), dan pemeliharaan makam bersejarah	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengembangan atraksi wisata (wisata terintegrasi), pengembangan sarana dan prasarana pariwisata	
			Program Pemasaran Pariwisata	Melaksanakan dan mengikuti even atau festival pariwisata di tingkat Provinsi dan Nasional	
			Program Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pembinaan SDM Pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif	

No	Program Politis Kepala Daerah	Fokus Program Politis	Program Nomenklatur	Fokus Program PD	Perangkat Daerah
9	**Lamongan Sehat**	Peningkatan kesehatan masyarakat secara holistik mulai dari kandungan sampai lansia, termasuk dalam penanganan stunting. Memperluas akses layanan Kesehatan dengan ketersediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta layanan kunjungan kerumah.	Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	Posyandu Siklus Hidup, melayani masyarakat mulai dari bayi hingga lansia	Dinas Kesehatan
			Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1. Jaminan kesehatan masyarakat 2. Laserku (Lamongan Sehat Sejahtera dengan Kunjungan Rumah) keluarga miskin yang tidak terdaftar PBI 3. Cek Kesehatan Gratis	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standart	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Memaksimalkan Peran POKTAN/Kelompok Kegiatan (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina keluara Lansia, Pusat Informasi Konseling Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor dalam Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	**Pendidikan Berkualitas dan Gratis Bagi Keluarga Kurang Sejahtera (PERINTIS)**	Pionir dalam menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua melalui peningkatan ketersediaan sarana prasarana dan kualitas pendidik. Perluasan akses beasiswa untuk memastikan tidak boleh ada masyarakat yang tidak bisa mengenyam pendidikan karena keterbatasan biaya.	Program Pengelolaan Pendidikan	Beasiswa untuk masyarakat Kab. Lamongan dari SD hingga S2	Dinas Pendidikan
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Beasiswa untuk guru dan tenaga kependidikan terutama untuk sekolah inklusi untuk jenjang S1	
11	**Lamongan Generasi Emas**	Membentuk generasi pemuda yang unggul melalui pembinaan, pengembangan karakter, dan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pelaksanaan Bupati Cup	Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Program Politis Kepala Daerah	Fokus Program Politis	Program Nomenklatur	Fokus Program PD	Perangkat Daerah
		potensi individu (atlet dan pelaku kreatif) sehingga dapat menjadi tulang punggung pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pembinaan pemuda pelopor dan wirausaha pemula	
12	**Yakin Semua Sejahtera**	Untuk menciptakan rasa yakin bahwa setiap warga Lamongan dapat mencapai taraf sejahtera melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan. Pemerintah Daerah ingin memastikan tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan sosial dan ekonomi.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemberian modal usaha pada KRTP	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Bantuan permakaman pada lansia dan Peretas (Perlindungan dan pemenuhan hak Disabilitas) pemberian pelatihan usaha disabilitas	
13	**Lamongan Nyantri**	Merawat nilai-nilai kesalehan sosial agar dapat mempertahakankan budaya yang beradab dan berakhlakul karimah bagi generasi masa depan melalui syiar agama dan peningkatan minat baca literatur serta Alqur'an	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi terkait bina mental spritiual dan kesejahteraan sosial	Sekretariat Daerah
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pendukung data peserta didik dan tahfidz Al Qur`an	Dinas Pendidikan
14	**Transformasi Digital Pelayanan Publik**	Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan aksesibilitas pelayanan publik bagi masyarakat melalui digitalisasi. Menjaga status Lamongan sebagai kabupaten ramah investasi.	Program Aplikasi Informatika	Optimalisasi Pelayanan Publik yang Efisien melalui Integrasi Aplikasi Pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyediaan Data yang Akurat dan Andal untuk Pelayanan Publik yang Efektif	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan digitalisasi layanan perijinan berbasis applikasi MPP Digital Nasional	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal	Peningkatan Minat Investasi melalui Upaya Penyediaan Informasi Peluang Investasi	
			Program Pendaftaran Penduduk	Pengajuan online administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui *platform digital*	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil		

No	Program Politis Kepala Daerah	Fokus Program Politis	Program Nomenklatur	Fokus Program PD	Perangkat Daerah
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan Koordinasi terkait Layanan Publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Fasilitasi dan koordinasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah	Fasilitasi dan koordinasi riset dan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Kepegawaian Daerah	Integrasi sistem informasi kepegawaian dengan data pengembangan karir melalui pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan SDM
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Layanan Digitalisasi melalui Aplikasi E-Pendapatan (pajak dan retribusi), Pemetaan Potensi Pajak Daerah melalui Satelit (GIS)	Badan Pendapatan Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Pelayanan Digitalisasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Identifikasi risiko pemerintah daerah melalui aplikasi Si Mario	Inspektorat
				Pengaduan *Wistle Blowing System* dan pelaporan budaya anti korupsi melalui aplikasi lapor WBS	Inspektorat
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindak lanjut hasil pengawasan APIP melalui aplikasi SIDAKLamong	Inspektorat
15	**Desa Pintar**	Untuk mendorong aparatur desa yang inovatif agar desa bisa menjadi pusat	Program Penataan Desa	Penataan dan penegasan batas wilayah dan digitalisasi peta wilayah desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

No	Program Politis Kepala Daerah	Fokus Program Politis	Program Nomenklatur	Fokus Program PD	Perangkat Daerah
		pertumbuhan ekonomi yang berbasis teknologi, potensi unggulan dan koperasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.	Program Peningkatan Kerja sama Desa	Pengembangan unit usaha BUMDesa bersama	dan Desa
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Badan Hukum BUMDesa, Pengembangan unit usaha BUMDesa dan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Desa	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Mendukung melalui perpustakaan keliling ke desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sumber: Data Diolah, 2025

Adapun, apabila dirunut secara lebih komprehensif, keseluruhan janji politik Kepala Daerah terpilih beserta perincian atau *breakdown outcome* kinerjanya sesuai dengan misi, tujuan, sasaran, dituangkan dalam matriks Program Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3-5 Program Pembangunan Daerah Tahun 2026-2030

Penyesuaian nomenklatur PD baru dan indikator kinerja yang baru

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Urusan	Perangkat Daerah
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan	Pertumbuhan Ekonomi yang Akseleratif dan Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah	Meningkatnya Daya Tarik Wisata Daerah	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Dipromosikan	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata yang dipromosikan	Program Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	
			Meningkatnya Kapasitas SDM dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata	
		Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan	Meningkatnya Kualitas Sarana Peternakan	Persentase Sarana Peternakan dalam Kondisi Baik	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Meningkatnya Kualitas Prasarana Peternakan	Persentase Prasarana Peternakan dalam Kondisi Baik	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Meningkatnya Keamanan Pangan Asal Hewan	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV (Nomor Kontrol Veteriner)			
			Meningkatnya Usaha Peternakan yang	Persentase Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan	Program Perizinan Usaha Pertanian	Pertanian	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Urusan	Perangkat Daerah
			berizin				
			Meningkatnya Kapasitas SDM Peternakan dan Kelembagaan Kelompok	1. Persentase SDM Peternak yang Meningkat Kapasitasnya	Program Penyuluhan Pertanian	Pertanian	
				2. Persentase Kelembagaan Kelompok yang Meningkat Kapasitasnya			
			Meningkatnya Jaminan Usaha Peternakan	Persentase Keikutsertaan Asuransi Ternak	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Persentase tingkat pemanfaatan sarana produksi pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Persentase tingkat pemenuhan prasarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian	
			Terkendalinya Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim	Persentase serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim yang ditangani	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pertanian	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	1. Persentase SDM Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya	Program Penyuluhan Pertanian	Pertanian	
				2. Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya			

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Urusan	Perangkat Daerah
			Terkelolanya Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Pangan	
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Neraca Bahan Makanan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	
			Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Jumlah Ikan yang Diolah	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelautan dan Perikanan	
			Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Penyediaan Air Baku dan Irigasi	Persentase Ketersediaan Air Baku	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
				Persentase Panjang Jaringan Irigasi Berkondisi Baik			
				Luas Area Bebas Genangan Banjir			

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Urusan	Perangkat Daerah
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Merata	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Dikembangkan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Program Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Perdagangan	
			Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor Barang	Program Pengembangan Ekspor	Perdagangan	
			Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase peningkatan jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Perdagangan	
			Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan omset produk lokal	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Perdagangan	
			Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Koperasi dan UM	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Koperasi dan UM	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Urusan	Perangkat Daerah
			Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Koperasi dan UM	
			Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Koperasi dan UM	
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Aset Usahanya	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Koperasi dan UM	
			Meningkatnya Legalitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha	Program Penguatan Badan Hukum Koperasi	Koperasi dan UM	
			Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Koperasi dan UM	
			Meningkatnya Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	Program Pengembangan UMKM	Koperasi dan UM	
			Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah	Persentase Peningkatan Industri Kecil dan Menengah	Program perencanaan dan Pembangunan industri	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya Jumlah IKM Formal	Persentase Pertumbuhan IKM Formal	Program pengendalian izin usaha industri kab/kota	Perindustrian	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Persentase data IKM yang masuk dalam SINAS	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Perindustrian	
		Meningkatnya Realisasi Investasi	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Persentase Peningkatan Minat Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Urusan	Perangkat Daerah
			Meningkatnya Minat Investasi	Persentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	Program Promosi Penanaman Modal	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Pengendalian Perusahaan yang Berinvestasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penaaman Modal	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Prosentase Data Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu pada Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Persentase tingkat produktifitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi	Persentase perusahaan yang menerapkan UU bidang ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Urusan	Perangkat Daerah
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Prosentase Kerjasama Antar Desa yang Berjalan dengan Baik	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Tata Kelola Administrasi Desa yang Tertib	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berahklak dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Meningkatnya pastisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun			
				Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-18 tahun Pndidikan Kesetaraan			
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Prosentase sekolah yang mengimplementasikan kurikulum muatan lokal	Program Pengembangan Kurikulum	Pendidikan	Dinas Pendidikan

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Urusan	Perangkat Daerah
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Prosentase guru PAUD, SD dan SMP Berkualifikasi pendidikan minimal S1/D4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standart Nasional Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memenuhi Standar Kompetensi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minuman Yang Sesuai Standar	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	Persentase Fasyankes Sesuai Standar Akreditasi	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Urusan	Perangkat Daerah
			Meningkatnya Pengandalian Penduduk	Prosentase Data Informasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) yang tersedia akurat dan tepat waktu	Program Pengendalian Penduduk	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana	Presentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Meningkatkan Ketahanan keluarga Sejahtera	Presentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Sosial kemasyarakatan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlit Berprestasi	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berkelanjutan	Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Merata	Menigkatnya Kualitas Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Konektivitas Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			Meningkatnya aksesibiltas Jalan dan Jembatan yang nyaman dan aman	Presentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
			Meningkatnya Kemantapan Jalan Kewenangan Kabupaten	Presentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap			

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Urusan	Perangkat Daerah
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Tersedia	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Kepatuhan PBG	Program Penataan Bangunan Gedung	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
			Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Urusan	Perangkat Daerah
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Santunan Atas Kerugian Tanah Untuk Pembangunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
			Meningkatnya Penyelesaian Tanah Kosong	Persentase Penyelesaian Tanah Kosong	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
			Meningkatnya Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kabupaten/ Kota Yang Ditangani	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 ha Di Kab/Kota Yang Ditangani	Program Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
			Meningkatnya Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Prosentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh		
			Meningkatnya Pemenuhan Rumah Korban Bencana	Persentase Pemenuhan Rumah Korban Bencana	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
			Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan dan Permukiman	Persentase Jalan Perumahan Permukiman Dalam Kondisi Baik	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Meningkatnya presentase pemenuhan	Presentase Mutu Lingkungan (air dan udara dalam kondisi	Program Pengendalian Pencemaran	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Urusan	Perangkat Daerah
		Hidup	kualitas air dan udara	baik)	Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
			Meningkatnya presentase tutupan lahan	Persentase Ketersediaan RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Program Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)			
				Presentase pengurangan sampah			
			Meningkatnya presentase limbah B3 yang terkelola	Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah B3 dalam 1 tahun	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan, Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, dan Pasca Bencana.	Persentase Penanggulangan Bencana	program penanggulangan bencana	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perlindungan	Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase PSKS Yang Meningkat Kapasitasnya	Program pemberdayaan sosial	Sosial	Dinas Sosial

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Urusan	Perangkat Daerah
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ditengah Kehidupan Masyarakat yang Religius, Harmoni, Berbudaya dan Partisipatif Dalam Pembangunan	Kesejahteraan Sosial yang Merata dan Stabilitas Wilayah Berbasis Kearifan Lokal Meningkat	Sosial	Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Pelayanan dan Direhabilitasi	Program rehabilitasi sosial	Sosial	Dinas Sosial
			Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS Yang Terlayani Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial	Sosial	Dinas Sosial
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan masyarakat		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Dinas PPPA
			Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Persentase forum anak yang terbentuk	Program Pemenuhan Hak Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Dinas PPPA
			Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Khusus Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Dinas PPPA
			Meningkatnya Kualitas Sarana Peternakan	Persentase Sarana Peternakan dalam Kondisi Baik	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Program Penyediaan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pertanian	
			Meningkatnya Keamanan Pangan Asal Hewan	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV (Nomor Kontrol Veteriner)		Pertanian	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Urusan	Perangkat Daerah
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan,	Dinas Perikanan
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan,	
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	Program Pengawasan Sumberdaya Keluatan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan,	
			Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Jumlah Ikan yang Diolah	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelautan dan Perikanan,	
			Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Program Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Penyediaan Air Baku dan Irigasi	Persentase Ketersediaan Air Baku	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Persentase Jaringan Irigasi			
				Luas Area Bebas Genangan Banjir			
		Meningkatnya Solidaritas Masyarakat	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	Program Penanganan Bencana	Sosial	Dinas Sosial

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Urusan	Perangkat Daerah
			Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Sosial	Dinas Sosial
		Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	Program Pengembangan Kebudayaan	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Kebudayaan	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kebudayaan	
			Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Program Pengelolaan Permuseuman	Kebudayaan	
		Meningkatnya stabilitas kewilayahan untuk kerukunan masyarakat	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelesaian pelanggaran gangguan trantibum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati			
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
				Persentase kejadian non kebakaran yang tertangani			

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Urusan	Perangkat Daerah
		Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Terkendalinya Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Bakesbangpol
			Meningkatnya Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasiladan Karakter Kebangsaan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Bakesbangpol
			Terciptanya Kerukunan Sosial, Agama dan Budaya	Persentase Peningkatan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Bakesbangpol
			Terkendalinya Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Bakesbangpol
Mewujudkan Reformasi Birokasi yang Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif	Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Berdampak Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Program Pendaftaran Penduduk	Kependudukan dan Catatan Sipil	Disdukcapil
				Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)			
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Program Pencatatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Disdukcapil
				Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan			

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Urusan	Perangkat Daerah
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Jumlah Titik pemanfaatan Informasi Kependudukan yang ditingkatkan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	Disdukcapil
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Jumlah Perizinan yang Diterbitkan dalam Satu Tahun	Program Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
			Meningkatnya tata kelola arsip statis dan dinamis	Persentase Pengelolaan Arsip Sesuai NSPK	Program Pengelolaan Arsip	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinator Kewilayahan	Kecamatan
		Meningkatnya Digitalisasi Tata kelola Pemerintah Daerah	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas Informasi publik Pemerintah Daerah	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Pembangunan Aplikasi yang sesuai dengan Roadmap SPBE	Program Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Tercapainya integrasi, dalam penyelenggaraan	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang dilengkapi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Urusan	Perangkat Daerah
			Sistem Statistik Nasional (SSN)	Metadata			
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Keamanan Informasi yang Dilindungi oleh Sistem Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Program Kepegawaian Daerah	Kepegawaian	BKPSDM
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN jabatan fungsional yang meningkat kompetensinya			
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya			
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik			
			Meningkatnya layanan pengembagan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDM
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial, dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial, dan fungsional			

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Urusan	Perangkat Daerah
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Tepat Waktu	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan	BAPPELITBANGDA
			Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan Sektoral	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Selaras dan Berorientasi Hasil	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	BAPPELITBANGDA
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Pelaksanaan Penganggran APBD yang tepat waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standar daerah		Keuangan	
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase ketepatan laporan keuangan		Keuangan	
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang di susun secara tertib Administrasi, Fisik, dan Hukum	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keuangan	
			Meningkatnya Wajib Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Wajib Pajak	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah
			Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Capaian Pajak Daerah		Keuangan	
			Meningkatnya Realisasi Retribusi dan PAD Lainnya	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya		Keuangan	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Urusan	Perangkat Daerah
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase rekomendasi laporan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan	Inspektorat
				Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP			
				Persentase rekomendasi laporan hasil pengawasan BPK yang ditindaklanjuti			Inspektorat
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Penilaian mandiri Maturitas Penyenggaraan SPIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pengawasan	Inspektorat
			Terkelolanya Perangkat Daerah Sesuai Aturan	Persentase Perangkat Daerah yang Ditata Sesuai Dengan Aturan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang Pemerintahan	Sekretariat Daerah

Sumber: Data Diolah, 2025

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2030 DALAM MENCAPAI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mencapai visi “Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan” sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD 2025–2030, Pemerintah Daerah telah menyusun daftar program perangkat daerah secara sistematis dan terintegrasi. Setiap program dirancang untuk menjadi instrumen pencapaian misi pembangunan daerah yang mencakup penguatan ekonomi lokal, pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta pelestarian nilai-nilai sosial dan budaya.

Indikasi rencana program Pemerintah Daerah berisi seluruh program pada perangkat daerah yang terbagi dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan agar setiap urusan dapat diselenggarakan setiap tahun selama masa periode RPJMD 2025-2029 yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengakselerasi pencapaian tujuan dan sasaran. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan untuk penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPJMD, maka perlu dialokasikan anggaran atau kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra, RKPD dan Renja perangkat daerah. Untuk memastikan bahwa program pembangunan daerah dapat didanai dengan baik, perlu memperhatikan pula kapasitas riil Kabupaten Lamongan. Idealnya kapasitas riil suatu daerah harus mampu memenuhi kebutuhan program pembangunan (belanja langsung) dalam kerangka pendanaan.

Selanjutnya pada tabel berikut ini akan dijabarkan seluruh program pembangunan beserta kerangka pendanaan berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan pada setiap perangkat daerah:

Tabel 4-1 Program Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2030

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN BIDANG PENDIDIKAN													Dinas Pendidikan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	86.64	86.90	754,065,414,227	87.16	757,640,192,176	87.42	761,393,709,020	87.68	765,334,901,713	87.95	769,473,154,040	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun	99.98%	99.98	188,981,870,895	99.98	189,877,772,248	99.98	190,818,468,668	99.98	191,806,199,911	99.99	192,843,317,716	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun	99.99%	99.99		99.99		99.99		99.99		99.99		Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-18 tahun Pndidikan Kesetaraan	11.56%	11.6		11.62		11.63		11.64		11.65		Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah Usia 5 - 6 tahun	84.93%	84.94		84.95		84.96		84.97		85.00		Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah Yang Mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100	13,449,520	100	13,513,280	100	13,580,228	100	13,650,523	100	13,724,333	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru PAUD, SD, SMP Berkualifikasi Pendidikan Minimal S1/D4	89.77%	90.00	316,490,733	90.05	317,991,112	90.15	319,566,511	90.20	321,220,679	90.25	322,957,555	Dinas Pendidikan
URUSAN BIDANG KESEHATAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	85.08	85.51	491,314,453,802	85.93	493,643,615,228	86.36	496,089,234,724	86.79	498,657,135,199	87.23	501,353,430,697	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Standar Pelayanan Minimal (SPM)	86.5	87.5	209,618,990,676	88	210,612,725,877	88.5	211,656,147,837	89	212,751,740,896	89.5	213,902,113,609	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memenuhi Standar Kompetensi	100	100	826,773,768	100	830,693,232	100	834,808,670	100	839,129,880	100	843,667,150	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minuman Yang Sesuai Standar	65	65.5	446,807,871	66	448,926,041	66.5	451,150,120	67	453,485,403	67.5	455,937,450	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang aktif	52	52.5	3,828,899,935	53	3,847,051,500	53.5	3,866,110,642	54	3,886,122,742	54.5	3,907,135,447	Dinas Kesehatan
URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	91.19	91.28	6,989,452,915	91.37	7,022,587,629	91.46	7,057,379,079	91.56	7,093,910,102	91.65	7,132,267,676	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	55.14	65.18	88,922,894,386	69.53	89,344,448,797	73.42	89,787,080,929	77.17	90,251,844,668	80.00	90,739,846,595	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
	Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan	88.22	88.31		88.40		88.48		88.57		88.66		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	86.12	86.38	9,992,411,758	86.64	10,039,782,520	86.90	10,089,521,820	87.16	10,141,748,085	87.42	10,196,585,663	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Ketersediaan Air Baku	81.53	82.03	75,130,593,900	82.53	75,486,763,517	83.03	75,860,741,616	83.53	76,253,418,620	84.03	76,665,729,474	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
	Persentase Jaringan Irigasi	74.08	75.08		76.08		77.08		78.08		79.08		Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
	Luas Area Bebas Genangan Banjir	30.58	31.08		31.58		32.08		32.58		33.08		Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Yang Terlayani SPAM	55.71	56.28	1,446,657,013	56.61	1,453,515,142	56.94	1,460,716,177	57.27	1,468,277,264	57.6	1,476,216,405	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Tersedia	73.33	50	1,893,143,352	55.36	1,902,118,127	60.71	1,911,541,640	66%	1,921,436,329	71.43%	1,931,825,753	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	72.42	72.52	4,556,806,400	72.57	4,578,408,731	72.62	4,601,091,179	72.66	4,624,907,750	72.71	4,649,915,149	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	51.33	55.7	1,081,806,120	57.89	1,086,934,609	60.71	1,092,319,523	66.07	1,097,973,683	71.43	1,103,910,551	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB	50	55.36	7,494,136,912	60.71	7,529,664,168	66.07	7,566,967,787	71.43	7,606,136,588	68.76	7,647,263,828	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	5.13	5.33	7,674,812,095	5.53	7,711,195,874	5.73	7,749,398,841	5.93	7,789,511,957	6.13	7,831,630,729	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	79.86	80.86	45,050,245	81.86	45,263,813	82.86	45,488,060	83.86	45,723,520	85	45,970,752	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang	77.45	77.95	729,230,848	78.45	732,687,893	78.95	736,317,791	79.45	740,129,183	79.95	744,131,145	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	83.21	83.29	7,525,745,338	83.38	7,561,422,440	83.46	7,598,883,396	83.54	7,638,217,401	83.63	7,679,518,106	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pemenuhan Rumah Korban Bencana	61.29	62.29	425,734,337	63.29	427,752,605	64.29	429,871,786	65.29	432,096,926	66.29	434,433,323	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 ha Di Kab/Kota Yang Ditangani	70.46	70.79	1,756,863,613	71.29	1,765,192,330	71.79	1,773,937,482	72.29	1,783,119,893	72.79	1,792,761,423	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase Rumah Layak Huni	70.77	71.8		72.8		73.8		74.8		75.8		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Rumah Yang Sudah Dilengkapi PSU (Jalan Lingkungan)	69.3	70.3	66,418,520,266	71.3	66,733,388,787	72.3	67,064,000,733	73.3	67,411,143,278	74.3	67,775,642,950	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	Persentase Rumah Yang Sudah Dilengkapi PSU (Drainase Lingkungan)	58.62	59.62		60.62		61.62		62.62		63.62		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
URUSAN BIDANG PERTANAHAN													
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	100	66,011,460	100	66,324,399	100	66,652,985	100	66,998,000	100	67,360,266	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian santunan atas kerugian tanah untuk pembangunan	100	100	10,000,000	100	10,047,407	100	10,097,184	100	10,149,450	100	10,204,329	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
URUSAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	88	88.44	15,190,845,897	88.88	15,262,860,738	89.33	15,338,476,321	89.77	15,417,872,684	90.22	15,501,238,864	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran gangguan trantibum	100	100	3,070,227,613	100	3,084,782,559	100	3,100,065,253	100	3,116,112,082	100	3,132,961,253	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100	100	38,774,824	100	38,958,642	100	39,151,652	100	39,354,312	100	39,567,105	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase kejadian non kebakaran yang tertangani	100	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	86.05	86.31	3,501,701,005	86.57	3,518,301,426	86.83	3,535,731,869	87.09	3,554,033,833	87.35	3,573,250,896	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	100	100	359,774,667	100	361,480,241	100	363,271,094	100	365,151,490	100	367,125,905	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
URUSAN BIDANG SOSIAL													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	84.48	84.90	4,465,362,359	85.33	4,486,531,184	85.75	4,508,758,451	86.18	4,532,097,080	86.61	4,556,602,642	Dinas Sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Yang Meningkat Kapasitasnya	80	82	3,223,297,241	83	3,238,577,841	84	3,254,622,471	85	3,271,469,332	86	3,289,158,537	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Korban Tindak Kekerasan Yang Tertangani	100%	100%	10,014,237	100%	10,061,711	100%	10,111,559	100%	10,163,899	100%	10,218,856	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Pelayanan dan Direhabilitasi	100	100	243,004,964	100	244,156,971	100	245,366,578	100	246,636,666	100	247,970,259	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS Yang Terlayani Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	100	12,991,040,173	100	13,052,626,453	100	13,117,292,047	100	13,185,190,922	100	13,256,484,739	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	100	100	107,472,787	100	107,982,280	100	108,517,248	100	109,078,965	100	109,668,767	Dinas Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan Dalam Kondisi Baik	1	1	172,719,544	1	173,538,351	1	174,398,098	1	175,300,833	1	176,248,704	Dinas Sosial
URUSAN BIDANG TENAGA KERJA													

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	87.63	87.89	5,782,349,192	88.16	5,809,761,422	88.42	5,838,544,263	88.69	5,868,766,247	88.95	5,900,499,329	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja	87.70	87.73	7,391,007	87.74	7,426,046	87.75	7,462,836	87.76	7,501,466	87.77	7,542,027	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3.17	3.20	1,063,250,250	3.22	1,068,290,772	3.24	1,073,583,321	3.26	1,079,140,497	3.28	1,084,975,531	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase tingkat produktifitas tenaga kerja	40.62	40.64		40.66		40.68		40.70		40.73		Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	75.15	76.08	211,442,794	76.11	212,445,175	76.14	213,497,675	76.16	214,602,801	76.19	215,763,182	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan UU bidang ketenagakerjaan	65.65	65.68	2,873,356,454	65.71	2,886,978,099	65.75	2,901,280,826	65.78	2,916,298,690	65.81	2,932,067,446	Dinas Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	67.19	67.22	25,066,535	67.24	25,185,368	67	25,310,142	67	25,441,154	67	25,578,717	Dinas Tenaga Kerja
URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	89.68	89.95	3,537,276,078	90.22	3,554,045,149	90.49	3,571,652,674	90.76	3,590,140,575	91.03	3,609,552,871	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	31.46	32.46	135,514,652	33.46	136,157,083	34.46	136,831,635	35.46	137,539,915	36.46	138,283,609	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	83,421,394	100%	83,816,868	100%	84,232,115	100%	84,668,125	100%	85,125,935	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pembelajaran keluarga yang berprespektif gender	0	20	16,695,134	74	16,774,281	60	16,857,384	80	16,944,643	100	17,036,264	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan,evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	0	100	18,860,613	60	18,950,025	100	19,043,907	100	19,142,484	100	19,245,990	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Forum Anak Yang Terbentuk	16.88%	20.04%	243,850,966	23.21%	245,006,984	26.37%	246,220,803	29.54%	247,495,312	32.70%	248,833,548	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	134,240,440	100%	134,876,831	100%	135,545,040	100%	136,246,660	100%	136,983,361	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN BIDANG PANGAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	85.59	86.02	26,839,716,971	86.45	26,966,955,307	86.88	27,100,555,559	87.31	27,240,835,825	87.75	27,388,130,103	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	jumlah lumbung pangan yang meningkat statusnya	61	62	99,264,618	63	99,735,199	64	100,229,309	65	100,748,125	66	101,292,881	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	persentase ketersediaan cadangan pangan (beras)	21.5	22	486,190,183	22.5	488,495,052	23	490,915,165	23.5	493,456,283	24	496,124,457	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	77.81%	77.82%	9,025,731	77.83%	9,068,519	77.85%	9,113,447	77.90%	9,160,621	78.00%	9,210,153	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	85.51	85.94	18,341,362,765	86.37	18,428,313,178	86.80	18,519,611,112	87.23	18,615,473,942	87.67	18,716,129,914	Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Dipenuhi	100%	100%	50,071,183	100%	50,308,554	100%	50,557,794	100%	50,819,495	100%	51,094,282	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase Pemenuhan Kualitas Air	92.50%	92.59%	154,700,227	92.69%	155,433,610	92.78%	156,203,662	92.87%	157,012,217	92.96%	157,861,200	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Pemenuhan Kualitas Udara	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tutupan Lahan	41.50	41.58	514,304,351	41.67	516,742,500	41.75	519,302,557	41.83	521,990,616	41.92	524,813,078	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah kegiatan atau usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan LB3	24	26	7,943,192	29	7,980,848	32	8,020,387	35	8,061,903	39	8,105,495	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	64.00	67.20	80,545,506	68.54	80,927,346	69.91	81,328,278	71.31	81,749,256	72.74	82,191,284	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Wilayah Yang Peduli dan Berwawasan Lingkungan	70.00%	71.40%	104,954,707	72.83%	105,452,263	74.28%	105,974,697	75.77%	106,523,252	77.29%	107,099,235	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan	24.14%	24.86%	44,304,084	25.61%	44,514,115	26.38%	44,734,648	27.17%	44,966,207	27.98%	45,209,345	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Perusahaan Yang Memenuhi Semua Aspek Yang Dipersyaratkan KLHK	88.00%	88.88%		89.77%		90.67%		91.57%		92.49%		
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Masyakarat Terkait Persetujuan Lingkunga Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten	100%	100%	18,440,015	100%	18,527,433	100%	18,619,222	100%	18,715,600	100%	18,816,798	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase tingkat pelayanan persampahan	68.05%	68.59%	2,147,109,198	69.14%	2,157,287,942	69.70%	2,167,975,623	70.25%	2,179,197,688	70.82%	2,190,980,856	Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	87.02	87.28	7,060,929,750	87.54	7,094,403,312	87.81	7,129,550,553	88.07	7,166,455,156	88.33	7,205,204,989	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	-	15.00	84,409,299	15.10	84,809,456	15.20	85,229,621	15.30	85,670,794	15.40	86,134,025	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)	64.73	64.75		64.77		64.8		64.83		64.86		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	98.92	98.93	95,941,393	98.94	96,396,220	98.95	96,873,788	98.96	97,375,235	98.97	97,901,754	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Titik pemanfaatan Informasi Kependudukan yang ditingkatkan	29 titik	29 titik	201,124,725	29 titik	202,078,192	29 titik	203,079,332	29 titik	204,130,529	29 titik	205,234,286	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Buku Profil Kependudukan dan Baliho Yang Tersedia	100%	100%	5,475,885	100%	5,501,844	100%	5,529,101	100%	5,557,722	100%	5,587,773	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.01	82.42	5,503,302,688	82.83	5,529,392,049	83.25	5,556,785,879	83.66	5,585,549,400	84.08	5,615,751,097	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Tertata dengan Baik	81	86	28,098,646	87	28,231,852	88	28,371,719	89	28,518,579	90	28,672,783	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama Antar Desa yang Berjalan dengan Baik	96.15	100	16,856,564	100	16,936,475	100	17,020,382	100	17,108,485	100	17,200,992	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tata Kelola Administrasi Desa yang Tertib	100	100	5,639,527,010	100	5,666,262,166	100	5,694,334,080	100	5,723,809,590	100	5,754,758,876	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	96	100	426,279,412	100	428,300,264	100	430,422,158	100	432,650,147	100	434,989,535	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
URUSAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	85.02	85.45	5,729,040,678	85.87	5,756,200,190	86.30	5,784,717,677	86.73	5,814,661,038	87.17	5,846,101,568	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Data Informasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) yang tersedia Akurat dan Tepat Waktu	100	100	800,586,639	100	804,381,959	100	808,367,045	100	812,551,385	100	816,944,942	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10.13	10.14	9,556,907,401	10.15	9,602,213,579	10.16	9,649,785,066	10.17	9,699,735,127	10.18	9,752,182,692	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	61.16	61.20	7,109,728,414	61.50	7,143,433,316	62.10	7,178,823,462	63.20	7,215,983,116	64.30	7,255,000,752	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	80.08	80.48	12,889,278,971	80.88	12,950,382,835	81.29	13,014,541,891	81.69	13,081,908,901	82.10	13,152,644,261	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks LLAJ	96.85	96.95	26,667,044,031	97.05	26,793,463,781	97.20	26,926,204,518	97.35	27,065,582,292	97.50	27,211,928,955	Dinas Perhubungan
URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	84.51	84.93	5,414,848,519	85.36	5,440,518,548	85.78	5,467,472,079	86.21	5,495,773,286	86.64	5,525,489,553	Dinas Komunikasi Dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Informasi Publik	37.52	45	3,187,899,519	55	3,203,012,309	65	3,218,880,740	75	3,235,542,592	85	3,253,037,536	Dinas Komunikasi Dan Informatika

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Terintegrasi	45.24	65	3,889,237,563	75	3,907,675,168	85	3,927,034,654	95	3,947,362,114	100	3,968,705,948	Dinas Komunikasi Dan Informatika
URUSAN BIDANG STATISTIK													
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pembangunan daerah	100	100	181,203,104	100	182,062,129	100	182,964,105	100	183,911,180	100	184,905,608	Dinas Komunikasi Dan Informatika
URUSAN BIDANG PERSANDIAN													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi	25.62	40	111,896,576	45	112,427,041	50	112,984,029	55	113,568,867	60	114,182,947	Dinas Komunikasi Dan Informatika
URUSAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	86.2	86.46	5,088,971,311	86.72	5,113,096,463	86.98	5,138,427,872	87.24	5,165,025,852	87.50	5,192,953,730	Dinas Koperasi Dan UM
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitasi Perizinan koperasi	70.5	100	59,227,199	100	59,507,976	100	59,802,792	100	60,112,348	100	60,437,382	Dinas Koperasi Dan UM
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	1.3	20	227,283,113	22	228,360,588	24	229,491,937	26	230,679,853	28	231,927,165	Dinas Koperasi Dan UM
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang sehat	10	23	116,284,514	25	116,835,781	27	117,414,611	29	118,022,383	31	118,660,543	Dinas Koperasi Dan UM
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang bersertifikat	16	16.5	10,000,000	17	10,047,407	17.5	10,097,184	18	10,149,450	18.5	10,204,329	Dinas Koperasi Dan UM
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pembiayaan	5	6	86,458,813	7	86,868,686	8	87,299,052	9	87,750,937	10	88,225,416	Dinas Koperasi Dan UM

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang meningkat omzet usahanya	52	56	700,996,559	58	704,319,755	60	707,809,110	62	711,472,934	64	715,319,948	Dinas Koperasi Dan UM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase penumbuhan usaha mikro	2	2.5	716,032,150	3	719,426,625	3.5	722,990,823	4	726,733,232	4.5	730,662,760	Dinas Koperasi Dan UM
URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	89.08	89.35	4,547,510,079	89.62	4,569,068,340	89.88	4,591,704,513	90.15	4,615,472,496	90.42	4,640,428,877	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi	22.18	25.18	14,059,988	30.38	14,126,642	35.58	14,196,628	40.78	14,270,114	45.98	14,347,274	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	99.36	99.41	53,375,881	99.46	53,628,918	99.51	53,894,608	99.56	54,173,582	99.61	54,466,505	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan yang Diterbitkan dalam Satu Tahun	31,491	3,240	201,890,914	3,450	202,848,013	3,660	203,852,967	3,870	204,908,169	4,080	206,016,130	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Pengendalian Perusahaan Yang Berinvestasi	83.22	67.53	134,779,106	68.53	135,418,050	69.53	136,088,941	70.53	136,793,376	71.53	137,533,034	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Data Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola	58	2.5	10,582,544	3	10,632,713	3.5	10,685,390	4	10,740,700	4.5	10,798,777	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	83.34	83.76	6,046,083,684	84.18	6,074,746,193	84.60	6,104,841,827	85.02	6,136,442,243	85.44	6,169,622,680	Dinas Pemuda Dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Prosentase Partisipasi Pemuda dalam Sosial kemasyarakatan	N/A	12	564,258,668	14	566,933,634	15	569,742,349	17	572,691,499	19	575,788,106	Dinas Pemuda Dan Olahraga

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlit Berprestasi	32	36	9,500,274,440	39	9,545,312,140	42	9,592,601,724	45	9,642,255,788	48	9,694,392,555	Dinas Pemuda Dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kwaran yang Meningkat Kapasitasnya	75	80	200,284,731	81	201,234,216	82	202,231,174	83	203,277,981	84	204,377,128	Dinas Pemuda Dan Olahraga
URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	85.35	85.78	6,850,459,594	86.21	6,882,935,386	86.64	6,917,034,968	87.07	6,952,839,529	87.51	6,990,434,319	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Prosentase Peningkatan Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	3.96	4.25	361,953,064	4.5	363,668,965	4.75	365,470,662	5	367,362,443	5.25	369,348,813	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Prosentase Koleksi Daerah dan Naskah Kuno Yang Dilestarikan	93.02	94	13,994,695	95	14,061,040	96	14,130,701	97	14,203,846	98	14,280,647	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
URUSAN BIDANG KEARSIPAN													
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	80.26	96.00	45,807,622	97.00	46,024,781	98.00	46,252,797	99.00	46,492,215	100.00	46,743,604	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban	80.11	96.00	29,127,108	97.00	29,265,190	98.00	29,410,176	99.00	29,562,412	100.00	29,722,259	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dengan NSPK	32.26	47.00	9,123,771	47.25	9,167,023	47.50	9,212,439	47.75	9,260,125	50.00	9,310,196	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	86.52	86.78	5,223,262,508	87.04	5,248,024,290	87.30	5,274,024,162	87.56	5,301,324,027	87.83	5,329,988,885	Dinas Perikanan

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	83,111.60	83,527.16	2,185,503,781	83,944.79	2,195,864,541	84,364.52	2,206,743,339	84,786.34	2,218,166,077	85,210.27	2,230,159,952	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	46,834.71	47,068.88	2,320,228,310	47,304.23	2,331,227,755	47,540.75	2,342,777,172	47,778.45	2,354,904,060	48,017.35	2,367,637,292	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Cakupan Wilayah Potensi Perikanan Yang Dilakukan Pengawasan	53.33	0.55	164,873,289	63.64%	165,654,900	72.73%	166,475,590	82.00%	167,337,316	91%	168,242,128	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Ikan Yang Diolah	92,906.44	93,370.97	217,981,840	93,837.83	219,015,221	94,307.02	220,100,270	94,778.55	221,239,573	95,252.44	222,435,840	Dinas Perikanan
URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	86.08	86.34	6,299,287,607	86.60	6,329,150,473	86.86	6,360,506,482	87.12	6,393,430,292	87.38	6,428,000,293	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	83.33	76	2,230,470,908	80	2,241,044,842	84	2,252,147,473	88	2,263,805,236	92	2,276,045,887	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok seni tradisional yang dikembangkan	63.87	65.13	146,207,854	66.15	146,900,977	67.35	147,628,757	68.37	148,392,926	69.04	149,195,303	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang di Lestarikan	74.51	73.53	720,649,498	74.51	724,065,862	75.49	727,653,044	76.47	731,419,586	77.45	735,374,454	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang dikelola	100	100	618,949,919	100	621,884,158	100	624,965,110	100	628,200,109	100	631,596,858	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
URUSAN BIDANG PARIWISATA													
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	141.86	2.78	364,483,161	5.56	366,211,056	8.33	368,025,347	11.11	369,930,352	13.89	371,930,607	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata yang dipromosikan	161.54	2.86	60,165,533	5.71	60,450,758	8.57	60,750,245	11.43	61,064,706	14.29	61,394,889	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	23.17	20.59	75,805,768	23.53	76,165,138	26.47	76,542,477	29.41	76,938,683	32.35	77,354,699	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
URUSAN BIDANG PERTANIAN													
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase sarana pertanian dalam kondisi baik	80.4	80.6	6,141,318,492	80.8	6,170,432,478	81.00	6,201,002,164	81.20	6,233,100,333	81.40	6,266,803,411	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	90.9	91.00	16,980,744,663	91.2	17,061,244,830	91.40	17,145,770,005	91.60	17,234,521,439	91.80	17,327,710,444	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase penurunan luasan gagal panen	309.94	0.40	109,767,849	0.35	110,288,223	0.30	110,834,615	0.25	111,408,327	0.20	112,010,724	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Kelembagaan/kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	N/A	74.52	1,245,330,401	74.62	1,251,234,106	74.72	1,257,432,996	74.82	1,263,941,831	74.92	1,270,776,107	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
URUSAN BIDANG PERTANIAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	78.39	78.78	9,713,996,349	79.18	9,760,047,234	79.57	9,808,400,664	79.97	9,859,171,765	80.37	9,912,481,421	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase sarana peternakan dalam kondisi baik	20	26	924,755,061	28	929,139,023	30	933,742,183	32	938,575,501	34	943,650,485	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase prasarana peternakan dalam kondisi baik	89.29	89.49	117,744,189	89.59	118,302,376	89.69	118,888,472	89.79	119,503,873	89.89	120,150,044	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Ternak Ruminansia Yang Terlayani	6.48	6.88	798,418,457	7.08	802,203,498	7.28	806,177,791	7.48	810,350,799	7.68	814,732,458	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Prosentase Ternak Unggas Yang Terlayani	1.36	1.76		1.96		2.16		2.36		2.56		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Prosentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana Penyakit	100	100		100		100		100		100		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Prosentase Peningkatan Produk Hewan Yang ASUH	39.76	40.16		40.36		40.56		40.76		40.96		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase ternak betina peserta AUTSK	0.00%	12.40%	18,346,081	12.41%	18,433,054	12.42%	18,524,376	12.43%	18,620,263	12.44%	18,720,945	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase peningkatan legalitas usaha peternakan	0.01	0.05	21,563,355	0.07	21,665,580	0.09	21,772,916	0.11	21,885,619	0.13	22,003,957	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase kemampuan kelas kelompok	1.58	1.78	207,393,838	1.88	208,377,024	1.98	209,409,370	2.08	210,493,333	2.18	211,631,494	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
URUSAN BIDANG PERDAGANGAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	83.91	84.33	5,059,124,950	84.75	5,083,108,610	85.17	5,108,291,452	85.60	5,134,733,437	86.03	5,162,497,521	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100	100	526,536,040	100	529,032,176	100	531,653,118	100	534,405,107	100	537,294,696	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase koefisien variasi harga antar waktu	0.10	0.01	273,785,222	0.10	275,083,148	0.10	276,445,971	0.10	277,876,935	0.20	279,379,447	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	net ekspor (rupiah)	2,238,085	2,069,234	403,353,921	2,152,004	405,266,090	2,238,085	407,273,868	2,327,609	409,382,034	2,420,714	411,595,609	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	78.00%	67.62%	24,351,118	72.63%	24,466,559	78.00%	24,587,772	83.77%	24,715,045	89.96%	24,848,682	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase peningkatan omset produk lokal	7%	6%	454,028,261	6.50%	456,180,661	7%	458,440,680	7.50%	460,813,701	8%	463,305,373	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase pertambahan dan pembangunan industri	2.12	2.00	2,284,497,714	2.05	2,295,327,772	2.12	2,306,699,333	2.15	2,318,639,471	2.20	2,331,176,617	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Pertumbuhan IKM Formal	78.00	74.80	19,778,117	76.00	19,871,879	78.00	19,970,328	80.00	20,073,701	82.00	20,182,241	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase data IKM yang masuk dalam SINAS	1.20	0.80	34,048,404	1.00	34,209,817	1.20	34,379,300	1.40	34,557,257	1.60	34,744,112	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
SEKRETARIAT DAERAH													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	84.53	84.95	26,825,768,533	85.38	26,952,940,744	85.80	27,086,471,565	86.23	27,226,678,928	86.66	27,373,896,659	Bagian Perencanaan dan Keuangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Setda dan Pimpinan	100%	100%	13,893,776,582	100%	13,959,642,440	100%	14,028,801,592	100%	14,101,418,702	100%	14,177,666,667	Bagian Umum
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Informasi dan Kegiatan Pimpinan yang Terpublikasi	100%	100%	949,818,292	100%	954,321,070	100%	959,048,987	100%	964,013,301	100%	969,225,830	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebijakan Strategis Bidang Organisasi Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	357,577,343	100%	359,272,501	100%	361,052,416	100%	362,921,327	100%	364,883,684	Bagian Organisasi
SEKRETARIAT DAERAH													

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Kebijakan Daerah Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	41,747,331,725	100%	41,945,242,195	100%	42,153,048,189	100%	42,371,244,483	100%	42,600,350,592	Bagian Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Lingkup Pemerintahan Yang Ditindak Lanjuti	100%	100%	302,742,288	100%	304,177,490	100%	305,684,453	100%	307,266,763	100%	308,928,190	Bagian Tata Pemerintahan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Kerjasama Yang Disahkan/Ditetapkan	100%	100%	200,999,547	100%	201,952,421	100%	202,952,937	100%	204,003,480	100%	205,106,550	Bagian Kerja Sama
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Regulasi Yang Di Tetapkan	100%	100%	466,281,430	100%	468,491,918	100%	470,812,931	100%	473,249,994	100%	475,808,910	Bagian Hukum
SEKRETARIAT DAERAH													
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase kebijakan strategis bidang Perekonomian Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	524,637,141	100%	527,124,274	100%	529,735,764	100%	532,477,829	100%	535,356,997	Bagian Perekonomian
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Pembangunan Yang Disusun Sesuai Ketentuan	100%	100%	488,859,178	100%	491,176,699	100%	493,610,097	100%	496,165,165	100%	498,847,986	Bagian Administrasi Pembangunan
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Kebijakan Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	297,252,383	100%	298,661,560	100%	300,141,195	100%	301,694,812	100%	303,326,110	Bagian Pengadaan barang dan Jasa
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Kebijakan Lingkup Bidang Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	881,460,612	100%	885,639,329	100%	890,026,982	100%	894,634,018	100%	899,471,405	Bagian Sumber Daya Alam
SEKRETARIAT DPRD													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	83.86	84.28	39,227,005,275	84.70	39,412,967,701	85.12	39,608,228,248	85.55	39,813,251,822	85.98	40,028,526,575	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi	100%	100%	24,774,026,139	100%	24,891,471,709	100%	25,014,789,557	100%	25,144,273,298	100%	25,280,231,226	Sekretariat DPRD

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PERENCANAAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	84.70	85.12	10,693,352,930	85.55	10,744,046,625	85.98	10,797,275,005	86.41	10,853,164,804	86.84	10,911,849,093	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Tepat Waktu	100%	100%	1,457,999,638	100%	1,464,911,539	100%	1,472,169,034	100%	1,479,789,404	100%	1,487,790,793	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Selaras dan Berorientasi Hasil	98%	100%	2,105,358,544	100%	2,115,339,362	100%	2,125,819,220	100%	2,136,823,071	100%	2,148,377,115	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
KEUANGAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	85.56	85.82	19,534,424,149	86.07	19,627,030,477	86.33	19,724,267,120	86.59	19,826,365,597	86.85	19,933,568,997	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase pelaksanaan penganggaran APBD yang tepat waktu	100%	100%	661,082,825,177	100%	664,216,803,027	100%	667,507,479,768	100%	670,962,690,352	100%	674,590,661,464	BPKAD
	Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standard daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		BPKAD
	Prosentase ketepatan laporan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Di Susun Secara Tertib Administrasi, Fisik, dan Hukum	100%	100%	841,498,401	100%	845,487,670	100%	849,676,403	100%	854,074,572	100%	858,692,650	BPKAD
KEUANGAN													

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	90.07	90.16	18,284,082,748	90.25	18,370,761,615	90.34	18,461,774,425	90.43	18,557,337,877	90.52	18,657,679,500	Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Berbasis Digital	6.29%		4,619,451,329		4,641,350,640		4,664,344,916		4,688,488,906		4,713,840,095	Badan Pendapatan Daerah
KEPEGAWAIAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM			6,557,898,416		6,588,987,271		6,621,630,569		6,655,906,033	83.75	6,691,895,269	BKPSDM
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	82.5	82.3	679,670,441	82.35	682,892,537	82.40	686,275,737	82.45	689,828,098	82.50	693,558,076	BKPSDM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Kompetensi ASN	2.82	3.9	2,330,562,601	4.36	2,341,611,038	4.80	2,353,211,896	5.26	2,365,392,797	5.70	2,378,182,743	BKPSDM
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Peningkatan Hasil Penelitian/Kajian Yang Ditindaklanjuti Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Daerah	73%	127%	1,103,619,941	153%	1,108,851,843	180%	1,114,345,340	207%	1,120,113,512	233%	1,126,170,092	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Inovasi yang Dimanfaatkan	N/A	70%	200,284,731	**74%**	201,234,216	**76%**	202,231,174	**78%**	203,277,981	**80%**	204,377,128	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
INSPEKTORAT DAERAH													

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	84.81	85.23	15,273,245,533	85.66	15,345,651,004	86.09	15,421,676,748	86.52	15,501,503,780	86.95	15,585,322,163	Inspektorat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti	98.50%	98.60%	165,173,816	98.70	165,956,851	98.8	166,779,038	88%	167,642,335	98.9	168,548,796	Inspektorat
	Presentase Rekomendasi Laporan Pengawasan BPK Yang Ditindaklanjuti	92	92.5		93		93.5		94		94.5		Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan Yang Dilegalitaskan	100	95	847,799,659	96	851,818,800	97	856,038,899	98	860,470,002	99	865,122,661	Inspektorat
KECAMATAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	10,173,815,815	100%	10,222,046,560	100%	10,272,688,852	100%	10,325,863,232	100%	10,381,696,333	Kecamatan Lamongan
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Lamongan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	15,427,332	100%	15,500,468	100%	15,577,261	100%	15,657,893	100%	15,742,557	Kecamatan Lamongan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	5,519,191,757	100%	5,545,356,444	100%	5,572,829,364	100%	5,601,675,931	100%	5,631,964,826	Kecamatan Lamongan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	18,926,907	100%	19,016,633	100%	19,110,846	100%	19,209,769	100%	19,313,639	Kecamatan Lamongan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	7,450,592	100%	7,485,913	100%	7,523,000	100%	7,561,941	100%	7,602,829	Kecamatan Lamongan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	32,906,781	100%	33,062,782	100%	33,226,582	100%	33,398,572	100%	33,579,162	Kecamatan Lamongan

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	5,592,852,983	100%	5,619,366,873	100%	5,647,206,458	100%	5,676,438,022	100%	5,707,131,164	Kecamatan Babat
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Babat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	10,972,299	100%	11,024,315	100%	11,078,932	100%	11,136,279	100%	11,196,494	Kecamatan Babat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	2,138,186,513	100%	2,148,322,958	100%	2,158,966,224	100%	2,170,141,654	100%	2,181,875,855	Kecamatan Babat
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	3,628,058	100%	3,645,257	100%	3,663,317	100%	3,682,279	100%	3,702,189	Kecamatan Babat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	8,855,589	100%	8,897,571	100%	8,941,651	100%	8,987,936	100%	9,036,535	Kecamatan Babat
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	33,216,422	100%	33,373,890	100%	33,539,231	100%	33,712,840	100%	33,895,129	Kecamatan Babat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	3,209,507,380	100%	3,224,722,607	100%	3,240,698,595	100%	3,257,473,382	100%	3,275,086,909	Kecamatan Paciran
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Paciran
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	8,620,555	100%	8,661,422	100%	8,704,333	100%	8,749,389	100%	8,796,698	Kecamatan Paciran

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	1,287,830,821	100%	1,293,936,006	100%	1,300,346,451	100%	1,307,077,418	100%	1,314,144,934	Kecamatan Paciran
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	5,000,000	100%	5,023,703	100%	5,048,592	100%	5,074,725	100%	5,102,164	Kecamatan Paciran
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	5,000,000	100%	5,023,703	100%	5,048,592	100%	5,074,725	100%	5,102,164	Kecamatan Paciran
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	24,661,776	100%	24,778,690	100%	24,901,449	100%	25,030,346	100%	25,165,688	Kecamatan Paciran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	2,931,835,247	100%	2,945,734,121	100%	2,960,327,938	100%	2,975,651,447	100%	2,991,741,130	Kecamatan Brondong
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Brondong
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	28,880,758	100%	29,017,672	100%	29,161,432	100%	29,312,380	100%	29,470,875	Kecamatan Brondong
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	1,114,641,910	100%	1,119,926,064	100%	1,125,474,425	100%	1,131,300,204	100%	1,137,417,272	Kecamatan Brondong
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	3,688,444	100%	3,705,929	100%	3,724,289	100%	3,743,567	100%	3,763,809	Kecamatan Brondong
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	1,652,349	100%	1,660,182	100%	1,668,407	100%	1,677,043	100%	1,686,111	Kecamatan Brondong
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	16,249,200	100%	16,326,233	100%	16,407,116	100%	16,492,044	100%	16,581,219	Kecamatan Brondong

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	2,419,398,232	100%	2,430,867,809	100%	2,442,910,865	100%	2,455,556,074	100%	2,468,833,543	Kecamatan Turi
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Turi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	24,678,484	100%	24,795,476	100%	24,918,319	100%	25,047,303	100%	25,182,737	Kecamatan Turi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	29,166,464	100%	29,304,733	100%	29,449,915	100%	29,602,356	100%	29,762,419	Kecamatan Turi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	2,753,915	100%	2,766,970	100%	2,780,679	100%	2,795,072	100%	2,810,186	Kecamatan Turi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	2,753,915	100%	2,766,970	100%	2,780,679	100%	2,795,072	100%	2,810,186	Kecamatan Turi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	28,474,080	100%	28,609,066	100%	28,750,802	100%	28,899,624	100%	29,055,888	Kecamatan Turi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	2,526,730,407	100%	2,538,708,811	100%	2,551,286,135	100%	2,564,492,325	100%	2,578,358,825	Kecamatan Pucuk
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Pucuk
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	5,956,568	100%	5,984,806	100%	6,014,456	100%	6,045,589	100%	6,078,278	Kecamatan Pucuk

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	22,023,710	100%	22,128,117	100%	22,237,744	100%	22,352,853	100%	22,473,718	Kecamatan Pucuk
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	4,667,135	100%	4,689,260	100%	4,712,492	100%	4,736,885	100%	4,762,498	Kecamatan Pucuk
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	3,584,396	100%	3,601,388	100%	3,619,230	100%	3,637,964	100%	3,657,635	Kecamatan Pucuk
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	35,130,242	100%	35,296,783	100%	35,471,651	100%	35,655,263	100%	35,848,055	Kecamatan Pucuk
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	2,226,336,771	100%	2,236,891,106	100%	2,247,973,159	100%	2,259,609,314	100%	2,271,827,277	Kecamatan Sukodadi
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Sukodadi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	4,506,406	100%	4,527,770	100%	4,550,201	100%	4,573,755	100%	4,598,485	Kecamatan Sukodadi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	21,164,088	100%	21,264,420	100%	21,369,768	100%	21,480,384	100%	21,596,531	Kecamatan Sukodadi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	2,463,001	100%	2,474,678	100%	2,486,938	100%	2,499,811	100%	2,513,328	Kecamatan Sukodadi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	1,559,217	100%	1,566,608	100%	1,574,370	100%	1,582,519	100%	1,591,076	Kecamatan Sukodadi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	19,930,334	100%	20,024,817	100%	20,124,024	100%	20,228,192	100%	20,337,568	Kecamatan Sukodadi

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	2,213,671,060	100%	2,224,165,351	100%	2,235,184,358	100%	2,246,754,315	100%	2,258,902,769	Kecamatan Tikung
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Tikung
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	4,516,421	100%	4,537,832	100%	4,560,313	100%	4,583,918	100%	4,608,704	Kecamatan Tikung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	7,710,962	100%	7,747,517	100%	7,785,900	100%	7,826,202	100%	7,868,519	Kecamatan Tikung
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	826,175	100%	830,091	100%	834,204	100%	838,522	100%	843,056	Kecamatan Tikung
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	2,500,000	100%	2,511,852	100%	2,524,296	100%	2,537,362	100%	2,551,082	Kecamatan Tikung
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	8,817,589	100%	8,859,391	100%	8,903,282	100%	8,949,368	100%	8,997,758	Kecamatan Tikung
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	2,420,781,348	100%	2,432,257,482	100%	2,444,307,423	100%	2,456,959,861	100%	2,470,244,921	Kecamatan Deket
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Deket
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	17,540,736	100%	17,623,891	100%	17,711,204	100%	17,802,882	100%	17,899,145	Kecamatan Deket

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	22,397,795	100%	22,503,976	100%	22,615,466	100%	22,732,530	100%	22,855,447	Kecamatan Deket
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	5,000,000	100%	5,023,703	100%	5,048,592	100%	5,074,725	100%	5,102,164	Kecamatan Deket
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	1,564,023	100%	1,571,438	100%	1,579,223	100%	1,587,398	100%	1,595,981	Kecamatan Deket
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	23,142,154	100%	23,251,863	100%	23,367,058	100%	23,488,013	100%	23,615,015	Kecamatan Deket
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	3,120,195,602	100%	3,134,987,430	100%	3,150,518,850	100%	3,166,826,841	100%	3,183,950,232	Kecamatan Kalitengah
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Kalitengah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	7,883,207	100%	7,920,579	100%	7,959,819	100%	8,001,021	100%	8,044,284	Kecamatan Kalitengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	12,808,217	100%	12,868,936	100%	12,932,692	100%	12,999,635	100%	13,069,926	Kecamatan Kalitengah
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	5,000,000	100%	5,023,703	100%	5,048,592	100%	5,074,725	100%	5,102,164	Kecamatan Kalitengah
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	5,000,000	100%	5,023,703	100%	5,048,592	100%	5,074,725	100%	5,102,164	Kecamatan Kalitengah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	10,171,068	100%	10,219,285	100%	10,269,914	100%	10,323,074	100%	10,378,892	Kecamatan Kalitengah

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	2,746,852,763	100%	2,759,874,695	100%	2,773,547,724	100%	2,787,904,404	100%	2,802,978,918	Kecamatan Kembangbahu
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Kembangbahu
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	16,344,736	100%	16,422,221	100%	16,503,581	100%	16,589,008	100%	16,678,706	Kecamatan Kembangbahu
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	23,679,213	100%	23,791,469	100%	23,909,337	100%	24,033,098	100%	24,163,048	Kecamatan Kembangbahu
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	4,332,159	100%	4,352,696	100%	4,374,260	100%	4,396,903	100%	4,420,677	Kecamatan Kembangbahu
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	3,205,757	100%	3,220,955	100%	3,236,912	100%	3,253,667	100%	3,271,260	Kecamatan Kembangbahu
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	17,394,729	100%	17,477,192	100%	17,563,777	100%	17,654,693	100%	17,750,154	Kecamatan Kembangbahu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	2,243,423,589	100%	2,254,058,928	100%	2,265,226,034	100%	2,276,951,495	100%	2,289,263,229	Kecamatan Mantup
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Mantup
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	3,755,339	100%	3,773,142	100%	3,791,835	100%	3,811,462	100%	3,832,071	Kecamatan Mantup

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	21,155,075	100%	21,255,364	100%	21,360,668	100%	21,471,237	100%	21,587,334	Kecamatan Mantup
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	3,013,784	100%	3,028,072	100%	3,043,074	100%	3,058,825	100%	3,075,365	Kecamatan Mantup
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	3,564,568	100%	3,581,466	100%	3,599,209	100%	3,617,840	100%	3,637,402	Kecamatan Mantup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	12,012,577	100%	12,069,525	100%	12,129,320	100%	12,192,105	100%	12,258,029	Kecamatan Mantup
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	3,096,685,469	100%	3,111,365,844	100%	3,126,780,237	100%	3,142,965,351	100%	3,159,959,719	Kecamatan Modo
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Modo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	4,549,167	100%	4,570,733	100%	4,593,378	100%	4,617,154	100%	4,642,120	Kecamatan Modo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	23,107,851	100%	23,217,398	100%	23,332,422	100%	23,453,197	100%	23,580,011	Kecamatan Modo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	5,607,972	100%	5,634,558	100%	5,662,473	100%	5,691,783	100%	5,722,560	Kecamatan Modo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	5,007,118	100%	5,030,855	100%	5,055,779	100%	5,081,950	100%	5,109,428	Kecamatan Modo
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	9,909,087	100%	9,956,063	100%	10,005,387	100%	10,057,178	100%	10,111,558	Kecamatan Modo

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	2,378,052,071	100%	2,389,325,639	100%	2,401,162,886	100%	2,413,591,995	100%	2,426,642,560	Kecamatan Bluluk
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Bluluk
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	10,014,237	100%	10,061,711	100%	10,111,559	100%	10,163,899	100%	10,218,856	Kecamatan Bluluk
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	9,016,372	100%	9,059,116	100%	9,103,997	100%	9,151,121	100%	9,200,603	Kecamatan Bluluk
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	7,615,226	100%	7,651,327	100%	7,689,234	100%	7,729,035	100%	7,770,827	Kecamatan Bluluk
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	5,000,000	100%	5,023,703	100%	5,048,592	100%	5,074,725	100%	5,102,164	Kecamatan Bluluk
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	10,112,030	100%	10,159,967	100%	10,210,302	100%	10,263,154	100%	10,318,648	Kecamatan Bluluk
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	2,646,213,270	100%	2,658,758,104	100%	2,671,930,178	100%	2,685,760,857	100%	2,700,283,070	Kecamatan Karangbinangun
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Karangbinangun
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	4,119,857	100%	4,139,388	100%	4,159,895	100%	4,181,428	100%	4,204,038	Kecamatan Karangbinangun

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	47,327,582	100%	47,551,947	100%	47,787,530	100%	48,034,892	100%	48,294,622	Kecamatan Karangbinangun
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	7,031,496	100%	7,064,830	100%	7,099,831	100%	7,136,582	100%	7,175,170	Kecamatan Karangbinangun
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	600,854	100%	603,703	100%	606,694	100%	609,834	100%	613,131	Kecamatan Karangbinangun
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	17,025,704	100%	17,106,418	100%	17,191,167	100%	17,280,153	100%	17,373,589	Kecamatan Karangbinangun
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	2,151,633,867	100%	2,161,834,061	100%	2,172,544,264	100%	2,183,789,978	100%	2,195,597,977	Kecamatan Glagah
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Glagah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	25,636,946	100%	25,758,483	100%	25,886,096	100%	26,020,090	100%	26,160,783	Kecamatan Glagah
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	28,831,696	100%	28,968,378	100%	29,111,894	100%	29,262,585	100%	29,420,811	Kecamatan Glagah
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	5,000,000	100%	5,023,703	100%	5,048,592	100%	5,074,725	100%	5,102,164	Kecamatan Glagah
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	5,000,000	100%	5,023,703	100%	5,048,592	100%	5,074,725	100%	5,102,164	Kecamatan Glagah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	27,452,636	100%	27,582,780	100%	27,719,431	100%	27,862,915	100%	28,013,573	Kecamatan Glagah

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	2,338,889,245	100%	2,349,977,155	100%	2,361,619,461	100%	2,373,843,882	100%	2,386,679,524	Kecamatan Ngimbang
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Ngimbang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	6,775,532	100%	6,807,653	100%	6,841,380	100%	6,876,792	100%	6,913,976	Kecamatan Ngimbang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	14,203,993	100%	14,271,329	100%	14,342,033	100%	14,416,271	100%	14,494,222	Kecamatan Ngimbang
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	5,240,650	100%	5,265,494	100%	5,291,581	100%	5,318,972	100%	5,347,732	Kecamatan Ngimbang
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	6,216,838	100%	6,246,310	100%	6,277,256	100%	6,309,749	100%	6,343,866	Kecamatan Ngimbang
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	6,826,705	100%	6,859,068	100%	6,893,050	100%	6,928,730	100%	6,966,194	Kecamatan Ngimbang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	2,790,904,893	100%	2,804,135,661	100%	2,818,027,969	100%	2,832,614,892	100%	2,847,931,161	Kecamatan Sugio
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Sugio
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	22,547,454	100%	22,654,344	100%	22,766,579	100%	22,884,425	100%	23,008,164	Kecamatan Sugio

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	33,309,053	100%	33,466,961	100%	33,632,763	100%	33,806,856	100%	33,989,654	Kecamatan Sugio
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	7,185,014	100%	7,219,076	100%	7,254,841	100%	7,292,394	100%	7,331,825	Kecamatan Sugio
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	5,000,000	100%	5,023,703	100%	5,048,592	100%	5,074,725	100%	5,102,164	Kecamatan Sugio
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	39,340,035	100%	39,526,533	100%	39,722,357	100%	39,927,971	100%	40,143,866	Kecamatan Sugio
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	2,552,849,222	100%	2,564,951,447	100%	2,577,658,783	100%	2,591,001,486	100%	2,605,011,323	Kecamatan Karanggeneng
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Karanggeneng
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	18,005,497	100%	18,090,855	100%	18,180,481	100%	18,274,589	100%	18,373,402	Kecamatan Karanggeneng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	19,258,286	100%	19,349,584	100%	19,445,446	100%	19,546,101	100%	19,651,789	Kecamatan Karanggeneng
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	5,000,000	100%	5,023,703	100%	5,048,592	100%	5,074,725	100%	5,102,164	Kecamatan Karanggeneng
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	3,647,285	100%	3,664,576	100%	3,682,731	100%	3,701,794	100%	3,721,810	Kecamatan Karanggeneng
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	14,680,570	100%	14,750,166	100%	14,823,242	100%	14,899,971	100%	14,980,537	Kecamatan Karanggeneng

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	2,505,621,871	100%	2,517,500,206	100%	2,529,972,458	100%	2,543,068,323	100%	2,556,818,981	Kecamatan Sambeng
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Sambeng
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	5,072,611	100%	5,096,659	100%	5,121,909	100%	5,148,421	100%	5,176,260	Kecamatan Sambeng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	14,576,476	100%	14,645,579	100%	14,718,136	100%	14,794,322	100%	14,874,316	Kecamatan Sambeng
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	5,000,000	100%	5,023,703	100%	5,048,592	100%	5,074,725	100%	5,102,164	Kecamatan Sambeng
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	3,871,804	100%	3,890,159	100%	3,909,432	100%	3,929,668	100%	3,950,916	Kecamatan Sambeng
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	13,588,872	100%	13,653,293	100%	13,720,934	100%	13,791,958	100%	13,866,532	Kecamatan Sambeng
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	2,149,584,462	100%	2,159,774,940	100%	2,170,474,942	100%	2,181,709,945	100%	2,193,506,697	Kecamatan Kedungpring
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Kedungpring
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	10,798,852	100%	10,850,046	100%	10,903,799	100%	10,960,241	100%	11,019,504	Kecamatan Kedungpring

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	34,422,436	100%	34,585,622	100%	34,756,966	100%	34,936,878	100%	35,125,786	Kecamatan Kedungpring
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	15,825,298	100%	15,900,320	100%	15,979,094	100%	16,061,806	100%	16,148,654	Kecamatan Kedungpring
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	23,011,514	100%	23,120,604	100%	23,235,149	100%	23,355,420	100%	23,481,706	Kecamatan Kedungpring
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	76,881,697	100%	77,246,168	100%	77,628,863	100%	78,030,692	100%	78,452,613	Kecamatan Kedungpring
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	2,158,861,639	100%	2,169,096,097	100%	2,179,842,278	100%	2,191,125,768	100%	2,202,973,433	Kecamatan Laren
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Laren
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	10,014,237	100%	10,061,711	100%	10,111,559	100%	10,163,899	100%	10,218,856	Kecamatan Laren
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	12,017,084	100%	12,074,053	100%	12,133,870	100%	12,196,679	100%	12,262,628	Kecamatan Laren
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	11,015,660	100%	11,067,882	100%	11,122,715	100%	11,180,289	100%	11,240,742	Kecamatan Laren
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	5,000,000	100%	5,023,703	100%	5,048,592	100%	5,074,725	100%	5,102,164	Kecamatan Laren
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	33,629,918	100%	33,789,346	100%	33,956,746	100%	34,132,516	100%	34,317,074	Kecamatan Laren

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	2,268,706,269	100%	2,279,461,465	100%	2,290,754,421	100%	2,302,612,024	100%	2,315,062,508	Kecamatan Sekaran
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Sekaran
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	23,647,835	100%	23,759,941	100%	23,877,653	100%	24,001,251	100%	24,131,029	Kecamatan Sekaran
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	14,009,817	100%	14,076,233	100%	14,145,970	100%	14,219,193	100%	14,296,078	Kecamatan Sekaran
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	5,000,000	100%	5,023,703	100%	5,048,592	100%	5,074,725	100%	5,102,164	Kecamatan Sekaran
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	5,000,000	100%	5,023,703	100%	5,048,592	100%	5,074,725	100%	5,102,164	Kecamatan Sekaran
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	13,416,373	100%	13,479,976	100%	13,546,759	100%	13,616,880	100%	13,690,508	Kecamatan Sekaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	2,563,569,078	100%	2,575,722,122	100%	2,588,482,818	100%	2,601,881,549	100%	2,615,950,217	Kecamatan Sarirejo
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Sarirejo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	5,457,559	100%	5,483,431	100%	5,510,597	100%	5,539,122	100%	5,569,072	Kecamatan Sarirejo

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	5,075,215	100%	5,099,275	100%	5,124,538	100%	5,151,064	100%	5,178,916	Kecamatan Sarirejo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	5,082,826	100%	5,106,922	100%	5,132,223	100%	5,158,789	100%	5,186,683	Kecamatan Sarirejo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	4,205,979	100%	4,225,919	100%	4,246,855	100%	4,268,838	100%	4,291,920	Kecamatan Sarirejo
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	20,455,680	100%	20,552,654	100%	20,654,477	100%	20,761,390	100%	20,873,649	Kecamatan Sarirejo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	2,504,568,194	100%	2,516,441,534	100%	2,528,908,542	100%	2,541,998,899	100%	2,555,743,774	Kecamatan Sukorame
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Sukorame
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	6,736,076	100%	6,768,010	100%	6,801,540	100%	6,836,747	100%	6,873,714	Kecamatan Sukorame
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	11,552,123	100%	11,606,888	100%	11,664,391	100%	11,724,769	100%	11,788,166	Kecamatan Sukorame
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	5,000,000	100%	5,023,703	100%	5,048,592	100%	5,074,725	100%	5,102,164	Kecamatan Sukorame
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	4,510,713	100%	4,532,096	100%	4,554,549	100%	4,578,125	100%	4,602,879	Kecamatan Sukorame
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	19,473,993	100%	19,566,313	100%	19,663,249	100%	19,765,031	100%	19,871,903	Kecamatan Sukorame

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	1,903,240,763	100%	1,912,263,406	100%	1,921,737,182	100%	1,931,684,646	100%	1,942,129,483	Kecamatan Solokuro
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Solokuro
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	20,230,460	100%	20,326,366	100%	20,427,068	100%	20,532,804	100%	20,643,827	Kecamatan Solokuro
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	21,444,895	100%	21,546,558	100%	21,653,305	100%	21,765,388	100%	21,883,076	Kecamatan Solokuro
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	5,000,000	100%	5,023,703	100%	5,048,592	100%	5,074,725	100%	5,102,164	Kecamatan Solokuro
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	5,000,000	100%	5,023,703	100%	5,048,592	100%	5,074,725	100%	5,102,164	Kecamatan Solokuro
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	19,953,475	100%	20,048,068	100%	20,147,390	100%	20,251,679	100%	20,361,182	Kecamatan Solokuro
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	1,935,266,229	100%	1,944,440,694	100%	1,954,073,883	100%	1,964,188,731	100%	1,974,809,321	Kecamatan Maduran
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Maduran
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	27,034,433	100%	27,162,594	100%	27,297,164	100%	27,438,462	100%	27,586,825	Kecamatan Maduran

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	20,559,728	100%	20,657,195	100%	20,759,536	100%	20,866,993	100%	20,979,823	Kecamatan Maduran
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	5,000,000	100%	5,023,703	100%	5,048,592	100%	5,074,725	100%	5,102,164	Kecamatan Maduran
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	5,000,000	100%	5,023,703	100%	5,048,592	100%	5,074,725	100%	5,102,164	Kecamatan Maduran
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Diselenggarakan	100%	100%	44,930,691	100%	45,143,693	100%	45,367,345	100%	45,602,179	100%	45,848,755	Kecamatan Maduran
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	84.19	84.61	3,725,970,646	85.03	3,743,634,256	85.46	3,762,181,047	85.89	3,781,655,177	86.32	3,802,103,014	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	N/A	20%	609,381,917	40%	612,270,797	60%	615,304,122	80%	618,489,113	100%	621,833,354	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	100%	100%	4,067,726,809	100%	4,087,010,574	100%	4,107,258,527	100%	4,128,518,877	100%	4,150,842,246	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	25.67%	27%	1,062,991,863	29%	1,068,031,160	31%	1,073,322,422	33%	1,078,878,248	35%	1,084,711,864	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100%	100%	231,612,968	100%	232,710,970	100%	233,863,871	100%	235,074,418	100%	236,345,492	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	100%	2,662,608,248	100%	2,675,230,804	100%	2,688,484,489	100%	2,702,400,857	100%	2,717,013,044	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
SOSIAL													
TOTAL				**3,232,798,062,819.45**		**3,248,123,703,029.88**		**3,264,215,625,250.82**		**3,281,112,143,582.81**		**3,298,853,487,831.40**	

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik diukur dari pencapaian indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintaham maka diperlukan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode jabatan yakni tahun 2025-2030. Indikator kinerja Pemerintah Daerah telah ditetapkan sebagaimana yang disajikan pada Bab III.

Sedangkan untuk pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja utama yang disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamongan 2025-2030

Indikator Tujuan	Satuan	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,88	4,95	5,01	5,15	5,26	5,50
Gini Rasio	Indeks	0,279	0,277	0,272	0,268	0,264	0,260
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,50	77,10	77,80	78,40	79,10	79,80
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	81,63	81.83	82.33	82.83	83.33	83.83
Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	89,45	89,50	89,77	90,05	90,27	90,60
Prosentase Penduduk Miskin	Persen	11,95	11,87	11,43	11,02	10,80	10,35
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	87,30	87,39	87,47	87,54	87,60	87,65

Sumber: Data Diolah, 2025

Dalam rangka mengetahui kinerja Pemerintah Daerah secara umum berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka indikator kinerja utama dan sasaran dibagi kedalam 4 (Aspek) aspek yaitu Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah dan Aspek Pelayanan Umum. Adapun indikator dan target kinerja daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4-3 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2030 Melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD)

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	90,3	90,9	91,2	91,5	91,8	92,0	92,0	
2	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	Persen	5,30	4,62	4,43	4,25	4,07	3,88	3,7	
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	15,57	29,02	33,52	38,01	42,51	47,00	50,00	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,33	70,95	71,04	71,13	71,21	71,30	71,39	
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	6,08	10,43	11,4	12,37	13,34	14,31	15,28	
6	Timbulan sampah Terolah di fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	14,90	15,95	16,56	17,18	17,79	18,40	19,01	
7	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan	Persen	50,55	50,75	50,95	51,15	51,35	51,55	51,75	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	layanan penuh pengumpulan sampah RT)									
8	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO_2 eq)	Ton CO2 eq	238.011,16	242.879,57	247.737,16	252.691,9	257.745,74	262.900,66	268.158,67	
9	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	90,89	95,68	93,41	93,34	93,28	93,21	92,19	
10	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64	
11	Indeks Kualitas Udara	Indeks	81,41	78,77	78,87	78,97	79,07	79,17	79,27	
12	Indeks Kualitas Air	Indeks	57,69	69,51	69,61	69,71	69,81	69,91	70,01	
13	Indeks Kualitas lahan	Indeks	39,59	58,97	59,01	59,05	59,09	59,13	59,17	
14	Kapasitas Tampungan Air Baku ($m^{3)}$	Kubik	80.813.439,32	81.113.439,32	81.413.439,32	81.713.439,32	82.013.439,32	82.313.439,32	82.613.439,32	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARARAT**									
1	**Kesejahteraan Ekonomi**									
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,81	4,88	4,95	5,01	5,15	5,26	5,50	
2	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	37,788	38,10	39,30	40,90	41,20	42,70	43,90	
3	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi	Persen	1,64	1,65	1,66	1,67	1,68	1,69	1,7	
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	12,16	11,95	11,87	11,43	11,02	10,80	10,35	
5	Gini Rasio	Indeks	0,281	0,277	0,272	0,268	0,264	0,260	0,260	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,90	76,50	77,10	77,80	78,40	79,10	79,80	
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,34	4,25	4,12	4,07	4,01	3,97	3,97	
8	Nilai Tukar Petani	Nilai	123,93	123,99	124,10	124,60	125,05	125,55	126,05	
9	Indeks Daya Beli	Indeks	0.768	0.772	0.778	0.788	0.798	0.808	0.818	
2	**Kesehatan Untuk Semua**									
1	Indeks Kesehatan	Indeks	0,847	0,849	0,851	0,853	0,855	0,857	0,860	
2	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	75,07	75,19	75,45	75,7	75,96	76,22	76,48	
3	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	53.98	54.39	54.10	53.95	53.91	53.86	53.84	
4	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	Persen	92,04	92,08	92,11	92,17	92,20	92,26	92,28	
5	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	6.90%	6.70%	6.50%	6.30%	6.10%	5.90%	5.70%	
6	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka	1,83	1,82	1,81	1,80	1,79	1,78	1,78	
3	**Pendidikan Berkualitas dan Merata**									
1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,672	0,673	0,674	0,675	0,676	0,677	0,677	
2	Rata-rata lama sekolah penduduk	Tahun	8,48	8,89	9,01	9,14	9,32	9,43	9,5	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	usia di atas 15 tahun (tahun)									
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,03	14,04	14,06	14,13	14,22	14,28	14,32	
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	65.76	65.81	65.86	65.96	66.06	66.16	66.26	
4	**Perlindungan Sosial yang Adaptif**									
1	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	34,03	32,77	34,35	36,94	38,52	41,11	42,96	
2	Cakupan Perlindungan Sosial pada Masyarakat Miskin	Persen	N/a	24,32	24.40	24.48	24.56	24.65	24.73	
5	**Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**									
1	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	89,33	89,50	89,77	90,05	90,27	90,60	90,60	
2	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	56,85	56,93	57,01	57,09	57,17	57,26	57,34	
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	N/A	72.25	72.30	72.35	72.40	72.45	72.50	
4	Nilai Solidaritas	Nilai	90,57	91,02	91,57	92,07	92,47	92,98	92,98	
5	Nilai Toleransi	Nilai	89,93	91,53	92,13	92,83	93,20	94,05	94,05	
6	Nilai Stabilitas	Nilai	88,11	88,87	89,25	89,86	90,34	91,02	91,02	
7	Indeks Pembangunan	Indeks	67,64	68,10	69,10	70,10	71,05	72,15	73,05	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Kebudayaan									
8	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,35	0,39	0,43	0,47	0,51	0,55	0,59	
6	**Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif**									
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,203	0,201	0,198	0,195	0,192	0,190	0,189	
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,15	73,75	74,15	74,35	74,45	74,50	74,53	
3	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	61,33	61,83	62,33	63,33	64,33	65,33	66,33	
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase penyandang disabilitas bekerja	Persen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	**Daya Saing Sumber Daya Manusia**									
1	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi		N/A	5,73	5,74	5,76	5,80	5,82	5,85	
2	**Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi**									

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat Inovasi Daerah	Predikat	Daerah Sangat Inovatif	Daerah Sangat Inovatif	Daerah Sangat Inovatif	Daerah Sangat Inovatif	Daerah Sangat Inovatif	Daerah Ter Inovatif	Daerah Ter Inovatif	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	12,23	12,35	12,65	12,95	13,25	13,55	13,85	
3	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	Persen	7,66	7,71	7,76	7,81	7,86	7,91	7,91	
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	1,98	1,99	2,00	2,01	2,02	2,03	2,04	
5	Rasio PDRB Perdagangan	Persen	19,8	20,25	20,35	20,45	20,55	20,65	20,75	
6	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan	Persen	30,1	30,01	29,66	29,31	28,96	28,61	28,26	
7	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	0.11	0.12	0.13	0.15	0.17	0.19	0.21	
8	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	Persen	5,08	5,18	5,28	5,38	5,48	5,58	5,58	
9	Realisasi Investasi	Triliun Rupiah	2,14	2,17	2,17	2,22	2,23	2,23	2,23	
10	Persentase Peningkatan Pengeluaran Wisatawan	Persen	Persen	2,6	2,79	2,91	3,03	3,15	3,27	
11	Persentase usaha	Persen	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,3	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	mikro yang naik kelas									
12	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,47	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	
13	Persentase Koperasi Aktif	Persen	93,97	73,01	74,02	75,03	76,04	76,98	77,25	
14	ICOR	Angka	N/A	6,36	6,25	6,14	6,02	5,91	5,8	
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	60,78	61,28	61,78	62,28	62,78	63,28	63,78	
3	**Transformasi Digital**									
1	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	N/A	5,00	5,10	5,20	5,30	5,40	5,50	
4	**Integrasi Ekonomi Domistik dan Global**									
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	30,91	28,9	29,92	29,94	29,96	29,98	30,01	
2	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Persen	13,2	17,1	17,5	17,9	18,3	18,7	19,1	
5	**Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**									
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	81.33	81,63	81.83	82.33	82.83	83.33	83.83	
2	Indeks Infrastruktur	Indeks	83,22	83,27	83,30	83,40	83,50	83,60	83,70	
3	Persentase Desa Mandiri	Persen	51,73	54,55	61,04	62,12	63,20	64,29	65,37	
4	Persentase kawasan permukiman kumuh	Persen	70,29	70,79	71,29	71,79	72,29	72,79	73,29	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani									
5	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen	70,83	72,4	73,47	75,11	76,75	78,26	79,91	
6	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks	96,85	96,95	97,05	97,20	97,35	97,50	97,65	
6	**Stabilitas Ekonomi Makro**									
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Persen	0,34	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	
2	Tingkat Inflasi	Persen	1,9	2,70	2,68	2,66	2,64	2,62	2,60	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	**Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,02	88,32	88,61	88,89	89,16	89,42	89,67	
2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.38	4,40	4.42	4.44	4.46	4.48	4.50	
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4,18	4,39	4,42	4,45	4,48	4,51	4,54	
4	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	-	-	1,8	1,9	2,1	2,2	2,4	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	79,28	79,33	79.50	80	80.5	81	81.5	
6	Nilai SAKIP	Nilai	83,18	83,23	83,28	83,33	83,38	83,40	83,50	
7	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	69.33	69,80	70.14	70.48	70.68	70.88	71.08	
8	Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
9	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,77	4,80	4,82	4,84	4,85	4,87	4,88	
10	Indeks Sistem Merit	Nilai	306,5	308,5	310,5	312,5	314,5	316,5	318,5	
2	**Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan**									
1	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,64	3,66	3,67	3,69	3,70	3,72	3,73	
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI PADA SETIAP URUSAN PEMERINTAH DAERAH**									
Urusan Pendidikan										
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	84.93%	84,94%	84,95%	84,96%	84,97%	84,98%	84,99%	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99.98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	99.99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	%	11.56%	11,58%	11,60%	11,62%	11,63%	11,64%	11,65%	
Urusan Kesehatan										
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	6,9%	7.45%	7.35%	7.25%	7.15%	7.05%	6.95%	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan	%	55,71	55.95	56.28	56.61	56.94	57.27	57.6	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota									
2	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	72,42	72.47	72.52	72.57	76.62	72.66	72.71	
3	Persentase kepatuhan PBG dan SLF Kabupaten/Kota	%	76,43	77,73	79,03	80,33	81,63	82,93	84,23	
4	Tingkat Kemantapan JalanKabupaten/Kota	%	55,19	56.38	57.68	58.96	60.2	61.39	62.53	
5	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	95,65	95.7	95,75	95,80	95,85	95,90	95,95	
6	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	84,2	84.25	84,30	84,35	84,40	84,45	84,50	
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
1	Persentase warga negara korban bencana	%	61,29	67,74	74,19	80,65	87,10	93,55	100,00	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni									
2	persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	70,46	73.52	76.58	79.64	82.71	85.77	88.83	
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	70,77	70.78	70.81	70.85	70.88	70.91	70.95	
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	63,96	63.96	64.46	65.02	65.64	66.32	67,90	
Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
1	Persentase penanganan pra bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
1	Persentase Gangguan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Trantibum yang Terselesaikan									
2	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran yang Tertangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Sosial										
1	Tingkat persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Urusan Tenaga Kerja										
1	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu pada	%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Rencana Tenaga Kerja (RTK)									
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	3,17	1.38	3.28	3.35	3.41	3.47	3.53	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Org	406.237.059	412.379.716	418.714.893	426.515.719	435.195.971	443.546.778	452.203.528	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	95.67	75.2	75.25	75.3	75.35	75.4	75.45	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	%	75.15	75.20	75.25	75.30	75.35	75.40	75.45	
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1	Persentase ARG pada	%	31.46%	31.56%	32.46%	33.46%	35.46%	36.46%	36.46%	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Belanja Langsung APBD									
2	Persentase Anak Korban kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	N/A	2.79	2.63	2.79	2.49	2.34	2.19	2.05	
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	nilai	90,11	90,31	90,49	90,64	90,77	90,88	91,38	
5	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	nilai	0,203	0,201	0,198	0,195	0,192	0,190	0,189	
Urusan Pangan										
1	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	1.90	1.69	1.48	1.27	1.05	0.84	0.80	
2	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	96.83	91.66	93.33	95	96.66	98.33	99,00	
Pertanahan										
1	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran									
Lingkungan Hidup										
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Nilai	50	51	52	53	54	55	56	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	Persentase kepemilikan KIA	%	N/A	65.46%	65,48%	65,50%	65,52%	65,54%	65,56%	
2	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	N/A	2,76%	3,68%	4,6%	5,51%	6,42%	7,34%	
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	N/A	98.92%	98,94%	98,95%	98,96%	98,97%	98,98%	
4	pemanfaatan data berdasar PKS	%	N/A	39.06%	39,08%	39,09%	39,10%	39,11%	39,12%	
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
2	Persentase Peningkatan Status Desa Maju menuju Mandiri	%	30,7%	5,38%	5,71%	6,67%	6,86%	7,06%	7,27%	
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluraga Berencana										
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	-	1.87	1.87	1.87	1.87	1.86	1.86	1.85	
2	Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)	%	76.22	76.22	76.23	76.24	76.25	76.26	76.27	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	%	4.48	4.48	4.46	4.45	4.44	4.43	4.42	
Urusan Perhubungan										
1	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	77,47	79,89	81,83	83,28	84,25	85,22	86,19	
Urusan Komunikasi dan Informatika										
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	2.70%	2.70%	2.70%	2.70%	2.70%	2.70%	4.05%	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah										
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	70.5	71	71,5	72	72,5	73	73,5	
2	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	52	52,5	53	53,5	54	54,5	55	
Urusan Penanaman Modal										
1	Persentase peningkatan investasi PMDN dan PMA di kabupaten/kota	%	8.02	3	1	1,20	1,40	1,60	1,80	
Kepemudaan dan Olahraga										
1	Peningkatan prestasi olahraga	%	39 %	42%	43.50%	45.00%	46.50%	48.00%	49.50%	
Urusan Statistik										
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	1.99	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	
Urusan Persandian										
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	36.50%	38.12%	40.84%	43.57%	46.84%	51.74%	54.46%	
Urusan Kebudayaan										
1	Persentase Warisan Budaya yang	%	74,51	75,01	75,56	76,01	76,53	77,02	77,52	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dilestarikan									
Urusan Perpustakaan										
2	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	70.40	70.50	70.60	70.70	70.80	70.90	71.00	
Urusan Arsip										
1	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja Alat Bukti yang Sah dan Pertanggung Jawaban Nasional	%	76.85	76.90	77.00	77.20	77.30	77.40	77.50	
2	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara pemerintah, layanan publik, dan kesejahteraan rakyat	%	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	
Urusan Kelautan dan Perikanan										
1	Produksi Perikanan Tangkap	%	101.81%	101.82%	101.83%	101.84%	101.85%	101.86%	101.87%	
2	Produksi Perikanan Budi Daya	%	72.30%	82.60%	85.20%	88.30%	91.40%	94.50%	97.60%	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	%	N/A	10.00%	15.00%	30.00%	45.00%	60.00%	75.00%	
Urusan Pariwisata										
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	1,98	2,00	2,05	2,10	2,15	2,20	2,20	
2	Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang	4.379.637	4.400.000	4.422.000	4.445.000	4.469.000	4.494.000	4.519.000	
3	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	480	490	500	515	530	550	560	
Urusan Pertanian										
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	3.01%	3.04%	3.07%	3.10%	3.13%	3.16%	3,19%	
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	1.03%	1.04%	1.05%	1.06%	1.07%	1.08%	1,09.%	
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%								
	1. Persentase Peningkatan Produksi Daging	%	-7.85%	2,00%	2,05%	2,10%	2,15%	2,20%	2,25%	
	2. Persentase Peningkatan Produksi Telur	%	-14.23%	1,00%	1,05%	1,10%	1,15%	1,20%	1,25%	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Urusan Perdagangan										
1	Nilai Ekspor Barang	Rp	Rp.20.781.794.661.355	21,820,884,000,000	22,911,929,000,000	24,057,525,000,000	25,260,401,000,000	26,523,421,000,000	27,849,592,000,000	
2	Persentase peningkatan jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	64,24% (4.303)	65.52%	66.83%	68.16%	69.52%	70.91%	72.32%	
3	Persentase peningkatan omset produk lokal	%	7.00%	7.25%	7.50%	7.75%	8.00%	8.25%	8.50%	
Urusan Perindustrian										
3	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan	Orang	n/a	71,793	75,393	79,093	82,893	86,793	90,793	
Urusan Sekretariat Daerah										
1	Pemanfaatan sistem pengadaan	%	23.87	-	24.37	24.87	25.37	25.87	26.37	
2	Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	%	9.09	-	11.09	13.09	15.09	17.09	19.09	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Tingkat kematangan UKPBJ	%	31.11	-	31.81	32.51	33.21	33.91	34.61	
4	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	N/A	97,2	97,3	97,5	97,7	97,9	98,2	
5	Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD)	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
6	Indeks Berakhlak	Indeks	N/A	72,08	72,19	72,30	72,41	72,47	72,51	
7	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	N/A	68,71	68,73	68,75	68,77	68,79	68,81	
Sekretariat DPRD										
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	80.75	81,18	81,23	81,28	81,33	81,38	81,43	
Urusan Keuangan										
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	17.09%	17.02	17.03	17.04	17,05	17.06	17.07	
2	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	91.07%	91.25%	91.50%	92.00%	92.50%	93.00%	93.50%	
3	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	2.41%	2.10%	2.20%	2.30%	2.40%	2.50%	2.60%	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	34.31%	31.80%	38.00%	40.00%	40.20%	40.40%	40.50%	
5	Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Indeks	91.9 %	92.2%	92.7 %	93.2 %	93.7 %	94.2 %	94.7 %	
Kepegawaian										
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	73.14%	74.14%	75.14%	76.14%	77.14%	78.14%	79.14%	
2	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	32.54%	33.29%	34.04%	34.79%	35.54%	36.29%	37.04%	
3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	19.26%	19.76%	20.26%	20.76%	21.26%	21.76%	22.26%	
Unsur Pengawasan										
1	Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
2	Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
Urusan Ketentraman, Ketertiban (Kesbangpol)										

1.

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Prosentase Konflik Ipoleksosbud, Hukum dan HAM yang ditangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Berdasarkan indikator kinerja daerah di atas, dapat difahami bahwa di dalam RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 telah memuat indikator makro dalam rangka menjamin keselarasan dengan tujuan pembangunan nasional dan juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan Pemerintah Daerah. Adapun target indikator makro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4-4 Indikator Makro Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,88	4,95	5,01	5,15	5,26	5,50
2	Gini Rasio	Indeks	0,279	0,277	0,272	0,268	0,264	0,260
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,50	77,10	77,80	78,40	79,10	79,80
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,95	11,87	11,43	11,02	10,80	10,35
5	Tingkat Pengangguran Tebuka	Persen	4,30	4,25	4,12	4,07	4,01	3,97

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen pedoman pembangunan Kabupaten Lamongan lima tahun ke depan yang menterjemahkan cita-cita Bupati yang dielaborasi dalam Visi dan Misi. Selain itu dokumen RPJMD memuat isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program Pemerintah Daerah.

RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tahap pertama dari RPJPD tahun 2025-2045 sebagai Langkah strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan demi terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan. Dalam pelaksanaan dokumen RPJMD, terdapat kaidah-kaidah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati;
b. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan/Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Prioritas, dan unggulan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029;
c. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
d. Berkaitan dengan program prioritas Pemerintah Daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas nasional dimana dimungkinkan Pemerintah Daerah tidak mampu membiayai, dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (*Public Private Partnership*), melalui pinjaman daerah dan/atau pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari pelaku usaha di Kabupaten Lamongan maupun yang tersebar diberbagai daerah. Penerbitan Obligasi Daerah serta kerja sama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah lainnya baik Lembaga

dalam Negeri maupun Lembaga Internasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan

e. Terhadap adanya perubahan pada SOTKD pengampu program yang dibentuk setelah RPJMD ditetapkan, maka dapat dilakukan penyesuaian terhadap dokumen RPJMD dan memberitahukan kepada DPRD Kabupaten Lamongan.
f. Dalam rangka mengawal pelaksanaan target kinerja Visi-Misi Bupati dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka indikator kinerja yang ada dalam RPJMD ini perlu untuk diterbitkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Daerah yang dilengkapi dengan definisi operasional, rumus, penanggungjawab dan metode pengukuran;
g. Dalam hal terdapat perubahan atau penyesuaian secara redaksional, akibat perubahan standar penulisan nomenklatur, standar perhitungan indikator kinerja, dan redaksional teknis lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, maka dilakukan penyesuaian pada perda RPJMD ini dan memberitahukan kepada DPRD Kabupaten Lamongan.
h. Berkaitan dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, setiap Perangkat Daerah perlu melakukan sosialisasi dan memperkuat peran sinergitas stakeholder;
i. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Daerah yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD ini, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah implementasikan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Lamongan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD bertanggung jawab dan menjaga konsistensi antara RPJMD dengan dokumen perencanaan tahunan demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai sehingga dapat mencapat target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BUPATI LAMONGAN,

YUHRONUR EFENDI